



RANCANGAN

RPJMD 2025-2029

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

+62 87848785496

Bappeda.kuningankab.go

bappedakuningan



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh camat.
7. Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.
15. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan

misi.

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan Strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
26. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah:
 - a. untuk menjabarkan Visi, Misi Bupati ke dalam perencanaan 5 (lima) tahunan; dan
 - b. untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh Pemangku Kepentingan.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. menetapkan Visi, Misi pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; dan
 - c. memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
memuat gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi, BUMD yang mendukung pelayanan pemda. Selain itu, juga memuat gambaran keuangan daerah penjelasan tentang realisasi APBD Tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 dan permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
memuat penjelasan Visi Daerah Tahun 2025 2029 yaitu kondisi daerah sebagai

hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2029. Selain itu, juga memuat Misi Daerah Tahun 2025-2029 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029;

- d. BAB IV : Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
memuat program PD tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program PD tahun 2025-2029 serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memuat program PD dan kinerja penyelenggaraan PD yaitu target tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD); dan
- e. BAB V : Penutup
memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB V ISI RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. capaian target indikator kinerja daerah;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - d. efektivitas program PD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
- a. pemantauan; dan
 - b. supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
- a. RKPD dengan RPJMD; dan
 - b. Renja PD dengan Renstra PD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik

sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.

- (2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan Perubahan Renstra PD.
- (5) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja PD; dan
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penyesuaian muatan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra PD per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi;
 - b. kondisi strategis daerah; atau

c. fiskal daerah.

- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja PD dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra PD dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada RPJMD Teknokratik yang disiapkan oleh Badan dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

BENI PRIHAYATNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA
BARAT: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk setiap satu tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan ini pemerintah daerah perlu menyusun RPJMD, Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dalam rangka meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (Lima) tahun ke depan melalui visi: Kuningan “Melesat” (Maju, Berdaya, Lestari, Agamis, Tangguh).

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD 2025-2029 adalah untuk menyediakan acuan dalam penyusunan rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang yang mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan

kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, sistematika, pengendalian dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.3.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN 2025 - 2045.....	I-10
1.3.2	Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.....	I-11
1.3.3	Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RTRW Kabupaten Kuningan.....	I-12
1.3.4	Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	I-12
1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
1.5	Sistematika Penulisan	I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-61
2.1.1	Aspek Daya Saing Daerah	II-79
2.1.2	Aspek Pelayanan Umum.....	II-89
2.1.3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-197
2.1.4	Inovasi Daerah	II-203
2.2	Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II-212
2.3	Gambaran Keuangan Daerah	II-217
2.4	Permasalahan dan Isu Strategis	II-226
2.4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-226
2.4.2	Isu Strategis.....	II-250

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1	Visi dan Misi	III-1

3.1.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029	III-3
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-10
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029	III-10
3.2.2	Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	III-20

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1	Program perangkat daerah.....	IV-1

BAB V PENUTUP

5.1	Kaidah.....	V-1
5.2	Pedoman Transisi	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Selain pendekatan diatas, dalam proses Penyusunan RPJMD dilakukan dengan strategi pendekatan *pentahelix* atau *dynamic governance*. Pendekatan Pentahelix merupakan strategi kolaboratif yang menempatkan pembangunan daerah sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas/LSM, dan media. Prinsip utamanya adalah sinergi lintas sektor untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersifat inklusif, berbasis bukti, inovatif, serta berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 menjadi dokumen yang sangat strategis, antara lain:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045 tahap kesatu;
3. Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan;
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki; dan
7. Pedoman penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 bagi perangkat daerah serta pedoman RPJMDes bagi seluruh desa di Kabupaten Kuningan.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategi di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kuningan.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah proses penyusunan RPJMD dimulai sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kuningan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik hingga 20 Februari 2030 (periode RPJMD 2025-2029).

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029 :

“Kuningan Melesat”

Maju, Ekonomi Berakselerasi

Empowering, Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Lestari, Pembangunan Berkelanjutan

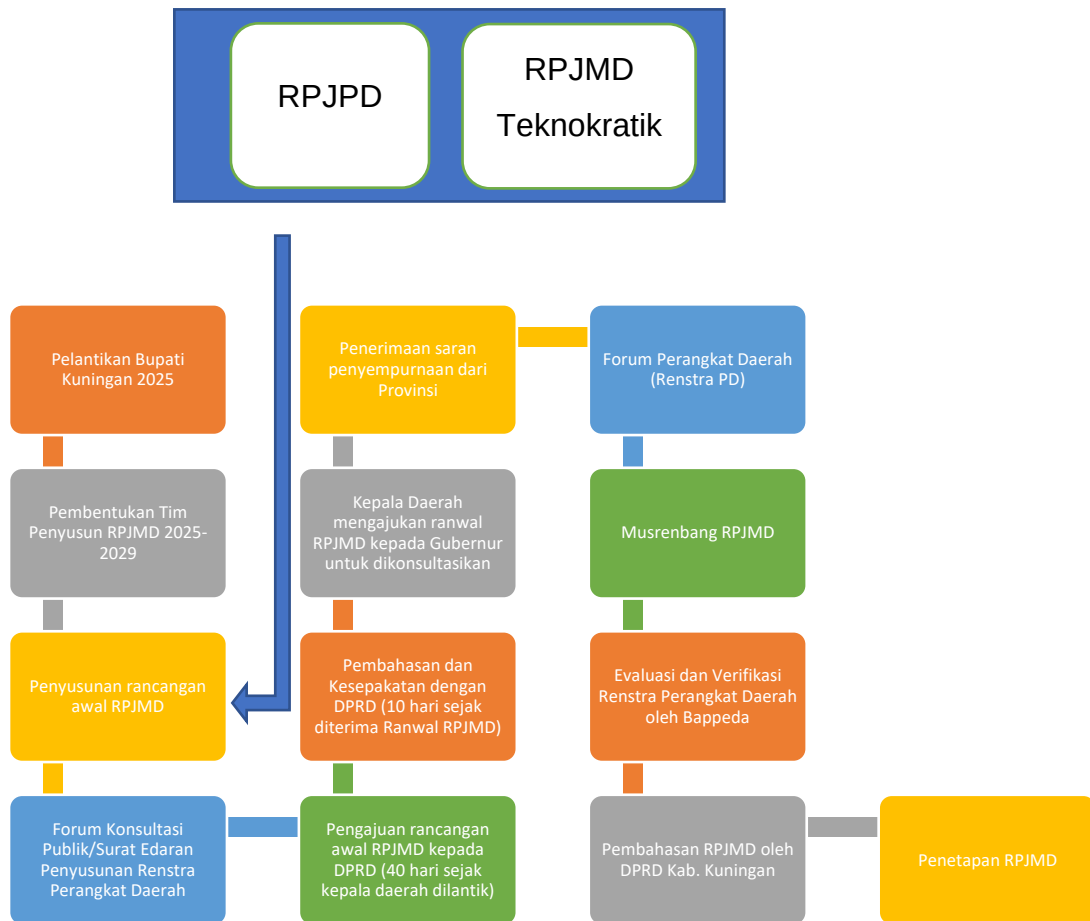
Agamis, Nilai Budaya dan Kehidupan

Tangguh, Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial

M i s i :

1. **Percepatan reformasi birokrasi** yang berintegritas, dan profesional melalui pemerintahan modern dan melayani;
2. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** daerah berbasis pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa yang maju dengan pemanfaatan sumber daya lokal;
3. **Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas** masyarakat berbasis pemberdayaan (Berdaya);
4. **Menjaga komitmen kelestarian sumber daya alam**, daerah tangkapan air dan mengurangi emisi lingkungan;
5. **Penerapan nilai-nilai agamis** dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat;
6. **Pembangunan yang tangguh** dengan orientasi pada layanan Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur untuk penguatan ketahanan dan modal sosial.

Dalam rangka menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan di daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang RPJMD Teknokratik, untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pada masa transisi. Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1. 1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);

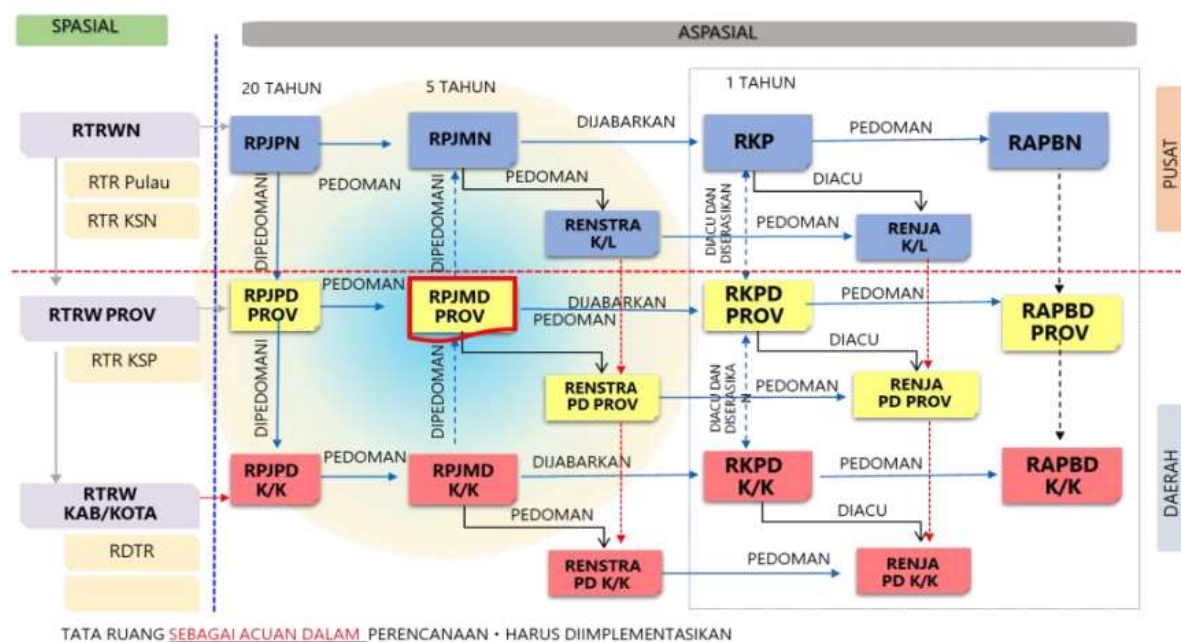
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); dan
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.

1.3 Hubungan Antar Dokumen



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

Tabel 1. 1 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Nasional	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”	“Jawa Barat Istimewa, Lembur diurus, Kota Ditata”	“Kuningan Melesat”
Bersama putra-putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa dengan fondasi kuat dengan tujuan yang jelas untuk setara dengan negara maju pada tahun 2045 atau lebih cepat.	Berpijak pada Latar Belakang Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat, Permasalahan-Permasalahan dan Isu strategis Provinsi Jawa Barat.	Mewujudkan kemajuan ekonomi yang berakselerasi untuk Masyarakat berdaya (<i>empowering</i>) dengan lingkungan dan alam Lestari kehidupan agama dan budaya yang harmonis serta membangun ketangguhan ideologi, pangan, birokrasi dan modal sosial

1.1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN 2025 - 2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN dilihat dari aspek sebagai berikut:

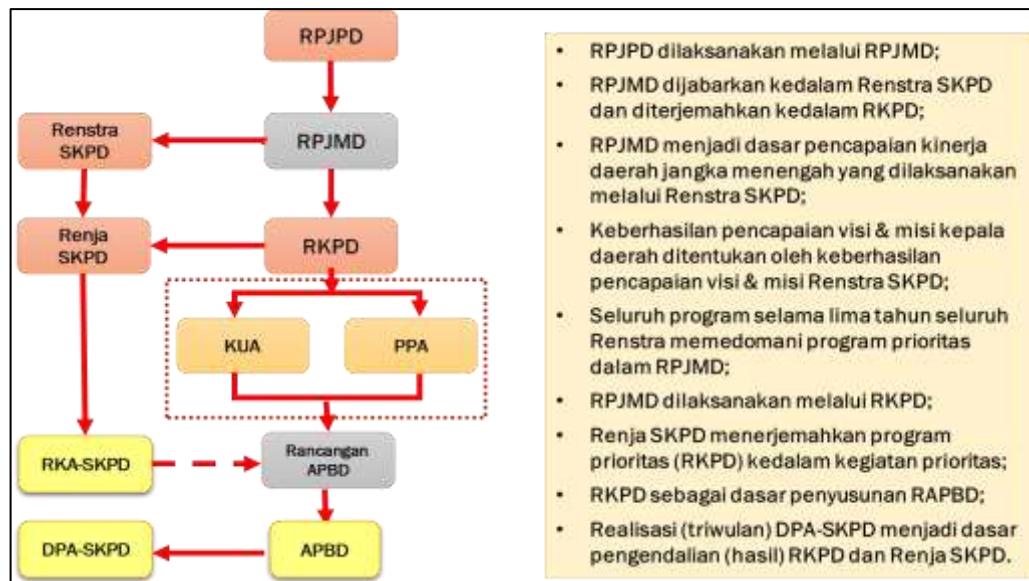
1. Keselarasan antar dokumen perencanaan, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
2. Kondisi dan karakteristik daerah bahwa dalam pencapaian target pembangunan disesuaikan dengan kewenangan, karakteristik dan kemampuan daerah.

1.1.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.

RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045 memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan, RPJMD disusun berdasarkan arahan yang terdapat dalam RPJPD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD menjadi tahapan pelaksanaan dari RPJPD untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045.

RPJMD Teknokratik adalah rancangan awal RPJMD yang disusun dengan pendekatan teknokratik merupakan dasar dalam penyusunan RPJMD definitif yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan fondasi awal dan masukan penting dalam proses penyusunan RPJMD.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan pemerintah daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.



Gambar 1. 3 RPJMD dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

1.1.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RTRW Kabupaten Kuningan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kuningan dengan rencana struktur dan pola ruang RTRW.

RPJMD juga diselaraskan dengan revisi RTRW Kabupaten Kuningan yang sedang disusun. Penyelarasan ini mencakup kesesuaian dengan tujuan penataan ruang yang baru, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian dan pariwisata berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, penyelarasan ini merujuk pada kebijakan pengembangan yang meliputi sistem pusat permukiman, peningkatan keterpaduan infrastruktur, pelestarian kawasan lindung, serta pengelolaan kegiatan budidaya yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pengendalian dampaknya; juga pada rencana struktur ruang yang mencakup sistem pusat permukiman (PKL, PPK, PPL, dan jaringan prasarana) serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman).

1.1.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi. Berdasarkan kajian KLHS, rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

1.1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Dokumen Perencanaan Sektor Strategis.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana sektoral strategis, seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), RPID, Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) dan RAD SDGs. Melalui RPJMD, setiap perangkat daerah memperoleh arah kebijakan, sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan prioritas program yang harus dicapai selama periode perencanaan.

Peran RPJMD sebagai pedoman penyusunan rencana sektoral strategis diwujudkan melalui:

- a. Penyelarasan arah kebijakan sehingga seluruh sektor pembangunan daerah bergerak pada tujuan yang sama.
- b. Integrasi program dan kegiatan agar rencana sektoral tidak berjalan terpisah, tetapi saling mendukung pencapaian sasaran daerah.
- c. Pengendalian dan evaluasi dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai tolok ukur keberhasilan.
- d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 - 2029 adalah:

- a. Untuk menjabarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam perencanaan lima tahunan; dan
- b. Untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 - 2029, adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah;
- b. Strategi pembangunan daerah;
- c. Kebijakan umum daerah; dan
- d. Program PD dan lintas PD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan disajikan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Maksud dan Tujuan;
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Aspek Geografi dan Demograf, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Standar Pelayanan Minimal, Kerja sama Daerah, Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda;
- 2.2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD dan Proyeksi Keuangan Daerah;

- 2.3. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis yang memuat Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah.

BAB III – VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Subbab Visi, Misi, Tujuan, Sasaran memuat:
- 3.1.1. Visi dan Misi; dan
 - 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
- 3.2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat:
- 3.2.1. Strategi dan Arah dan Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - 3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB.IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Subbab Program perangkat daerah memuat;
- 4.1.1. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - 4.1.2. Indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 4.2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan perangkat daerah memuat;
- 4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - 4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V – PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

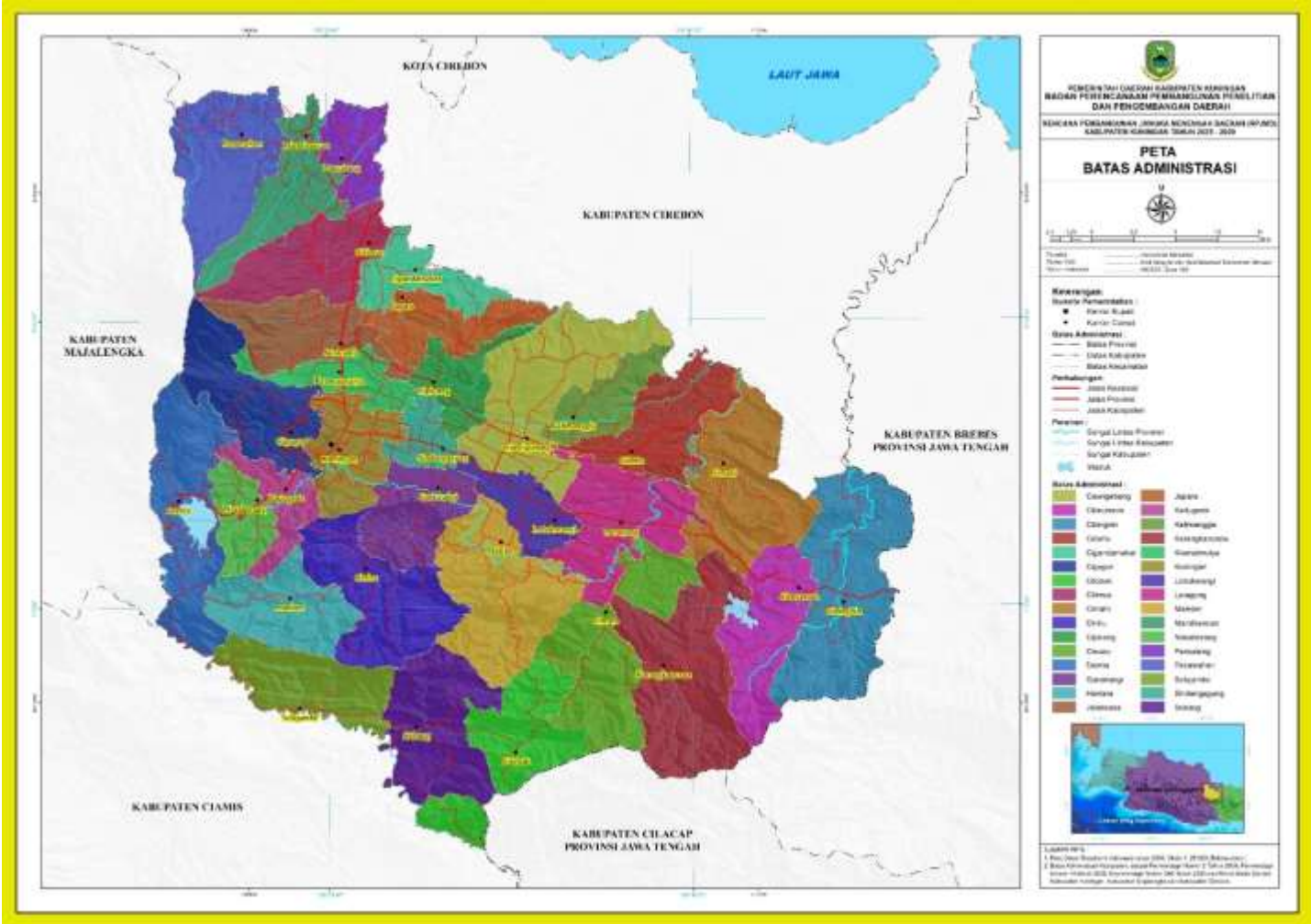
Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, dengan luas total wilayah mencapai sekitar 119.344 Ha. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Cibingbin, yang mencakup sekitar 6.972,51 Ha, sedangkan Kecamatan Sindangagung memiliki luas terkecil, yakni sekitar 1.300,91 Ha.

Secara astronomis, wilayah ini berada pada koordinat 6°46'51,92" hingga 7°11'44,02" Lintang Selatan serta 108°23'2,07" hingga 108°47'40,12" Bujur Timur. Dari aspek geografis, memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalur regional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pangandaran. Selain itu, menjadi jalur alternatif penghubung antara Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah dan berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati. Kabupaten Kuningan termasuk dalam Kawasan Rebana, bersama dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, serta Kota Cirebon, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Secara administratif, Kabupaten Kuningan terbagi menjadi 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 dusun, 1.745 rukun warga, dan 5.675 rukun tetangga, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Tengah); dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah).

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Luas wilayah setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.040,81	5,06%
2	Cibeureum	3.919,78	3,28%
3	Cibingbin	6.972,51	5,84%
4	Cidahu	3.704,72	3,10%
5	Cigandamekar	2.242,54	1,88%
6	Cigugur	3.529,15	2,96%
7	Cilebak	4.268,78	3,57%
8	Cilimus	3.529,69	2,96%
9	Cimahi	5.838,75	4,89%
10	Ciniru	4.976,49	4,17%
11	Cipicung	1.902,09	1,59%
12	Ciwaru	5.197,64	4,35%
13	Darma	5.449,36	4,56%
14	Garawangi	2.984,57	2,50%
15	Hantara	3.537,40	2,96%
16	Jalaksana	3.920,57	3,28%
17	Japara	2.707,49	2,27%
18	Kadugede	1.810,55	1,52%
19	Kalimanggis	2.017,75	1,69%
20	Karangkencana	6.529,53	5,47%
21	Kramatmulya	1.687,29	1,41%
22	Kuningan	2.994,24	2,51%
23	Lebakwangi	1.969,69	1,65%
24	Luragung	4.073,77	3,41%
25	Maleber	5.736,20	4,80%
26	Mandirancan	3.500,00	2,93%
27	Nusaherang	1.809,45	1,52%
28	Pancalang	1.919,88	1,61%
29	Pasawahan	4.927,49	4,13%
30	Selajambe	3.661,44	3,07%
31	Sindangagung	1.300,91	1,09%
32	Subang	4.748,84	3,98%
Jumlah		119.344,83	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Topografi dan Morfologi, merupakan ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta objek lainnya, termasuk planet, satelit alami (seperti bulan), dan asteroid. Salah satu aspek utama dalam kajian topografi adalah elevasi atau ketinggian suatu daerah. Ketinggian wilayah dapat dikategorikan ke dalam beberapa rentang, yaitu 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl, 2.000 – 3.000 mdpl, dan lebih dari 3.000 mdpl. Luas wilayah berdasarkan tingkat ketinggian disajikan dalam Tabel 2.2, sedangkan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

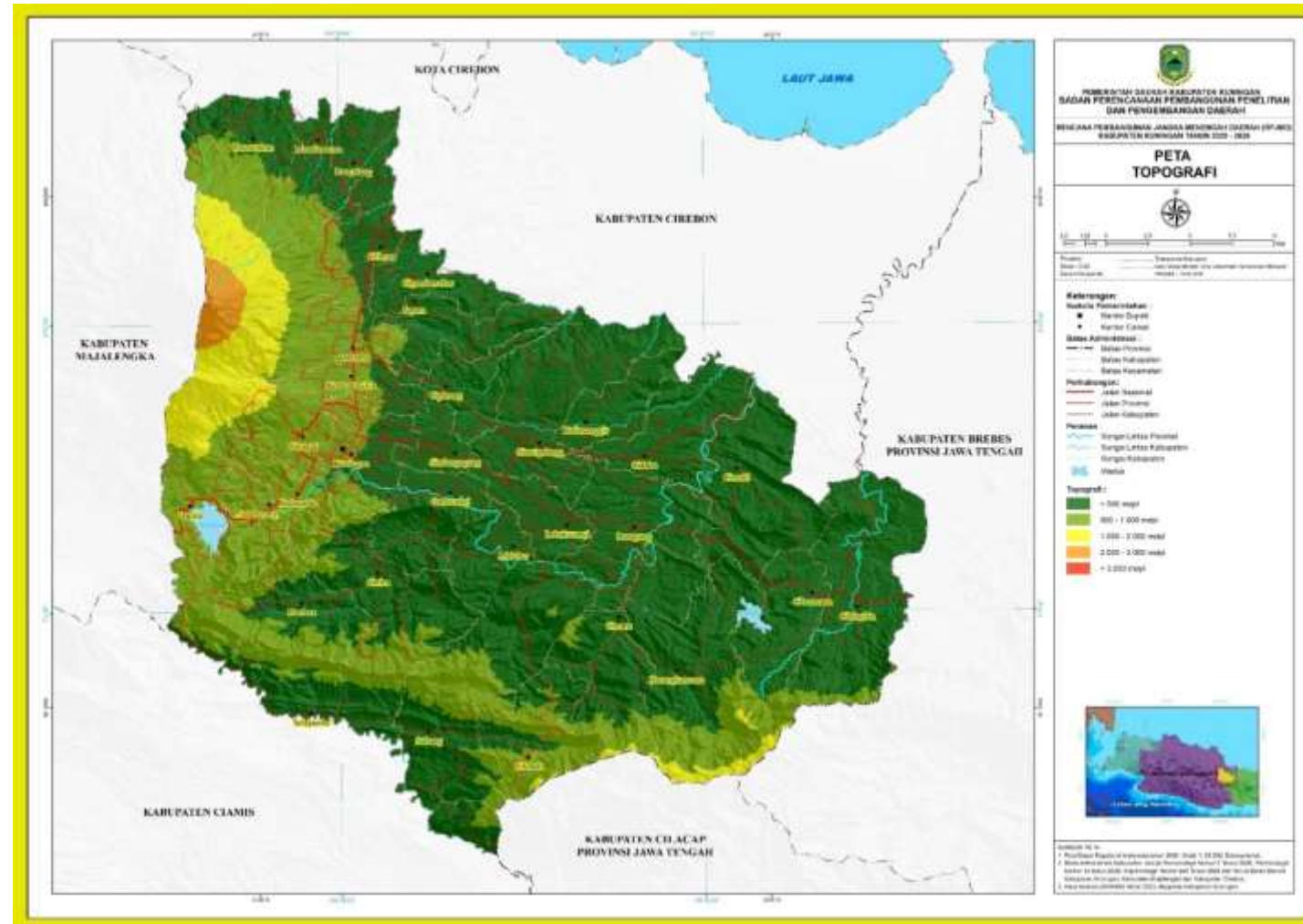
Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	0 - 500 mdpl	80.054,41	67,08
2	500 – 1.000 mdpl	32.011.42	26,82
3	1.000 – 2.000 mdpl	6.192,74	5,19
4	2.000 – 3.000 mdpl	1.078,13	0,90
5	> 3000 mdpl	8,12	0,01
Jumlah		119.344,83	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada ketinggian 0 – 500 mdpl, mencakup 67,01 persen dari total area, yang tersebar di bagian tengah, timur, dan utara. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian lebih dari 3.000 mdpl memiliki luas terkecil, yaitu sekitar 8,14 Ha, yang merupakan bagian dari puncak Gunung Ciremai.

Gambar 2.2 Peta Topografi



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Kabupaten Kuningan memiliki beragam karakteristik morfologi, di bagian barat, terdapat Gunung Ciremai dengan ketinggian mencapai 3.078 meter di atas permukaan laut sebagai ciri khasnya. Wilayah selatan didominasi oleh perbukitan, sedangkan wilayah timur memiliki kontur yang bervariasi dari bergelombang hingga berbukit. Bagian utara cenderung datar hingga bergelombang, sementara wilayah tengah memiliki morfologi yang relatif datar hingga landai. Luas wilayah berdasarkan karakteristik morfologi disajikan dalam Tabel 2.3, sedangkan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

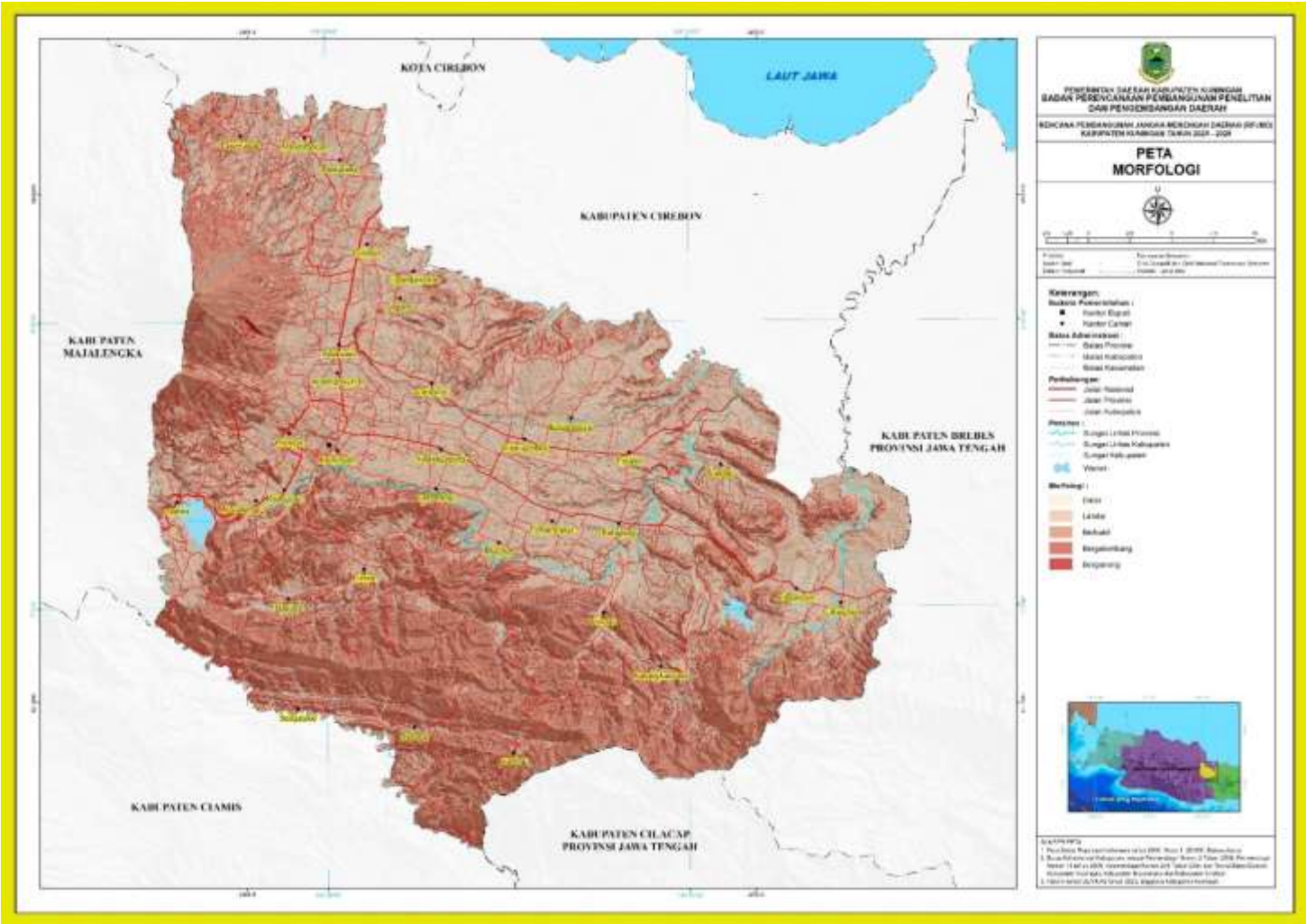
Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1.	Datar	3.925,48	3,29
2.	Landai	23.737,45	19,89
3.	Bergelombang	27.163,62	22,76
4.	Berbukit	46.004,62	38,55
5.	Bergunung	18.513,66	15,51
Jumlah		119.344,83	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.3, wilayah Kabupaten Kuningan didominasi oleh morfologi landai dengan luas mencapai 56.938,71 Ha atau sekitar 47,82 persen dari total area. Sementara itu, wilayah dengan morfologi bergunung memiliki luas terkecil, yaitu hanya 152,42 Ha atau sekitar 0,13 persen.

Gambar 2.3 Peta Morfologi



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Peran Strategis Daerah, berdasarkan amanat regulasi dan Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045, daerah memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa Barat bagian timur. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya letak geografis yang strategis di antara wilayah Cirebon, Majalengka, dan Ciamis serta memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata dan memiliki potensi industri yang cukup besar, terutama industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

1. Kawasan Rebana

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan Rebana merupakan Kawasan pengembangan baru yang meliputi 7 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Konsep Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menggunakan konsep integrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing dan berkelanjutan, kemudian di kembangkan ke dalam konsep struktur ruang kawasan pengembangan *polysentric smart region* merupakan struktur ruang yang di dalamnya terdapat kawasan perkotaan inti (*Growth Pole*) dan kawasan perkotaan sekitarnya (*Growth Foundation*). *Growth Pole* di Kawasan Rebana adalah Kertajati Aero City, Kota Baru Patimban, dan Kota Cirebon yang saling meningkatkan kualitas dan daya saing dari masing-masing wilayah. Untuk *Growth Foundation* di Kawasan Rebana terdiri dari pengembangan 13 kawasan peruntukan industri (KPI) dan 20 sentra industri Kecil Menengah (SIKM) yang ada di Kawasan Rebana.

Kawasan Metropolitan Rebana memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi manfaat yang dapat diperoleh dari Kawasan Metropolitan Rebana:

- a. **Peningkatan perekonomian**, Kawasan Metropolitan Rebana diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Hal ini akan membuka peluang untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian daerah.
Daerah memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi-potensi tersebut dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan.
- b. **Peningkatan infrastruktur**, Pembangunan infrastruktur di Kawasan Metropolitan Rebana, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, akan memberikan manfaat bagi daerah. Infrastruktur tersebut akan memudahkan akses daerah ke pusat-pusat ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat dan sekitarnya.

- c. **Peningkatan kualitas hidup**, Pembangunan di Kawasan Metropolitan Rebana akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.

Potensi pengembangan di daerah yang dapat memanfaatkan Kawasan Metropolitan Rebana:

- a. **Pengembangan pariwisata**, Daerah memiliki potensi pariwisata yang besar, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi pariwisata daerah dapat lebih dikembangkan dan dipromosikan ke wisatawan domestik dan mancanegara.
- b. **Pengembangan industri**, Daerah memiliki potensi industri yang besar, seperti industri pertanian, industri pengolahan, dan industri kreatif. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi industri daerah dapat lebih dikembangkan dan menarik investor.
- c. **Pengembangan pertanian**, Daerah memiliki potensi pertanian yang besar, seperti pertanian padi, pertanian hortikultura, dan pertanian perkebunan. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi pertanian daerah dapat lebih dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Berikut ini rencana pengembangan kawasan rebana di daerah:

1. Pembangunan jalan alternatif Cirebon-Ciamis (segmen Cipasung-Cikijing-Panawangan) untuk mendukung aksesibilitas BIJB Kertajati dan jalur logistik Cisumdawu-Ciamis
2. Pengembangan jalan Lingkar Timur-Selatan untuk mendukung konektivitas jalan poros Tengah pada jalur Nasional Pantura, Pansela dan Tol Cipali
3. Peningkatan ruas jalan Cipasung-Subang-Cilebak-Cilacap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Selatan yang terisolir, untuk membuka peluang jalur alternatif ekonomi baru dari Cilacap menuju Ciayumajakuning dan BIJB Kertajati.
4. Pembangunan SPAM Skala Kota Daerah Pelayanan Kuningan-Cirebon-Brebes, daerah merupakan kabupaten pendukung pemasok air minum di Kawasan Rebana.
5. Kabupaten Kuningan sendiri mempunyai keunggulan dan potensi pada sektor pariwisata melaksanakan pembangunan jalan lingkar Cigugur-Cisantana untuk meningkatkan akses menuju obyek wisata Palutungan dan sekitarnya

Pemerintah Daerah harus melakukan persiapan yang matang agar dapat memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini meliputi perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta dukungan dari

masyarakat. Dengan persiapan yang matang, dapat menjadi salah satu wilayah yang paling diuntungkan dari Kawasan Rebana.

2. Wilayah Pengembangan Kawasan Ciayumajakuning

Ciayumajakuning adalah salah satu Wilayah Pengembangan (WP) kawasan yang ditargetkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Pembangunan Ciayumajakuning memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi manfaat yang dapat diperoleh:

- a. **Peningkatan Perekonomian**, Ciayumajakuning diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kuningan. Hal ini akan membuka peluang untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten Kuningan memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi-potensi tersebut dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan.
- b. **Peningkatan Infrastruktur**, Pembangunan infrastruktur di Ciayumajakuning, seperti jalan tol, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, akan memberikan manfaat bagi daerah. Infrastruktur tersebut akan memudahkan akses daerah ke pusat-pusat ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat dan sekitarnya.
- c. **Peningkatan Kualitas Hidup**, Pembangunan di Ciayumajakuning akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.

Potensi pengembangan daerah yang dapat memanfaatkan Ciayumajakuning:

- a. **Pengembangan pariwisata**, Daerah memiliki potensi pariwisata yang besar, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi pariwisata daerah dapat lebih dikembangkan dan dipromosikan ke wisatawan domestik dan mancanegara.
- b. **Pengembangan industri**, Daerah memiliki potensi industri yang besar, seperti industri pertanian, industri pengolahan, dan industri kreatif. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi industri daerah dapat lebih dikembangkan dan menarik investor.
- c. **Pengembangan pertanian**, Daerah memiliki potensi pertanian yang besar, seperti pertanian padi, pertanian hortikultura, dan pertanian perkebunan. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi pertanian daerah dapat lebih dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 terdapat beberapa proyek diidentifikasi bernilai strategis yaitu yang ada di daerah adalah jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya. Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya diperkirakan akan mulai direncanakan pada periode tahap 1 (2025-2029). Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi daerah. beberapa potensi manfaat yang dapat diperoleh daerah dari jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya:

- a. **Peningkatan aksesibilitas**, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan meningkatkan aksesibilitas daerah ke wilayah lain di Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan perjalanan dan berbisnis.
- b. **Peningkatan konektivitas**, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan meningkatkan konektivitas daerah dengan wilayah lain di Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- c. **Peningkatan pariwisata**, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan meningkatkan pariwisata daerah. Hal ini akan menarik wisatawan domestik dan mancanegara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. **Peningkatan kesejahteraan masyarakat**, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Fungsi atau kontribusi Daerah terhadap wilayah sekitar, secara umum peran dan kontribusi Kabupaten Kuningan terhadap daerah sekitarnya diuraikan sebagai berikut:

1) *Ekonomi: hinterland agraris–pariwisata yang menyuplai hilir pesisir/industri*

Kabupaten Kuningan berkarakter pegunungan–agraris dengan basis hortikultura (sayuran, buah semusim) dan destinasi alam/budaya. Produksi hortikultura Kuningan menjadi pemasok segar bagi pasar wilayah pesisir/industri (Cirebon–Indramayu) dan koridor BIJB Kertajati, memperkuat rantai pasok pangan regional. Di sisi hilir, Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu lebih bertumpu pada kegiatan perdagangan–jasa, pelabuhan, dan industri pesisir; sedangkan Majalengka tumbuh sebagai hub bandara (BIJB Kertajati). Kombinasi ini membuat Kuningan berperan sebagai “lumbung dataran tinggi + destinasi wisata alam” yang menyuplai konsumsi kota dan tenaga kerja/kunjungan wisata lintas-kabupaten.

2) *Infrastruktur dan konektivitas: sebagai pengikat pegunungan–pesisir*

Posisi Kabupaten Kuningan di kaki Gunung Ciremai menghubungkan koridor pegunungan (selatan–barat) dengan pintu logistik/penumpang di utara–timur:

- Bandara Kertajati (Majalengka) melayani kawasan Cirebon–Indramayu–Majalengka–Kuningan (Ciayumajakuning); arus orang dan barang dari/ke Kuningan terdorong oleh akses tol/jalan arteri menuju bandara.
- Pelabuhan Cirebon menjadi outlet komoditas kawasan timur Provinsi Jawa Barat, Kuningan termasuk hinterland yang memasok kebutuhan dan pergerakan barang/penumpang ke Pelabuhan, perencanaan Rebana Metropolitan semakin menempatkan Kabupaten Kuningan sebagai simpul pemasok bahan pangan/rekreasi alam untuk kawasan industri–logistik di utara.

3) *Lingkungan hidup: Kabupaten Kuningan “menara air” Ciayumajakuning*

Kekuatan utama Kabupaten Kuningan adalah jasa lingkungan dari Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang secara administratif berada di Kabupaten Kuningan–Majalengka. TNGC berperan sebagai hulu/daerah tangkapan air besar (DAS Cimanuk dan Cisanggarung), sehingga menyuplai air baku dan irigasi ke Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, selain Kabupaten Kuningan sendiri. Inilah kontribusi ekologis paling strategis Kuningan terhadap dataran rendah pesisir. Skala kawasan konservasi ini substansial ($\pm 14,8$ – $15,5$ ribu ha berdasarkan SK penunjukan/penetapan), menegaskan peran Kabupaten Kuningan sebagai penyangga tata air yang menjaga produktivitas pertanian dan ketersediaan air perkotaan di wilayah hilir (termasuk Indramayu yang bermuara di DAS Cimanuk).

B. Potensi Sumber daya Alam

Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki komitmen untuk mempertahankan kelestarian alam, sehingga pengembangan sektor industri memiliki keterbatasan dalam mendorong perekonomian daerah. Walaupun demikian, Kabupaten Kuningan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber perekonomian. Potensi tersebut diantaranya :

Hidrologi, Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam pengelolaan tata air bagi wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon di Jawa Barat, serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh posisi sebagai hulu bagi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Citanduy. Selain itu, juga memiliki dua waduk, yaitu Waduk Darma dan Waduk Kuningan, yang berkapasitas cukup besar untuk memasok air hingga ke Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap.

a. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan air tanah (CAT) adalah area yang memiliki sistem akuifer yang luas, memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan tersimpan dalam lapisan batuan di bawah permukaan. Keberadaan cadangan air tanah yang memadai memungkinkan masyarakat di wilayah ini untuk memperoleh air bersih dengan lebih mudah untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lainnya, tanpa sepenuhnya bergantung pada sumber air permukaan seperti sungai atau waduk.

Salah satu peran penting keberadaan CAT yaitu mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Banyak lahan pertanian bergantung pada air tanah untuk keperluan irigasi, terutama di wilayah dengan pola curah hujan musiman. Dengan adanya CAT, petani dapat memanfaatkan sumur sebagai sumber air bagi lahan pertanian mereka sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Selain itu, di beberapa daerah, mata air yang bersumber dari CAT juga dimanfaatkan sebagai penyedia air minum alami bagi masyarakat.

Namun, berada dalam cekungan air tanah juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu risiko utamanya adalah pemanfaatan air tanah secara berlebihan, yang dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah serta berdampak negatif pada lingkungan, seperti terjadinya amblesan tanah (*subsidence*). Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan air tanah yang tidak terkendali dapat mengurangi ketersediaan air bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air tanah yang bijaksana dan berkelanjutan agar manfaat dari CAT dapat dimaksimalkan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Kuningan memiliki area cekungan air tanah (CAT) seluas sekitar 48.555,8 Ha (40,8 persen), yang mencakup CAT Kuningan, CAT Majalengka, dan CAT Cirebon-Sumber. Sementara itu, area non-CAT mencakup 70.524,8 Ha (59,2 persen). Luas wilayah CAT tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT)

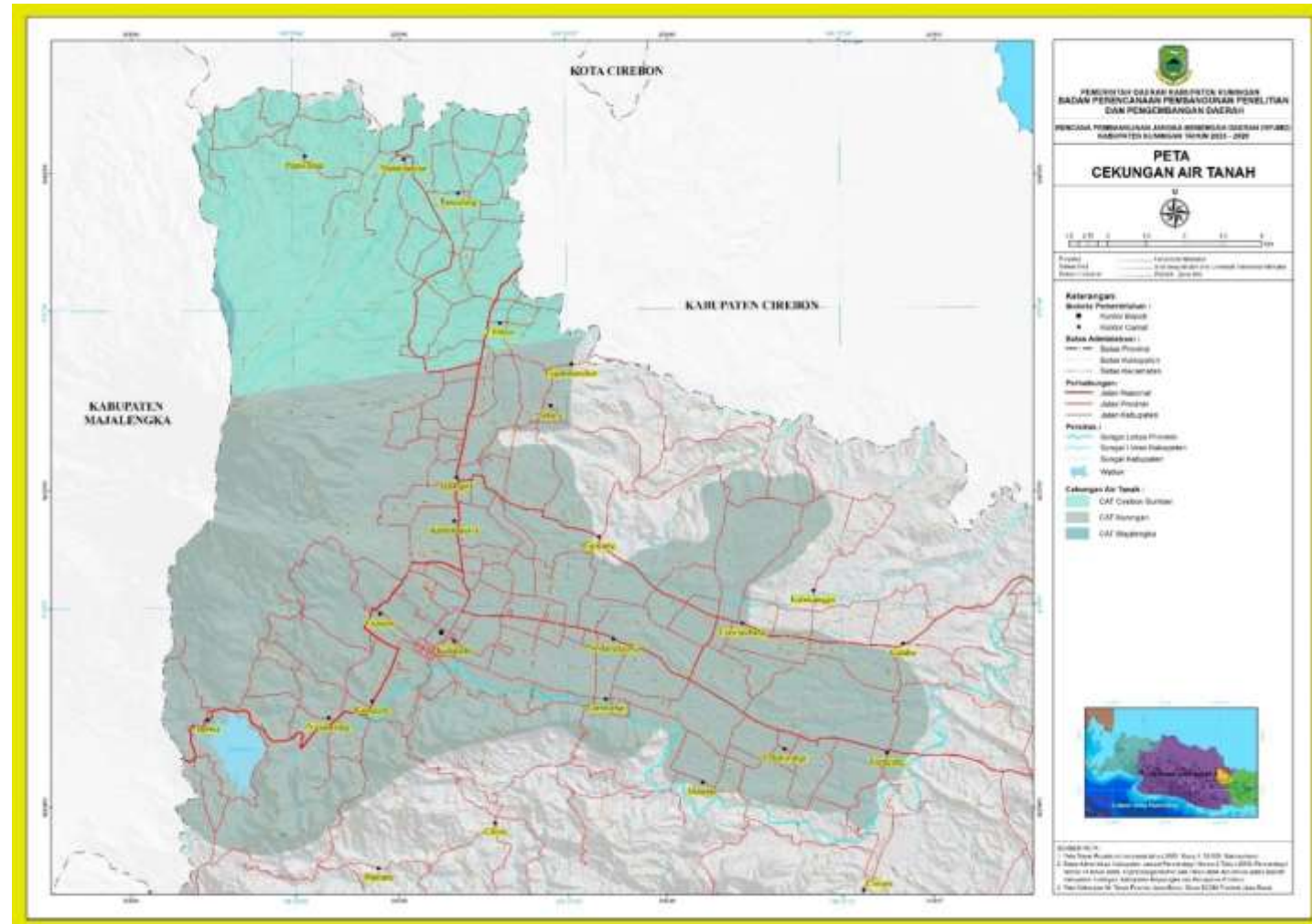
No	CAT	Luas (ha)
1	CAT-Kuningan	35.752,4
2	CAT-Majalengka	115,9
3	CAT-Cirebon-Sumber	12.687,5
Jumlah		48.555,8

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Secara umum, cekungan air tanah terletak di bagian barat, sedangkan area non-CAT tersebar di wilayah selatan, timur, hingga sebagian utara dengan pola menyerupai huruf U. Area non-CAT memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air tanah karena tidak adanya akuifer yang luas dan produktif untuk menyimpan serta mengalirkan air dalam jumlah memadai. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut harus mengandalkan sumber air permukaan atau

membangun sistem penyimpanan air yang lebih kompleks.

Gambar 2.4 Cekungan Air Tanah



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Salah satu dampak utama dari kondisi ini adalah kerentanan terhadap kekeringan. Karena wilayah tersebut tidak memiliki cadangan air tanah yang memadai, pasokan air bisa sangat bergantung pada curah hujan dan sumber air permukaan seperti sungai, danau, atau waduk. Ketika musim kemarau tiba, kawasan ini lebih rentan mengalami krisis air, yang dapat berdampak buruk pada sektor pertanian, industri, dan kebutuhan domestik masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan ketergantungan pada air yang disuplai dari daerah lain, yang berpotensi menyebabkan konflik sumber daya air antar wilayah.

Selain itu, kawasan yang tidak berada dalam CAT juga lebih rentan terhadap penurunan kualitas tanah dan lingkungan. Tanpa adanya akuifer yang mampu menyimpan air dengan baik, tanah di daerah tersebut mungkin memiliki daya serap air yang rendah. Akibatnya, saat hujan turun, air lebih cepat mengalir di permukaan daripada meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko erosi dan banjir. Di sisi lain, kurangnya cadangan air tanah juga dapat menghambat pertumbuhan vegetasi alami, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan air tanah dapat menyebabkan biaya tinggi dalam penyediaan air. Pengeboran sumur dalam mungkin tidak efektif karena tidak ada akuifer besar yang bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat harus mengandalkan pasokan air dari luar atau membangun infrastruktur tambahan seperti waduk atau sistem pemanenan air hujan. Hal ini tentu membutuhkan investasi besar, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, tidak berada dalam cekungan air tanah dapat menyebabkan berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, wilayah semacam ini perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif, seperti pemanfaatan teknologi penyimpanan air, efisiensi penggunaan air, serta pelestarian lingkungan untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masa depan.

b. Sebaran Mata Air

Berdasarkan Berita Acara Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Nomor 600/38/ILH tanggal 31 Januari 2018, di Kabupaten Kuningan terdapat 735 mata air yang sudah terdata. Kecamatan Ciawigebang memiliki jumlah mata air terbanyak dengan 81 sumber mata air, diikuti oleh Cidahu (52) dan Cigandamekar (46). Sebaliknya, Kecamatan Lebakwangi dan Maleber memiliki jumlah mata air paling sedikit, masing-masing hanya 2 sumber mata air. Jika dilihat dari lokasi koordinatnya, terdapat kemungkinan beberapa mata air yang saling terhubung atau berasal dari sumber akuifer yang sama seperti di Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Subang,

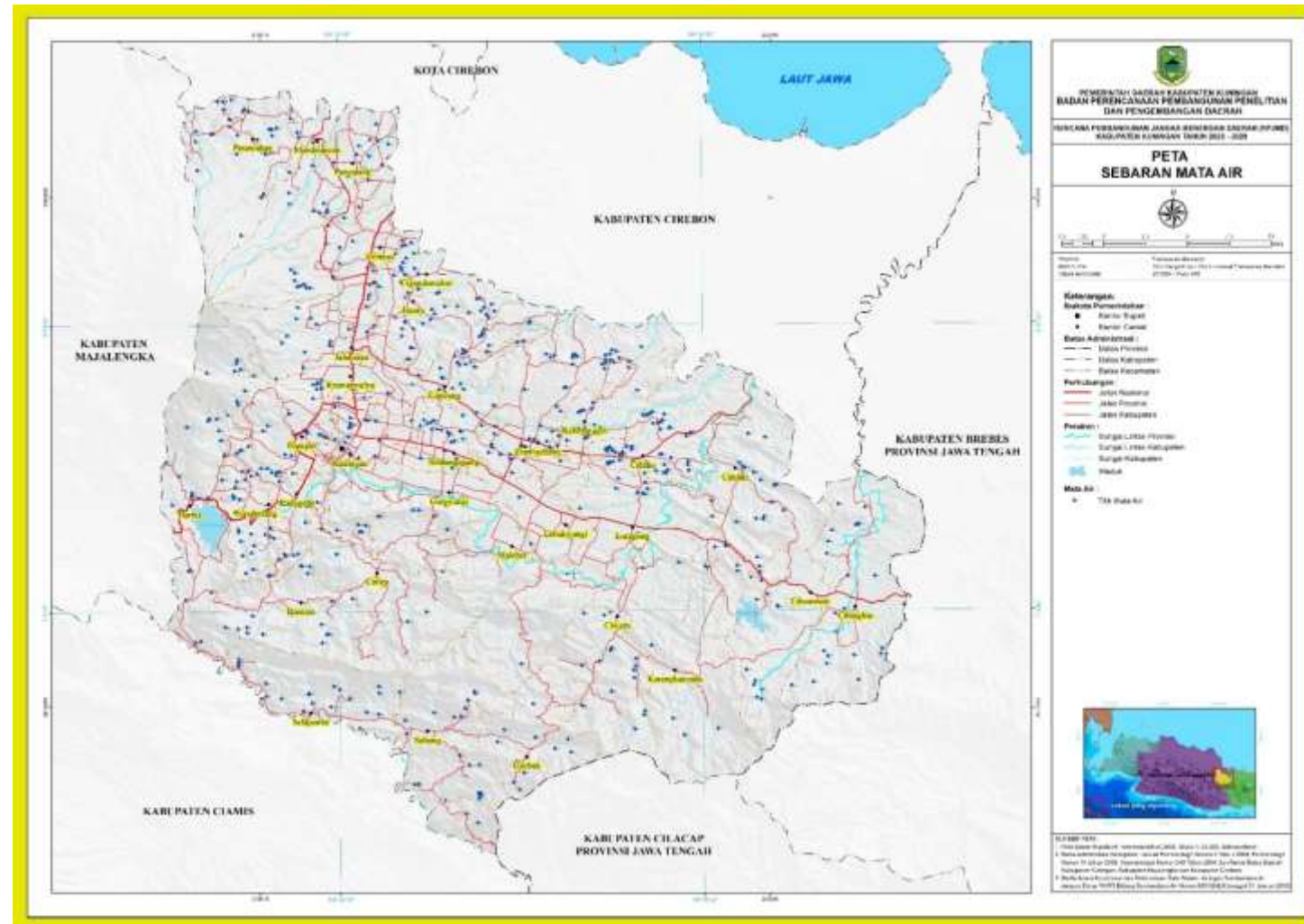
Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Kadugede, dan Kecamatan Darma. Sebaran jumlah mata air menurut kecamatan sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.5 Sebaran Jumlah Mata Air Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air	No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Ciawigebang	81	17	Selajambe	23
2	Cidahu	52	18	Ciwaru	19
3	Cigandamekar	46	19	Kuningan	18
4	Japara	32	20	Cilimus	17
5	Hantara	31	21	Pancalang	16
6	Pesawahan	31	22	Jalaksana	15
7	Cigugur	28	23	Garawangi	15
8	Subang	27	24	Mandirancan	14
9	Nusaherang	27	25	Kramatmulya	12
10	Cipicung	26	26	Cilebak	12
11	Darma	26	27	Cibeureum	12
12	Cimahi	25	28	Luragung	12
13	Kadugede	24	29	Ciniru	10
14	Cibingbin	24	30	Karangkencana	9
15	Kalimanggis	24	31	Lebakwangi	2
16	Sindangagung	23	32	Maleber	2

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Kuningan

Gambar 2.5 Sebaran Mata Air



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah Kabupaten Kuningan menjadi hulu bagi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di utara dan Wilayah Sungai Citanduy di selatan. Wilayah Sungai tersebut mencakup sekitar 10 (sepuluh) Daerah DAS sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kuningan

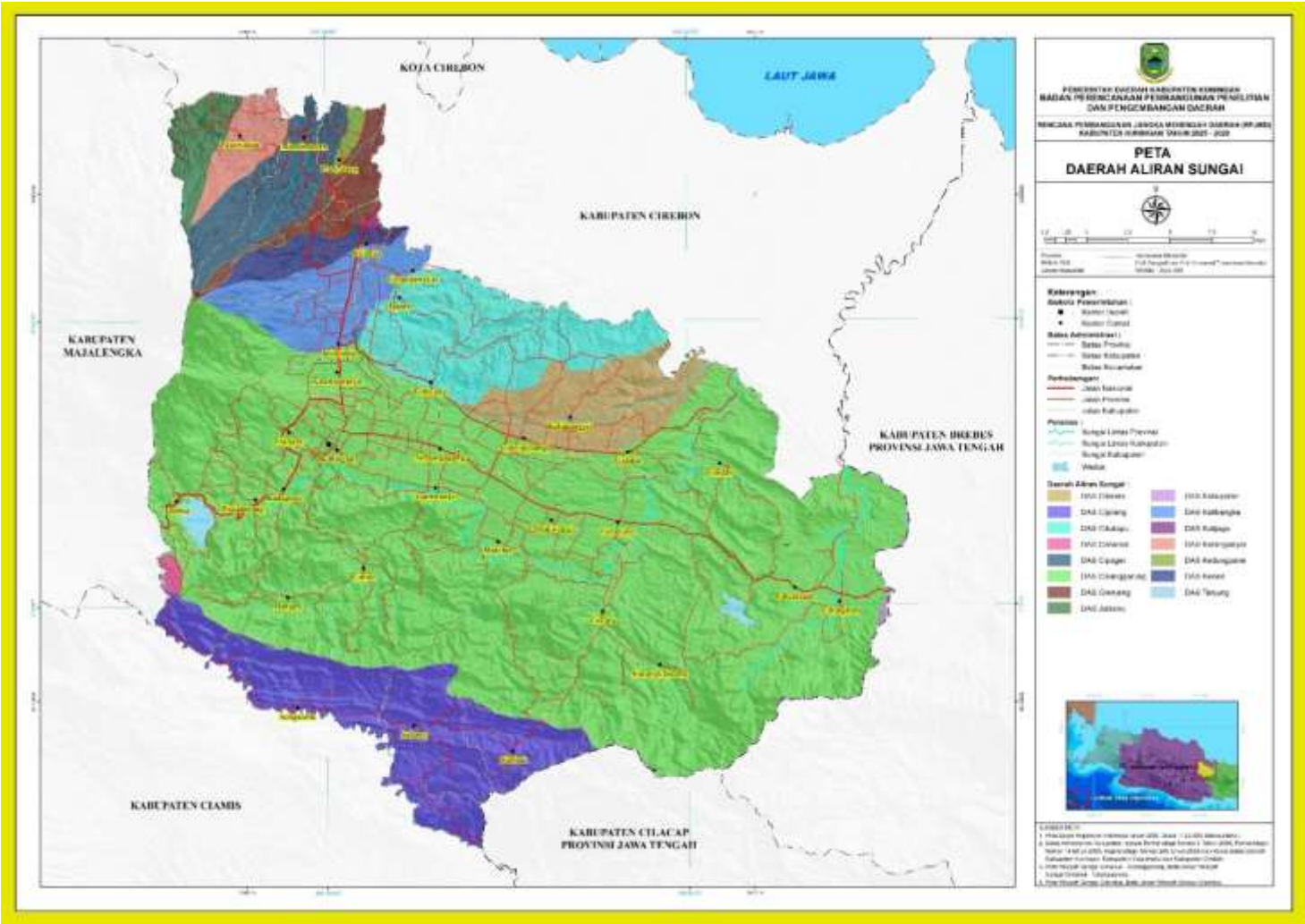
No	DAS	Luas (Ha)	Cakupan Kecamatan
1	DAS Cisanggarung	76.558,36	Cibingbin, Cibeureum, Cidahu, Ciawigebang, Cipicung, Jalaksana, Japara, Kadugede, Kalimanggis, Kramatmulya, Lebakwangi, Luragung, Mandirancan, Nusaherang, Pancalang, Pasawahan, Sindangagung, Garawangi, Subang
2	DAS Cijolang	11.588,05	Cibingbin, Cibeureum, Karangkancana, Luragung, Maleber, Nusaherang, Subang
3	DAS Cikalapu	8.373,99	Ciniru, Darma, Hantara, Kadugede, Lebakwangi, Selajambe
4	DAS Ciberes	5.319,68	Cigandamekar, Cilebak, Cimahi, Kalimanggis, Maleber, Pancalang
5	DAS Kalibangka	4.522,39	Ciawigebang, Cidahu, Cibingbin, Cibeureum, Jalaksana
6	DAS Cipager	4.298,07	Cilimus, Mandirancan, Pancalang
7	DAS Grenjeng	2.441,45	Cilebak, Cimahi, Hantara, Karangkancana
8	DAS Karanganyar	1.825,23	Cibingbin, Cibeureum
9	DAS Jatiroke	1.772,30	Ciawigebang, Cidahu, Cipicung
10	DAS Kenari	1.585,88	Cibeureum, Cidahu, Ciawigebang

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

DAS Cisanggarung merupakan DAS terbesar dengan luas 76.558,36 Ha, mencakup 18 kecamatan. DAS ini memiliki peran penting dalam sistem hidrologi wilayah, berkontribusi terhadap pasokan air dan pengelolaan sumber daya air di daerah yang luas. Di urutan kedua, DAS Cijolang memiliki luas 11.588,05 Ha, mencakup 7 kecamatan, yang menunjukkan bahwa meskipun lebih kecil, DAS ini tetap memiliki cakupan wilayah yang cukup luas.

DAS dengan cakupan sedang antara 4.000 hingga 8.000 Ha, seperti DAS Cikalapu (8.373,99 ha), DAS Ciberes (5.319,68 ha), dan DAS Kalibangka (4.522,39 ha), tersebar di berbagai kecamatan dengan pengaruh yang cukup besar terhadap aliran air di wilayahnya masing-masing. DAS yang lebih kecil seperti DAS Karanganyar (1.825,23 ha), DAS Jatiroke (1.772,30 ha), dan DAS Kenari (1.585,88 ha) memiliki cakupan yang lebih terbatas, namun tetap berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem air dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

Gambar 2.6 Daerah Aliran Sungai



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

d. Potensi Wilayah

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan sumber daya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa sektor yang menjadi potensi di Kabupaten Kuningan:

Kehutanan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan-paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.¹

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Dengan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016; SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017; SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW Kabupaten Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota; Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan; dan Hasil Analisis SIG Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kuningan, diperoleh luasan hutan sebagaimana tabel berikut ini.

¹ Arief, Arifin. 2011. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Tabel 2.7 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	25.066,82
2	Taman Nasional	8.837,02
3	Taman Wisata Alam	8,90
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,73
5	Hutan Kota	71,50
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait

Tabel di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan dalam Angka Tahun 2025).

Perkebunan, merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Luas areal tanaman perkebunan menurut jenis tanaman dan produksi sebagaimana ditampilkan Tabel bawah ini.

Tabel 2.8 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kelapa		Kopi	
		Luas (Ha)	Ton	Luas (Ha)	Ton
1	2020	5.487,05	5.769,63	1.729,86	1.005,52
2	2021	5.798,46	3.967,28	1.725,11	323,7
3	2022	4.570,29	3.035,77	1.566,49	327,55
4	2023	4.146,50	3.178,36	1.572,32	496,88
5	2024	3.994,94	4.017,94	1.537,36	726,03

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, luas lahan dan produksi kelapa serta kopi mengalami fluktuasi. Pada komoditas kelapa, luas lahan awalnya meningkat dari 5.487,05 Ha pada 2020 menjadi 5.798,46 Ha pada 2021, tetapi kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 3.994,94 Ha pada 2024. Produksi kelapa juga menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan puncak produksi terjadi pada 2020 sebesar 5.769,63 ton, namun turun drastis menjadi 3.035,77 ton pada 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 4.017,94 ton di 2024.

Sementara itu, luas lahan kopi relatif stabil dengan sedikit variasi, berada di kisaran 1.537,56 hingga 1.729,86 Ha. Namun, produksi kopi mengalami penurunan tajam dari 1.005,52 ton pada 2020 menjadi 323,7 ton pada 2021, sebelum perlahan meningkat kembali hingga mencapai 726,03 ton pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas, seperti perubahan kondisi cuaca, teknik budidaya, atau minat petani dalam menanam komoditas perkebunan.

Tanaman Pangan, pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut². Luasan lahan sawah dilindungi (LSD) memiliki luas sekitar 27.415 Ha. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani terutama untuk menanam padi, jagung kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Adapun kuantitas produksi tanaman pangan dan Tanaman Palawija yang sudah terdata sebagaimana di tabel bawah ini.

Tabel 2.9 Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Palawija Tahun 2020-2024

No	Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	356.216	370.280	366.160	297.548	352.511
2	Jagung	1.690	1.544	1.829	1.750	3.035
3	Kedelai	650	222	859	479	229
4	Kacang Kanah	625	260	186	123	114
5	Kacang Hijau	156	55	84	5	12
6	Ubi Kayu	497	129	23	367	472
7	Ubi Jalar	4.561	1.177	1.148	1.530	4.751

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Dalam periode 2020 hingga 2024, produksi tanaman pangan dan palawija di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya fluktuasi. Produksi padi mengalami kenaikan dari 356.216 ton pada 2020 hingga mencapai puncaknya di 2022 sebesar 366.160 ton, sebelum turun drastis menjadi 297.548 ton pada 2023, lalu kembali meningkat menjadi 352.511ton pada 2024. Produksi jagung juga mengalami variasi, dengan peningkatan signifikan dari 1.690 ton pada 2020 menjadi 3.001 ton di 2022, meskipun sempat menurun di 2023, kemudian naik lagi pada 2024.

Komoditas kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami tren penurunan produksi secara umum, dengan kedelai mencapai produksi tertinggi di 2022 sebesar 859 ton, namun turun drastis pada 2024 menjadi hanya 229 ton. Hal serupa terjadi pada kacang tanah dan kacang hijau, di mana produksinya terus menurun, bahkan

² Aartsen, J. V., 1953. *Ekonomi pertanian Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.

kacang hijau hanya mencapai produksi 12 ton pada 2024. Sementara itu, ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan pola produksi yang berfluktuasi, dengan ubi kayu mengalami penurunan drastis di 2022 sebelum kembali naik pada 2024, dan ubi jalar sempat mengalami penurunan tajam di 2021-2023 sebelum meningkat pesat ke angka 4.751 ton pada 2024.

Peternakan, merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal. Terdapat berbagai jenis komoditas ternak di Kabupaten Kuningan sebagaimana diperlihatkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Jumlah Komoditas Ternak Tahun 2020-2024

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ternak Besar					
	a. Sapi Potong	29.533	29.972	30.631	28.240	30.712
	b. Sapi Perah	7.737	7.945	7.278	6.582	7.303
	c. Kerbau	4.543	4.609	4.674	4.904	4.929
	d. Kuda	356	365	365	379	382
2	Ternak Kecil					
	a. Domba	125.652	130.114	136.620	123.757	137.015
	b. Kambing	7.489	7.603	7.950	9.099	9.086
	c. Kelinci	7.959	7.931	8.050	7.847	7.987
	d. Babi	3.051	4.140	1.710	1.256	1.347
3	Ternak Unggas					
	a. Ayam Buras	528.120	601.702	634.796	562.514	597.938
	b. Ayam Ras Petelur	1.499.166	1.497.135	1.908.399	2.231.239	2.340.353
	c. Ayam Ras Pedaging	3.258.516	3.685.653	3.814.651	3.326.380	4.248.100
	d. Puyuh	148.264	131.543	133.542	136.697	141.072
	e. Itik	70.016	73.609	74 710	88.894	89.072
	f. Itik Manila/Entok	3.651	16.095	20.661	19.619	21.106

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, 2025

Dalam periode 2020-2024, jumlah populasi ternak besar di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi. Sapi potong mengalami peningkatan dari 29.533 ekor pada 2020 menjadi 30.631 ekor pada 2022, sebelum turun ke angka 28.240 ekor di 2023, lalu kembali meningkat ke 30.712 ekor pada 2024. Sapi perah mengalami penurunan signifikan dari 7.945 ekor pada 2021 menjadi 6.582 ekor di 2023, tetapi sedikit meningkat menjadi 7.303 ekor pada 2024. Sementara itu, populasi kerbau dan kuda menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan jumlah kerbau meningkat perlahan dari 4.543 ekor pada 2020 menjadi 4.929 ekor pada 2024, dan kuda naik dari 356 ekor menjadi 382 ekor dalam periode yang sama.

Ternak kecil juga mengalami variasi dalam jumlah populasi. Domba menunjukkan pertumbuhan, dari 125.652 ekor pada 2020 menjadi 137.015 ekor di 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2023. Kambing mengalami tren peningkatan yang lebih stabil, sementara kelinci cenderung berfluktuasi tetapi tetap berada di kisaran 7.900 ekor. Sebaliknya, populasi babi mengalami penurunan drastis dari 4.140 ekor pada 2021 menjadi hanya 1.347 ekor pada 2024, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor permintaan pasar atau regulasi peternakan yang berubah.

Pada sektor unggas, ayam buras dan ayam ras pedaging mengalami lonjakan populasi, terutama ayam ras pedaging yang meningkat dari 3.258.516 ekor pada 2020 menjadi 4.248.100 ekor pada 2024. Ayam ras petelur juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai 2.340.353 ekor di 2024. Populasi itik dan entok menunjukkan peningkatan yang cukup stabil, dengan entok mengalami pertumbuhan pesat dari 3.651 ekor pada 2020 menjadi 21.106 ekor di 2024. Sementara itu, puyuh mengalami sedikit penurunan pada 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Perikanan, menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan Kabupaten Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 sebesar 440,83 ton dengan nilai Rp11.792,31 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele.

Tabel 2.11 Produksi Perikanan Tangkap

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai (Juta Rp)
1	2020	223,03	3.568,51
2	2021	355,70	7.824,48
3	2022	368,35	223,03
4	2023	404,80	10.524,80
5	2024	440,83	11.792,31

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Produksi perikanan tangkap mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, produksi tercatat sebesar 223,03 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp3.568,51 juta. Produksi kemudian meningkat signifikan pada 2021 menjadi 355,70 ton dengan nilai yang lebih dari dua kali lipat, yaitu Rp7.824,48 juta. Pada 2022, meskipun produksi bertambah menjadi 368,35 ton, nilai ekonominya justru turun drastis ke Rp223,03 juta, yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan harga ikan atau perubahan dalam metode penilaian. Tren positif kembali terlihat pada 2023 dan 2024, dengan produksi mencapai 404,80 ton dan 440,83 ton, serta nilai ekonomi yang meningkat pesat menjadi Rp10.524,80 juta dan Rp11.792,31 juta.

Pariwisata, karena keberagaman morfologi dan topografinya, Kabupaten Kuningan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan baik pariwisata alam, pariwisata budaya maupun pariwisata buatan. Gunung Ciremai di bagian barat merupakan destinasi favorit bagi para pendaki dan pecinta keindahan alam. Di bidang sejarah dan budaya, memiliki banyak destinasi yang menarik. Gedung Perundingan Linggarjati, misalnya, menjadi saksi bisu perundingan penting antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946. Selain itu, Situs Purbakala Cipari memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat prasejarah di wilayah ini. Dengan segala potensinya, Kabupaten Kuningan memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

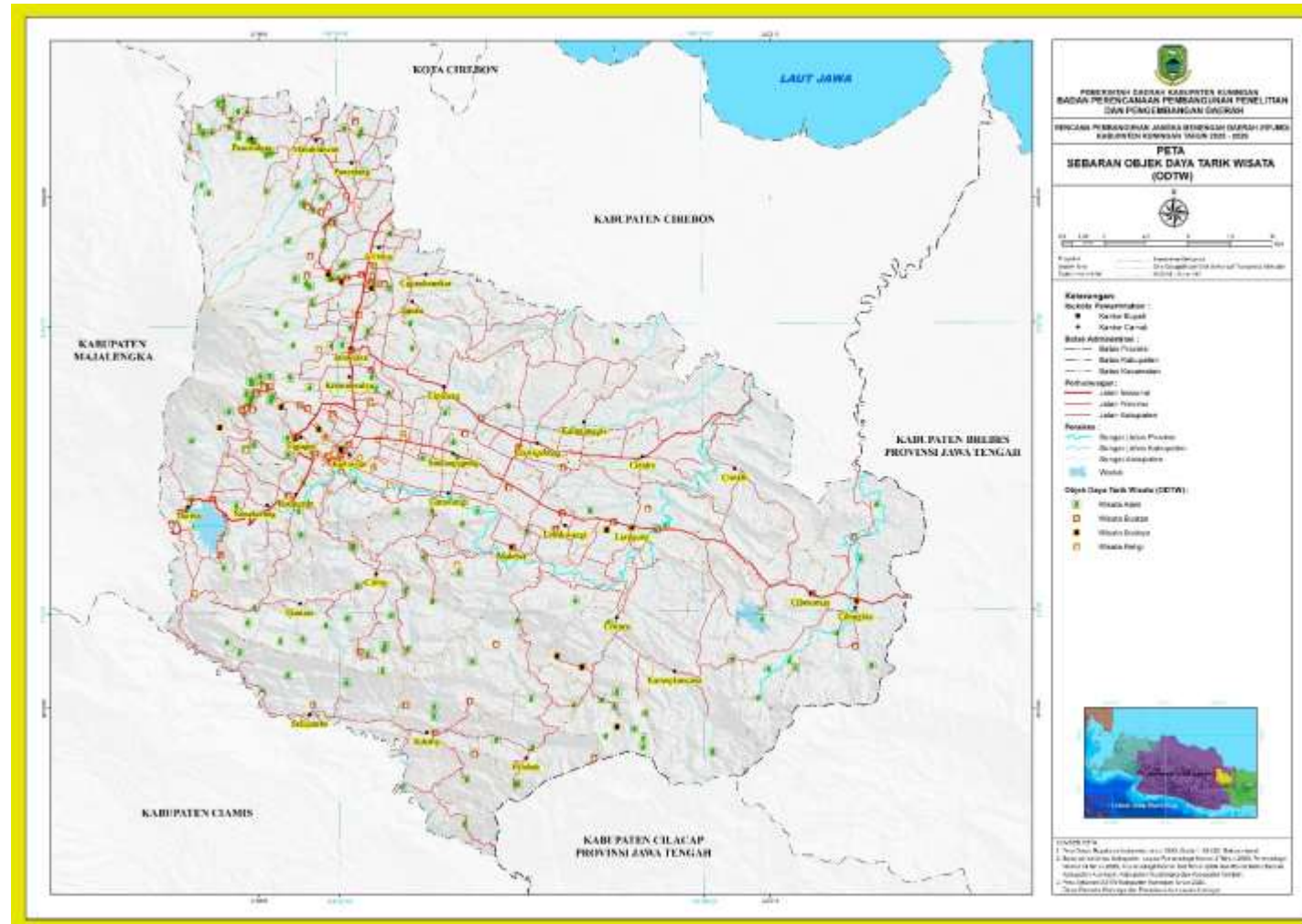
**Tabel 2.12 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Tahun 2020–2024**

Tahun	M mancanegara	Domestik	Jumlah
2020	49	2.480.669	2.480.718
2021	16	2.668.426	2.668.442
2022	35	3.448.882	3.448.917
2023	26	2.785.100	2.785.126
2024	224	3.824.296	3.824.520

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Jumlah wisatawan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan tren peningkatan pada wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada 2020, jumlah wisatawan mencapai 2.480.718 orang, dengan 49 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Meskipun jumlah wisatawan mancanegara turun menjadi 16 orang pada 2021, wisatawan domestik meningkat menjadi 2.668.426, sehingga total wisatawan juga bertambah. Puncak kunjungan terjadi pada 2022, dengan jumlah wisatawan mencapai 3.448.917 orang, yang didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak 3.448.882 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 35 orang. Pada 2023, total wisatawan sedikit menurun menjadi 2.785.126 orang, sejalan dengan penurunan wisatawan mancanegara menjadi 26 orang. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan wisatawan mancanegara, mencapai 224 orang, dengan total wisatawan meningkat drastis menjadi 3.824.520 orang. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan terus berkembang, dengan daya tarik utama masih berasal dari wisatawan domestik, sementara wisatawan mancanegara mulai menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.

Gambar 2.7 Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Beberapa potensi pengembangan pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan:

2.1.1.1 Potensi Pariwisata Alam

- a. Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati di Desa Linggajati Kecamatan Cilimus;
- b. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC);
- c. Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
- d. Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- e. Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
- f. Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
- g. Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
- h. Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
- i. Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
- j. Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
- k. Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
- l. Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
- m. Telaga Remis di Desa Kaduella Kecamatan Pasawahan;
- n. Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
- o. Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
- p. Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
- q. Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- r. Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
- s. Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- t. Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;
- u. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
- v. Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
- w. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
- x. Kebun Raya Kuningan di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
- y. Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
- z. Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
- aa. Situ Cicerem di Desa Kaduella Kecamatan Pasawahan;
- bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;
- cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;

- dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
- ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.

2.1.1.2 Potensi pariwisata budaya

- a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
- b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
- c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
- d. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.

2.1.1.3 Potensi pariwisata buatan antara lain *Open Space Gallery* di Desa Linggasana, Sangkan Resort Aqua Park di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus dan sebagainya.

2.1.1.4 Potensi Pariwisata Religi antara lain Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; Makam Syech Muhibat di Kelurahan Winduhaji dan sebagainya.

Pengembangan potensi di atas dapat ditunjang dengan **wisata kuliner** yang ada di daerah seperti tape ketan, dan olahan produk pertanian lainnya.

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang³. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang lebih 46.313 Ha yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam.

Panas Bumi (Geothermal), Kabupaten Kuningan memiliki potensi energi panas bumi yang cukup besar, tersebar di beberapa wilayah dengan kapasitas yang bervariasi. Prospek Sumber Daya Panas Bumi terkonsentrasi di sekitar Gunung Ciremai, beberapa di antaranya sudah dilakukan kajian seperti di Desa Sangkanurip

Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Ciniru Kecamatan Japara.

Beberapa prospek utama adalah Sangkanhurip dengan luas reservoir sekitar 2 km², suhu antara 140–180°C, dan cadangan terduga sebesar 25 MW. Selain itu, terdapat prospek Ciniru yang memiliki luas reservoir sekitar 8,5 km² dengan cadangan terduga mencapai 75 MW, serta prospek Pajambon dengan luas 10 km² dan cadangan sebesar 135 MW.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung air adalah kapasitas maksimum sumber daya air di suatu wilayah untuk mendukung kebutuhan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas sumber daya tersebut. Daya dukung air mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan air (air tanah dan air permukaan) dengan kebutuhan konsumsi, termasuk untuk rumah tangga, pertanian, industri, dan ekosistem.

Jika pemanfaatan air melampaui daya dukungnya, maka dapat terjadi berbagai masalah seperti kekeringan, penurunan muka air tanah, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan air yang bijak sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan sumber daya air.

Data Daya Dukung Air mengacu pada hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Adapun kecamatan dengan status daya dukung air telah melampaui tertinggi adalah Kecamatan Cilimus sebesar 1.862,30 Ha dan Kecamatan Cigandamekar sebesar 1.625,52 Ha, yang dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan yang besar dan merupakan wilayah perkotaan yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan terbangun.

Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Cidahu, Cilebak, Cimahi, Ciniru, Darma, dan Hantara tidak mengalami kelebihan eksploitasi, dengan angka melampaui daya dukung sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan air tanah di wilayah tersebut masih dalam batas yang aman. Kecamatan lainnya memiliki tingkat penggunaan air yang melampaui daya dukungnya dengan persentase yang bervariasi, seperti Japara (42,82%), Mandirancan (38,57%), dan Sindangagung (20,78%). Sementara itu, kecamatan dengan kelebihan pemakaian yang lebih moderat adalah Kuningan (6,99%), Lebakwangi (14,48%), dan Pasawahan (12,17%). Luasan Daya Dukung Air per Kecamatan sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.13 Luas Daya Dukung Air per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	No.	KecIKLHamatan	Luas (Ha)
1	CIAWIGEBANG	6.035,19	18	KADUGEDE	1.808,45
	Belum Melampai	4.917,65		Belum Melampai	1.700,52
	Melampai	1.117,54		Melampai	107,93
2	CIBEUREUM	3.868,38	19	KALIMANGGIS	2.015,93
	Belum Melampai	3.450,76		Belum Melampai	1.926,71
	Melampai	417,61		Melampai	89,22
3	CIBINGBIN	6.403,24	20	KARANGKANCANA	6.410,55
	Belum Melampai	5.715,43		Belum Melampai	6.351,47
	Melampai	687,81		Melampai	59,08
4	CIDAHU	3.701,61	21	KRAMATMULYA	1.685,43
	Belum Melampai	3.701,61		Belum Melampai	1.521,71
5	CIGANDAMEKAR	2.240,35		Melampai	163,72
	Belum Melampai	614,83	22	KUNINGAN	2.990,94
	Melampai	1.625,52		Belum Melampai	2.781,75
6	CIGUGUR	3.524,98		Melampai	209,19
	Belum Melampai	3.450,38	23	LEBAKWANGI	1.967,80
	Melampai	74,6		Belum Melampai	1.682,85
7	CILEBAK	4.143,53		Melampai	284,94
	Belum Melampai	4.143,53	24	LURAGUNG	4.070,16
8	CILIMUS	3.525,75		Belum Melampai	4.021,63
	Belum Melampai	1.663,45		Melampai	48,53
	Melampai	1.862,30	25	MALEBER	5.730,58
9	CIMAH	5.834,15		Belum Melampai	5.697,03
	Belum Melampai	5.834,15		Melampai	33,55
10	CINIRU	4.971,12	26	MANDIRANCAN	3.495,96
	Belum Melampai	4.971,12		Belum Melampai	2.147,53
11	CIPICUNG	1.900,16		Melampai	1.348,43
	Belum Melampai	1.510,43	27	NUSAHERANG	1.807,29
	Melampai	389,73		Belum Melampai	1.735,24
12	CIWARU	5.174,91		Melampai	72,05
	Belum Melampai	5.112,15	28	PANCALANG	1.917,83
	Melampai	62,76		Belum Melampai	900,76
13	DARMA	5.442,98		Melampai	1.017,07
	Belum Melampai	5.442,98	29	PASAWAHAN	4.921,65
14	GARAWANGI	2.981,44		Belum Melampai	4.322,63
	Belum Melampai	2.836,26		Melampai	599,02
	Melampai	145,19	30	SELAJAMBE	3.657,44
15	HANTARA	3.533,30		Belum Melampai	3.251,81
	Belum Melampai	3.533,30		Melampai	405,63
16	JALAKSANA	3.916,06	31	SINDANGAGUNG	1.299,56

No	Kecamatan	Luas (Ha)
	Belum Melampaui	3.625,96
	Melampaui	290,1
17	JAPARA	2.704,77
	Belum Melampaui	1.546,66
	Melampaui	1.158,11

No.	KecIKLHamatan	Luas (Ha)
	Belum Melampaui	1.029,56
	Melampaui	270
32	SUBANG	4.744,01
	Belum Melampaui	4.656,13
	Melampaui	87,88

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, data di atas mengindikasikan bahwa beberapa kecamatan menghadapi tekanan air tanah yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan air yang lebih efektif, seperti peningkatan efisiensi penggunaan air, pengembangan sistem penyimpanan air, dan kebijakan konservasi yang lebih ketat untuk memastikan ketersediaan air tanah yang berkelanjutan di masa mendatang.

II- 33

Daya dukung pangan adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya secara berkelanjutan. Daya dukung ini bergantung pada berbagai faktor, seperti luas lahan pertanian, produktivitas pertanian, ketersediaan air, teknologi pertanian, serta kebijakan pangan dan distribusi.

Jika daya dukung pangan suatu daerah melebihi kebutuhan penduduknya, maka wilayah tersebut mampu mandiri dalam penyediaan pangan. Sebaliknya, jika daya dukungnya lebih kecil dari kebutuhan, maka daerah tersebut harus mengimpor atau mendapatkan pasokan pangan dari wilayah lain. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam, penggunaan teknologi pertanian, serta kebijakan distribusi pangan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah.

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) kecamatan yang tidak memiliki wilayah dengan status daya dukung telah melampaui, yaitu Kecamatan Selajambe dan Kecamatan Subang, yang berarti kedua kecamatan tersebut masih memiliki daya dukung pangan yang baik. Adapun kecamatan dengan status daya dukung pangan telah melampaui tertinggi adalah Kecamatan Cimahi sebesar 2.225,44 Ha dan Kecamatan Cibingbin sebesar 1.661,44 Ha, yang dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan yang besar. Namun apabila dianalisis berdasarkan persentasenya, maka Kecamatan Kuningan sebesar 62,42% dan Kecamatan Kramatmulya sebesar 56,92%, di mana kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah perkotaan yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan terbangun. Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.14 Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	CIAWIGEBANG	6.035,19	17	JAPARA	2.704,77
	Belum Melampaui	5.047,91		Belum Melampaui	2.012,98
	Telah Melampaui	987,28		Telah Melampaui	691,79
2	CIBEUREUM	3.916,73	18	KADUGEDE	1.808,45
	Belum Melampaui	2.918,74		Belum Melampaui	1.343,16
	Telah Melampaui	998,00		Telah Melampaui	465,29
3	CIBINGBIN	6.967,64	19	KALIMANGGIS	2.015,93
	Belum Melampaui	5.305,74		Belum Melampaui	1.517,38
	Telah Melampaui	1.661,90		Telah Melampaui	498,54
4	CIDAHU	3.701,61	20	KARANGKANCANA	6.524,07
	Belum Melampaui	3.585,16		Belum Melampaui	5.396,54
	Telah Melampaui	116,44		Telah Melampaui	1.127,53

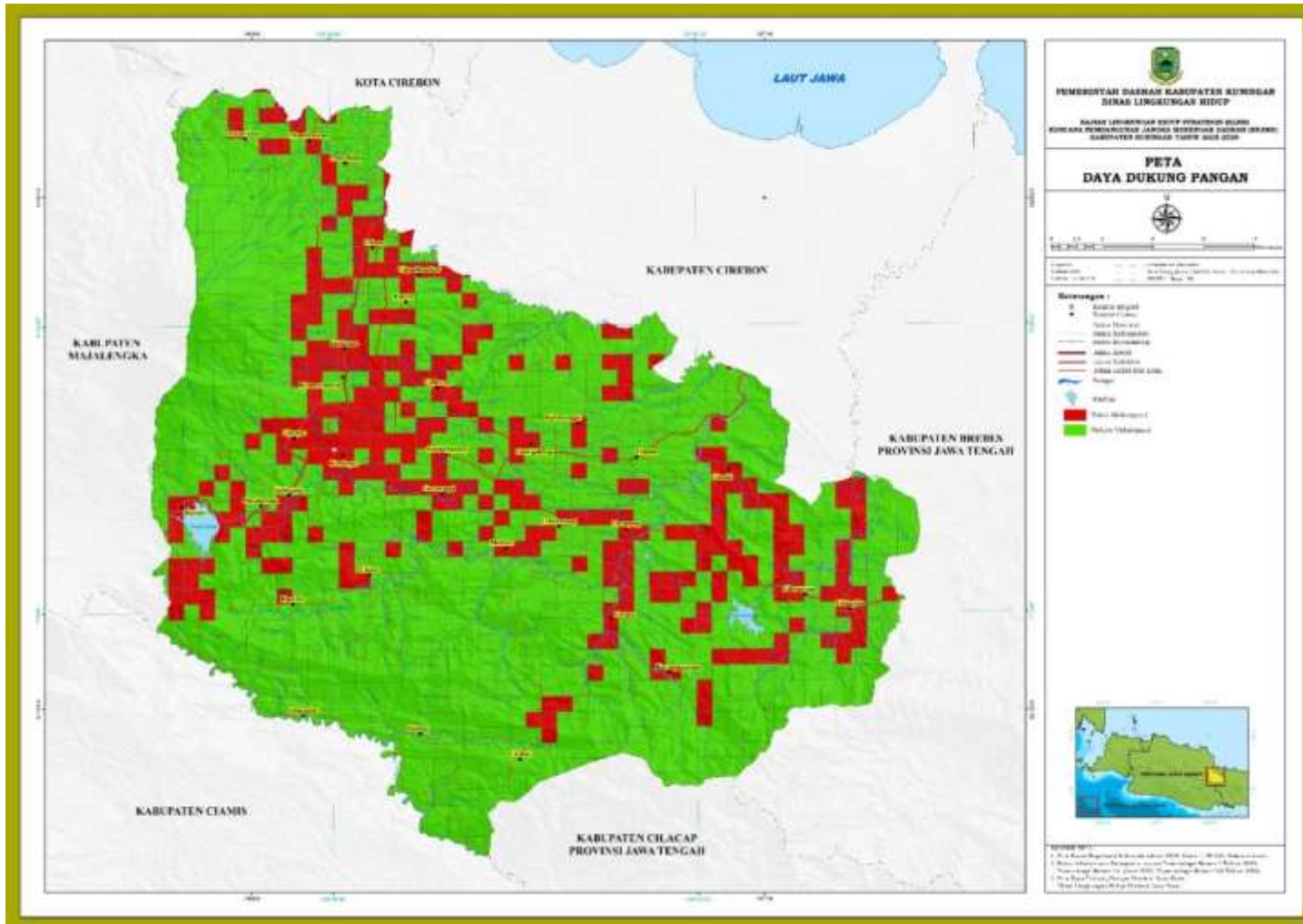
No	Kecamatan	Luas (Ha)
5	CIGANDAMEKAR	2.240,35
	Belum Melampaui	1.344,26
	Telah Melampaui	896,09
6	CIGUGUR	3.524,98
	Belum Melampaui	2.674,26
	Telah Melampaui	850,72
7	CILEBAK	4.263,13
	Belum Melampaui	3.856,94
	Telah Melampaui	406,19
8	CILIMUS	3.525,75
	Belum Melampaui	2.444,12
	Telah Melampaui	1.081,63
9	CIMAH	5.834,15
	Belum Melampaui	3.608,72
	Telah Melampaui	2.225,44
10	CINIRU	4.971,12
	Belum Melampaui	4.560,54
	Telah Melampaui	410,58
11	CIPIUNG	1.900,16
	Belum Melampaui	1.226,62
	Telah Melampaui	673,54
12	CIWARU	5.193,00
	Belum Melampaui	4.179,55
	Telah Melampaui	1.013,45
13	DARMA	5.442,98
	Belum Melampaui	4.169,25
	Telah Melampaui	1.273,73
14	GARAWANGI	2.981,44
	Belum Melampaui	1.978,89
	Telah Melampaui	1.002,56
15	HANTARA	3.533,30
	Belum Melampaui	3.338,17
	Telah Melampaui	195,13
16	JALAKSANA	3.916,06
	Belum Melampaui	2.573,02
	Telah Melampaui	1.343,04

No	Kecamatan	Luas (Ha)
21	KRAMATMULYA	1.685,43
	Belum Melampaui	726,12
	Telah Melampaui	959,31
22	KUNINGAN	2.990,94
	Belum Melampaui	1.123,91
	Telah Melampaui	1.867,03
23	LEBAKWANGI	1.967,80
	Belum Melampaui	1.224,68
	Telah Melampaui	743,12
24	LURAGUNG	4.070,16
	Belum Melampaui	2.728,23
	Telah Melampaui	1.341,93
25	MALEBER	5.730,58
	Belum Melampaui	5.277,90
	Telah Melampaui	452,68
26	MANDIRANCAN	3.495,96
	Belum Melampaui	3.077,73
	Telah Melampaui	418,22
27	NUSAHERANG	1.807,29
	Belum Melampaui	1.018,22
	Telah Melampaui	789,07
28	PANCALANG	1.917,83
	Belum Melampaui	1.620,75
	Telah Melampaui	297,09
29	PASAWAHAN	4.921,65
	Belum Melampaui	4.401,45
	Telah Melampaui	520,20
30	SELAJAMBE	3.657,44
	Belum Melampaui	3.657,44
31	SINDANGAGUNG	1.299,56
	Belum Melampaui	746,04
	Telah Melampaui	553,52
32	SUBANG	4.744,19
	Belum Melampaui	4.744,19

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Dalam mengatasi ketimpangan daya dukung pangan, kecamatan yang masih dalam kondisi baik perlu diarahkan untuk mempertahankan produktivitasnya, sementara kecamatan yang sudah mengalami tekanan perlu diintervensi dengan kebijakan yang tepat melalui optimalisasi lahan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pengembangan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Pangan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2025

Daya Dukung lahan fungsi lindung, Dengan luas wilayah yaitu 206,906,543 Ha, guna lahan fungsi lindung terdapat hutan produksi, lindung setempat, perikanan (tambak), pertanian (ladang), suaka alam, dan perumahan, perumahan perdagangan dan jasa. Dilihat pada nilai Daya Dukung Lahan (DDL) tahun 2023 adalah 0,45 yang berarti bahwa fungsi lindung sedang. Dilihat dari nilai 0,45 maka tergolong tingkat DDL dalam kategori sedang yaitu antara nilai 0,40-0,60.

D. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk bertahan hidup, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memastikan kecukupan pangan bagi penduduk. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 261,17 kg per kapita per tahun, kemudian meningkat menjadi 274,21 kg pada tahun 2021 dan mencapai 293,61 kg pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 266,9 kg per kapita per tahun, dan meningkat kembali menjadi 272,03 kg.

Tingkat konsumsi pangan lokal juga mengalami peningkatan, pada tahun 2020, persentase konsumsi pangan lokal tercatat sebesar 37%, dan terus meningkat menjadi 40% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 50% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program yang mendorong masyarakat untuk lebih mengonsumsi produk pangan lokal, yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah, namun pada tahun 2024 kembali turun ke angka 46%.

Selain itu, jumlah lumbung pangan di Kabupaten Kuningan menunjukkan perkembangan positif, dengan peningkatan jumlah lumbung pangan yang tercatat dari 0 pada tahun 2020 menjadi 5 pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya upaya yang lebih terorganisir untuk menyimpan dan mengelola cadangan pangan lokal guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 0.

Skor pola pangan harapan (PPH) di Kabupaten Kuningan juga mengalami hasil yang stabil dan baik. Skor PPH tercatat 82,4% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 93,2% pada tahun 2022 dan 2023, serta meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 93,8, yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas pola konsumsi pangan yang lebih bergizi dan seimbang di masyarakat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kuningan menunjukkan kemajuan yang baik dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, konsumsi pangan lokal, dan pengelolaan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas pola konsumsi pangan di masyarakat.

Tabel 2.15 Kondisi Indikator Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	261,17	274,21	293,61	266,9	272,03
2	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	37	40	45	50	55
3	Lumbung Pangan	Buah	0	1	3	5	0
4	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	82,4	82,4	93,2	93,2	93,8
5	Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Persen	3,51	3,73	6,63	6,43	5,83

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan melansir data tentang desa-desa yang mengalami rawan pangan tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.16 Desa Rawan Pangan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Kecamatan	Desa
Karangkencana	Jabranti
Ciwaru	Sagaranten, Citikur
Cibingbin	Sukaharja
Cibeureum	Tarikolot
Cimahi	Sukajaya, Cimulya
Subang	Situgede, Jatisari
Selajambe	Padahurip, Selajambe, Ciberung, Kutawaringin, Jamberama
Cilebak	Legokherang, Bungurberes, Mandapajaya
Cidahu	Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela, Jatimulya
Kalimanggis	Kalimanggis Wetan, Kalimanggis Kulon
Hantara	Pakapasan Girang, Cikondang, Tundagan, Bunigeulis, Hantara

Kecamatan	Desa
Kramatmulya	Karangmangu
Luragung	Benda
Pancalang	Patalagan, Sumbakeling, Tenjolayar
Japara	Wano
Maleber	Garahaji, Padamulya
Darma	Cimenga, Sukarasa, Tugumulya
Cipicung	Pamulihan, Sukanangan, Muncangela
Ciawigebang	Lebaksiuh, Sukaraja
Pasawahan	Pasawahan
Nusaherang	Kertayuga, Windusari, Jambar
Kadugede	Sindangjawa, Cisukadana, Margabakti
Garawangi	Citiusari, Tembong, Sukaimut, Garawangi, Karamatwangi
Ciniru	Pinara, Cipedes, Rambatan, Longkewang, Mungkaldatar
JUMLAH	

Sumber: diolah dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan data desa rawan pangan yang tersebar di berbagai kecamatan, tercatat sebanyak 24 kecamatan yang memiliki desa dengan kondisi rawan pangan. Total terdapat 63 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan berdasarkan informasi yang dihimpun. Jumlah desa rawan pangan di setiap kecamatan bervariasi, yang mencerminkan tingkat kerentanan pangan yang berbeda-beda antar wilayah. Kecamatan yang tidak terdapat Desa Rawan Pangan sebanyak 8 kecamatan, yaitu Cigandamekar, Cilimus, Kuningan, Lebakwangi, Cigugur, Jalaksana, Mandirancan dan Sindangagung.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa rawan pangan terbanyak adalah Cidahu, dengan total 6 desa, yaitu Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela, dan Jatimulya. Menyusul di bawahnya adalah Selajambe, Hantara, Garawangi, dan Ciniru, yang masing-masing memiliki 5 desa rawan pangan. Tingginya jumlah desa rawan pangan di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan yang mungkin disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, atau infrastruktur yang belum merata.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Isu lingkungan hidup yang berkembang di Kabupaten Kuningan di antaranya berupa pencemaran air, persampahan, banjir dan longsor, perubahan fungsi lahan serta kebakaran hutan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Meskipun dampak tersebut di atas belum meluas, namun perlu diupayakan penanganan secara serius yang melibatkan para pihak dan multisektor, sejak perencanaan sampai pengawasan. Tidak kalah penting penyusunan database tentang kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan sangat diperlukan sebagai basis perencanaan pembangunan ke depan. Salah satu isu lingkungan yang terdokumentasikan saat ini adalah data tentang layanan persampahan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Kondisi Pengelolaan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	- Penanganan Sampah	Ton	95637	103.888	107.441	111.055	108.189
		Persen	55,94	60,11	61,09	61,75	59,76
	- Pengurangan Sampah	Ton	9.976,68	10.120,64	11.200	11.718,40	15,728
		Persen	16,55	18,1	22	27,61	8,73
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,04	68,91	66,93	71,11	72,05
	- Indeks Kualitas Air	Poin	48,89	50	51,11	53,83	54,44
	- Indeks Kualitas Udara	Poin	88,94	86,52	86,96	89,04	92,84
	- Indeks tutupan lahan	Poin	57,73	68,8	57,05	64,19	63,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

Volume Penanganan Sampah meningkat dari tahun 2020 sebesar 95.637 ton menjadi puncaknya pada tahun 2023 sebesar 111.055 ton, lalu sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 108.189 ton. Persentase Penanganan Sampah relatif membaik dari 55,94% (2020) hingga mencapai 61,75% (2023), namun turun menjadi 59,76% di 2024. Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam penanganan, meski terjadi sedikit penurunan di akhir periode. Volume Pengurangan Sampah naik cukup signifikan, dari 9.976,68 ton (2020) menjadi 15.728 ton (2024). Namun, persentase pengurangan sampah justru fluktuatif: meningkat dari 16,55% (2020) hingga mencapai puncaknya 27,61% (2023), lalu anjlok drastis menjadi hanya 8,73% pada 2024. Ini menandakan ada kendala pada upaya pengurangan sampah di tahun terakhir, meskipun volume absolutnya meningkat.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kuningan tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi kualitas lingkungan. Pada tahun

2020 nilai IKLH tercatat sebesar 67,04 poin dan meningkat menjadi 68,91 poin di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan menjadi 66,93 poin, sebelum kembali meningkat pada 2023 (71,11 poin) dan 2024 (72,05 poin). Secara umum tren IKLH menunjukkan perbaikan meskipun sempat menurun di tengah periode. Jika dilihat dari komponen penyusunnya, Indeks Kualitas Air menunjukkan peningkatan konsisten dari 48,89 poin di tahun 2020 menjadi 54,44 poin pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas sumber daya air. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara cenderung stabil di kisaran tinggi, meskipun sempat turun dari 88,94 poin (2020) menjadi 86,52 poin (2021). Setelah itu, indeks kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 92,84 poin pada 2024, yang menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Kuningan relatif sangat baik. Untuk Indeks Tutupan Lahan, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2020 berada di 57,73 poin, kemudian meningkat tajam menjadi 68,8 poin di 2021. Namun, pada 2022 turun lagi menjadi 57,05 poin sebelum naik kembali menjadi 64,19 poin di 2023, lalu sedikit menurun ke 63,82 poin pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika pemanfaatan lahan yang dapat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi antar indikator, tren IKLH Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan secara umum dalam kurun waktu 2020–2024. Peningkatan terbesar terlihat pada kualitas air dan udara, sedangkan tutupan lahan masih menunjukkan ketidakstabilan.

Tutupan Lahan, luas total lahan bervegetasi di Kabupaten Kuningan mencapai 87.479,4 Ha, atau sekitar 73,48% dari total penggunaan lahan. Lahan ini mencakup hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, perkebunan, serta lahan pertanian. Namun, jika lahan pertanian baik pertanian lahan kering maupun pertanian lahan kering campur Semak dikeluarkan dari perhitungan, maka luas lahan bervegetasi murni tersisa 45.736,1 Ha, yang setara dengan 38,44% dari total lahan. Area ini terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, dan perkebunan, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta fungsi hidrologis. Keberadaan lahan bervegetasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aktivitas pertanian, Kabupaten Kuningan masih memiliki kawasan hijau yang cukup luas untuk mendukung kelestarian lingkungan. Luasan wilayah berdasarkan ketinggian disajikan tabel berikut, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

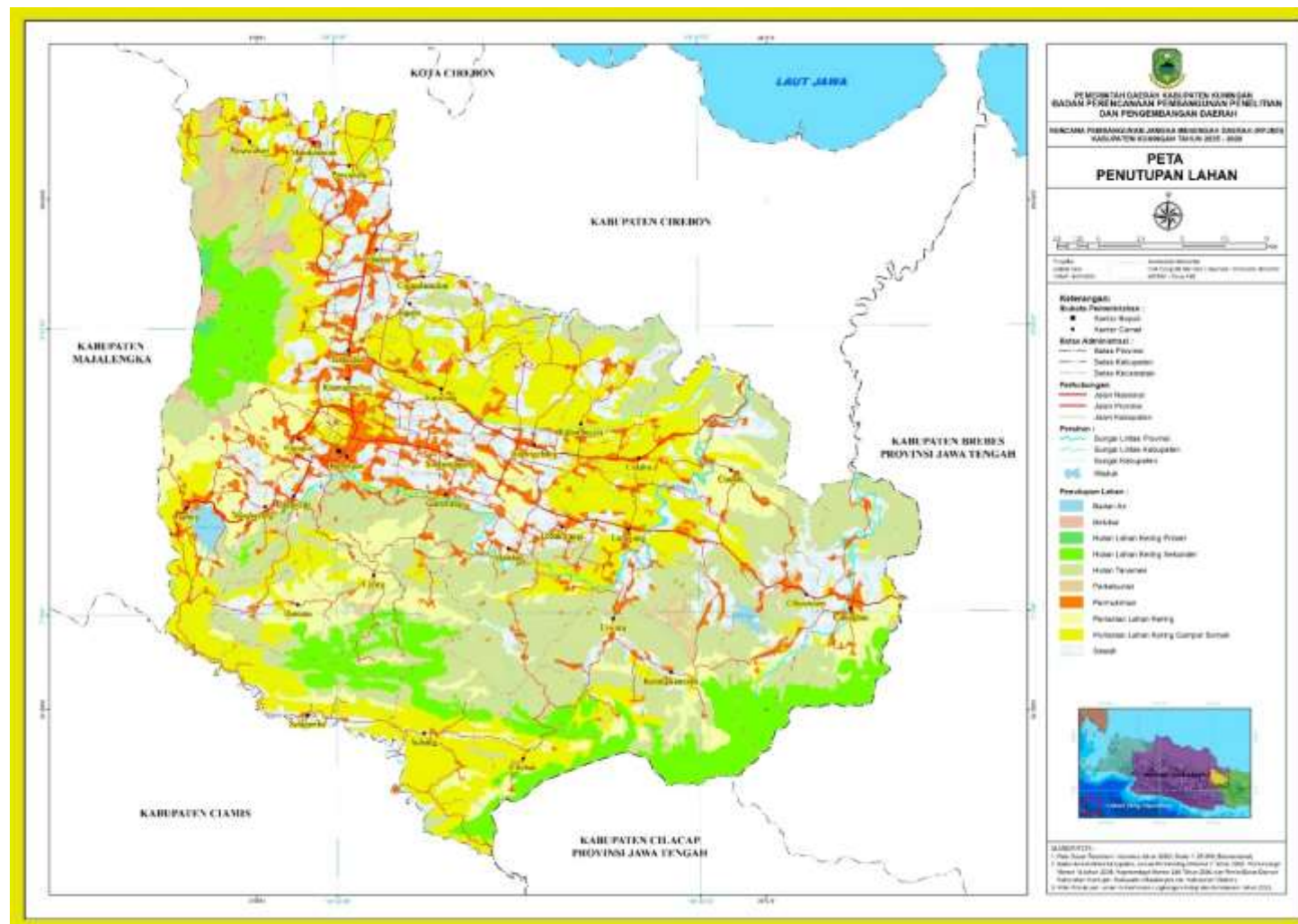
Tabel 2.18 Luasan Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan

No	Ketinggian	Luas (ha)
1	Badan Air	576,5
2	Belukar	1.020,8
3	Hutan Lahan Kering Primer	216,7
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	12.327,5
5	Hutan Tanaman	29.429,6
6	Perkebunan	2.741,5
7	Permukiman	9.453,8
8	Pertanian Lahan Kering	13.987,3
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	27.756,0
10	Sawah	21.572,2

Sumber: Data Penutupan Lahan tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel di atas menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Kuningan mencakup 41.743,3 Ha, atau sekitar 35,04% dari total penggunaan lahan. Lahan ini terdiri dari pertanian lahan kering seluas 13.987,3 Ha dan pertanian lahan kering campur semak yang mencapai 27.756,0 Ha. Selain itu, terdapat sawah dengan luas 21.572,2 Ha, yang menunjukkan bahwa aktivitas pertanian di daerah ini cukup beragam, mencakup tanaman pangan, hortikultura, serta sistem pertanian lahan basah dan kering.

Gambar 2.10 Peta Penutupan Lahan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kabupaten Kuningan terus menunjukkan upaya peningkatan dalam hal ketertiban umum dan penanggulangan bencana selama periode 2020 hingga 2024, Kesiapsiagaan dan upaya pencegahan dalam rangka pengurangan risiko bencana juga mengalami peningkatan signifikan, dengan persentase naik dari 85% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024, menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga menunjukkan perbaikan, meskipun sempat menurun dari 85% pada tahun 2020 menjadi 80% di tahun 2021, namun kembali meningkat hingga 93% pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga ketahanan wilayah secara menyeluruh. Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk juga menunjukkan fluktuasi cukup tajam, dari hanya 2 desa pada 2020–2021, melonjak menjadi 30 desa pada 2022, namun kembali menurun menjadi 18 desa pada tahun 2024.

Tabel 2.19 Kondisi Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana	%	85	92,31	92	100	100
2	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	85	80	81	97	93
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	2	2	30	5	18
4	Indeks Risiko Bencana	Nilai	154	147,14	142,33	133,71	134,40

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2025

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Menurut Data BPBD Kabupaten Kuningan, sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan (76,18 persen) diprediksi memiliki kerawanan bencana alam tingkat menengah.

Tabel 2.20 Luasan Kawasan Rawan Bencana

No	Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Rendah	8.741,42	7,35
2.	Menengah	90.620,14	76,18
3.	Tinggi	19.588,31	16,47

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan hasil inventarisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan dan UPT Pemadam Kebakaran (UPT Damkar), bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan di antaranya yaitu gerakan tanah terutama longsor, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, banjir bandang, banjir geomorfologis, dan cuaca ekstrem. Bencana yang paling sering terjadi yaitu tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Data kejadian bencana secara rinci ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.21 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah Longsor	158	161	228	161	154
2	Gerakan Tanah	15	3	6	4	2
3	Tanah Amblas	2	-	-	-	1
4	Gempa Bumi	2	-	1	-	16
5	Banjir	15	9	28	8	22
6	Abrasi	1		-	-	-
7	Angin Kencang / Puting Beliung	24	26	26	29	37
8	Sambaran Petir	1	2	2	4	1
9	Kebakaran Hutan/Lahan	6	-	3	48	25
10	Kekeringan	1	-	-	18	9
11	Kebakaran Rumah / Gedung	14	8	16	15	29
12	Bangunan Ambruk	21	13	20	10	25
13	Orang Hanyut	-	2	-	2	-
14	Orang Tenggelam	-	2	4	-	5
15	Orang Hilang	-	-	-	2	-
TOTAL		260	226	334	301	326

Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan dan UPT Damkar Kabupaten Kuningan 2025

Dalam lima tahun terakhir, kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kuningan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, tercatat 260 kejadian bencana, yang kemudian menurun menjadi 226 kejadian pada 2021, namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 334 kejadian pada 2022. Meskipun jumlah kejadian sedikit menurun pada 2023 (301 kejadian), angka tersebut kembali naik pada 2024 menjadi 326 kejadian. Beberapa bencana dengan frekuensi tinggi adalah tanah longsor, angin kencang/puting beliung, serta kebakaran rumah atau gedung. Gempa bumi yang relatif jarang terjadi mengalami lonjakan signifikan pada 2024 dengan 16 kejadian. Selain itu, kebakaran hutan/lahan juga mengalami peningkatan tajam pada 2023 sebelum kembali menurun pada 2024.

Kerentanan Gerakan Tanah, merupakan fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat adanya gangguan keseimbangan terhadap tanah yang terjadi, baik terjadi secara alamiah ataupun buatan. Gerakan tanah mencakup berbagai jenis pergerakan massa tanah dan batuan yang dapat terjadi akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Beberapa bentuk gerakan tanah yang umum terjadi antara lain tanah longsor, rayapan tanah, jatuhnya, tanah amblas atau *subsidence*, pergerakan lateral, aliran bahan rombakan atau *debris flow*. Gerakan tanah yang umum terjadi di Kabupaten Kuningan yaitu longsor, rayapan, amblas, dan aliran bahan rombakan. Gerakan tanah biasanya terjadi pada kawasan berbukit ketika musim hujan.

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rentan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

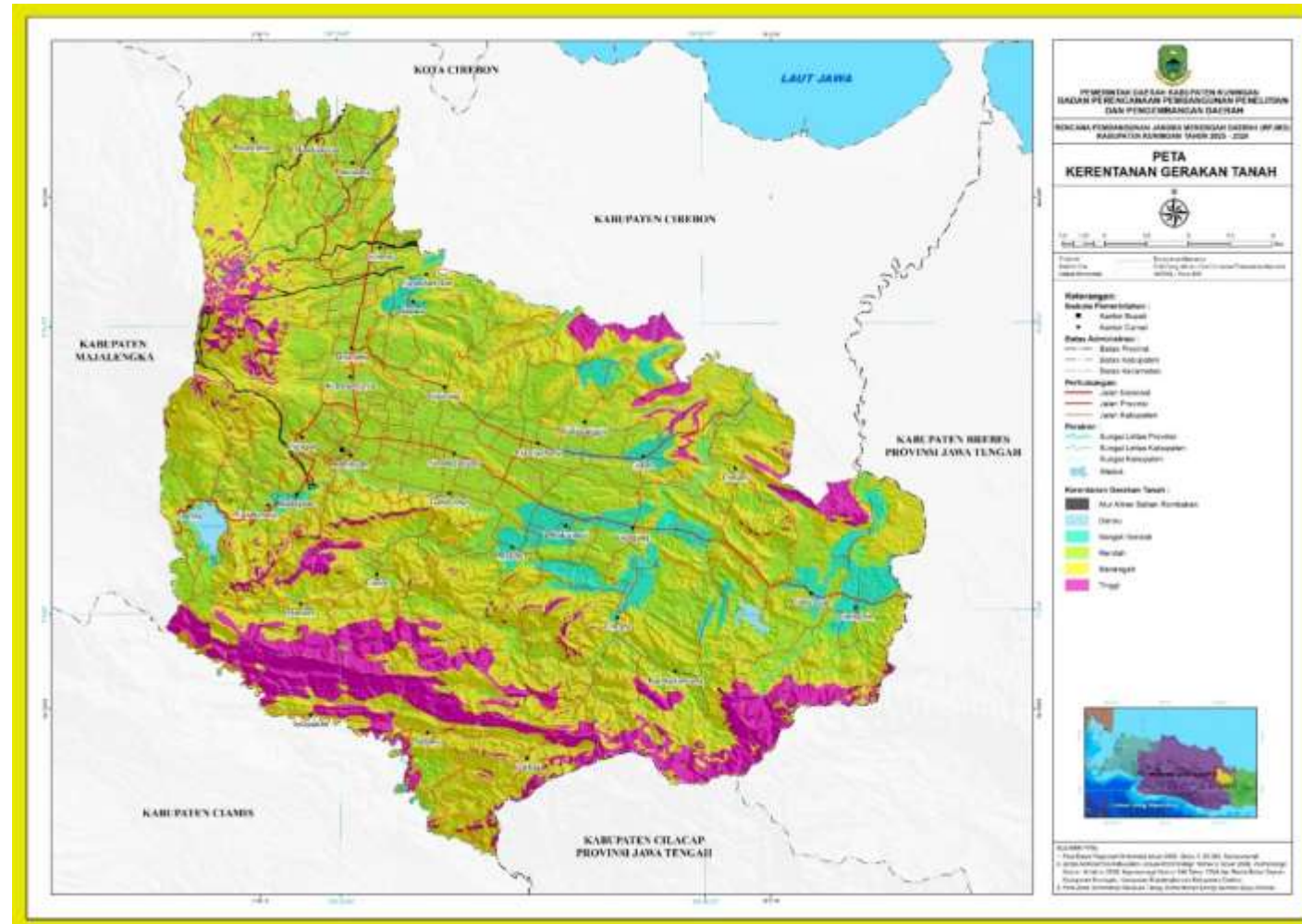
Tabel 2.22 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sangat Rendah	6.843,67	5,73
2.	Rendah	42.138,68	35,29
3.	Menengah	53.368,90	44,69
4.	Tinggi	15.893,92	13,31
5.	Alur Aliran Bahan Rombakan	814,17	0,68
6.	Danau	349,97	0,29
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada kerentanan gerakan tanah rendah hingga menengah. Kawasan dengan kerentanan tinggi umumnya berada di wilayah selatan yang kondisi topografinya berbukit.

Gambar 2.12 Peta Kerentanan Gerakan Tanah



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Kawasan Rawan Letusan Gunung Api, Gunung Ciremai yang terletak di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka merupakan gunung api strato (stratovulkan) yang masih aktif hingga saat ini. Meskipun aktivitas vulkaniknya relatif jarang dibandingkan gunung api lainnya di Indonesia, Gunung Ciremai memiliki riwayat letusan yang tercatat dalam sejarah vulkanologi.

Letusan terakhir Gunung Ciremai terjadi pada tahun 1951 dan tergolong sebagai letusan freatik. Letusan jenis ini terjadi akibat interaksi air dengan panas magma di bawah permukaan, menghasilkan semburan uap panas, abu vulkanik, dan material ringan lainnya. Letusan tersebut berskala kecil hingga sedang, tidak menimbulkan kerusakan signifikan, tetapi cukup untuk mengingatkan masyarakat akan potensi bahaya dari aktivitas vulkanik gunung ini. Selain itu, beberapa letusan kecil lainnya diduga terjadi pada abad ke-17, menghasilkan aliran lava dan material piroklastik yang membentuk sebagian lanskap gunung hingga saat ini.

Karakter letusan Gunung Ciremai umumnya bersifat eksplosif, meskipun dalam skala yang terbatas. Potensi bahaya dari letusan ini meliputi lontaran material vulkanik, sebaran abu yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, hingga aliran piroklastik pada letusan besar. Selain itu, material vulkanik yang tertinggal di lereng gunung berisiko terbawa air hujan, memicu lahar yang berbahaya bagi permukiman di sekitar gunung.

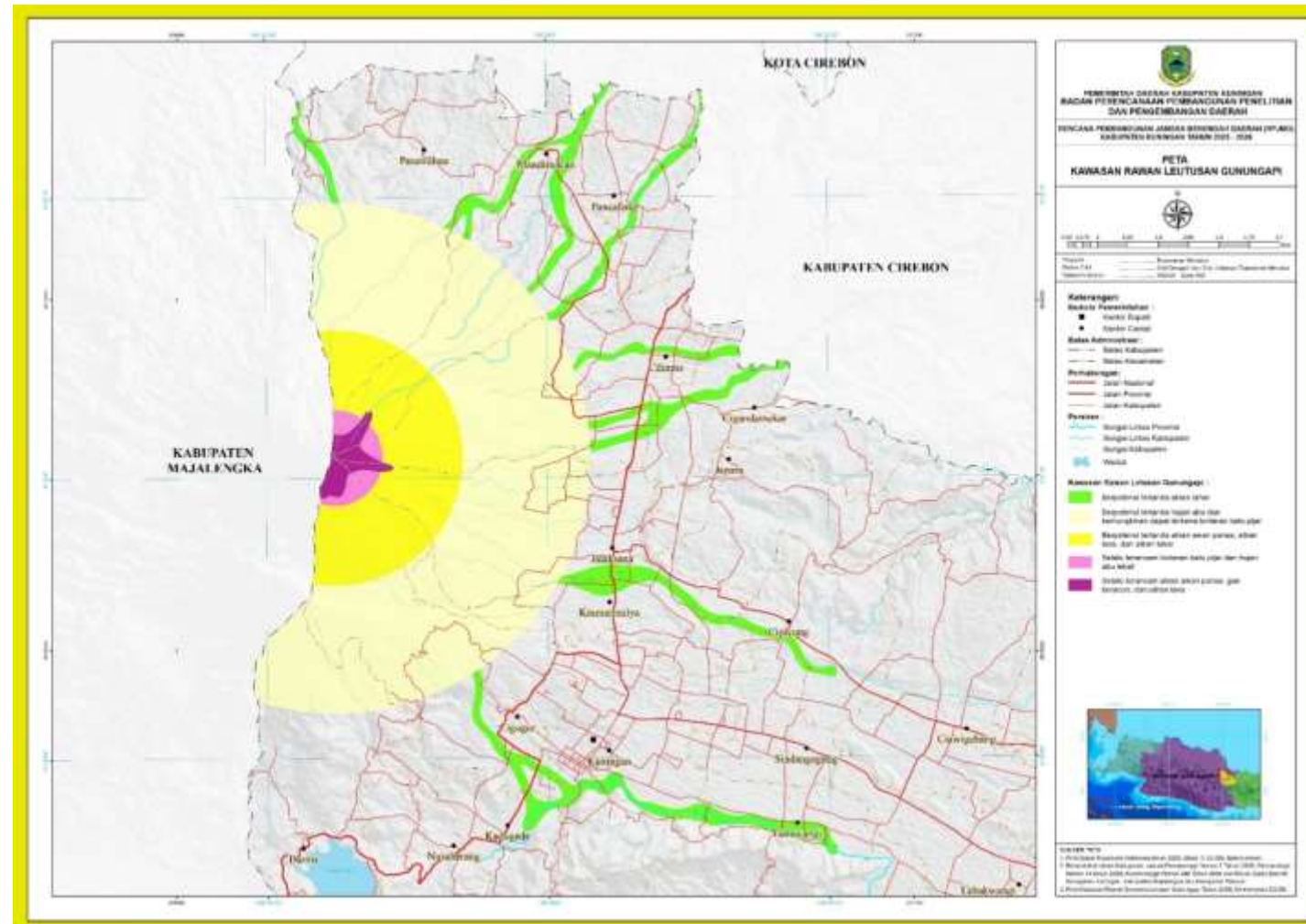
Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar	4.455,67	23,95%
2.	Berpotensi terlanda aliran lahar	2.514,23	13,51%
3.	Selalu terancam aliran awan panas, gas beracun, dan aliran lava	231,80	1,25%
4.	Selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat	417,43	2,24%
5.	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar	2.375,23	12,77%
6.	Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	8.609,59	46,28%
Jumlah		18.603,95	100%

Sumber: Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi.

Gambar 2.13 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Kawasan Rawan Banjir Bandang, Kabupaten Kuningan, dengan karakteristik geografis yang mencakup daerah pegunungan/perbukitan, lembah, dan aliran sungai, memiliki potensi terjadinya banjir bandang, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Topografi Kuningan yang berbukit dan curam di beberapa wilayah, terutama di kawasan hulu sungai, dapat memicu aliran air yang deras saat hujan lebat, meningkatkan risiko banjir bandang di daerah hilir. Selain itu, berkumpulnya air di sungai besar seperti Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok berpotensi menyebabkan terjadinya banjir geomorfologis di beberapa wilayah seperti Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung. Pada kondisi tersebut, meskipun tidak terjadi banjir bandang, beberapa permukiman dapat terendam oleh luapan air sungai, seperti yang pernah terjadi di Desa Datar Kecamatan Cidahu dan Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin.

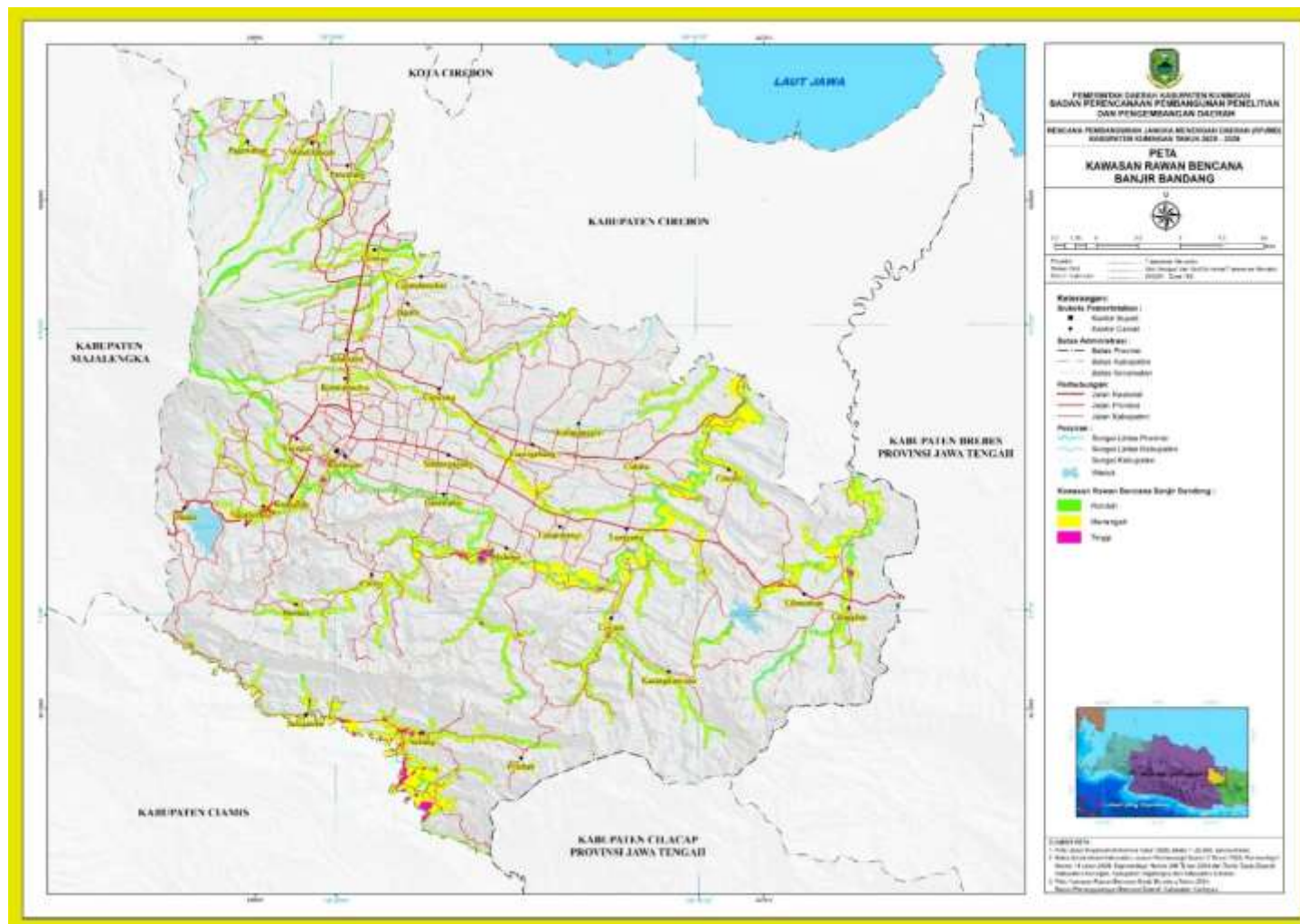
Menurut BPBD Kabupaten Kuningan, kawasan rawan banjir memiliki luas sekitar 14.140,59 Ha. Dari luas tersebut, sebagian besar berada pada tingkat kerawanan menengah (59,53 persen) dan hanya sebagian kecil berada pada tingkat kerawanan tinggi (2,72 persen).

Tabel 2.24 Luasan Kawasan Rawan Banjir Bandang

No.	Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Rendah	5.337,86	37,75
2.	Menengah	8.417,72	59,53
3.	Tinggi	385,02	2,72

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2024

Gambar 2.14 Peta Kawasan Rawan Banjir Bandang



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Gempa Bumi, aktivitas gempa tektonik di Kabupaten Kuningan sering dikaitkan dengan keberadaan Sesar Baribis. Sesar Baribis khususnya segmen Ciremai memiliki karakteristik sebagai sesar geser aktif dengan potensi pergerakan yang dapat menyebabkan gempa berkekuatan sedang hingga besar. Beberapa peristiwa gempa bumi telah terjadi di Kabupaten Kuningan, seperti gempa berkekuatan 4,1 magnitudo pada 25 Juli 2024 yang menyebabkan kerusakan bangunan. Selain itu, gempa berkekuatan 3,8 magnitudo pada 22 Desember 2022 juga tercatat dipicu oleh aktivitas Sesar Baribis. Selain sesar baribis, sesar yang teridentifikasi berada di Kabupaten Kuningan yaitu Sesar Cibingbin. Sesar ini memiliki panjang sekitar 4,52 kilometer dan membentang dari barat laut ke tenggara, melewati Desa Ciangir, Sindangjawa, dan Cipondok. Dengan kondisi geologis yang rentan terhadap gempa bumi, penting bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk meningkatkan mitigasi bencana guna mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Cuaca Ekstrem, fenomena cuaca ekstrem, khususnya angin kencang, kerap terjadi di daerah tropis, termasuk Kabupaten Kuningan, terutama saat peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh hembusan angin monsun yang datang dari arah Australia. Secara umum angin kencang menerjang wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan daerah-daerah dengan vegetasi kurang, serta dipengaruhi pula oleh letak matahari dan kondisi topografi. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi). Adanya fenomena angin kencang ini berpotensi mengakibatkan berbagai kerugian yang cukup besar seperti kerugian fisik maupun ekonomi sehingga diperlukan upaya dalam penanggulangannya.

Klimatologi, Kabupaten Kuningan memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2024, rata-rata suhu udara tahunan mencapai $28,1^{\circ}\text{C}$ atau naik $0,1^{\circ}\text{C}$ dari tahun 2023, suhu minimum rata-rata tahunan sebesar $24,7^{\circ}\text{C}$ atau naik $0,6^{\circ}\text{C}$ dari tahun 2023, sedangkan suhu maksimum rata-rata tahunan mencapai $33,2^{\circ}\text{C}$ atau turun $0,7^{\circ}\text{C}$ dari tahun 2023, dengan kelembaban rata-rata 77,75 persen atau turun 0,6 persen dari tahun 2023, dan kecepatan angin rata-rata 27,5 knot (Kuningan Dalam Angka tahun 2025).

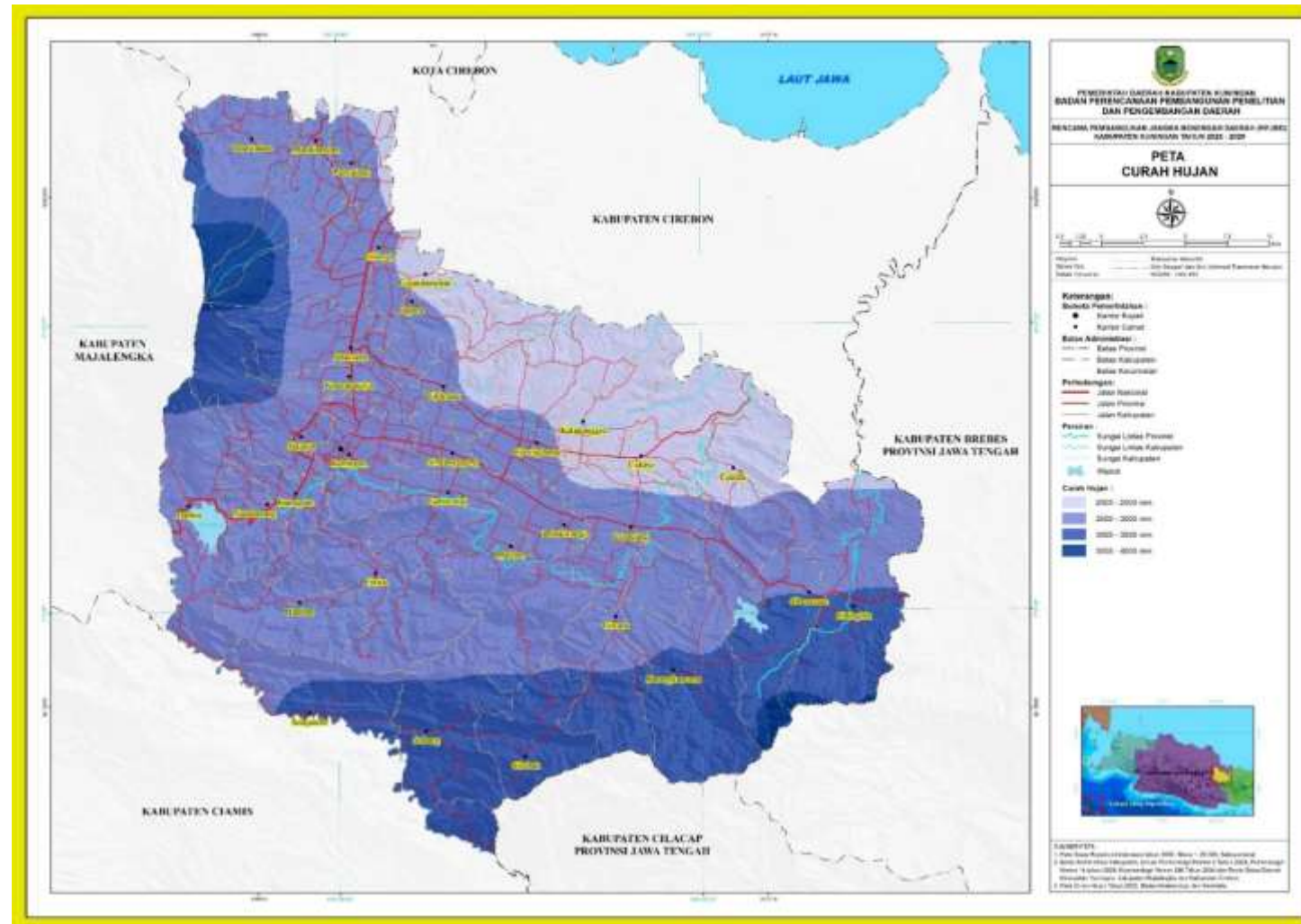
Tabel 2.25 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2000 - 2500 mm	18.254,9	15,33
2	2500 - 3000 mm	70.310,2	59,04
3	3000 - 3500 mm	27.779,1	23,33
4	3500 - 4000 mm	2.736,4	2,30
Jumlah		119.080,6	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.25, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan antara 2.000 sampai dengan 4.000 mm/tahun di mana sebagian besar wilayahnya (58,91 persen) memiliki curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun.

Gambar 2.15 Peta Curah Hujan

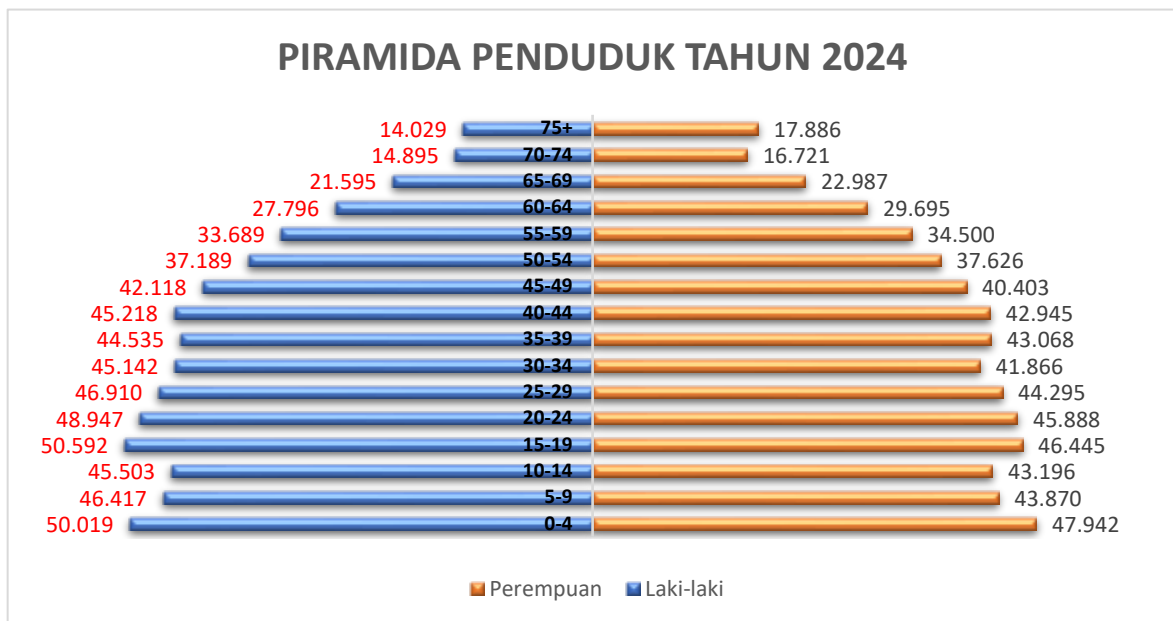


Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

G. Gambaran Demografi

Kondisi demografi pada tahun 2024 berdasarkan data Kuningan Dalam Angka 2025 (BPS), jumlah penduduk mencapai 1.213.927 jiwa (Laki-laki: 614.594 jiwa; perempuan: 593.095 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tercatat 1.016,61 jiwa per km². Komposisi penduduk menurut umur tergolong ke dalam piramida *expansive* atau piramida penduduk muda, sesuai dengan gambar 2.16 dan tabel 2.22 di bawah ini.

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Tahun 2024



Tabel 2.26 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Demografi						
1.	Jumlah Penduduk	1.167.686	1.180.391	1.196.017	1.201.764	1.213.927
	a. Laki-laki	592.009	598.254	602.415	608.669	614.594
	b. Perempuan	575.677	582.137	586.596	593.095	593.095
	c. Rasio	102,84	102,77	102,7	102,63	102,55
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	978	989	995,74	1.006,42	1.016,61
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,17	1,09	1,04	1,05	1,04
4.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur (jiwa)					
	a. 0-14	277.965	276.433	275.713	276.989	276.947

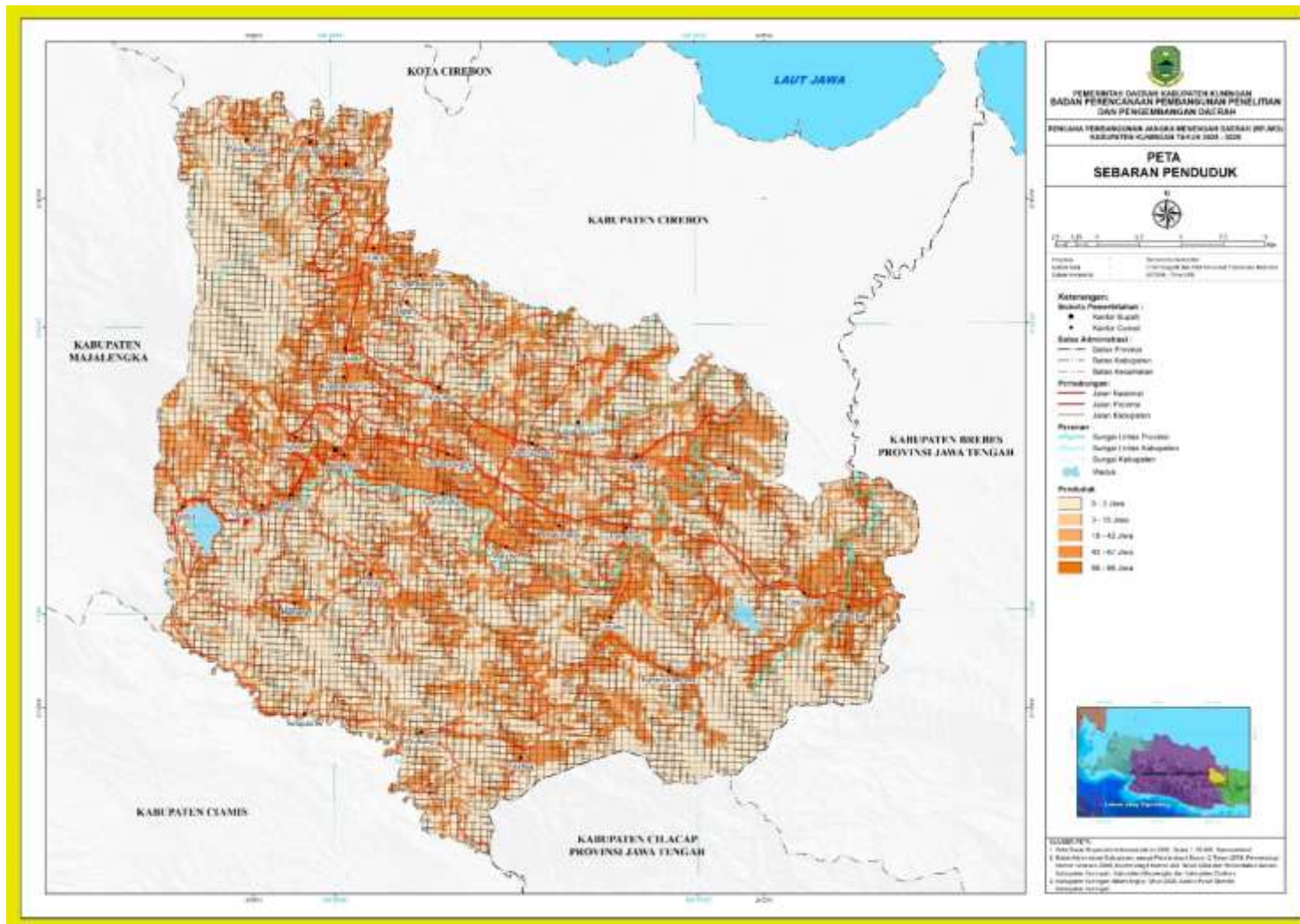
Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	b. 15-64	798.083	806.294	816.115	821.316	828.867
	c. 65+	91.638	97.664	74.347	103.459	108.113
5.	Angka Beban Tanggungan (ABT)	46,31	46,40	46,55	46,32	46,46

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Jumlah penduduk pada periode tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat 1.167.686 jiwa, kemudian naik menjadi 1.213.927 jiwa pada 2024. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 1,04–1,17 persen, yang menunjukkan laju pertumbuhan relatif stabil. Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki konsisten lebih banyak dibanding perempuan, dengan rasio jenis kelamin berada pada kisaran 102,55–102,84. Artinya, terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Jika ditinjau dari kepadatan penduduk, terjadi peningkatan dari 978 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 1.016,61 jiwa/km² pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan tekanan terhadap lahan dan potensi meningkatnya kebutuhan layanan publik seiring pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia 0–14 tahun relatif stabil di kisaran 276 ribu jiwa, yang menandakan jumlah anak-anak cenderung konstan. Sementara itu, kelompok usia 15–64 tahun (usia produktif) meningkat dari 798.083 jiwa (2020) menjadi 828.867 jiwa (2024). Kenaikan ini menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas juga meningkat cukup signifikan, dari 91.638 jiwa (2020) menjadi 108.113 jiwa (2024). Hal ini menandakan adanya tren penuaan penduduk yang perlu diantisipasi dengan kebijakan kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara itu, Angka Beban Tanggungan (ABT) berada di kisaran 46,31–46,55, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk nonproduktif (usia 0–14 tahun dan 65+). Angka ini relatif stabil sepanjang periode, sehingga beban demografi tidak mengalami perubahan signifikan.

Gambar 2.17 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Perkembangan PDRB tahun 2020-2024, pemerataan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)						
a. Nilai PDRB						
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Miliar Rupiah	25.618,87	26.919,10	29.519,83	32.544,89	35.535,77
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Miliar Rupiah	16.882,76	17.483,02	18.450,34	19.418,73	20.507,27
b. PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	21,996	22,891	24,827,21	27,080,93	29.273,40

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2025

Adapun untuk melihat nilai Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan per lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.28 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.302,21	6.43 5,08	7.026,81	7.723,37	8.253,92
B	Pertambangan dan Penggalan	312,73	369,59	375,77	407,76	419,64
C	Industri Pengolahan	557,69	610,72	663,71	719,05	805,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,38	25,49	27,32	28,79	27,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,32	28,56	30,01	31,11	36,69

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
F	Konstruksi	2.090,20	2.342,69	2.533,80	2.750,90	2.868,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.586,95	3.673,81	4.106,71	4.424,73	4.773,35
H	Transportasi dan Pergudangan	3.591,64	3.673,81	4.353,13	5.194,09	6.276,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466,23	484,72	568,47	641,89	692,77
J	Informasi dan Komunikasi	1.094,15	1.154,70	1.211,23	1.306,64	1.483,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	1.414,09	1.557,61	1.667,16	1.789,77	1.913,27
L	Real Estat	655,42	732,08	798,74	865,88	913,01
M,N	Jasa Perusahaan	112,74	123,82	145,33	161,89	156,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	940,97	932,41	919,34	958,83	1.045,15
P	Jasa Pendidikan	3.182,13	3.374,44	3.638,16	3.924,13	4.127,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401,02	440,21	473,30	514,21	521,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	842,00	847,60	980,84	1.101,86	1.223,00
	Produk Domestik Regional Bruto	25.618,87	26.929,10	29.519,83	32.544,89	35.535,77

Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sd 2024

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.29 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.591,62	3.675,49	3.812,90	3.894,39	3.644,68
B	Pertambangan dan Penggalian	217,43	245,14	243,51	245,97	262,35
C	Industri Pengolahan	416,25	430,15	453,98	475,00	502,71

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,79	16,77	17,36	17,90	19,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,32	17,36	17,85	18,36	20,81
F	Konstruksi	1.433,51	1.534,20	1.579,41	1.659,77	1.709,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.655,96	2.751,05	2.862,89	2.982,16	2.991,73
H	Transportasi dan Pergudangan	2.287,91	2.293,42	2.580,10	2.837,97	3.403,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	307,84	310,70	349,94	374,25	395,07
J	Informasi dan Komunikasi	1.142,56	1.223,60	1.304,80	1.402,17	1.655,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	859,97	903,64	894,50	936,16	974,68
L	Real Estat	554,89	618,42	653,07	695,21	770,49
M,N	Jasa Perusahaan	75,83	82,81	92,48	98,86	91,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	540,31	531,67	525,34	538,67	566,57
P	Jasa Pendidikan	1.843,53	1.896,95	2.020,36	2.130,30	2.280,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	292,77	314,78	333,66	350,25	372,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	631,27	636,86	708,17	761,35	844,38
	Produk Domestik Regional Bruto	16.882,76	17.483,02	18.450,32	19.418,73	20.507,27

Sumber Data : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sd 2024

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor unggulan. Dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata

dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor tersebut, di antaranya adalah:

- a. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang terbesar perekonomian, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - 2) Optimalisasi lahan tadah hujan;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
 - 4) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
 - 5) Perlindungan terhadap kegagalan panen; dan
 - 6) Diversifikasi usaha pertanian.
- b. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.
- c. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.
- d. Peningkatan promosi pariwisata.

Laju Pertumbuhan Ekonomi, hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kabupaten konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

Tabel 2.30 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-2,42-1,51	1,75-2,65	1,90-3,00	2,00-3,45	0,19-7,20
Capaian	0,11	3,56	5,53	5,25	5,61

Sumber : RPJMD 2018-2023, RPD 2024-2026 dan BPS Kab. Kuningan, 2025

Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2022 sebesar 5,53, namun di tahun 2023 sedikit terkoreksi menjadi 5,25 dan di tahun 2024 naik menjadi 5,61, dari data tersebut sampai tahun 2024 capaian LPE masih di atas

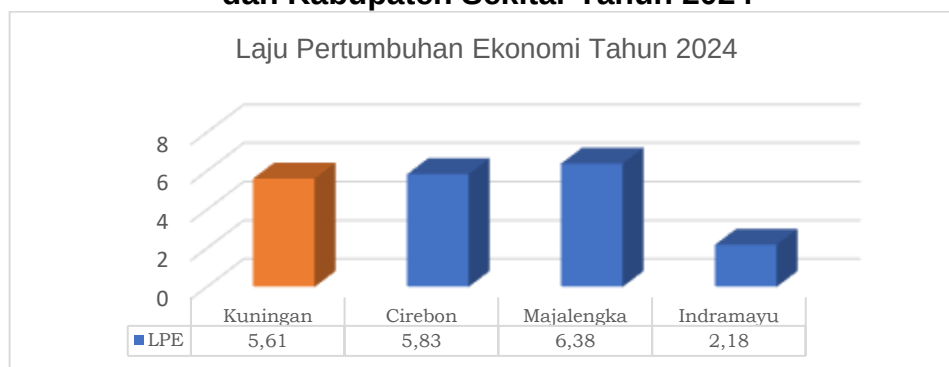
Provinsi Jawa Barat (4,95) dan Nasional (5,03). Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten tetangga berada di atas Kabupaten Indramayu (2,18), di bawah Kabupaten Cirebon (5,83) dan Kabupaten Majalengka (6,38).

Tabel 2.31 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Kuningan	0,11	3,56	5,53	5,25	5,61
LPE Jabar	(-2,52)	3,74	5,45	5,00	4,95
LPE Nasional	(-2,07)	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2025

Gambar 2.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber : data olahan Bappeda, Kab. Kuningan, 2025

Indeks Gini Ratio, merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 2.32. Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	< 0,38	< 0,38	< 0,38	< 0,38	0,336
Capaian	0,361	0,349	0,345	0,351	0,372

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2024 berada pada level menengah dengan besaran 0,372, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 0,351 poin, kondisi ini masih dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,421 dan Nasional sebesar 0,381.

Tabel 2.33 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini Ratio Kuningan	0,361	0,349	0,345	0,351	0,372
Indeks Gini Ratio Jabar	0,398	0,406	0,417	0,425	0,421
Indeks Gini Ratio Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2025

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber : data olahan Bappeda, Kab. Kuningan, 2025

Kabupaten Kuningan berada pada level menengah dengan besaran 0,372 yang masih cukup jauh di bawah angka Jawa Barat yang mencapai 0,421. Kondisi tersebut menggambarkan pendapatan masyarakat Kuningan masih relatif lebih merata dibandingkan Jawa Barat secara umum. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kuningan cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil PPLS, di mana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit di atas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin).

Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (*redistribution with growth*). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (*agroindustri*) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian di Kabupaten Kuningan. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat di wilayah Kuningan selatan yang masih banyak terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena minimnya investasi di wilayah tersebut. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan selalu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2024 indeks gini ratio Kabupaten Kuningan sebesar 0,372, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 0,421 dan 0,381. Selain itu, perbandingan indeks gini ratio Kabupaten Kuningan sebesar 0,372 dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu masing-masing sebesar 0,379, 0,354, dan 0,306.

Kemiskinan, merupakan salah satu isu penting nasional. Kemajuan sosial dan ekonomi saat ini masih menyisakan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun regional salah satunya terjadi di Kabupaten Kuningan. Adapun data dari kemiskinan Kabupaten Kuningan dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 2.34 Kemiskinan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	352,358	358,069	371.665	402.767	420.867
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	139,20	143,315	140,25	133,88	131,83
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Meskipun garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, namun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2022 sebesar 12,76 persen, lalu mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 sebesar 11,88 persen.

Dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 16.040 jiwa, atau dari semula 123.160 jiwa menjadi 139.200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tahun 2020 dan menjadi 13,10 persen pada tahun 2021.

Memasuki tahun 2024, walau masih sangat terasa dampak kenaikan harga barang di Kabupaten Kuningan namun pergerakan perekonomian membuat jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan. Menurut catatan BPS, pada tahun 2024 terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2 ribu jiwa lebih, sehingga persentase penduduk yang berada di bawah GK menjadi sebesar 11,88 persen.

Persentase Penduduk Miskin selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Kuningan sebesar 11,88 persen, sedangkan di provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 7,46 persen dan 9,03 persen.

Tabel 2.35 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kemiskinan Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
Persentase Kemiskinan Jabar	7,88	8,40	8,06	7,62	7,46
Persentase Kemiskinan Nasional	9,78	10,14	9,57	9,36	9,03

Sumber : BPS, 2025

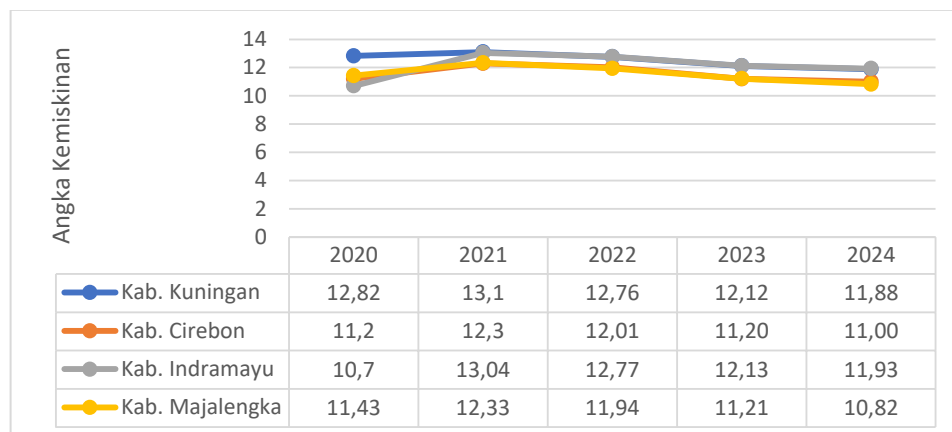
Pasca pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah berusaha keras untuk membangkitkan aspek ekonomi dan menjaga agar inflasi dapat tetap terkendali. Upaya tersebut cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, karakteristik pergerakan angka kemiskinannya relatif sama sejak tahun 2020. Ketika

yang satu naik, yang lain juga naik dan ketika yang satu turun, yang lain juga turun dengan besaran yang bervariasi. Hal ini kemungkinan karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama terutama dalam hal masih dominannya sektor pertanian sehingga masih banyak warganya yang bekerja di sektor pertanian.

Masyarakat petani cenderung miskin karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun struktural. Salah satu penyebab utamanya adalah kepemilikan lahan yang terbatas. Banyak petani hanya memiliki lahan kecil (kurang dari 0,5 Ha), bahkan sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang rendah. Selain itu, harga komoditas pertanian yang tidak stabil membuat pendapatan petani sering tidak menentu, terutama karena mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap tengkulak atau pasar. Di sisi lain, biaya produksi yang tinggi akibat mahalnya pupuk, benih, dan pestisida semakin memperparah kondisi mereka, sementara keuntungan yang diperoleh sering kali sangat kecil.

Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sulitnya akses terhadap modal menyebabkan petani terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang. Selain itu, keterbatasan teknologi dan minimnya inovasi dalam pertanian membuat produktivitas mereka tetap rendah, karena banyak yang masih menggunakan metode tradisional. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim dan risiko bencana alam seperti banjir atau kekeringan yang dapat merusak hasil panen. Hal ini semakin diperburuk dengan akses pasar yang tidak menguntungkan, di mana petani harus melewati rantai distribusi yang panjang, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan mereka sendiri.

Gambar 2.20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem diperlukan keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk sektor swasta dan masyarakat umum. Kabupaten Kuningan ditunjuk sebagai lokasi percontohan program linieritas pengentasan kemiskinan oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI). Strategi kebijakan sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, meliputi :

- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka, merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Adapun data tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 9,49 persen, sedangkan pada tahun 2024 TPT mengalami penurunan sebesar 1,71 persen dari 9,49 persen menjadi 7,78 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 7,78 persen dari penduduk usia angkatan kerja yang menganggur/tidak bekerja.

Meskipun angka pengangguran terus menurun, tantangan masih ada, terutama

dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Kabupaten Kuningan memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat usia produktif yang belum terserap ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi dalam pendidikan vokasi, serta pengembangan sektor industri yang lebih luas masih diperlukan untuk memastikan penurunan angka pengangguran yang berkelanjutan.

Tingkat pengangguran terbuka adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,81 persen. Sedangkan untuk tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan menjadi 7,78 persen, namun hal ini masih berada di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sedangkan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 7,78 persen, Kabupaten Cirebon sebesar 6,74 persen, Kabupaten Majalengka sebesar 4,01 persen dan Kabupaten Indramayu sebesar 6,25 persen.

Tabel 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kuningan, Provinsi dan Nasional

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

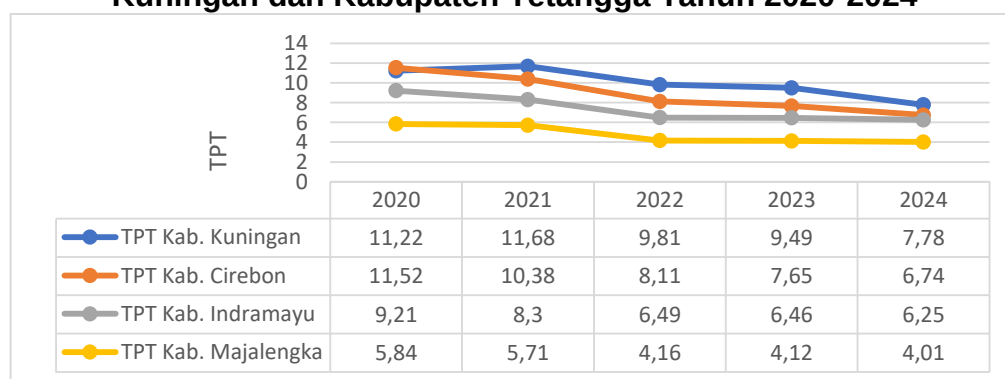
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, hanya Kabupaten Kuningan yang mengalami kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perantau yang bekerja di luar Kabupaten Kuningan, terpaksa kembali ke daerah dan menjadi pengangguran karena terjadinya pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berangsur melandai Tingkat Pengangguran Terbuka di masing-masing daerah terus mengalami penurunan hingga tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan yang lebih tinggi

dibandingkan kabupaten tetangga kemungkinan disebabkan oleh semakin berkembangnya investasi manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Semakin banyak investasi berarti semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, dan semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap.

Gambar 2.21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024



Sumber : Bappeda Kab. Kuningan, 2025

B. Kesehatan Untuk Semua

Persentase Balita Stunting mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, prevalensi balita stunting tercatat sebesar 7,38%, lalu menurun menjadi 6,21% pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,6% di tahun 2022, dan melonjak lebih tinggi menjadi 7,81% pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa setelah sempat mengalami perbaikan, masalah stunting kembali meningkat dan memerlukan perhatian lebih serius, terutama dalam hal pemenuhan gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan dasar, serta edukasi keluarga.

Tabel 2.38 Persentase Balita Stunting Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Balita Stunting (persen)	7,38	6,21	6,6	7,81	7,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

Selain itu kesehatan untuk semua yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Secara rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Indikator Umum Kesejahteraan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
UHH	Tahun	73,28	73,59	73,37	73,78	73,45	74,03	73,53	74,91	74,60	75,22
Angka Kematian Ibu	kasus per 100 ribu orang	22	27	22	42	21	24	21	21	23	13
Angka Kematian Bayi	kasus per 1000	4,05	4,14	4,04	2,95	4,03	5,13	4,02	9,25	6,32	8,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,1	12,22	12,14	12,23	12,19	12,24	12,23	12,26	12,68	12,27
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,41	7,38	7,46	7,57	7,52	7,88	7,6	7,89	8,00	7,90
Pengeluaran	000 Rp	8.967-9.003	9.459	9.042-9.092	9.409	9.116-9.181	9.620	9.190-9.271	10.011	9.933	10.418
Indeks Kesehatan	Poin	81,97	82,45	82,23	82,74	82,45	83,12	82,67	84,48	83,78-84,24	82,74*
Indeks HLS	Poin	67,22	67,89	67,56	67,56	67,78	68,00	68,04	68,11	70,47	70,47
Indeks RLS	Poin	49,40	50,47	50,24	50,24	50,47	52,53	50,61	52,60	53,32	53,32
Indeks Pendidikan	Poin	58,31	59,18	60,41	59,97	60,58	60,27	60,77	60,36	61,68-61,96	61,89*
Indeks Daya Beli	Poin	66,12-66,39	68,44	66,22-66,59	68,27	66,23-66,70	68,95	66,33-66,91	70,17	69,72-70,24	n/a
IPM	Poin	68,39	69,38	69,26	69,71	69,45	70,16	69,66	70,99	70,86-71,40	71,56

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas, Perkembangan angka harapan hidup penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seiring perbaikan pola hidup dan peningkatan sarana pendukung kesehatan bagi penduduk. Menurut angka UHH tahun 2024, sejak umur nol tahun penduduk memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 75,22 tahun, untuk capaian angka kematian ibu dan kematian bayi cenderung fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir.

C. Pendidikan berkualitas yang merata

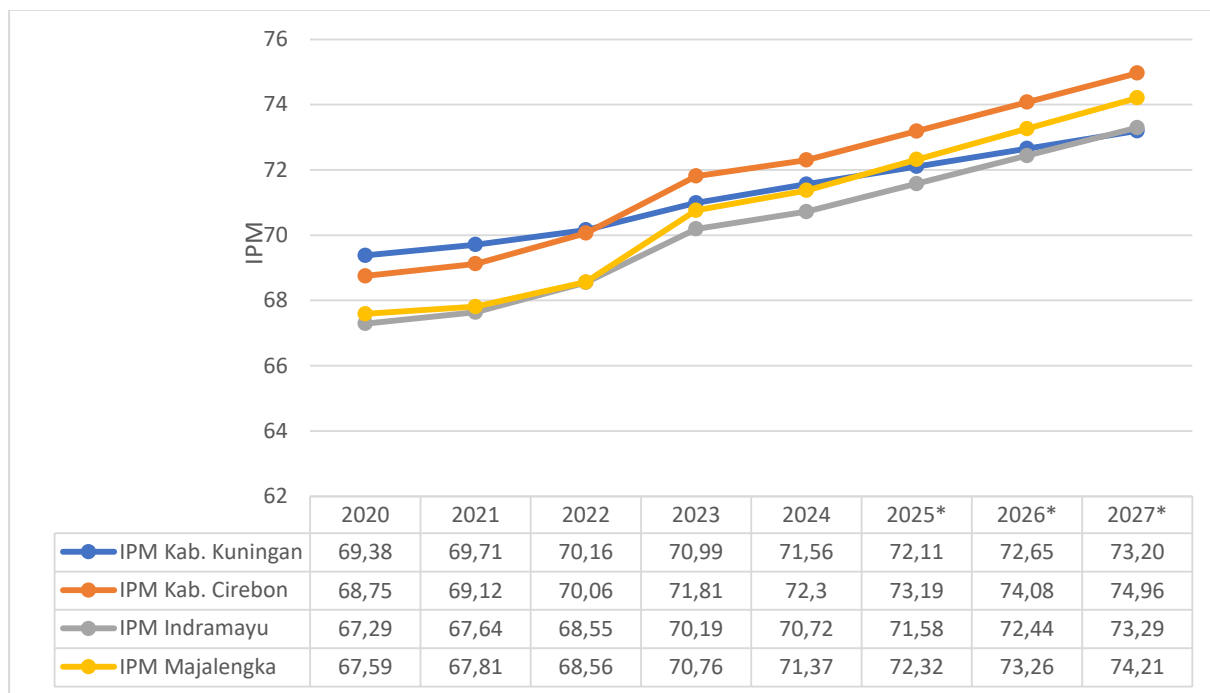
Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan meningkat hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1 sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke atas yang masih bersekolah pada pendidikan formal maupun non formal.

Semakin besar mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan semakin tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai.

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1 SMP atau paling tinggi kelas 2 SMP. Kemampuan penduduk dalam capaian rata-rata lama sekolah masih berada pada tingkatan pendidikan SMP ke bawah menunjukkan kualitas penduduk dilihat dari aspek pendidikan masih relatif rendah, dengan capaian hanya sampai kelas 1 atau 2 SMP. Pengeluaran per kapita mencapai 9.620 juta rupiah pada tahun 2022, 10.011 juta rupiah pada tahun 2023 dan 10.418 juta rupiah pada tahun 2024. Pengeluaran per kapita cenderung meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Sisi pengeluaran memberikan dampak kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada komoditas-komoditas yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk.

Meskipun IPM terus mengalami peningkatan, akan tetapi lajunya relatif lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. IPM Kabupaten Kuningan pernah diatas ketiganya di tahun 2020, namun Kabupaten Cirebon mengejar dan lebih unggul di tahun 2023 dan diperkirakan Kabupaten Majalengka akan mendahului di tahun 2025, lalu Kabupaten Indramayu di tahun 2027. Hal ini kemungkinan disebabkan terutama oleh adanya peningkatan daya beli masyarakat. Salah satu faktor pengungkitnya yaitu meningkatnya investasi di bidang industri/manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Keberadaan industri manufaktur dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya upah yang stabil dan lebih tinggi dibandingkan sektor informal.

**Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022-2024**



Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan, 2025

* Data proyeksi

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) adalah pendekatan sistematis untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan untuk lebih siap menghadapi, mengatasi, dan beradaptasi dengan berbagai guncangan. Ini adalah evolusi dari perlindungan sosial tradisional yang lebih berfokus pada risiko siklus hidup (misalnya, kemiskinan kronis, usia tua, disabilitas), dengan menambahkan kemampuan untuk merespons guncangan berskala besar dan tak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi.

Perlindungan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti bencana alam, krisis ekonomi, pandemi, serta dampak perubahan iklim, diperlukan sistem perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif dan antisipatif.

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) hadir sebagai pendekatan integratif yang menghubungkan program bantuan sosial, jaminan sosial, dan respons kebencanaan untuk membangun ketangguhan masyarakat. Dalam kerangka PSA, jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat, khususnya pekerja sektor formal dan

informal, serta kelompok rentan.

Program jaminan sosial tenaga kerja, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, memberikan perlindungan atas risiko ekonomi yang dihadapi pekerja. Sementara itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memastikan akses layanan kesehatan yang setara bagi seluruh penduduk, termasuk pada masa krisis.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju adalah dua konsep yang saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Keduanya sering kali diangkat sebagai visi dalam pembangunan jangka panjang suatu bangsa. Kondisi ini dapat ditunjukkan oleh indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.40 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IKUB	67,46	72,39	78,27	76,02	76,49

Sumber: Kesbangpol, 2025

F. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Pembangunan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif dapat ditunjukkan dengan ketercapaian pembangunan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Selama kurun waktu lima tahun ke belakang pencapaian IDG daerah menunjukkan posisi di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun pencapaian IPG pada kurun waktu yang sama masih menunjukkan posisi daerah di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pada indikator yang berkontribusi terhadap pencapaian IPG dan IDG, selain dipengaruhi faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadap sumber daya pembangunan, juga karena belenggu *stereotype* bahwa perempuan harus berada di ranah publik, tidak

dapat dielakkan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDG yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuknya.

Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun (IDG) dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IPG	Kabupaten Kuningan	86,81	86,97	87,17	87,31	88
	Jawa Barat	89,20	89,36	89,80	90,23	90,17
IDG	Kabupaten Kuningan	70,54	73,04	73,67	73,47	78,86
	Jawa Barat	70,24	70,62	71,22	71,74	72,76

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

2.1.1 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), pada tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyusun buku Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024. Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD ini distandardisasi dengan rumus minmax sehingga didapat skor 0-5. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode perhitungan yang sama. Skor IDSD Kabupaten Kuningan menurut pilar-pilarnya sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42 Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Pilar	Komponen	Indikator	Skor Indeks
Pilar 1 : Institusi	Keamanan	Kejahatan Terorganisir	4,91
		Tingkat Pembunuhan (Rate)	4,92
	Checks and balances	Transparansi Anggaran	5,00
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00
		Kinerja Instansi Pemerintah	5,00
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5,00
	Transparansi	Upaya Pencegahan Korupsi	4,67
		Hak Atas Kepemilikan	4,41
		Kualitas Administrasi Pertanahan	4,29
	Orientasi Masa Depan Pemerintah	Tingkat pengelolaan lingkungan	5,00
Indeks Pilar Institusi			4,82
Pilar 2: Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi (Darat)	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan	5,00
		Kualitas Infrastruktur Jalan	5,00
	Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	Layanan Infrastruktur Kereta Api	0,00
	Infrastruktur Transportasi (Udara)	Layanan Infrastruktur Bandara	0,25
	Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	Layanan Infrastruktur Pelabuhan	2,40
	Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	Rasio Elektrifikasi	5,00
	Infrastruktur Utilitas (Air)	Akses Air Minum Layak	4,83
		Tingkat Kehilangan Air	2,26
Indeks Pilar Infrastruktur			3,09
Pilar 3: Adopsi TIK	Adopsi TIK	Pengguna Telepon Seluler	4,60
		Jangkauan Jaringan 4G	5,00
		Pengguna Internet	3,72
Indeks Pilar Adopsi TIK			4,44
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi	Stabilitas Ekonomi Makro	Pertumbuhan Deflator PDRB	3,17
		Kapasitas Fiskal Daerah	2,31

Pilar	Komponen	Indikator	Skor Indeks
Makro		Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi (2021-2023)	4,56
		Indeks Ketahanan Pangan	4,55
		Nilai Investasi	2,38
Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro			3,39
Pilar 5: Kesehatan		Angka Harapan Hidup	4,11
Indeks Pilar Kesehatan			4,11
Pilar 6: Keterampilan	Tenaga Kerja Saat Ini	Rata-rata Tahun Sekolah	4,30
		Keterampilan Lulusan	0,00
		Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil	4,26
	Tenaga Kerja Masa Depan	Angka Harapan Sekolah	4,41
		Berpikir Kritis dalam Mengajar	3,18
		Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar	4,41
Indeks Pilar Keterampilan			3,43
Pilar 7: Pasar Produk	Persaingan Domestik	Persaingan Sektor Jasa	5,00
Indeks Pilar Pasar Produk			5,00
Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Fleksibilitas	Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	1,57
		Upah Pekerja	4,01
	Meritokrasi dan Insentif	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki	4,33
Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja			3,31
Pilar 9: Sistem Keuangan	Kedalaman	Kredit Swasta Terhadap PDRB Harga Berlaku	5,00
		Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	1,31
		Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB	0,46
Indeks Pilar Sistem Keuangan			2,25
Pilar 10: Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	4,40
Indeks Pilar Ukuran Pasar			4,40

Pilar	Komponen	Indikator	Skor Indeks
Pilar 11: Dinamika Bisnis	Persyaratan Administrasi	Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)	4,56
		Kinerja Pelayanan Publik	4,89
Indeks Pilar Dinamika Bisnis			4,72
Pilar 12: Kaabilitas Inovasi	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Keanekaragaman Tenaga Kerja	2,74
		Pengembangan Klaster	3,39
	Riset	Publikasi Ilmiah	3,28
		Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)	4,20
		Belanja Riset	1,78
		Indeks Keunggulan Lembaga Riset	0,86
		Komersialisasi	Aplikasi Merek Dagang
	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi		
Total Indeks Kab. Kuningan IDSD 2024			3,82

Sumber : IDSD 2024, BRIN

Berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan tahun 2024, diperoleh skor total sebesar 3,82 dari skor maksimal 5,00, yang mencerminkan tingkat daya saing daerah yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan di beberapa sektor. Pilar dengan skor tertinggi adalah Pilar 7: Pasar Produk dengan nilai sempurna 5,00, menunjukkan tingkat persaingan sektor jasa yang sangat kuat. Disusul oleh Pilar 1: Institusi dengan skor 4,82, yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi tinggi, dan keamanan yang cukup terjaga. Pilar lain yang menonjol adalah Pilar 11: Dinamika Bisnis (4,72), Pilar 10: Ukuran Pasar (4,40), dan Pilar 3: Adopsi TIK (4,44), mengindikasikan pertumbuhan administrasi bisnis dan adopsi teknologi yang positif.

Namun demikian, terdapat beberapa pilar dengan skor rendah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti Pilar 9: Sistem Keuangan (2,25) yang dipengaruhi oleh rendahnya nilai akad Kredit Usaha Rakyat dan premi asuransi, serta Pilar 2: Infrastruktur (3,09) yang terkendala oleh layanan infrastruktur transportasi jalur kereta api dan bandara dengan skor sangat rendah. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro juga menunjukkan skor moderat 3,39, yang menandakan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah dan nilai investasi. Pilar 6: Keterampilan (3,43) memperlihatkan masih lemahnya keterampilan lulusan dan aspek berpikir kritis dalam pendidikan. Pilar

12: Kapabilitas Inovasi menjadi salah satu tantangan terbesar dengan skor 2,92, terutama pada indikator belanja riset dan kualitas lembaga penelitian.

Tabel 2.43 Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No.	Kab./Kota	Skor IDSD
1	Kab. Kuningan	3,82
2	Kab. Cirebon	3,80
4	Kab. Majalengka	3,68
3	Kab. Indramayu	3,34
5	Kab. Sumedang	3,92
6	Kab. Subang	3,68
7	Kota Cirebon	3,95
Prov. Jawa Barat		3,88
Nasional		3,43

Sumber : IDSD 2024, BRIN

Secara umum, Kabupaten Kuningan menunjukkan performa yang baik pada aspek kelembagaan, persaingan pasar, dan transformasi digital. Namun, untuk meningkatkan daya saing secara menyeluruh, diperlukan strategi yang lebih terfokus pada peningkatan infrastruktur, sistem keuangan, inovasi, serta kualitas tenaga kerja dan pendidikan. Upaya kolaboratif lintas sektor dan keberlanjutan program menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing yang lebih tinggi di masa depan.

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan, Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, di mana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat

berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Data pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total pengeluaran mencapai Rp1.157.538, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp1.211.685 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi Rp1.100.725. Meski demikian, angka ini kembali meningkat menjadi Rp1.155.616 pada 2023 dan Rp1.161.901 di tahun 2024.

Pengeluaran untuk makanan secara umum tetap menjadi komponen terbesar, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp668.912. Sedangkan pengeluaran bukan makanan cenderung stabil, walaupun sempat turun pada 2022 menjadi Rp479.513, sebelum kembali mendekati angka sebelumnya di tahun-tahun berikutnya. Data ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang relatif seimbang antara kebutuhan makanan dan bukan makanan, dengan kecenderungan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi tahunan.

Tabel 2.44 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan	Rp.	614.074	668.912	621.212	612.843	627.711
2	Bukan Makanan	Rp.	543.464	542.773	479.513	542.773	534.190
Jumlah		Rp.	1.157.538	1.211.685	1.100.725	1.155.616	1.161.901

Sumber: BPS Kab. Kuningan

B. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, **IPTEK** merupakan investasi strategis dalam pembangunan nasional yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pada level daerah seperti Kabupaten Kuningan. Inovasi, sebagai hasil dari penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, menjadi indikator penting daya saing daerah. Hubungan antara IPTEK dan inovasi bersifat timbal balik, di mana IPTEK

melahirkan inovasi, dan inovasi mendorong perkembangan IPTEK. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat peran IPTEK dan inovasi di daerah. Melalui partisipasinya dalam Program Smart City dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bekerja sama dengan Telkom University, Kuningan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi digital. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi di sektor pertanian, seperti irigasi tetes dan budidaya hidroponik, guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Inisiatif seperti Kuningan Digital Valley turut dikembangkan untuk memperkuat literasi digital dan pemberdayaan SDM lokal, termasuk generasi muda. Berbagai inovasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan serius dalam menjadikan IPTEK sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing tinggi, baik secara sosial maupun ekonomi.

Dari aspek **inovasi** untuk mengukur keberhasilan dari inovasi daerah, dapat ditunjukkan dengan capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan dan menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks ini mencerminkan kapasitas daerah dalam menjawab tantangan pembangunan melalui pendekatan yang kreatif, efektif, dan adaptif. Dengan penguatan inovasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi layanan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, IID Kabupaten Kuningan mencapai 29,82 poin.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK (persen)	60,01	60,23	61,80	61,95	65,84

Sumber: KDA tahun 2024 dan tahun 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kuningan, TPAK menunjukkan fluktuasi namun

secara umum cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, dalam periode 2020–2024, TPAK naik 5,83 poin persentase, dari 60,01% menjadi 65,84%. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami gangguan akibat pandemi, partisipasi tenaga kerja pada akhirnya berhasil pulih dan bahkan melampaui tingkat sebelum pandemi.

C. Transformasi Digital

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui integrasi sistem dan layanan digital, SPBE diharapkan dapat menyederhanakan proses birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi SPBE juga menjadi indikator penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus mendukung pencapaian reformasi birokrasi secara berkelanjutan

Tabel 2.46 Capaian SPBE Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
SPBE	N/A	2,24	2,88	3,39	3,57

Sumber: Kemenpan-RB, 2024

Indeks SPBE sudah mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0,18 poin menjadi 3,57 poin, namun dalam pelaksanaannya masih perlu upaya peningkatan penerapan SPBE dengan menyiapkan manajemen peningkatan SPBE, Arsitektur SPBE dan evaluasi kinerja SPBE daerah.

D. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Identifikasi dan Analisis Pusat Pertumbuhan

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut dapat dikembangkan melalui program strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara signifikan, antara lain dengan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan Pengembangan pariwisata. Berikut pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

1. Pusat Pertumbuhan Wilayah Perkotaan

Kecamatan Kuningan, Ciawigebang, Cilimus, Luragung, dan Mandirancan

merupakan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan yang memiliki wilayah pelayanan kabupaten. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan di daerah dapat dilakukan melalui program/proyek strategis berikut:

- a. Pembangunan jalan tol Kuningan-Cirebon: Jalan tol ini akan menghubungkan daerah dengan Cirebon, sehingga akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
- b. Pengembangan kawasan wisata: Pengembangan kawasan wisata perkotaan akan mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah.

2. Pusat Pertumbuhan Wilayah Pedesaan

Desa Cibingbin, Cidahu, Cigugur, Darma, dan wilayah pedesaan lainnya merupakan pusat pertumbuhan wilayah pedesaan di daerah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah pedesaan di daerah dapat dilakukan melalui program/proyek strategis kawasan perdesaan sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- b. Pengembangan pertanian dan perkebunan: Pengembangan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- c. Pengembangan pariwisata: Pengembangan pariwisata alam dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan program/proyek strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

E. Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi, merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Kuningan, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Cirebon, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, di mana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,10 persen.

Tabel 2.47 Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup beragam, mencerminkan pengaruh situasi nasional dan global terhadap stabilitas harga di tingkat daerah. Dalam periode tersebut, inflasi mengalami puncak di tahun 2022 dengan 4,86% dan titik terendah di 2024 sebesar 1,10%. Pola ini menunjukkan bahwa setelah guncangan harga tinggi pada 2022, pengendalian inflasi berjalan efektif hingga mampu menurunkan tekanan harga secara signifikan dalam dua tahun berikutnya.

Tabel 2.48 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi Kota Cirebon	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10
Inflasi Jabar	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64
Inflasi Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,54

Sumber : BPS, 2025

Inflasi Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Jawa Barat dan Nasional masing-masing pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 1,10 persen, 1,64 persen dan 1,54 persen. Pada tahun 2024 inflasi mengalami penurunan yang cukup besar baik di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan,

perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

A. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Negara agar dimungkinkan untuk diakses oleh warga, terutama pada jenjang pendidikan dasar, di mana jenjang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar. Kondisi pendidikan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan hingga akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut adalah sajian data-data terkait dengan bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sederajat	95,21	95,26	99,99	99,78	98,52
2	SMP/MTs/ Sederajat	79,90	79,82	79,63	83,64	81,30
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	64,73	67,61	66,86	64,01	65,55

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif terutama pada jenjang pendidikan dasar. APM jenjang SD/MI/Sederajat konsisten tinggi, meningkat dari 95,21% pada 2020 menjadi hampir sempurna pada 2022 (99,99%), dan tetap di atas 98% hingga 2024, mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau anak usia sekolah dasar. Di jenjang SMP/MTs/Sederajat, APM relatif stabil di kisaran 79–83%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada 2023 (83,64%), meskipun sedikit menurun di tahun berikutnya. Sementara itu, APM jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat cenderung lebih rendah dan fluktuatif, berada di kisaran 64–67%, menunjukkan bahwa partisipasi siswa pada jenjang pendidikan menengah atas masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.50 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sederajat (%)	98,60	100,72	101,70	104,68	102,72
2	SMP/MTs/ Sederajat (%)	97,63	96,55	80,53	85,94	90,03
3	SMA/SMK/MA/Sederajat (%)	78,03	79,03	77,93	77,88	85,86

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan cukup tinggi, terutama pada jenjang pendidikan dasar. APK jenjang SD/MI/Sederajat konsisten melebihi 100% sejak tahun 2021, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 104,68%, yang mengindikasikan bahwa tidak hanya anak usia sekolah dasar yang terdaftar, tetapi juga mereka yang di luar usia resmi, seperti yang terlambat masuk sekolah. Di jenjang SMP/MTs/Sederajat, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 80,53%, namun angka ini kembali meningkat hingga mencapai 90,03% di tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan partisipasi. Sementara itu, jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki APK terendah, meskipun terdapat tren peningkatan dari 78,03% pada tahun 2020 menjadi 85,86% pada tahun 2024. Secara umum, APK menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Kuningan cukup baik, terutama di jenjang dasar, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pada jenjang menengah dan atas.

Tabel 2.51 Ketersediaan Gedung Sekolah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Jumlah gedung sekolah	657	658	656	657	658
2	SMP Jumlah gedung sekolah	108	109	111	120	120

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2025

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), jumlah gedung tercatat sebanyak 657 unit pada tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan menjadi 658 pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 656 pada tahun 2022. Namun demikian, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 657 pada tahun 2023 dan stabil di angka 658 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten. Tercatat sebanyak 108 gedung pada tahun 2020, kemudian bertambah menjadi 109 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut dengan

111 gedung pada tahun 2022 dan melonjak signifikan menjadi 120 gedung pada tahun 2023, serta tetap pada jumlah yang sama di tahun 2024.

Tabel 2.52 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD					
	- Jumlah Guru	6.753	6.570	6.668	6.939	6.101
	- Jumlah Murid	101.438	99.346	98.302	96.947	97.345
	- Rasio	01:15,0	01:15,1	01:14,7	01:14,0	01:16,0
2	SMP					
	- Jumlah Guru	2.537	2.494	2.502	2.674	2.490
	- Jumlah Murid	40.396	41.145	40.397	40.668	41.879
	- Rasio	01:15,9	01:16,5	01:16,2	01:15,2	01:16,8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2025

Perkembangan jumlah guru dan murid di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan dinamika yang menarik selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada jenjang SD, jumlah guru sempat menurun dari 6.753 pada tahun 2020 menjadi 6.570 pada tahun 2021, lalu mengalami kenaikan menjadi 6.939 pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 6.101 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah murid SD menunjukkan tren penurunan dari 101.438 murid di tahun 2020 menjadi 96.947 pada tahun 2023, meskipun sedikit meningkat menjadi 97.345 pada 2024. Rasio guru terhadap murid di jenjang SD tercatat sekitar 1:15 hingga 1:16 selama periode ini.

Untuk jenjang SMP, jumlah guru relatif stabil, yaitu dari 2.537 guru pada tahun 2020 menjadi 2.490 pada 2024, dengan fluktuasi kecil di antara tahun-tahun tersebut. Jumlah murid SMP pun tidak jauh berbeda, dengan kisaran antara 40.000 hingga 42.000 murid. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 40.396 murid dan meningkat menjadi 41.879 murid pada 2024. Rasio guru terhadap murid di jenjang SMP juga menunjukkan keseimbangan yang cukup baik, berada di kisaran 1:15 hingga 1:17. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, Kabupaten Kuningan tetap menjaga ketersediaan tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah secara proporsional.

Tabel 2.53 Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04
2	SMP(persen)	0,16	0,15	0,15	0,14	0,27

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kuningan, 2025

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Persentase angka putus sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren yang relatif stabil bahkan cenderung menurun selama periode 2020 hingga 2024. Pada jenjang SD, angka putus sekolah tercatat sebesar 0,1% setiap tahun dari 2020 hingga 2023, bahkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,04% hal ini mencerminkan tingkat keberlangsungan pendidikan dasar yang cukup baik.

Periode 2020–2023, APS menunjukkan tren menurun secara bertahap dari 0,16% (2020) menjadi 0,14% (2023). Penurunan ini relatif kecil namun konsisten, mengindikasikan adanya upaya yang cukup berhasil dalam mempertahankan siswa agar tetap bersekolah di tingkat SMP. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan APS menjadi 0,27%, naik signifikan dibanding tahun 2023 (0,14%). Kenaikan ini sebesar +0,13 poin persentase atau sekitar 93% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, lonjakan yang cukup besar ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat mengindikasikan adanya faktor penghambat baru, diantaranya: dampak ekonomi yang membuat sebagian keluarga tidak mampu membiayai sekolah anak, migrasi penduduk atau perpindahan domisili, faktor sosial seperti pernikahan dini atau anak yang memilih bekerja atau perubahan metode pembelajaran atau transisi kurikulum yang membuat sebagian siswa kesulitan beradaptasi.

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah, sejak tahun 2020 angka kelulusan sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2.54 Angka Kelulusan Tahun 2020-2024 dalam persen

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	100%	100%	100%	100%	100%

2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan 2025

Ket : *) SMA Ditarik ke Wewenang Provinsi

Dalam upaya sinkronisasi mutu pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan berbagai program untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan standar pendidikan antar jenjang. Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan Tim Akselerasi Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang.

Pemerintah Kabupaten Kuningan juga telah mengakses bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa pengadaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi di sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di jenjang pendidikan berikutnya. Program-program inovatif seperti Pimda Nyawah, Gerbang Berkah, dan Mini Teater Edukatif juga telah diluncurkan untuk memperkuat karakter siswa dan mendorong kebersamaan di lingkungan sekolah. Pencapaian ini tercermin dalam peningkatan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Kuningan, yang mencapai 96,07% pada tahun 2024.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Tren Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan, dengan puncak tertinggi pada tahun 2023. Meskipun tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan, angka tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, dibutuhkan intervensi terintegrasi mencakup peningkatan gizi ibu hamil, pemerataan tenaga kesehatan terlatih, perbaikan sarana perawatan bayi baru lahir, dan edukasi kesehatan bagi keluarga.

Tabel 2.55 Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun

	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi per Tahun (kasus per 1000)	4,14	5,23	5,91	9,25	8,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, termasuk seorang ibu hamil harus dipastikan kesehatannya. Banyak kematian perempuan terjadi pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Informasi mengenai tingginya *Mumps Measles Rubella* (MMR) akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Di periode tahun 2020–2021 terjadi lonjakan signifikan dari 27 kasus (2020) menjadi 49 kasus (2021), atau naik sekitar 81%. Di periode tahun 2022–2024, setelah tahun 2021 AKI menurun drastis menjadi 24 kasus di tahun 2022 (turun sekitar 51%). Penurunan berlanjut menjadi 21 kasus (2023) dan mencapai titik terendah 13 kasus (2024). Tren ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam layanan kesehatan ibu, seperti peningkatan kualitas *antenatal care*, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta program pencegahan komplikasi kehamilan. Meskipun tahun 2024 AKI sudah lebih rendah, tetap perlu mempertahankan dan memperluas program yang telah terbukti efektif, seperti: pemeriksaan kehamilan minimal 6 (enam) kali, Peningkatan fasilitas kesehatan ibu di daerah terpencil, dan sistem rujukan cepat untuk kasus komplikasi persalinan, selanjutnya penting untuk dilaksanakan evaluasi mendalam terkait faktor yang menyebabkan lonjakan kasus di tahun 2021 agar tidak terulang di masa depan.

Tabel 2.56 Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus per 100 ribu)	27	49	24	21	13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

c. Persentase Balita Stunting

Tren prevalensi stunting tahun 2020–2024 menunjukkan penurunan di tahun 2021, namun mengalami kenaikan hingga 2024. Capaian 2024 sebesar 7,87% adalah yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir, sedikit melampaui angka awal 2020 sebesar 7,38%. Hal ini menandakan perlunya intervensi lintas sektor yang lebih terintegrasi, mencakup perbaikan gizi ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan, edukasi pola makan, serta perbaikan sanitasi lingkungan.

Tabel 2.57 Persentase Balita Stunting Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Balita Stunting (persen)	7,38	6,21	6,6	7,81	7,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagian besar indikator sarana dan prasarana lingkup pekerjaan umum menunjukkan tren positif selama 2020–2024, khususnya kemantapan jalan/jembatan, kondisi irigasi, dan sanitasi layak. Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 76,50% menjadi 82,35%, kenaikan tertinggi terjadi pada 2020–2021 (+2,56 poin persentase), kemudian meningkat stabil tiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya program pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang cukup efektif. Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik tahun 2020–2021 stagnan di 60,93%, lalu meningkat secara bertahap hingga 66,97% di tahun 2024. Peningkatan 6,04 poin dalam lima tahun mencerminkan adanya upaya rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi, walaupun laju perbaikan relatif moderat. Akses Air Minum Layak mengalami kenaikan dari 88,12% (2020) ke 91,75% (2024), dengan puncak 91,10% pada 2022. Tahun 2023 sedikit menurun (90,98%), namun kembali naik pada 2024. Fluktuasi ini terjadi dipengaruhi faktor ketersediaan sumber air, cuaca ekstrem, dan gangguan distribusi. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak sempat turun signifikan pada 2021 menjadi 89,89% dari 93,25% di 2020, namun kembali meningkat hingga mencapai 96,68% pada 2024. Peningkatan tajam pasca-2021 menunjukkan adanya

intervensi yang cukup berhasil, seperti pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi. Akses Air Minum Perpipaan mengalami peningkatan yang tidak konsisten, naik 34,65% (2020) dan 36,69% (2021), lalu turun di 2022–2023, kemudian melonjak signifikan pada 2024 menjadi 42,44%. Lonjakan di 2024 (+6,64 poin dari tahun sebelumnya) sebagai dampak adanya perluasan jaringan perpipaan yang cukup besar pada tahun tersebut.

Tabel 2.58 Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	76,5	79,063	80,699	82,357	82,352
2	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Persen	60,93	60,93	62,23	63,81	66,97
3	Akses Air Minum Layak	Persen	88,12	88,23	91,1	90,98	91,75
4	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	93,25	89,89	93,65	93,99	96,68
5	Akses Air Minum Perpipaan	Persen	34,65	36,69	35,87	35,80	42,44

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 2025

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, RTRW Kabupaten Kuningan sedang dalam proses revisi lima tahunan pertama sejak ditetapkan.

Salah satu kebijakan tata ruang yang bersifat strategis dalam revisi RTRW, antara lain telah merencanakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi berupa KSK Pariwisata Waduk Darma dan sekitarnya serta KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kebun Raya Kuningan dan sekitarnya di Kecamatan Pasawahan.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga ke perdesaan. Namun, perkembangannya belum sepenuhnya sesuai dengan data backlog dan standar permukiman yang layak huni, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi hunian menunjukkan perbaikan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Persentase rumah layak huni meningkat dari 95,57% pada tahun 2020 menjadi 97,63% pada tahun 2024. Capaian ini menjadi dasar sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, baik melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan perumahan baru yang sesuai standar, maupun peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana dasar.

Tabel 2.59 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah layak huni	Persen	95,57	97,00	97,21	97,54	97,63

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Kuningan terus menunjukkan upaya peningkatan dalam hal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama periode 2020 hingga 2024. Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap prinsip Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) menunjukkan tren positif, dari 83% pada tahun 2020 menjadi 86% di tahun 2024. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) justru mengalami penurunan dari 0,68 di tahun 2020 menjadi 0,64 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga ketahanan wilayah secara menyeluruh.

Tabel 2.60 Kondisi Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Persen	83	84	84	85	86
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,68	0,72	0,68	0,64	0,68

Sumber : Sat Pol PP Kab Kuningan, 2025

g. Sosial

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar pemerintah sampai saat ini, hal itu rentan memunculkan persoalan-persoalan sosial. Dinas Sosial mencatat beberapa persoalan sosial yang ada, antara lain tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Kondisi Indikator Sosial Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sarana Sosial seperti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	35	32	32	32	32
2	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	80,02	13,39	24,09	63,93	57,11
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	70,8	10,29	86,82	93,91	57,24
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	53.423	10.223	126.779	190.747	116.261

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kuningan, 2025

Sarana Sosial (Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi) menurun dari 35 unit (2020) menjadi 32 unit pada 2021, dan kemudian tetap stagnan hingga 2024. Penurunan awal ini mungkin akibat penggabungan fasilitas dan penutupan karena kondisi tertentu serta efisiensi pengelolaan. Persentase Penyandang Disabilitas dan Lansia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial tahun 2020 cukup tinggi di 80,02%, lalu turun drastis pada 2021 menjadi 13,39%, tahun-tahun berikutnya meningkat bertahap hingga 63,93% (2023), sebelum turun kembali ke 57,11% (2024). Fluktuasi besar ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan penyaluran bantuan, ketersediaan anggaran, atau mekanisme pendataan penerima manfaat. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial turun sangat tajam dari 70,80% (2020) menjadi 10,29% (2021), lalu melonjak tinggi ke 86,82% (2022) dan 93,91% (2023) dan tahun 2024 kembali menurun ke 57,24%. Pola fluktuasi ekstrem ini menunjukkan ketidakstabilan penyaluran bantuan sosial, yang dipengaruhi perubahan prioritas program, penyesuaian data penerima, dan faktor eksternal seperti bencana/krisis. Jumlah PMKS yang Ditangani mengalami penurunan drastis pada 2021 (10.223) dibanding 2020 (53.423), Setelah itu melonjak signifikan pada 2022 (126.779) dan mencapai puncak di 2023 (190.747), lalu turun ke 116.261 pada 2024. Perubahan tajam ini terkait dengan

perubahan cakupan program atau peningkatan pendataan dan penjangkauan di tahun-tahun tertentu.

h. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK (persen)	60,01	60,23	61,80	61,95	65,84

i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mainstreaming keadilan gender sudah mulai kuat menjadi perspektif dalam kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip inklusi sosial yang menjadi perspektif dalam penyusunan RPJMD ini salah satunya turut memperhatikan ruang-ruang yang memungkinkan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 86,81, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 86,97 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut, dengan IPG mencapai 87,17 pada tahun 2022 dan 2023, serta diperkirakan meningkat menjadi 88,00 pada tahun 2024. Peningkatan IPG ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih optimal di semua aspek kehidupan.

Tabel 2.62 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPG	86,81	86,97	87,17	87,31	88

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

j. Pangan

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk bertahan hidup, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memastikan kecukupan pangan bagi penduduk. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan utama menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 261,17 kg per kapita per tahun, kemudian meningkat menjadi 274,21 kg pada tahun 2021 dan mencapai 293,61 kg pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 266,9 kg per kapita per tahun, dan meningkat kembali menjadi 272,03 kg pada tahun 2024.

Tingkat konsumsi pangan lokal juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, persentase konsumsi pangan lokal tercatat sebesar 37%, dan terus meningkat menjadi 40% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 50% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program yang mendorong masyarakat untuk lebih mengonsumsi produk pangan lokal, yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah, namun pada tahun 2024 kembali turun ke angka 46%.

Selain itu, jumlah lumbung pangan menunjukkan perkembangan positif, dengan peningkatan jumlah lumbung pangan yang tercatat dari 0 pada tahun 2020 menjadi 5 pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya upaya yang lebih terorganisir untuk menyimpan dan mengelola cadangan pangan lokal guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 0.

Skor pola pangan harapan (PPH) juga mengalami hasil yang stabil dan baik. Skor PPH tercatat 82,4% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 93,2% pada tahun 2022 dan 2023, serta meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 93,8, yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas pola konsumsi pangan yang lebih bergizi dan seimbang di masyarakat.

Secara keseluruhan, menunjukkan kemajuan yang baik dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, konsumsi pangan lokal,

dan pengelolaan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas pola konsumsi pangan di masyarakat.

Tabel 2.63 Kondisi Indikator Pangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	261,17	274,21	293,61	266,9	272,03
2	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	37	40	45	50	55
3	Lumbung Pangan	Buah	0	1	3	5	0
4	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	82,4	82,4	93,2	93,2	93,8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melansir data tentang desa-desa yang mengalami rawan pangan tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.64 Desa Rawan Pangan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Kecamatan	Desa
Karangkencana	Jabranti
Ciwaru	Sagaranten, Citikur
Cibingbin	Sukaharja
Cibeureum	Tarikolot
Cimahi	Sukajaya, Cimulya
Subang	Situgede, Jatisari
Selajambe	Padahurip, Selajambe, Ciberung, Kutawaringin, Jamberama
Cilebak	Legokherang, Bungurberes, Mandapajaya
Cidahu	Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela, Jatimulya
Kalimanggis	Kalimanggis Wetan, Kalimanggis Kulon
Hantara	Pakapasan Girang, Cikondang, Tundagan, Bunigeulis, Hantara
Kramatmulya	Karangmangu
Luragung	Benda
Pancalang	Patalagan, Sumbakeling, Tenjolayar
Japara	Wano
Maleber	Garahaji, Padamulya
Darma	Cimenga, Sukarasa, Tugumulya
Cipicung	Pamulihan, Sukanangan, Muncangela
Ciawigebang	Lebaksiuh, Sukaraja
Pasawahan	Pasawahan
Nusaherang	Kertayuga, Windusari, Jambar
Kadugede	Sindangjawa, Cisukadana, Margabakti
Garawangi	Citiusari, Tembong, Sukaimut, Garawangi, Karamatwangi
Ciniru	Pinara, Cipedes, Rambatan, Longkewang, Mungkaldatar

Sumber: diolah dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan data desa rawan pangan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan, tercatat sebanyak 24 kecamatan yang memiliki desa dengan kondisi rawan pangan. Total terdapat 63 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan berdasarkan informasi yang dihimpun. Jumlah desa rawan pangan di setiap kecamatan bervariasi, yang mencerminkan tingkat kerentanan pangan yang berbeda-beda antar wilayah. Kecamatan yang tidak terdapat Desa Rawan Pangan sebanyak 8 kecamatan, yaitu Cigandamekar, Cilimus, Kuningan, Lebakwangi, Cigugur, Jalaksana, Mandirancan dan Sindangagung.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa rawan pangan terbanyak adalah Cidahu, dengan total 6 desa, yaitu Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela, dan Jatimulya. Menyusul di bawahnya adalah Selajambe, Hantara, Garawangi, dan Ciniru, yang masing-masing memiliki 5 desa rawan pangan. Tingginya jumlah desa rawan pangan di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan yang mungkin disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, atau infrastruktur yang belum merata.

k. Konsumsi Beras Per Kapita

Data ketersediaan beras menunjukkan penurunan setiap tahunnya sebagaimana tergambar pada tabel di atas, akan tetapi sebaliknya, data konsumsi beras terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menandakan ada ketergantungan masyarakat Kuningan terhadap beras, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.65 Konsumsi Beras per Kapita Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Beras per kapita (kg/kapita/tahun)	76,02	77,90	73,57	75,39	74,83

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Konsumsi beras per kapita mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, konsumsi beras per kapita tercatat sebesar 76,02 kg per kapita per tahun. Angka ini sedikit meningkat menjadi 77,90 kg pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 73,57 kg. Pada tahun 2023, konsumsi beras kembali meningkat menjadi 75,39 kg, meskipun sedikit menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 74,83 kg per kapita per tahun.

I. Pertanian

Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu prasyarat

penting untuk terlaksananya pembangunan fisik. Sebelum proses pengadaan tanah seyogyanya dilakukan kajian atau studi kelayakan dengan mempertimbangkan aspek teknis, geografis, sosial budaya dan lingkungan.

Persentase bidang tanah yang bersertifikat milik pemerintah daerah (Pemda) menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya 60% dari bidang tanah milik Pemda yang telah memiliki sertifikat. Angka ini turun menjadi 46% pada tahun 2021, namun kemudian meningkat tajam menjadi 73,89% pada tahun 2022, mencapai 81,97% pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi 87,63%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam menyelesaikan proses sertifikasi tanah yang dimiliki oleh Pemda.

Tabel 2.66 Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda	Persen	60	46	73,89	81,97	87,63

Sumber : BPKAD Kab. Kuningan, 2025

m. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap warga negara berhak memiliki identitas diri, dan dalam rangka itu, Pemerintah Kabupaten menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dengan memberikan kartu identitas diri kepada warganya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.67 Data Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	89,14	94,6	100	99,94	98,3
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL.)	Persen	99,5	98,53	99,4	99,16	98,52
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	40,62	54,68	43,46	47,77	55,18

4	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	91,86	92,67	94,21	96,07	96,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan dokumen identitas menunjukkan perkembangan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan administrasi kependudukan dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat terhadap dokumen penting.

Pada tahun 2020, persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat sebesar 89,14%, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 99,16% pada tahun 2023 dan sedikit turun menjadi 98,52% pada tahun 2024, menunjukkan hampir semua keluarga telah memiliki KK. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL) juga sangat tinggi, dengan angka 99,5% pada tahun 2020 dan tetap tinggi di atas 98% hingga 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 98,52% pada tahun 2024.

Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), yang dimulai dengan persentase 40,62% pada tahun 2020, angka ini meningkat signifikan menjadi 54,68% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut menurun menjadi 43,46% dan 47,77%, dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 55,18%.

Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0 hingga 18 tahun meningkat secara stabil, dari 91,86% pada tahun 2020 menjadi 96,48% pada tahun 2024.

n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menunjukkan kemajuan yang pesat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah BUMDES tercatat sebanyak 185 unit, dan angka ini meningkat signifikan menjadi 361 pada tahun 2024. Peningkatan jumlah BUMDES ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pemberdayaan masyarakat desa disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.68 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2020-2024**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMDES	Unit	185	229	349	349	361
2	Status Desa :						
	- Tertinggal	Desa	4	0	0	0	0

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	- Berkembang		220	165	116	48	12
	- Maju		115	160	183	218	215
	- Mandiri		22	36	62	95	134
3	PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
4	Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kuningan, 2025

Terkait dengan status desa, pada tahun 2020, masih terdapat 4 desa yang tergolong desa tertinggal, namun pada tahun 2021 hingga 2024, status desa tertinggal berhasil dihapuskan, dengan semua desa mengalami peningkatan status. Desa yang berkembang menurun signifikan dari 220 desa pada tahun 2020 menjadi 12 desa pada tahun 2024, sementara desa yang maju mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari 115 desa pada tahun 2020 menjadi 215 desa pada tahun 2024. Selain itu, jumlah desa mandiri juga meningkat pesat, dari 22 desa pada tahun 2020 menjadi 134 desa pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial desa.

Di sisi lain, kegiatan sosial yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa, seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu, terus aktif dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. PKK aktif di seluruh desa dengan persentase 100% pada setiap tahun, yang menunjukkan peran penting PKK dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa. Demikian pula, Posyandu tetap beroperasi secara maksimal dengan 100% posyandu aktif pada setiap tahun, yang mendukung program kesehatan masyarakat dan tumbuh kembang anak.

o. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	71,15	71,61	71,94	72,24	66,40
2	Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	13,25	17,49	11,04	7,45	10,30
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama (RKP) Wanita	Tahun	20,90	20,80	22,70	22,80	22,90

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, 2025

Prevalensi pemakaian kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* mengalami sedikit fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase penggunaan kontrasepsi tercatat sebesar 71,56%, dan angka ini sedikit meningkat menjadi 72,24% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 prevalensi penggunaan kontrasepsi turun menjadi 66,40%. Penurunan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam program keluarga berencana.

Sementara itu, persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, *unmet need* tercatat sebesar 13,25%, yang meningkat menjadi 17,49% pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 20,86% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini turun drastis menjadi 7,45%, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2024 menjadi 10,30%.

Adapun rata-rata usia kawin pertama (RKP) wanita mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 hingga 2022, rata-rata usia kawin pertama wanita tercatat stabil di angka sekitar 19 tahun, namun pada tahun 2024, angka tersebut meningkat menjadi 22,90 tahun. Peningkatan ini dapat mencerminkan perubahan dalam pola pernikahan yang semakin mengarah pada pernikahan yang lebih matang, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga.

p. Perhubungan

Sarana prasarana dan fasilitas perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.70 Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	58	59	50	60	55,58

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kuningan

Ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten Kuningan dalam periode 2020–2024 belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya tantangan dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, baik dari segi pendanaan, perawatan fasilitas, atau faktor lain seperti kerusakan dan keterbatasan kapasitas. Perlu strategi perencanaan yang lebih berkesinambungan agar peningkatan yang sempat dicapai (seperti di tahun 2023) bisa dipertahankan dan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya.

Berkaitan dengan isu perhubungan yang dapat dianggap krusial saat ini adalah penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan di sekitar jalan protokol ketika banyak pengunjung.

q. Komunikasi dan Informatika

Jumlah *Base Transceiver Station (BTS)* menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan usaha yang terus-menerus dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi di wilayah ini. Pada tahun 2020, jumlah BTS tercatat sebanyak 283 unit, dan angka ini meningkat menjadi 319 unit pada tahun 2021. Peningkatan terus berlanjut, dengan jumlah BTS mencapai 325 unit pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 326 unit sampai dengan tahun 2023, namun tidak ada penambahan pada tahun 2024.

Peningkatan jumlah BTS ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperluas cakupan layanan telekomunikasi, yang penting untuk mendukung konektivitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Pemasangan BTS yang terus meningkat ini juga mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, serta sektor-sektor lainnya yang bergantung pada akses internet dan komunikasi yang stabil.

Tabel 2.71 Kondisi BTS Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BTS	BTS	283	319	325	326	326

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan

r. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sektor KUKM merupakan sektor strategis yang dapat menumbuhkan insentif ekonomi dalam masyarakat sekaligus menyerap tenaga kerja. Serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Pembinaan koperasi dan UKM diarahkan kepada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, permodalan, kelembagaan, serta teknologi dan informasi.

Jumlah wirausahawan di Kabupaten Kuningan berfluktuasi, sempat mencapai puncak pada tahun 2023 dengan 480 orang, namun turun kembali menjadi 160 orang di 2024. UMKM yang dibina juga mengalami lonjakan pada 2022 (1.317 UMKM) tetapi menurun di tahun berikutnya. Sementara itu, jumlah koperasi aktif menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 460 unit (2020) menjadi 573 unit (2024). Kondisi koperasi sehat sempat turun di 2023, namun membaik di 2024 dengan 85 koperasi.

Jumlah koperasi yang dibina berfluktuasi tajam, bahkan sempat menurun drastis pada 2022–2023 (100 koperasi), lalu meningkat signifikan pada 2024 (799 koperasi). Namun, koperasi yang memberikan pelayanan kepada UMKM menurun drastis setelah 2021 dan hanya bertahan di angka 30 unit pada 2023–2024.

Di sisi lain, jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas PIRT meningkat pesat dari 40 produk (2020) menjadi 369 produk (2024). Begitu juga dengan UMKM yang memiliki akses pasar luar daerah, relatif stabil di angka 500 sejak 2021 dan naik menjadi 523 pada 2024. Perkembangan KUKM dapat dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.72 Indikator kinerja KUKM Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wirausahawan (org)	100	262	220	480	160
Jumlah UMKM yang dibina (buah)	100	464	1.317	400	252
Jumlah Koperasi Aktif (buah)	460	491	492	520	573
Jumlah Koperasi Sehat (buah)	60	75	75	50	85
Jumlah Koperasi yang dibina (buah)	490	515	100	100	799
Jumlah Koperasi yang memberikan pelayanan terhadap usaha UMKM (Buah)	456	465	10	30	30
Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT (produk)	40	65	100	269	369
Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah (buah)	400	500	500	500	523

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

s. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

**Tabel 2.73 Jumlah Nilai Investasi dan Kerja Sama Investasi
Tahun 2020 – 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai investasi	383.012.406.831 1	1.800.363.869.952 2	7.004.865.478.704 4	8.884.931.828.574 4	16.426.903.363.817 17

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

Investasi pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, pada tahun 2020 jumlah nilai investasi tercatat sebesar Rp 383.012.406.831,- yang mencerminkan kontribusi awal sektor investasi terhadap perekonomian daerah. Namun, angka tersebut mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, dengan jumlah nilai investasi mencapai Rp 1.800.363.869.952,-. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah yang semakin intens dalam menarik investor dan meningkatkan minat investasi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2022, nilai investasi mengalami lonjakan lebih besar lagi, mencapai Rp.7.004.865.478.704,- dan pada tahun 2024, nilainya semakin meningkat menjadi Rp.8.884.931.828.574,-. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan berhasil menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para investor, yang juga berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor industri dan infrastruktur di daerah ini. Pada tahun 2024, nilai investasi mencapai angka yang sangat tinggi, yakni Rp.16.426.903.363.817,- yang menjadi bukti jelas dari semakin berkembangnya perekonomian dan potensi investasi.

t. Kebudayaan

Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni, budaya, dan sejarah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemeliharaan kekayaan budaya. Dari tahun 2020 hingga 2024, penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya berlangsung secara konsisten dengan 12 kegiatan yang diadakan setiap tahunnya.

Selain itu, sarana untuk penyelenggaraan seni dan budaya tetap terjaga dengan stabil, di mana pada setiap tahun antara 2020 hingga 2024, jumlah sarana yang tersedia tetap tercatat sebanyak 2 unit. Keberadaan sarana ini mendukung keberlangsungan berbagai kegiatan budaya yang diadakan di Kabupaten Kuningan.

Di sisi lain, Kabupaten Kuningan juga tetap berkomitmen penuh dalam melestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Setiap tahun, pelestarian ini tercatat dengan persentase 100%, menunjukkan upaya maksimal dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya yang ada.

Tabel 2.74 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	12	12	12
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	2	2	2	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Rumpun bahasa yang umum digunakan di Kabupaten Kuningan adalah Bahasa Sunda Kuningan (BSK), yang merupakan dialek bahasa sunda yang termasuk dalam rumpun dialek Cirebon. BSK memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan Bahasa Sunda Priangan, seperti variasi leksikon dan perubahan fonem.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait bahasa Sunda Kuningan:

a) Dialek Cirebon:

BSK termasuk dalam rumpun dialek Cirebon, yang meliputi beberapa daerah di sekitar Cirebon, termasuk Kuningan.

b) Kekhasan BSK:

BSK memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan bahasa Sunda Priangan, seperti variasi leksikon dan perubahan fonem.

c) Penggunaan sehari-hari:

Bahasa Sunda Kuningan digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Kuningan, termasuk dalam proses penamaan objek wisata.

d) Pembelajaran dan Pemeliharaan:

BSK masih dipelihara dan dipertahankan oleh para penuturnya, seperti dibuktikan dengan penerbitan Kamus Basa Sunda Wewengkon Kuningan.

e) Perbandingan Leksikon:

Leksikon BSK memiliki perbedaan dengan bahasa Sunda Priangan, yang dapat dilihat dalam perbandingan kosakata.

f) Fonem:

Tidak ada perbedaan jumlah dan jenis fonem antara BSK dengan bahasa Sunda baku.

Selain itu Kabupaten Kuningan memiliki beberapa bangunan cagar budaya, situs dan kesenian atau adat istiadat yang merupakan ciri khas. Berikut merupakan bangunan cagar budaya, situs dan kesenian atau adat istiadat di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.75 Bangunan Cagar Budaya, Situs dan Kesenian atau Adat Istiadat

No.	Bangunan Cagar Budaya	Situs	Kesenian/ Adat Istiadat
1	Lingga Cikahuripan	Gedung Perundingan Linggarjati	Sapton dan Panahan Tradisional
2	Pendopo Kabupaten Kuningan	Makam Syekh Maulani	Seren Taun
3	Makam Arya Kamuning	Situs Purbakala Cipari	Kawin Cai
4	Pasarean Dipati Ewangga (Pangeran Arya Adipati Ewangga)	Paseban Tri Panca Tunggal	Pesta Dadung
5	Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur	Situs Batu Naga Jabranti	Sintren
6	Punden Berundak Hulu Lingga	Gedung SMP Negeri 1 Kuningan	Cingcowong
7	SMP Negeri 1 Kuningan	Gedung Graha Wangi	Reog Cengal
8	Arca Nandi	Gedung Syahrir	Babarit
9	Lingga Yoni	Lingga Cikahuripan	Tari Buyung
10	Gedung Graha Wangi	Pasarean Arya Kamuning	
11	Gedung Syahrir	asarean Dipati Ewangga	
12	Situs Batu Naga	Eks Kewadanaan Ciawigebang	
13	Eks Kewadanaan Ciawigebang	Paseban Cigugur	
14		Situs Batu Berundak Sagarahiyang	

Sumber : Disporapar Kabupaten Kuningan, 2025

u. Persandian

Persandian menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaannya. Dalam

pelaksanaannya urusan persandian lebih dititikberatkan kepada pengamanan dan pengelolaan informasi Pemerintahan Daerah.

Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 18%, kemudian meningkat menjadi 27,8% pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan upaya dalam pengamanan informasi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut menurun drastis menjadi 3,14%, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau prioritas dalam pengelolaan informasi. Meskipun demikian, pengamanan informasi tetap menjadi aspek penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah daerah. Data untuk tahun 2024 menjadi 3,20%, namun diharapkan langkah-langkah pengamanan informasi tetap diperkuat.

Tabel 2.76 Kondisi Persandian Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Persen	18	27,8	3,14	3,14	3,20

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2025

v. Perpustakaan

Pada tahun 2020-2024 koleksi buku di perpustakaan daerah terus mengalami peningkatan jumlah, begitu juga terjadi peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77 Data Perpustakaan di Kabupaten Kuningan 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	3.032	4.290	13.719	10.446	10.000
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	22.802	24.742	24.742	29.005	30.150

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari

tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat 3.032 pengunjung, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.290 pengunjung. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah pengunjung mencapai 13.719 orang. Namun, pada tahun 2024, jumlah pengunjung mengalami penurunan menjadi 10.000 orang, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sosial atau kondisi eksternal lainnya.

Sementara itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga terus bertambah dari sebanyak 22.802 tahun 2020, bertambah menjadi 30.150 eksemplar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen perpustakaan untuk terus memperkaya koleksi buku, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi.

w. Kearsipan

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentase ini tercatat sebesar 75%, dan terus meningkat menjadi 80% pada tahun 2021, 85% pada tahun 2022, dan mencapai 92% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang terus berkembang dalam pengelolaan arsip secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 2.80 Persentase perangkat daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Di Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	75	80	85	90	92
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	1	1	5	2	2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan

2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Jawa Barat. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan adalah jenis perikanan darat atau air tawar. Meski sektor perikanan bukan menjadi unggulan daerah, akan tetapi sektor ini menjadi penyangga pangan daerah. Capaian produksi perikanan menunjukkan *trend* yang

positif setiap tahunnya sehingga dapat menjadi usaha ekonomi produktif tradisional masyarakat di perairan lahan milik maupun di perairan umum.

Pengembangan sektor perikanan dilaksanakan melalui pembinaan, penyediaan bibit unggul, *re-stocking* benih ikan di perairan umum dan pelarangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan di perairan umum.

Sarana dan prasarana perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat 37 unit sarana dan prasarana perikanan, yang kemudian meningkat menjadi 40 unit pada tahun 2021. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah mencapai 55 unit, dan pada tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 100 unit. Namun, pada tahun 2024, jumlah sarana dan prasarana perikanan mengalami penurunan menjadi 21 unit, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau kondisi lain yang memengaruhi sektor ini.

Di sisi lain, produksi ikan terus menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, total produksi ikan tercatat sebanyak 21.627 ton, yang meningkat menjadi 22.981 ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, produksi ikan terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 24.567 ton dan 26.957 ton. Pada tahun 2024, diperkirakan produksi ikan akan mencapai 27.523 ton, menunjukkan sektor perikanan yang terus berkembang meskipun ada penurunan jumlah sarana prasarana.

Tabel 2.78 Sarana Prasarana Perikanan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sarana prasarana Perikanan (Unit)	37	40	55	100	21
Produksi ikan (Ton)	21.627	22.981	24.567	26.957	27.523

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025

b. Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat strategis, mengingat ada banyak sumber daya alam yang sudah terkelola dengan baik dan mendatangkan banyak wisatawan. Selain wisata alam, ada juga wisata budaya, sejarah dan wisata buatan lainnya, yang secara perlahan sudah mulai bergerak maju.

Perkembangan sarana pariwisata menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sektor perhotelan dari tahun 2020 hingga 2023. Jumlah hotel berbintang tercatat terus meningkat, dengan hotel berbintang 4 mengalami penambahan satu unit pada tahun

2023, mencapai total satu hotel. Hotel berbintang 3 tetap stabil dengan jumlah 3 unit dari tahun 2020 hingga 2023, sementara hotel berbintang 2 dan 1 juga tetap konstan, masing-masing sebanyak dua dan satu unit. Pada tahun 2024, jumlah hotel berbintang diperkirakan akan mencapai delapan unit, dengan penambahan hotel berbintang 3 dan 4.

Sementara itu, jumlah hotel non-bintang juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan dari 126 unit pada tahun 2020 menjadi 155 unit pada tahun 2023, meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 153 unit. Restoran dan rumah makan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 63 unit pada tahun 2020 menjadi 89 unit pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan perkembangan sektor pariwisata yang semakin berkembang, diiringi dengan peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan.

Kekayaan potensi wisata menarik banyak wisatawan datang dan berdampak pada semakin maraknya berdiri sarana dan prasarana pendukung, seperti: hotel, penginapan, homestay, restoran dan lain-lain, yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.79 Potensi Sarana Prasarana Pariwisata Tahun 2020 – 2024

No	Sarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel Berbintang	6	6	6	7	8
	a. 4	-	-	-	-	1
	b. 3	3	3	3	4	4
	c. 2	2	2	2	2	2
	d. 1	1	1	1	1	1
2	Hotel Non Bintang	126	131	154	155	153
3	Restoran/Rumah Makan	63	70	71	85	89

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kuningan menunjukkan tren positif dengan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kunjungan tercatat sebanyak 2.480.718 orang dan meningkat menjadi 2.668.442 orang pada tahun 2021. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, dengan 3.448.917 orang, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata setelah pandemi. Meskipun pada tahun 2023 jumlah kunjungan sedikit menurun menjadi 2.785.126 orang, namun pada tahun 2024, jumlah kunjungan kembali melonjak mencapai 3.824.520 orang, menandakan keberhasilan dalam pemulihan dan peningkatan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.80 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020 – 2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Wisata	2.480.718	2.668.442	3.448.917	2.785.126	3.824.520

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

c. Pertanian

Menurut data BPS, produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya tetap stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024, dengan rata-rata 6,19 ton per Ha setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya produksi padi, memiliki konsistensi yang baik dalam menghasilkan bahan pangan utama, meskipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh para petani.

Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 24,6%, dan terus menurun menjadi 23,9% pada tahun 2021, 23,8% pada tahun 2022, 23,7% pada tahun 2023, hingga mencapai 23,2% pada tahun 2024. Penurunan ini dimungkinkan terjadinya diversifikasi sektor ekonomi Kabupaten Kuningan yang semakin berkembang, dengan sektor lain yang turut berkontribusi lebih besar terhadap PDRB.

Tabel 2.81 Produktivitas dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha (ton)	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
2	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	24,6	23,9	23,8	23,7	23,2

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

d. Kehutanan

Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya hutan yang melimpah, yang penyebaran sumber daya tersebut hampir di seluruh kecamatan. Potensi kehutanan yang dimiliki di antaranya, yaitu hutan negara seluas 33.479,92 ha terdiri atas :

- Taman Nasional Gunung Ciremai 8.837 Ha
- Hutan produksi 24.634 Ha
- Taman Wisata Alam Linggarjati 8,92 Ha

Selain hutan Negara terdapat juga hutan rakyat yang tersebar di seluruh

kecamatan dengan luas 8.021 Ha.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kuningan memiliki beberapa potensi sumber daya energi dan mineral, di antaranya:

- Sumber daya mineral yang meliputi pasir, andesit, bentonit, onyx dan marmer, sirtu, kaolin, diatomit, tras, kalsit, batu gamping dan emas yang hampir semuanya telah diusahakan/ditambang, sehingga kegiatan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian.
- Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki adalah potensi Panas Bumi/Geotermal yang berada di Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, dan yang terletak di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Pemanfaatan bahan galian yang sudah intensif dilakukan terutama adalah bahan galian golongan C, yang lokasinya tergambar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.82 Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Kuningan

No	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan	Ket.
1	Batu Gamping	Luragung	Gunungkarung	Sumberdaya	
			Cirahayu		
			Luragung		
2	Bentonit	Luragung	Cikaduwetan	Tereka 490 m3	
		Cimahi	Karangkancana		
		Ciawigebang	Bendungan	Sumberdaya	
3	Kalsit	Ciniru	Rambatan	Sumberdaya	
4	Lempung	Ciniru	Bunigeulis, Tundagan	Sumberdaya	
5	Andesit	Jalaksana	Sidamulya	Cadangan Hipotenik	Tambang Rakyat
		Cigugur	Cisantana	251.583.445 m3	
6	Diatomit	Darma	Wadukdarma,	Hipotenik	
			Kawahmanuk	25,000 Tons	
7	Kaolin	Luragung	Margamukti	Hipotenik	
				25,000 Tons	
8	Onyx	Ciniru	Ciniru, Rambatan,	Sumberdaya	
			Cipedak		
9	Pasir	Cigugur	Cisantana	Cadangan Hipotenik	Tambang Rakyat
	Gunung Api	Cilimus	Linggasana, Linggajati	Cadangan Hipotenik	

No	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan	Ket.
		Mandirancan	Mandirancan,	50.606.950 Ton	
			Kertawinangun		
		Pasawahan	Cibuntu, Singkup		
10	Pasir	Cidahu	S. Ciparay, S. Ciberes, S. Cisanggarung, S. Cihirup		
		Ciawigebang		Sumberdaya telah diusahakan	
		Lebakwangi			
		Luragung			
11	Sirtu	Garawangi	S. Cisanggarung	Cadangan Hipotenik	
		Ciniru	S. Cipadak	650.000 m ³	
12	Tras	Jalaksana	Nanggerang	Sumberdaya	
13	Emas	Ciniru	Citapen	Sumberdaya	
		Hantara	Gunungmanik	Sumberdaya	KP
		Lebakwangi	Cipakem		Penelitian
14	Panas bumi/ Geotermal	Cigandamekar	Sangkanurip	Sumberdaya	Dalam proses
		Kramatmulya	Pajambon	Sumberdaya	oleh Dep. ESDM

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2018

f. Perdagangan

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional di Kabupaten Kuningan, tercatat bahwa pada tahun 2020 pendapatan mencapai 502.993 ribu rupiah. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 466.562 ribu rupiah dan kembali sedikit menurun pada tahun 2022 sebesar 462.173 ribu rupiah. Namun, pada tahun 2023 terdapat kenaikan kembali menjadi 468.051 ribu rupiah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Target dan Realisasi PAD dari Pasar Kabupaten Kuningan

Pasar	2020 (ribu rupiah)	2021 (ribu rupiah)	2022 (ribu rupiah)	2023 (ribu rupiah)	2024 (ribu rupiah)
Pasar Kepuh	296.648	275.450	276.277,5	276.487	374.178
Pasar Baru	170.045	162.120	170.617,5	170.617,5	199.262
Pasar Cilimus (Pujasera)					35.000

Pasar	2020 (ribu rupiah)	2021 (ribu rupiah)	2022 (ribu rupiah)	2023 (ribu rupiah)	2024 (ribu rupiah)
Pasar Ciputat	31.500	13.125			
Pasar Kadugede	4.800	4.800	4.800	16.146	4.800
Pasar Langlangbuana		11.067	10.478	4.800	1.000

Sumber: Bappenda Kab. Kuningan, 2025

g. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kuningan relatif stabil dengan sedikit fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri tercatat sebesar 2,2%, kemudian meningkat sedikit menjadi 2,3% pada tahun 2021 dan kembali menjadi 2,2% pada tahun 2022, sebelum mencapai 2,3% lagi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri terus memberikan sumbangan penting terhadap ekonomi daerah, meskipun kontribusinya tetap berada dalam kisaran yang stabil.

Tabel 2.84 Data Sektor Industri Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (persen)	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3
2	Pertumbuhan Industri	9,2	12,2	13	8,3	2
3	Industri besar	2	2	4	3	3
4	Industri menengah	1	1	0	0	1
5	Industri kecil dan mikro	420	420	3.961	6.466	8.592

Sumber : Kuningan Satu Data, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PDRB, dan SUSEDA, 2025

h. Transmigrasi

Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang dikenal dengan jumlah migrasi yang tinggi, namun mayoritas adalah transmigrasi yang sifatnya tidak resmi dan tidak tercatat oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan transmigran yang resmi dan tercatat jumlahnya sangat sedikit, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.85 Jumlah Transmigran Tahun 2020-2024

No	Transmigran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Orang				
1	Jumlah Transmigran yang Dibina	40	40	100	42 (Provinsi)	-
2	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan secara	-	-	-	-	-

No	Transmigran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Orang				
	resmi oleh Pemkab					

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan

Pelaksanaan fungsi perencanaan secara umum dilaksanakan oleh seluruh PD yang di koordinasikan melalui musyawarah pembangunan di semua tingkatan dari mulai desa, kecamatan dan kabupaten. Dalam perencanaan pembangunan daerah dititikberatkan kepada penyusunan program dan kegiatan tahunan melalui Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) serta penyediaan data dan informasi serta kajian permasalahan pembangunan yang terdiri dari bidang ekonomi, infrastruktur lingkungan hidup dan lingkungan, sosial budaya dan pemerintahan.

Dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan landasan strategis dalam pembangunan di tingkat daerah. Dokumen ini mencakup berbagai rencana jangka panjang, menengah, maupun pendek yang disesuaikan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Beberapa dokumen utama yang disusun Bappeda antara lain RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Melalui dokumen-dokumen tersebut, Bappeda mengintegrasikan aspirasi masyarakat, data sektoral, serta arah pembangunan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Tabel 2.86 Kinerja Perencanaan per Program Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	>90	>90	>90	>90	>90

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan

b. Keuangan

Tujuan fungsi keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan agar dapat berjalan efisien, efektif tepat sasaran dan tercapainya target yang direncanakan. Hal ini sebagai upaya memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang diprogramkan. Selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2023, Kabupaten Kuningan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerahnya. Opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Konsistensi pencapaian ini menjadi indikator positif atas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Namun pada Tahun 2024 capaian turun menjadi WDP, hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan agar bisa ditingkatkan lagi menjadi WTP. Berikut merupakan Indikator kinerja keuangan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.87 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: Inspektorat Kab. Kuningan

c. Pengawasan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan fungsi pengawasan terus ditingkatkan, baik pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun pengawasan langsung oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah di semua tingkatan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Beberapa indikator kinerja pengawasan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.88 Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Persen	84,17	85	82,01	72,47	69,43

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	RI yang ditindaklanjuti						
3	Prosentase Pelanggaran Pegawai	Persen	n/a	0,09	0,07	0,12	0,07

Sumber: Inspektorat Kab. Kuningan

d. Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.89 Nilai SAKIP Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Level	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten berada pada level B. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pencapaian level B selama lima tahun berturut-turut mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan untuk mencapai level yang lebih tinggi seperti BB atau A.

2) Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.90 Skor Kinerja LPPD Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Skor LPPD	Poin	0	2,81	3,1486	n/a	3,3782

Sumber: website www.kemendagri.go.id

e. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu forum komunikasi Ormas, Orsos, dan LSM.

2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa penyusunan database partai politik, verifikasi bantuan partai politik, sosialisasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu bagi pemilih pemula, Forum komunikasi generasi muda partai politik, pendampingan pengurus partai politik, serta

sosialisasi pemilih pemula.

Tabel 2.91 Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	10	15

Sumber : Bakesbangkpol Kabupaten Kuningan

4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam kerangka RPD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam kerangka RPD Tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Kuningan memuat 5 (lima) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi pembangunan dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPD Tahun 2024-2026, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2024 dan evaluasi terhadap capaian indikator. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.92 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Daerah RPD Kab. Kuningan 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target		Kondisi Akhir RPD
							2025	2026	
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	Poin	0,336	0,379	0,332	0,328	0,328
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98
			Pengeluaran per kapita	Ribu	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	97,54	96,42	97,54	97,94	97,94
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,28	71,56	71,79	72,31	72,31
		Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	7,90	12,79	12,89	12,89
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8	12,27	8,09	8,18	8,18
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08
			Prevalensi Stunting	Persen	16	22,7	15	14	14

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target		Kondisi Akhir RPD
							2025	2026	
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,49	88,00	87,75	88,01	88,01
		Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,46	3,82	3,51	3,56	3,56
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	130	105,27	129	128	128
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target		Kondisi Akhir RPD
							2025	2026	
		Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon dan Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	129	105,27	128	128	128
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Pelayanan Infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	86	82,352	86.8	87,79	87,79
			Tingkat kemandapan jalan						
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,16-5,66	5,61	5,18-5,71	5,66-5,76	5,66-5,76
		Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang Disertai dengan Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51-9,21	7,78	8,32-9,05	8,13-8,89	8,13-8,89

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target		Kondisi Akhir RPD
							2025	2026	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum PDRB /Pariwisata	Persen	1,75-1,92	1,95	1,75-1,94	1,75-1,96	1,75-1,96
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,31	5,83	2,32	2,34	2,34
			Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	Persen	4,83	0,32	4,84	4,85	4,85
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52
			Kontribusi Sektor Pertanian	Persen	n/a	23,23	24,49	24,57	24,57
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03
T5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B	B	B

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target		Kondisi Akhir RPD
							2025	2026	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,7	82,23	86,4	87,1	87,1
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B	B	B
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45,03	29,82	53,76	62,49	62,49

Sumber: perangkat daerah Kabupaten Kuningan, 2025

Tabel 2.93 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,16	69,45	70,16	69,66	70,99	70,86-71,40	71,56
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32	0,60	1,04	0,60	1,05	1,28	1,04
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	13,06	12,76	12,74	12,12	11,12-12,72	11,88

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	11,01	9,81	10,14	9,49	9,04-11,21	7,78
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	1,90 - 3,00	5,53	2,00-3,45	5,25	0,19-7,20	5,61
6	Indeks Gini	Poin	0,345	<0,38	0,345	<0,38	0,351	0.336	0,379
7	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	24,68	24,68	24,83	-	27,08	25,22	29,27

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuningan, BPS Kab. Kuningan, 2025

Tabel 2.94 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,53	-1,11 – 6,04	5,61	-1,50 – 5,66	-1,88 – 5,27	-1,88 – 5,27	BPS
2	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp. (juta)	18.450.340	18.615.813 – 20.580.520	16,89	19.115.365 - 21490552	19.619.790 – 22.395.712	19.619.790 – 22.395.712	BPS
3	Indeks Gini	Poin	0,345	0,336	0,379	0,332	0,328	0,328	BPS
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98	BPS
6	Garis Kemiskinan	Rp	371.665	374.473 – 414.273	420.867	382.600 – 429.041	391.138 – 443.398	391.138 – 443.398	BPS
8	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional (PPMI)/Miskin Ekstrem	persen	10,83	9,02	8.80	8.92	8.12	8.12	Dinsos
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	persen	2,14	1,09 – 2,52	2,02	1,06 – 2,51	1,04 – 2,49	1,04 – 2,49	BPS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	IPM :	Poin	70,16	70,86-71,40	71,56	71,31-71,85	71,76-72,52	70,86-71,40	BPS
	- Indeks Pendidikan	Poin	60,27	61,68-61,96	61,89	61,89-62,66	62,64-63,28	62,64-63,28	BPS
	- Indeks Kesehatan	Persen	83,12	83,78-84,24		84,14-84,70	84,62-84,83	84,62-84,83	BPS
	- Indeks Pengeluaran	Poin	68,95	69,72-70,24	71,39	70,18-70,68	70,62-70,98	70,62-70,98	BPS
11	Angka Harapan Lama sekolah / EYS	Tahun	12,24	12,68	12,27	12,79	12,89	12,89	Disdikbud
12	Indeks Harapan Lama sekolah	Poin	68	70,47	70,47	71,05	71,64	71,64	Disdikbud
13	Angka Rata-rata Lama Sekolah / MYS	Tahun	7,88	8	7,9	8,09	8,18	8,18	Disdikbud
14	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	52,53	53,32	53,32	53,94	54,57	54,57	Disdikbud
15	Umur harapan hidup (UHH)	Tahun	74,03	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08	BPS
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	55	65	79,83	70	75	75	Dinkes
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	61,8	62,57-65,03	65,84	63,54-66,02	64,51-67,01	64,51-67,01	BPS / Bappeda
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	9,04-11,21	7,78	9,26-11,49	9,47-11,77	9,47-11,77	BPS / Bappeda
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12,93	15,49	10,91	15,94	16,31	16,31	Bappeda
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,89	1,75 – 1,92	1,95	1,75 – 1,94	1,75 – 1,96	1,75 – 1,96	BPS/Bappeda
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32**	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24	BPS / Bappeda
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	5,61	-7,06	-7,12	-7,12	BPS / Bappeda
23	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta (Rp)	24,68	25,22	29,27	25,76	26,3	26,3	BPS / Bappeda
24	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	Ribu (Rp)	9.620	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210	BPS / Bappeda
25	Rasio Penduduk yang Bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	86,07	86,5	92,22	86,75	87	87	Disnakertrans
26	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	542.782	552.782	618.129	562.782	572.782	572.782	Disnakertrans
27	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	6	10	14,97	15	20	20	Diskatan
28	Angka Kematian Bayi (/1000)	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	Dinkes
28	Angka Kematian Ibu (/100.000)	Kasus	24	23	13	22	22	22	Dinkes
29	Persentase Stunting pada balita	Persen	19,4	16	7,9	15	14	14	Dinkes
30	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,17	87,02	88	87,04	87,06	87,06	BPS
32	Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan/ODF	Persen	66,49	80	100	83	85	85	Dinkes
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.211.684*	1.195.965-1.580.871	1.161.901	1.260.149-1.655.840	1.324.436-1.730.706	1.324.436-1.730.706	BPS/Bappeda
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,29	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52	DKPP
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per papita (cek data)	Persen	44,79*	28,40-62,57	45,98	26,22-64,67	24,25-66,56	24,25-66,56	BPS/Bappeda
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,7446	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793	DPMD
9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	106,49	130	105,27	129	128	128	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,7	0,68	0,71	0,72	0,72	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	85,7	82,23	86,4	87,1	87,1	Bappeda
12	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Kuningan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri (PDN).	Persen	40	50	40	55	60	60	DKUKMPERIN DAG
13	Nilai SAKIP	level / skor	B	B	B	B	BB	BB	Bag. Org / Inspektorat
14	Indeks Reformasi Birokrasi	level / skor	CC	CC	BB	CC	B	B	Bag. Org / BKPSDM
15	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74	76,5	75	76	76	Satpol PP, BPBD
16	Opini BPK	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	BPKAD
17	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Skor	3,02	1,30 – 1,44	3,82	1,45 – 1,60	1,61 – 1,95	1,61 – 1,95	Bappeda
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
	PENDIDIKAN :								Disdikbud
1	APK PAUD usia 5-6 tahun	Persen	93,58	93,98	98,05	94,25	94,6	94,6	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	910	920	933	925	930	930	
3	Jumlah PAUD Holistik integratif	Lembaga	100	150	200	200	300	300	
4	APK SD/Paket A	Persen	100,01	100,02	100	100,02	100,03	100,03	
5	APM SD/Paket A	Persen	99,99	99,91	98,52	99,92	99,92	99,92	
6	APK SMP/Paket B	Persen	99,35	99,52	100	99,65	99,8	99,8	
7	APM SMP/Paket B	Persen	79,63	93,65	81,30	93,95	94,05	94,05	
8	Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	Lembaga	50	55	85	57	60	60	
9	Angka Partisipasi usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan	Persen	95,15	95,4	96,1	95,55	95,7	95,7	
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,81	1,9	89,09	1,9	1,9	1,9	
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,7	1,8	85,31	1,8	1,8	1,8	
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,84	1,9	79,68	1,9	1,9	1,9	
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,73	1,8	75,64	1,8	1,8	1,8	
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi Minimal B	Persen	36,06	36,7	40,7	37,05	37,65	37,65	
15	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	97,56	97,6	97,8	97,65	97,98	97,98	
16	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	84,82	85,1	92,5	85,55	85,8	85,8	
17	Guru PAUD profesional	Persen	23,37	23,5	67,85	23,87	24,17	24,17	
18	Guru Profesional SD	Persen	59,08	59,3	71,77	59,65	59,9	59,9	
19	Guru Profesional SMP	Persen	58,98	59,25	68,3	59,85	60,05	60,05	
20	Persentase kepala sekolah profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Guru Layak PAUD	Persen	74,08	74,28	76,94	74,75	74,94	74,94	
23	Persentase Guru Layak SD	Persen	95,56	95,76	97,74	95,9	96,1	96,1	
24	Persentase Guru Layak SMP	Persen	98,92	98,96	98,98	98,98	98,99	98,99	
25	Rasio Kelas Layak PAUD	Persen	73,69	73,94	87,08	74,19	74,5	74,5	
26	Rasio Kelas Layak SD	Persen	85,66	86,26	90,27	86,86	87,3	87,3	
27	Rasio Kelas Layak SMP	Persen	97,95	97,99	98,08	98,08	98,2	98,2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	KESEHATAN :								
1	Prevalensi Wasting pada Balita	Persen	6,5	6	4,54	5,5	4	4	Dinkes
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kasus	24	23	13	22	22	22	
4	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	56	56	54	57	58	58	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	127	100	100	100	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,16	98	72,4	98	98	98	
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94,59	95	54,3	96	97	97	
8	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Poin/ 100.000 Penduduk	4,5	4,5	7	4,5	4,5	4,5	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC semua kasus	Persen	88	95	72	95	97	97	
10	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	54	40	7	35	35	35	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
13	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	83,81	100	100	100	
14	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90	95	70	95	96	96	
15	Cakupan pelayanan nifas	Persen	96,3	97	70	97	98	98	
16	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	53,4	100	58	100	100	100	
17	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	81,2	100	100	100	
18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99,41	100	99,67	100	100	100	
19	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	
21	Jumlah PBI BPJS/KIS	Orang	619.894	1.114.110	761.161	1.215.392	1.316.675	1.316.675	
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PISPK dengan Intervensi keluarga	Persen	99,12	100	100	100	100	100	
24	Persentase puskesmas yang melakukan tata kelola masyarakat	Persen	13,51	25	40,54	35	45	45	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	dengan indikator kinerja baik								
25	Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan tradisional	Persen	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase puskesmas yang melaksanakan layad rawat tidak terencana	Persen	0	40	40	60	70	70	
28	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	8,16	9,96	9,62	10,86	11,76	11,76	
29	Proporsi kusta baru tanpa cacat	Persen	67,3	70	50	80	90	90	
30	<i>Release From Treatment</i> (RFT) rate kusta PB dan MB	Persen	91	92	84,5	93	95	95	
31	Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV	Persen	95	95	70	95	95	95	
32	Insidensi HIV	Per 1.000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
33	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	Persen	92	92	83,2	92	92	92	
34	Prevalensi Malaria (Annual Parasite Incidence/API)	API per 1000 penduduk	0,0000009	<1	0	<1	<1	<1	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	49%	60%	53%	65%	70%	70%	RSUD 45
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	4 hari	6 hari	3 hari	6 hari	6 hari	6 hari	RSUD 45
3	Rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	RSUD 45
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	per 1000	54 per 1000	40 per 1000	51 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	RSUD 45
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	per 1000	29 per 1000	24 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	RSUD 45
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	Kali	52 kali	50 kali	67kali	50 kali	50 kali	50 kali	RSUD 45
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	76.95	78	80,49	79	80	80	RSUD 45
8	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80	standar akreditasi	paripurna	-	Paripurna	-	paripurna	paripurna	RSUD 45
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	67,67	68,77	51,71	69,37	70	70	RSUD Linggarjati
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	3,67	4	2,69	5	6	6	RSUD Linggarjati

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	2,29	2,59	4,1	2,89	3	3	RSUD Linggarjati
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	persen	32,53	32	19,33	31,5	30	30	RSUD Linggarjati
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	persen	18,05	17,5	10,44	17	16,5	16,5	RSUD Linggarjati
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	Kali	51,45	51,3	47,04	51	50	50	RSUD Linggarjati
7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80	standar akreditasi	paripurna	-	Paripurna	-	paripurna	paripurna	RSUD Linggarjati
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	73,3	75	81,49	78	80	80	RSUD Linggarjati
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :								DPUTR
1	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	63,23	64	66,97	65	66	66	
2	Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,1	94,19	91,75	95,74	97,29	97,29	
3	Akses Sanitasi Layak	Persen	93,65	96,33	96,68	97,68	99,02	99,02	
4	Persentase Kemantapan jalan	Persen	80,69	86	82,352	86,8	87,9	87,9	
5	Persentase keselamatan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	30	60	-	75	100	100	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN :								DPKPP
1	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	Ha	54,35	2	9,6	2	2	60,35	
3	Persentase rumah layak huni	Persen	97,21	97,55	96,42	97,75	97,94	97,94	
4	Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani	Km	149,96	50	95,82	50	50	299,96	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :								
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	n/a	90	90	91	92	92	Satpol PP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Persen	84	85	86	86	87	87	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	93	95	96	96	97	97	
4	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	95	95	96	96	97	97	
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	90.98	100	100	100	100	100	BPBD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	92.02	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	30	10	18	10	10	30	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	92	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	81	75	93,47	80	85	85	
	SOSIAL :								Dinsos
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	24.09	30	4,31	40	45	45	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	Persen	70.40	75	100	80	80	80	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
	TENAGA KERJA :								
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat	Orang	470	304	426	336	368	1008	Disnakertrans
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	50	50	93	55	60	60	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :								DPPKBP3A
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100%	80%	11%	80%	80%	80%	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100%	80%	76%	80%	80%	80%	
4	Rasio KDRT	Persen	0,0001	0,0001	0,000043	0,0001	0,0001	0,0001	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per- 100.000 penduduk perempuan)	per-100.000	8	8	6,9	7,8	7,6	7,6	
6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Belanja Langsung APBD	persen	55%	8%	32%	10%	12%	12%	
7	Persentase perempuan kepala keluarga berdaya ekonomi yang dibina	persen	0,626	0,645	0,645	0,657	0,669	0,669	
	PANGAN :								
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	93,2	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03	Diskatan
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	68	2	4	2	2	74	Diskatan
	PERTANAHAN :								DPKPP
1	Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
	LINGKUNGAN HIDUP :								DLH
1	Penanganan Sampah	Ton	107.441	103,946	108189	104.439	105.929	105.929	
		Persen	61,09	58,2	59,76	57,8	57,4	57,4	
2	Pengurangan Sampah	Ton	11.200	10.716	15.728	11.022	11.333	11.333	
		Persen	22	6	8,73	6,1	6,2	6,2	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,93	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58	
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	51,11	50,1	54,44	50,2	50,3	50,3	
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	86,96	84,5	92,84	84,6	84,7	84,7	
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	57,05	59	63,82	60	61	61	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :								Disdukcapil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	100	83	98,34	84	85	85	
2	Cakupan Kepemilikan KTP eL	Persen	99,4	98,5	99,06	98,75	99	99	
3	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	43,46	35	55,20	37,5	40	40	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	94,21	89	96,36	90	91	91	
5	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerja sama	Persen	24	39	74,54	44	49	49	
8	Persentase pemenuhan layanan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Persen	100	100	100	100	100	100	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :								DPMD
	Indeks Desa Membangun (IDM)								
1	Desa Status : Mandiri	Desa	183	10	134	10	10	213	
2	Desa Status : Maju	Desa	62	15	215	15	15	107	
	- Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	48	60	49,86	70	80	80	
	- Jumlah BUMDES yang berbadan hukum	Unit	53	7	132	8	8	23	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA :								DPPKBP3A
1	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))	persen	67,24	67,24	66,4	67.34	68	68	
2	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)	point	52,73	52,73	62,68	52.93	53,15	53,15	
3	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)	persen	20,86	20,76	10,3	20,56	20,46	20,46	
4	ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	kelahiran	17,1	17	18,7	16,9	16,8	16,8	
5	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	tahun	20	20	20,9	20,5	20,5	20,5	
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	anak	2,3	2,3	2,03	2,25	2,2	2,2	
	PERHUBUNGAN :								
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	49	53	55,58	55	57	57	Dishub
2	Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	Persen	27,12*	30	30,20	32	34	34	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:								Diskominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (LPPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1,162	8	8	8	8	8	Diskominfo
3	Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Diskominfo
4	Indeks SPBE	Point	2.88	3	3,57	3.1	3.2	3.2	Diskominfo
5	Pengentasan Desa Blank Spot	Desa	1	5	2	5	5	5	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (LPPD)	Persen	80	82	84	85	89	89	Diskominfo
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:								
1	Jumlah koperasi aktif	Unit Usaha	492	20	537	25	30	567	Diskopdagperi n
2	Jumlah koperasi sehat	Unit usaha	75	75	85	75	75	300	Diskopdagperi n
3	Jumlah koperasi binaan	Orang	100	50	799	50	50	250	Diskopdagperi n
4	Jumlah koperasi modern	Orang	n/a	50	70	50	50	150	Diskopdagperi n
5	Jumlah UKM binaan	Unit Usaha	1317	100	254	100	100	1617	Diskopdagperi n
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	563	250	300	950	Diskopdagperi n
	PENANAMAN MODAL:								DPMPTSP
1	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi	1	3	0	3	3	10	
2	Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi	3	2	2	2	2	9	
3	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Laporan	1	2	2	2	2	2	
4	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	2	4	4	4	4	4	
5	Media informasi perizinan dan nonperizinan	Media	2	2	2	2	2	2	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :								Dispora
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,03	0,5	0,5	0,5	0,5	10.53	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	Orang	150	200	200	250	300	300	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	19	6	58	8	10	43	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	STATISTIK :								
1	Jumlah Produsen Data	SKPD/NON SKPD	60	60	70	70	80	80	Diskominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
4	Jumlah Metadata Statistik	OPD/NON OPD	26	40	60	50	60	60	Diskominfo
	PERSANDIAN :								
1	Jumlah Sertifikat TTE yang diterbitkan	Sertifikat TTE	997	1200	1350	1400	1600	1600	Diskominfo
	KEBUDAYAAN :								Disdikbud
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	143	143	143	143	143	143	
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya	24	24	24	24	24	24	
5	Jumlah Pengunjung Museum	Orang	34.489	36.390		38.392	40.192	40.192	
	PERPUSTAKAAN :								Dinas Arsip Perpus
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	buku	26150	30150	16943	32150	34150	34150	
2	Jumlah Perpustakaan Binaan	perpustakaan	70	100	1180	125	150	150	
3	Jumlah SDM Perpustakaan Binaan	orang	70	100	207	125	150	150	
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	8750	10000	101052	11000	12000	12000	
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (LPPD)	Persen	0	32,5	79,85	34,5	36	36	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD)	Poin	0	68,5	70,85	69	70	70	
	KEARSIPAN :								Dinas Arsip Perpus
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	85	90	90	92	93	93	
2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina	Orang	62	124	80	186	186	186	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip (LPPD)	Box	0	5	5	8	10	10	
	Layanan Urusan Pilihan								
	PARIWISATA :								Dispar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.448.917	3.793.809	3.824.520	4.173.190	4.590.509	4.590.509	
2	Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	Daya Tarik Wisata (DTW)	12	3	15	4	5	24	
3	Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif	Orang	n/a	50	50	50	75	175	
4	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	Orang	25	50	75	50	75	200	
	PERTANIAN :								
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	23,23	24,49	24,57	24,57	Diskatan
	Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Ekor		4678		4702	4725	4725	DISKANNAK
	Produksi Daging (Ton) :								DISKANNAK
1	1. Daging Sapi	Ton	2.352	2.259	2.866	2.282	2.305	2.305	DISKANNAK
2	2. Daging Domba/Kambing	Ton	1.430	1.348	1.488	1.361	1.375	1.375	DISKANNAK
3	3. Daging Ayam Buras	Ton	591	648	716	681	715	715	DISKANNAK
4	4. Daging Ayam Ras Petelur	Ton	1.777	1.479	2.179	1.509	1.539	1.539	DISKANNAK
5	5. Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	30.006	31.679	33.415	32.63	33.609	33.609	DISKANNAK
	Produksi Telur (Ton) :								DISKANNAK
6	1. Telur Ayam Buras	Ton	1.361	1.493	1.496	1.568	1.646	1.646	DISKANNAK
7	2. Telur Ayam Ras Petelur	Ton	21.823	18.168	26.763	18.531	18.902	18.902	DISKANNAK
8	3. Telur Itik	Ton	469	484	559	499	514	514	DISKANNAK
9	Produksi Susu Sapi (Ton) :								DISKANNAK
10	Susu Sapi Perah	Ton	18.402	18.979	18.107	19.074	19.17	19.17	DISKANNAK
	Populasi Ternak (Ekor) :								DISKANNAK
11	1. Sapi Perah	Ekor	7.278	7.943	7.943	8.022	8.102	8.102	DISKANNAK
12	2. Sapi Potong	Ekor	30.631	30.559	30.559	31.17	31.794	31.794	DISKANNAK
13	3. Kerbau	Ekor	4.647	4.678	4.678	4.702	4.725	4.725	DISKANNAK
14	4. Domba	Ekor	136.620	133.79	133790	134.459	135.131	135.131	DISKANNAK
15	5. Kambing	Ekor	7.725	7.718	7.718	7.756	7.795	7.795	DISKANNAK
16	6. Ayam Buras	Ekor	634.796	696.545	696.545	731.373	767.941	767.941	DISKANNAK
17	7. Ayam Ras Petelur	Ekor	1.908.399	1.588.772	2.340.353	1.620.548	1.652.959	1.652.959	DISKANNAK
18	8. Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.814.651	4.027.412	4.248.100	4.148.235	4.272.682	4.272.682	DISKANNAK
19	9. Itik	Ekor	74.710	75.836	89.072	76.595	77.361	77.361	DISKANNAK
20	Bahan Pangan Asal Hewan (Ton)	Ton	-	surplus	Surplus	surplus	surplus	surplus	DISKANNAK
21	Penanggulangan Kemiskinan (RTP)	RTP	304	731		733	774	774	DISKANNAK
22	Terlaksananya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	-	7	-	8	10	10	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	PERDAGANGAN :								
1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	-	1	1	7	Diskopdagperin
2	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Laporan	8	5	5	5	5	23	Diskopdagperin
3	Nilai ekspor bersih perdagangan	USS	6.861.579	1.772.802	3.579.914	1.882.802	1.992.802	12.509.985	Diskopdagperin
4	Jumlah alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.528	5.000	5.000	21.392	Diskopdagperin
5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	produk	n/a	50	352	50	50	150	Diskopdagperin
	PERINDUSTRIAN :								
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	1	2,32	2,34	2,34	Diskopdagperin
2	Pertumbuhan Industri	Persen	13	2	2	2	2	2	Diskopdagperin
3	Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	77	50	50	190	Diskopdagperin
	TRANSMIGRASI :								Disnakertrans
1	Jumlah Translok yang diberdayakan	Orang	n/a	40	n/a	60	80	80	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN :								
1	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Ikan Kecil	Ton	24.567,65	28.500	27.000	30.500	32.500	32.500	Diskanak
2	Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan (NTP)	Persen	102,75	104,2	113,86	104,5	105	105	Diskanak
3	Tingkat produksi perikanan budidaya	Ton	24.567,65	28,5	27.000	30,5	32,5	32,5	
4	Cakupan kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	700	1000	680	1100	1200	1200	
5	Jumlah Rumah Tangga perikanan	Orang	12.238	23	22.026	24	25	25	
6	Pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar berbasis kearifan lokal	Unit	n/a	2	0	4	6	6	
7	Peningkatan Produksi Non Kosumsi	Persen	n/a	10.5	0	15	20	20	
8	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
9	Tingkat kesejahteraan nelayan (NTN)	Persen	102,95	102,75	101	103	103,25	103,25	Diskanak
10	Tingkat produksi perikanan tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
11	Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	13	20	13	25	30	30	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
12	Jumlah Rumah Tangga Nelayan	Orang	1,85	1.800	1.500	1.900	2.000	2.000	
13	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	210,59	250	923	260	275	275	
14	Tingkat kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persen	102,1	101,5	99	102,25	103	103	Diskanak
15	Tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	210,59	250	923	260	275	275	
16	Cakupan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelompok	37	40	40	50	60	60	
17	Jumlah Rumah Tangga pengolah dan pemasar	Orang	1.750	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	
18	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	25	27	31	27	27	27	
19	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ha	200	200	200	200	200	200	
20	Rasio Kawasan Perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	200	200	200	200	200	200	Diskanak
21	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	14	8	14	5	2	2	
22	cakupan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	Kelompok	3	4	4	5	6	6	
	Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	SEKRETARIAT DAERAH :								Setda
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	n/a	70-75	100	75-80	>80	>80	Barjas
2	Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	n/a	85	100	90	95	95	
3	Persentase Nilai Paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang diinput pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	n/a	90	100	95	100	100	
4	Persentase Perumusan Kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek Pembangunan	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	Adpem
5	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	
6	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan BLUD	Persentase	n/a	5	1,5	5	5	5	Ekonomi
7	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian perekonomian dan Sumber daya Alam	Persentase	n/a	85	100	85	85	85	
8	Nilai LPPD Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Level & Score	n/a	3,1	belum tersedia	3,2	3,3	3,3	Tapem
9	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	n/a	84	100	85	86	86	
10	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	Hukum
11	Persentase Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan : Jumlah Bahan Kebijakan Daerah yang diusulkan sebagai Produk Hukum	Persentase	n/a	>80	100	>90	>90	>90	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Hukum terintegrasi	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	
13	Persentase Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Individu yang dibina dan difasilitasi	Persentase	20	20	100	20	20	20	Kesra
14	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
15	Persentase bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan	Persentase	n/a	80	66,69	80	80	80	
16	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal SETDA	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	Umum
17	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Program, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	Perencanaan & Keuangan
18	Persentase Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan bagian pada Sekretariat Daerah	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	
19	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Berbasis SPBE	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	
20	Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keprotokolan	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	Prokompim
21	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persentase	n/a	80	100	80	80	80	
22	Jumlah viewer hasil publikasi dan Dokumentasi	Orang	n/a	750	750	1000	1080	1080	
23	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien	Persentase	n/a	80	100	80	85	85	Organisasi
	Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN :								Bappeda
1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kesesuaian Program/kegiatan di RKPD dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	Dokumen	4	4	4	4	4	12	
4	Dokumen Perencanaan (RPJP; RPD dan RKPD)	Dokumen	2	4	4	4	2	10	
	KEUANGAN :								
1	Penetapan APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2	Persentase Laporan Aset Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0.5	1	0,42	1.5	1.5	1.5	Bappenda
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Persen	68	70	80	75	80	80	
3	Jumlah Layanan Pajak Daerah	WP	3630	800	5335	900	1000	1000	
4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	89,98	95	94,99	96	97	97	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :								BKPSDM
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	57	57	78,23	60	63	63	
2	Indeks Sistem Merit	Point	282	290	289	290	325	325	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :								Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Kajian Isu Pembangunan	Dokumen	5	2	2	2	2	6	
2	Inovasi Daerah	Buah	1	1	1	1	1	3	
	SEKERTARIAT DPRD :								Sekretariat DPRD
1	Pelayanan Administrator Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
	PENGAWASAN :								Inspektorat
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kuningan	Persen	71,65	70	76	71	72	72	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Persen	76,7	74	75	74	75	75	
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	82,31	82	69	83	83	83	
4	Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	OPD	26	10	29	12	15	15	
5	Level SPIP	Level	3	2	3	2	3	3	
6	Capaian Nilai MCP	Nilai	91	70	88	73	75	75	
7	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	
	Layanan Unsur Pemerintahan Umum								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :								Kesbangpol
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	74,11* (2019)	75	76,44	-	-	75	
2	Pembinaan Kesadaran Politik Masyarakat	Orang	340	300	450	300	300	300	
3	Pembinaan Ideologi Negara dan Karakter Kebangsaan	Orang	400	300	558	300	300	300	
4	Indeks Toleransi Beragama	Poin	72,39	70	76,49	70	70	70	
	Layanan Unsur Kewilayahan								
	KECAMATAN :								32 Kecamatan
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	63	64	65	65	66	66	Karangkancana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan Karangkancana	Persen	63	65	66	-	-	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	190	195	196	200	210	210	
5	Jumlah KK Miskin	KK	300	309	310	290	261	261	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Karangancana	Keluarga	70	60	61	40	25	25	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	71	75	76	83	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	76	77	78	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	83	84	85	85	86	86	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	251	252	253	253	254	254	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Ciniru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	90	80.30%	-	-	90	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	78	75%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	815	820	810	850	870	870	
5	Jumlah KK Miskin	KK	409	390	380	350	330	330	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	380	350	345	300	280	280	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	97	97	315	97	99	99	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90%	95	96	96	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	87	95	96	96	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	324	325	324	330	335	335	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	40	60	60	70	80	80	Jalaksana

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	90	70	72	-	-	70	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	302	302	302	302	302	302	302	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7768	7768	7768	7768	7768	7768	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7768	7768	7768	7768	7768	7768	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	90	90	60	90	90	90	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	168	168	168	168	168	168	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	24	24	24	24	24	24	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	600	600	600	600	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	900	900	900	900	900	900	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	93	65	96	100	100	Lebakwangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	100	100	66	-	-	100	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	100	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	331	365	196	400	450	450	
5	Jumlah KK Miskin	KK	100	95	310	90	85	85	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1705	1875	1896	2062	2268	2268	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	155	155	15	155	155	155	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	83	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	450	470	303	525	575	575	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang	Persen	100	100	90	100	100	100	Darma

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	diatasi								
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	90	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	100	90	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	600	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	1	1	90	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	150	200	90	250	300	300	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	90	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	85	90	95	95	Maleber
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	80	80	70	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	100	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	2148	2198	2158	2248	2298	2298	
5	Jumlah KK Miskin	KK	268	750	750	98	48	48	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	940	900	900	880	850	850	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	185	185	185	185	185	185	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	95	95	97	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	957	1000	960	1070	1100	1100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	384	404	385	408	412	412	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100%	100	100	100	Ciwaru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	90	58.53%	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80	80	80%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	745	715	603	625	550	550	
5	Jumlah KK Miskin	KK	4294	3894	1800 KK	2294	1294	1294	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	85%	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90%	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11									
12	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130		140	150	150	
13	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	196	310	320	320	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	62	63	70	64	66	66	Pancalang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	62	65	65	-	-	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	95	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	128	140	140	154	169	169	
5	Jumlah KK Miskin	KK	342	308	308	278	251	251	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	66	50	50	35	22	22	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	77	65	84	92	92	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	76	76	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	85	80	86	87	87	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	251	240	252	253	253	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	75	80	75	85	90	90	Cimahi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	87	67,87	-	-	87	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	78	80	85	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1231	350	355	380	400	400	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	1880	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	2415	1875	1880	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	60	70	75	85	85	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	85	90	95	111	111	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	88	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	245	75	250	280	280	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	115	135	67,87	145	175	175	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Kadugede
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75.6	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1500	1725	91	2000	2314	2314	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	120	133	120	120	120	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam	Persen	70	85	80	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan								
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	95	100	130	130	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	75.6	120	150	150	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	79	81	80	83	87	87	Cibingbin
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	82	82	-	-	82	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	80	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	700	705	700	710	750	750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	200	200	200	200	200	200	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	515	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	125	122	127	130	130	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	80	80	82	84	84	Cigandamekar
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	65.8	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.744	1.918	1,918	2.110	2.321	2.321	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	107	117	117	128	140	140	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	490	500	500	550	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	301	331	331	364	400	400	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Mandirancan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	70	70	70	-	-	70	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	74	80	83	83	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	600	620	615	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1570	1410	1320	1294	1120	1120	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	700	750	750	950	1050	1050	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	130	130	140	130	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	80	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	70	75	75	80	85	85	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya(katagori Perizinan)	Dokumen	245	250	250	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	75	90	95	95	Japara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	60	65	65	-	-	65	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1007	1015	1010	1025	1035	1035	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3075	2767	2499	2490	2241	2241	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	480	500	2958	525	550	550	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	108	108	108	108	108	108	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	350	355	98	360	365	365	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Garawangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	550	550	600	630	630	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	231	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2415	1875	231	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	60	60	65	60	60	60	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	178	178	95	178	178	178	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	139	100	160	160	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	426	100	120	120	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Cilebak
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75	-	-	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	75	80	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	237	262	250	300	300	300	
5	Jumlah KK Miskin	KK	415	400	300	385	360	360	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	109	109	260	100	100	100	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	79	80	80	80	80	80	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	85	100	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	60	70	60	70	70	70	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	255	245	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Subang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	75	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	630	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	112	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	85	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	145	200	235	235	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	183	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang	Persen	70	73	71	75	78	78	Ciawigebang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	diatasi								
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	75	80	70.30%	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	95%	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	9,253	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	10,343	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,528	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	315	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	75%	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	71	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	70.30%	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	99	100	100	100	100	100	Cibeureum
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	95	63	-	-	95	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	77	93	85	94	95	95	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	0	0	0	0	0	0	
5	Jumlah KK Miskin	KK	576	500	480	450	400	400	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	95	95	89	95	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90	95	97	97	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	92	95	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap	Dokumen	210	230	225	245	250	250	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	tahunnya								
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Nusaherang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	72.36%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	75	80%	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	550	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	14,539	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	120	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	90	90	100%	90	90	90	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90%	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	100	125	1,425	140	200	200	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	220	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	80	80	82	84	84	Kramatmulya
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	471	471	663	874	874	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	112	112	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	250	600	280	310	310	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap	Dokumen	250	280	80	313	349	349	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	tahunnya								
1	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Cigugur
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Cigugur	Lokasi	78	>78	8	>78	>78	>78	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	5	5	15	10	15	15	
6	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	500	620	640	640	
7	Jumlah Keluarga Miskin Yang Diberdayakan di Wilayah Kecamatan	Keluarga	462	82	82	100	130	130	
8	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	90	70	100	120	120	
9	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	90	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	107	316	132	316	316	316	
13	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	2041	646	1840	650	650	650	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Cidahu
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	72	82	65%	-	-	82	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	350	325	400	500	500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1.349	1.200	1,1	1.000	900	900	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1.290	1.000	700	900	800	800	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	90	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	144	150	150	150	150	150	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	90	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	305	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	300	175	320	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	75	100	100	100	Hantara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	70	72	81%	-	-	72	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	75%	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	705	776	327	854	862	862	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1586	1427	379	1284	1156	1156	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	777	855	340	941	1035	1035	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	172	172	100%	172	172	172	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	80	90%	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	87	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen			324				
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Pasawahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	76	76	-	-	76	
3	partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	82	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	156	159	159	162	165	165	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2051	1876	1876	1576	1500	1500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan	Orang	110	110	110	110	110	110	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	kapasitas								
9	Tingkat kepatuhan aparaturnya Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	486	506	100	528	548	548	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (Kategori Perizinan)	Dokumen	568	588	76	608	628	628	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	0	10	8%	10	10	10	Cipicung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	85	78%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	65	70	65%	74	77	77	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	885	850	950	1055	1055	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1476	1358	1458	1277	1179	1179	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1476	1358	1358	1277	1179	1179	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	70	68	80	100	100	
8	Jumlah aparaturnya pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	80	80	90	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparaturnya Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	120	130	125	140	150	150	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	576	720	700	750	780	780	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	240	240	360	480	480	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Selajambe
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	80	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	73	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	635	825	900	900	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	105	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	182	200	235	235	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	86	100	100	100	Sindangagung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	85	90	80	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85	90	>90	95	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	3139	3139	3139	3139	3139	3139	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3898	3508	3508	3157	2841	2841	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	842	757	757	682	613	613	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	137	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	94	94	96	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	300	350	1000	375	400	400	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	200	225	55	250	275	275	
1	Persentase Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Kuningan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	76	77	77	-	-	77	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Kuningan	Lokasi	70	75	75	85	95	95	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	20	20	20	20	20	20	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Diberdayakan	UMKM	32	32	20	32	32	32	
7	Jumlah KK Miskin	KK	8042	7882	7882	7725	7571	7571	
8	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1203	1180	1180	1157	1134	1134	
9	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	80	90	90	100	120	120	
10	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
12	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Dokumen	900	1000	1000	1000	1000	1000	
14	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Pelayanan	540	600	600	660	726	726	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	92	92	95	98	98	Cilimus
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.600	1,65	1,6	1700	1750	1750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2.838	2,5	2500	2,3	2,1	2,1	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2.520	2.600	2,6	2.710	0.282	0.282	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	507	507	507	507	507	507	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	490	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	299	310	310	330	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	74	75	78	78	Luragung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di	Persen	-	80	81	-	-	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021*	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)								
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	4,957	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	9,104	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,521	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	314	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	91	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	93	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	74	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Kalimanggis
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	60	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	80	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	150	324	300	516	727	727	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	96	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan	Pelayanan	75	85	80	90	100	100	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	100	130	124	150	200	200	

Dari hasil evaluasi RPJMD dan RKPD telah banyak target capaian yang tercapai selama periode 2019-2023. Adapun untuk target capaian yang masih belum tercapai dapat dikarenakan beberapa faktor salah satunya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, sehingga belum bisa mengakomodir seluruhnya.

5. Evaluasi Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

- Menurunnya persentase kemiskinan pada tahun 2020 menjadi 13,58%. Karena Capaian 12,82% < 13,58% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan mencapai 89,16% pada tahun 2020.

Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

- Capaian penurunan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada tahun 2020 menjadi 6,3%.
- Menurunnya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita pada tahun 2020 menjadi 20%. Karena Capaian 7,4% < 20 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

- Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 menjadi 22 kasus. Karena Capaian 27 kasus > 22 kasus Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2020 menjadi 91%. Karena Capaian 103,3% > 91% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Menurunnya prevalensi Malaria per 1000 orang pada tahun 2020 menjadi 0. Karena Capaian 0 = 0 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

- Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2020 menjadi 70,21%. Karena Capaian 68,70% < 70,21% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

- Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2020 menjadi 95,21%. Karena Capaian 95,21% < 99,89% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2020 menjadi 79,90%. Karena Capaian 79,90% < 91,22% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan
- Meningkatnya capaian rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 64,73%.
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,41 tahun. Karena Capaian 7,64 > 7,41 target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

- Tercapainya penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan per 1000 penduduk anak perempuan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 0,059.
- Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD 30%. Karena Capaian 22% < 30% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

- Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2020 menjadi 88,12%. Karena Capaian 85,92% > 88,12% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

- Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2020 menjadi 93,25%. Karena Capaian 85,47% < 93,25% target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

- Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 99,96% pada tahun 2020 (Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat).

Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

- Meningkatnya persentase tenaga kerja formal mencapai 47,86% pada tahun 2020.
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka mencapai 15,25% pada tahun 2020. Karena Capaian 14,29% < 15,25% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

- Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur mencapai 2,25% pada tahun 2020.

Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

- Koefisien Gini pada tahun 2020 menjadi <0,38. Karena Capaian 0,361 < 0,38 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

- Meningkatnya rumah layak huni menjadi 95,85%. Karena Capaian 95,94% > 95,85% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80,25% pada tahun 2020. Karena Capaian 72,49% < 80,25% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
(Target RPJMD: cakupan pelayanan pengelolaan sampah kabupaten)

Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

- Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), Capaian sebanyak 5 dokumen pada tahun 2020 .

Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

- Membuat daftar kecamatan yang masuk zona bencana alam. Tercatat ada 20 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan longsor. Sebanyak 13 kecamatan di antaranya berada dalam kategori pergerakan tanah tinggi. Dari 20 kecamatan itu, tujuh kecamatan masuk pada potensi gerakan tanah menengah, dan 13 kecamatan sisanya masuk potensi gerakan tanah tinggi.
- Mewaspada kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ceremai dan beberapa wilayah lainnya di seputar lereng Gunung.
- Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang menjadi 0. Karena Capaian 8,37 > 0 Target SDGs, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

- Kabupaten Kuningan tidak memiliki pantai dan laut.

Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

- Meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 1,94% (2.317,38 Ha) pada tahun 2020.

Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif,

akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

- Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada tahun 2020 tercapai sebanyak 60 orang.
- Meningkatnya Indeks Perilaku Korupsi (IPAK) mencapai 94,54% pada tahun 2020.
- Meningkatnya persentase Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah menjadi 66,95% pada tahun 2020 .
- Keberadaan PERDA/PerBup tentang Konsultasi Publik, di mana telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Informasi, media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) dan Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat,

Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

- Tercapainya penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 sebesar Rp 84,3 Milyar yang mencapai 28% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Tercapainya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 2,77 Triliun.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Untuk Institusi Pelayanan

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di Lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. SKM dilakukan secara berkala minimal satu Tahun sekali. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian kepuasan masyarakat, terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian antara lain: (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Tabel 2.98 Survei Kepuasan Masyarakat perangkat daerah Kabupaten Kuningan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Sekretariat DPRD	70,929	C (Kurang baik)	50	Manual	1. Alur pelayanan 2. Produk spesifikasi jenis pelayanan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 2. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama Peningkatan Kecepatan Pelayanan, Peningkatan Kedisiplinan petugas pelayanan, Peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan proses dan pemberian pelayanan yang lebih adil.
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	87	B (Baik)	291	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Prosedur pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.
3.	Dinas Perhubungan	79,38	B (Baik)	100	Online (Aplikasi Typeform)	1. Waktu penyelesaian 2. Kompetensi pegawai	1. Waktu penyelesaian : Penganggaran penambahan sarana dan prasarana. 2. Kompetensi pegawai: a. Mengadakan pengadaan pegawai ASN di Unit-unit pelayanan b. Peningkatan kompetensi pegawai.
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,14	A (Sangat Baik)	2.088	Online (Aplikasi SKM)	1. Waktu penyelesaian	1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan. 2. Pentingnya kolaborasi yang lebih baik dan menyeluruh dari level atas sampai bawah.

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
					berbasis Android)	2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	
5.	Dinas Lingkungan Hidup	77,78	B (Baik)	100	Manual (typeform)	1. Waktu penyelesaian 2. Kompetensi Pelaksana 3. Sarana dan prasarana	Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah dapat ditingkatkan secara optimal dan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi dapat dipertahankan secara optimal.
6.	Kecamatan Kuningan	80,9465	B (Baik)	200	Pengisian Kuesioner Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitasi sarana dan prasarana dan penambahan personel ASN di Kantor Kecamatan Kuningan bisa mendapatkan prioritas
7.	Kecamatan Luragung	80,715	B (Baik)	245	Pengisian Kuesioner Manual	1. Waktu penyelesaian pelayanan 2. Prosedur layanan 3. Perilaku pelaksana	1. Mengajukan rencana belanja modal AC untuk tahun depan 2. Mengajukan permohonan kekurangan pegawai ke BKPSDM Kab. Kuningan.
8.	Kecamatan Cimahi	80,615	B (Baik)	210	Pengisian Kuesioner Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian : a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.
9.	Kecamatan Cidahu	78,97	B (Baik)	300	Pengisian Kuesioner Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Penanganan pengaduan 4. Waktu penyelesaian	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Sehubungan kekurangan di Kantor Kecamatan Cidahu lebih kepada Sarana dan Prasarana , maka untuk penganggaran tahun berikutnya kami akan mengusulkan kepada Dinas terkait di Kabupaten Kuningan agar rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cidahu bisa mendapatkan prioritas.

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							Dan untuk penambahan pegawai kantor Kecamatan Cidahu akan berkoordinasi dengan Badan terkait untuk penambahan pegawai.
10.	Kecamatan Lebakwangi	86,29	B (Baik)	100	Pengisian Kuesioner Manual	1. Penanganan pengaduan 2. Sistem, mekanisme, prosedur	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Namun demikian, sehubungan kekurangan di Kantor Kecamatan Lebakwangi lebih kepada Penanganan Pengaduan dan Sistem, Mekanisme, Prosedur, maka kami di Kantor Kecamatan Lebakwangi belum bisa memastikan Rencana Tindak Lanjut dari hasil analisa tersebut.
11.	Kecamatan Japara	77,62	B (Baik)	410	Pengisian Kuesioner Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3. Perilaku petugas	1. Sarana dan prasarana: a. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai b. Penambahan SDM 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Adanya tempat pengaduan khusus 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan
12.	Kecamatan Mandirancan	84,45	B (Baik)	120	Pengisian Kuesioner Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan prasarana	1. Peningkatan sosialisasi registrasi "online". 2. Penyediaan printer KTP.
13.	Kecamatan Pasawahan	78,78	B (Baik)	200	Pengisian Kuesioner Manual	1. Penanganan pengaduan 2. Sarana dan prasarana	1. Memaksimalkan penggunaan aplikasi LAPOR 2. Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitasi sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas.
14.	Dinas Sosial	81,12	B (Baik)	697	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian: Pengembangan pembuatan Aplikasi, sosialisasi operator Desa di Kecamatan 2. Prosedur pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait aplikasi dan petugas layanan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,38	B (Baik)	234	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online"

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
						3. Perilaku Petugas	b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Somplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,945	B (Baik)	100	Manual	1. Persyaratan; 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan; 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan; 4. Kesesuaian Produk Layanan; 5. Sarana dan Prasarana.	1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama Peningkatan Kecepatan Pelayanan, Peningkatan Kedisiplinan petugas pelayanan, Peningkatan pelayanandengan penyederhanaan proses dan pemberian pelayanan yang lebih adil; 2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon, SMS dan media on line (WEB); 3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas; b. Memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan. 4. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							serta mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dalam bentuk insentif khusus dan juga sanksi bagi petugas yang melanggar aturan disiplin sebagai PNS; 5. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 6. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelanggan dalam pengisian: Kondisi pelayanan: jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati.
17.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	87,04	B (Baik)	164	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3. Persyaratan 4. Produk layanan	1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan. 2. Pentingnya kolaborasi yang lebih baik dan menyeluruh dari level atas sampai bawah.
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	B (Baik)	200	Manual	1. Penanganan pengaduan layanan 2. Biaya/tarif 3. Sarana dan Prasarana 4. Waktu penyelesaian 5. Perilaku pelaksana	1. Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah 2. Untuk proses pelayanan kepegawaian lebih ditingkatkan dan dipercepat agar tidak bolak-balik
19.	Sekretariat Daerah	75,295	C (Kurang baik)	615	Manual	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 2. Biaya/tarif	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: a. Diadakannya tempat pengaduan khusus (Media Whatsapp, email, nomor telepon/SMS)

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
						3. Waktu penyelesaian 4. Persyaratan 5. Perilaku pelaksana 6. Sarana prasarana	b. Memaksimalkan Website resmi Setda sebagai sarana pengaduan 2. Biaya/tarif: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan 3. Waktu penyelesaian: Memonitoring dan mengevaluasi SOP pelayanan 4. Persyaratan: Memonitoring dan mengevaluasi persyaratan dalam setiap layanan 5. Perilaku pelaksana: Meningkatkan SDM dalam pelayanan 6. Sarana prasarana: Mengadakan sarana dan prasarana yang belum tersedia, serta mengoptimalkan sarpras yang sudah ada
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82,69	B (Baik)	40	Manual	Waktu pelayanan	Waktu dalam pemberian pelayanan agar lebih disingkat dan sesuai dengan SOP yang telah ada.
21.	Dinas Perikanan dan Peternakan	74,07	C (Kurang baik)	450	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Sompifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	80,03	B (Baik)	155	Database Google Form	1. Sarana dan prasarana 2. Perilaku pelaksana	1. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung fungsi pelayanan publik 2. Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
23.	Kecamatan Kramatmulya	79,295	B (Baik)	250	Manual	Sarana dan prasarana	Penganggaran tahun berikutnya kami akan mengusulkan kepada Dinas terkait di Kabupaten Kramatmulya agar pengadaan dan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kramatmulya bisa mendapatkan prioritas.
24.	Kecamatan Cigugur	81,13	B (Baik)	260	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Penanganan pengaduan layanan 3. Kompetensi petugas pelayanan 4. Persyaratan 5. Waktu penyelesaian	1. Pengadaan sarana dan prasarana 2. Membuka hotline pelayanan 3. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas 4. Pengadaan informasi tentang persyaratan pelayanan 5. Peningkatan keterampilan karyawan.
25.	Kecamatan Cibingbin	77,19	B (Baik)	100	Manual	1. Penanganan pengaduan 2. Perilaku pelaksana	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: - Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kecamatan 2. Perilaku pelaksana: - Memberikan pelatihan pelayanan prima, Bimtek, kursus
26.	Kecamatan Ciwaru	78,22	B (Baik)	200	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Produk/hasil layanan	1. Pengadaan sarana dan prasarana 2. Meningkatkan SDM dengan memberi pelatihan, Bimtek
27.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,67	B (Baik)	156	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Sompifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
28.	Kecamatan Karangancana	81,85	B (Baik)	184	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Pembuatan Aplikasi layanan <i>online</i> .

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							2. Prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku petugas: - Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>.
29.	Kecamatan Garawangi	79,81	B (Baik)	350	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "<i>online</i>". - Penambahan SDM. 2. Prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku petugas: Memberika pelatihan.
30.	Kecamatan Maleber	80,8	B (Baik)	200	Manual	Sistem, mekanisme dan prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur: - Sosialisasi Registrasi "<i>online</i>" kepada masyarakat; - Pembangunan Fasilitas Pelayanan <i>online</i> melalui Smartphone bagi masyarakat; - Pelatihan khusus kepada pegawai terkait pelayanan berbasis <i>online</i>.
31.	Kecamatan Ciawigebang	78,99	B (Baik)	250	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "<i>online</i>". - Penambahan SDM. 2. Prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku petugas: Memberika pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i> .
32.	Kecamatan Sindangagung	85,08	B (Baik)	130	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk/hasil layanan 3. Penanganan pengaduan	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "<i>online</i>". - Penambahan SDM 2. Produk/hasil layanan: Mengadakan pelatihan, Bimtek

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							3. Penangan pengaduan: Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kecamatan
33.	Kecamatan Darma	78,52	B (Baik)	150	Manual	Sarana dan prasarana	1. Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas 2. Penambahan pegawai.
34.	Kecamatan Cilimus	85,6	B (Baik)	245	Manual	Sarana dan prasarana	Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas
35.	Kecamatan Cigandamekar	82,235	B (Baik)	200	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Sarana prasarana 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 4. Biaya/tarif 5. Penanganan pengaduan, saran	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi online b. Integrasi secara online terhadap kebutuhan pelayanan Masyarakat dengan Dinas/Instansi di Kab. Kuningan 2. Sarana prasarana: Penyediaan printer KTP 3. Sistem, mekanisme dan prosedur: a. Sosialisasi registrasi online kepada Masyarakat b. Pembangunan fasilitas pelayanan online melalui smartphone bagi Masyarakat c. Pelatihan khusus kepada pegawai terkait pelayanan berbasis online 4. Biaya/tarif: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan 5. Penanganan pengaduan, saran: Tersedianya layanan aduan Masyarakat secara <i>realtime</i> di kecamatan.
36.	Kecamatan Jalaksana	78,22	B (Baik)	200	Manual	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 2. Sarana dan prasarana 3. Produk spesifikasi jenis pelayanan	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah 10 hasilnya. Namun demikian, sehubungan kekurangan yang ada di Kantor Kecamatan Jalaksana lebih kepada Sarana dan Prasarana bersifat fisik masih belum mendapat prioritas karena keterbatasan anggaran, maka kami di Kantor Kecamatan Jalaksana belum bisa

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							memastikan Rencana Tindak Lanjut dari hasil 16nalisa tersebut.
37.	Kecamatan Subang	78,68	B (Baik)	140	Manual	1. Produk spesifikasi jenis pelayanan 2. Sarana dan prasarana	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perangkat kantor kecamatan subang tentang pengetahuan mengenai tata naskah dinas dan pengetahuan mengenai regulasi pemerintahan
38.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	84,13	B (Baik)	73	Database Google Form	1. Waktu penyelesaian 2. Kemudahan prosedur	1. Perlu dilakukan pembinaan terhadap petugas yang melayani agar lebih ramah dan jelas dalam memberikan prosedur pelayanan. 2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan monitoring terhadap program yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan di Desa.
39.	Kecamatan Hantara	85,08	B (Baik)	70	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Produk/hasil layanan 3. Penanganan pengaduan	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi online b. Integrasi secara online terhadap kebutuhan pelayanan Masyarakat dengan Dinas/Instansi di Kab. Kuningan 2. Produk/hasil layanan: Mengadakan pelatihan, Bimtek 3. Penangan pengaduan: Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kecamatan
40.	UPTD Puskesmas Cigandamekar	81,1	B (Baik)	77	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Waktu pelayanan 3. Produk layanan	1. Sarana dan prasarana: a. Dibuat tim pengelola sarana dan prasarana Puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan baik b. Menunjuk 1 (satu) orang petugas disetiap unit/ruang/bagian tersebut (koordinator ruangan) untuk merawat sarana dan prasarana c. Membuat SOP perawatan sarana dan prasarana sebelum dan setelah pelayanan d. Usulan peningkatan kapasitas pengelola barang

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							2. Waktu pelayanan: Menambah personel di unit dengan waktu tunggu relative lama (unit pendaftaran dan rekam medis) 3. Produk layanan: a. Buat media sosialisasi tentang produk layanan yang up to date berupa neon box, banner, leaflet, spanduk, flyer, tv spot atau artikel di media social b. Melakukan sosialisasi tentang produk layanan ke semua lini Masyarakat, termasuk para stakeholder.
41.	UPTD Puskesmas Cilimus	85,37	B (Baik)	357	Manual	1. Sarana prasarana 2. Prosedur 3. Perilaku pelaksana	1. Waktu penyelesaian: Pembuatan/perbaikan petunjuk arah agar lebih dimengerti pasien. 2. Prosedur: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku pelaksana: Memberikan pembinaan kepada karyawan.
42.	UPTD Puskesmas Jalaksana	81,935	B (Baik)	750	Manual	1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2. Waktu pelayanan	1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: a. Menambah petugas pendaftaran dan informasi b. Membuat Google form untuk pengaduan c. Menyediakan kotak saran disetiap unit pelayanan d. Mengingatkan kepada pasien untuk memberikan saran atau masukan setelah diberikan pelayanan. 2. Waktu pelayanan: a. Mengefektifkan waktu pelayanan melalui pembaharuan rekam medik elektronik b. Menambah petugas rekam medik.
43.	Dinas Kesehatan	81,86	B (Baik)	92	Manual	1. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 2. Sarana dan prasarana	1. Yang saat ini sudah kami lakukan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah : a. Penambahan prasarana lemari untuk penyimpanan ramuan sebanyak 2 buah, penyimpanan prasarana baby spa 1 buah

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							b. Penambahan prasarana meja untuk pendaftaran sebanyak 1 buah c. Penambahan prasarana kursi tunggu pasien stainless (isi 4) d. Penampahan kursi untuk petugas sebanyak 2 buah. 2. Rencana yang akan kami lakukan : a. Membuat SOP pelayanan Griya Sehat b. Membuat Alur pendaftaran dan alur pelayanan c. Membuat banner dan leaflet terkait penambahan jadwal buka Griya Sehat yang asalnya 2 hari/ minggu menjadi 3 hari/ minggu) d. Membuat kotak saran, masukan dan pengaduan e. Menambahkan nomor kontak (Whatsapp) sebagai nomor saran, masukan dan pengaduan
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	77,256	B (Baik)	50	Manual	1. Persyaratan 2. Waktu penyelesaian pelayanan 3. Kompetensi pelaksanaan 4. Sarana dan prasarana	1. Kenyamanan lingkungan: Pemeliharaan Gedung dan kantor
45.	UPTD Puskesmas Lamapayung	89,54	A (Sangat Baik)	341	Manual	Sistem mekanisme dan prosedur	Meningkatkan system mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pasien secara maksimal.
46.	UPTD Puskesmas Subang	86,24	B (Baik)	240	Manual	1. Prosedur pelayanan 2. Produk layanan	1. Prosedur pelayanan: a. Buat media sosialisasi tentang system, mekanisme dan prosedur yang up to date berupa: banner, leaflet, tv spot atau artikl di media sosial. b. Melakukan sosialisasi tentang system, mekanisme dan prosedur pelayanan kesemua lini masyarakat, termasuk para stakeholder terkait melalui kegiatan pertemuan yang ada. 2. Produk layanan:

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							a. Dibuat tim pelayanan diluar Gedung puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan baik b. Membuat inovasi pelayanan luar Gedung c. Membuat SOP kegiatan inovasi pelayanan luar gedung
47.	UPTD Puskesmas Nusaherang	82,87	B (Baik)	722	Manual	Pengaduan	1. Pembuatan kotak saran 2. Media pengaduan melalui telekomunikasi
48.	UPTD Puskesmas Cimahi	81,17	B (Baik)	379	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Waktu layanan	1. Sarana dan prasarana: a. Pembentukan tim sarpras b. Penambahan dan peningkatan sarpras 2. Waktu layanan: a. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis
49.	UPTD Puskesmas Garawangi	84,03	B (Baik)	740	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Kompetensi pelaksana	1. Sarana dan prasarana: Disesuaikan dengan RAK yang sudah ada 2. Kompetensi pelaksana: Untuk petugas baru melaksanakan orientasi dan latihan ke setiap unit layanan secara intensif.
50.	UPTD Puskesmas Sindangagung	86,535	B (Baik)	776	Manual	1. Waktu Pelayanan 2. Perilaku layanan	1. Waktu Pelayanan: Penyusunan Sistematis/Alur Pelayanan yang lebih efektif 2. Perilaku layanan: Melakukan Pembinaan terhadap pegawai secara berkala
51.	UPTD Puskesmas Kuningan	78,12	B (Baik)	750	Manual	1. Persyaratan 2. Waktu pelayanan dan prosedur pelayanan	1. Persyaratan: Lakukan sosialisasi dan simplifikasi aturan terhadap masyarakat secara terus menerus baik melalui media sosial maupun lintas sektor. 2. Waktu pelayanan dan prosedur pelayanan: Meningkatkan kedisiplinan pegawai puskesmas Kuningan, melakukan monitoring secara periodic untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu perbaikan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pelatihan ERM kepada seluruh pegawai.
52.	UPTD Puskesmas Selajambe	90,79	A (Sangat Baik)	258	Manual	Produk layanan	1. Melakukan sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis layanan 2. Membuat media sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis pelayanan berupa banner yang dipasang di ruang informasi
53.	UPTD Puskesmas Windusengkahan	80,5	B (Baik)	300	Manual	1. Sarana prasarana 2. Waktu penyelesaian 3. Produk layanan	1. Sarana prasarana: a. Pengajuan sarpras b. Lakukan pemantauan/monitoring sarpras 2. Waktu penyelesaian: Kepatuhan pengorganisasian penyimpanan rekam medis/perubahan pencarian dan penyimpanan rekam medis secara online 3. Produk layanan: Pengajuan media penunjang/sarpras.
54.	UPTD Puskesmas Ciawigebang	82,57	B (Baik)	335	Manual	1. Sarana prasarana 2. Waktu penyelesaian 3. Produk layanan	1. Sarana prasarana: Pengajuan perbaikan dan atau kelengkapan sarpras 2. Waktu penyelesaian: Penerapan RME 3. Produk layanan: Pembuatan jadwal difokuskan oleh pihak manajemen
55.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	83,785	B (Baik)	245	Manual	1. Persyaratan 2. Sarana dan prasarana 3. Biaya/tarif 4. Pengaduan 5. Prosedur	1. Adanya penambahan jenis pemeriksaan untuk klinik yaitu pemeriksaan elektrolit 2. Bisa dilayani dengan menggunakan kartu BPJS
56.	UPTD Puskesmas Cilebak	81,83	B (Baik)	357	Manual	Produk layanan	1. Melakukan sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis layanan 2. Membuat media sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis pelayanan berupa banner yang dipasang di ruang informasi
57.	UPTD Puskesmas Cidahu	82,45	B (Baik)	740	Manual	1. Produk layanan 2. Penanganan pengaduan	1. Produk layanan: Melakukan sosialisasi mengenai maklumat pelayanan melalui forum-forum resmi

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							ataupun tidak resmi dengan sasaran semua masyarakat. 2. Penanganan pengaduan: Melakukan sosialisasi mengenai maklumat pelayanan melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas tindakan lanjut dari masukan pasien yang berkunjung
58.	UPTD Puskesmas Cibingbin	81,75	B (Baik)	375	Manual	Produk layanan	Melakukan sosialisasi mengenai maklumat pelayanan melalui forum-forum resmi ataupun tidak resmi dengan sasaran semua masyarakat
59.	UPTD Puskesmas Linggarjati	80,805	B (Baik)	729	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Layanan pengaduan, masukan dan saran 3. Sarana prasarana	1. Waktu penyelesaian: a. Mengaktifkan Kembali mesin antrian b. Menambah petugas pelayanan 2. Layanan pengaduan, masukan dan saran: Mengaktifkan kotak saran, dan akun sosial media Puskesmas sehingga masyarakat dapat langsung melakukan aduan, saran, dan masukan 3. Sarana prasarana: Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan
60.	UPTD Puskesmas Ciwaru	78,16	B (Baik)	375	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Pengaduan, saran dan masukan 3. Kompetensi pelaksana	1. Sarana dan prasarana: Lakukan movev terhadap kelengkapan dan perawatan sarpras 2. Pengaduan, saran dan masukan: Peningkatan sosialisasi penyampaian pengaduan saran dan masukan 3. Kompetensi pelaksana: Pengusulan pemenuhan tenaga dokter gigi atau ATLM
61.	UPTD Puskesmas Cibeureum	77,852	B (Baik)	364	Manual	1. Persyaratan pelayanan 2. Pemahaman prosedur layanan 3. Waktu layanan	1. Persyaratan pelayanan: Sosialisasi jenis layanan Puskesmas baik dalam Gedung maupun luar gedung 2. Pemahaman prosedur layanan: Pengaktifan CS dan sosialisasi layanan 3. Waktu layanan: a. Melakukan sosialisasi jenis-jenis layanan yang ada

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							b. Penambahan loket layanan dan adanya petugas CS
62.	UPTD Puskesmas Kalimanggis	81,79	B (Baik)	703	Manual	Penanganan aduan	Perbaikan dalam manajemen pelayanan
63.	UPTD Puskesmas Mandirancan	88,87	A (Sangat Baik)	750	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Perilaku petugas	1. Sarana dan prasarana: a. Dibuat tim pengelola sarana dan prasarana Puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan baik b. Membuat SOP perawatan sarpras sebelum dan setelah pelayanan c. Usulan peningkatan kapasitas pengelola barang d. Terjadwalnya Kalibrasi pengajuan barang 2. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
64.	UPTD Puskesmas Manggari	87,7	B (Baik)	387	Manual	1. Produk layanan 2. Waktu penyelesaian	1. Produk layanan: a. Membuat usulan untuk perbaikan Dental Unit b. Membuat usulan agar melengkapi pemeriksaan di laboratorium 2. Waktu penyelesaian: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap Waktu pelayanan
65.	UPTD Puskesmas Darma	84,03	B (Baik)	357	Manual	Waktu pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan terutama penambahan petugas di nursing center
66.	UPTD Puskesmas Sukamulya	80,7	B (Baik)	163	Manual	Waktu pelayanan	a. Pemenuhan jumlah petugas tiap unit sesuai standar kebutuhan b. Melaksanakan evaluasi waktu pelayanan tiap unit
67.	UPTD Puskesmas Kadugede	81,215	B (Baik)	738	Manual	1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan	1. Persyaratan pelayanan: Peningkatan sosialisasi terkait persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
68.	UPTD Puskesmas Pasawahan	78,15	B (Baik)	734	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana	Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada unsur waktu penyelesaian dan unsur sarana dan prasarana. Serta memperbaiki sistem penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat dan transparan.
69.	UPTD Puskesmas Luragung	81,05	B (Baik)	900	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Prosedur pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service layanan
70.	UPTD Puskesmas Karangkencana	82,42	B (Baik)	383	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Prosedur pelayanan	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis
71.	Kelurahan Cipari	83,94	B (Baik)	56	Manual	4. Sistem, mekanisme dan prosedur 5. Biaya/tarif 6. Waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi jenis pelayanan	3. Sistem, mekanisme dan prosedur: - Sosialisasi Registrasi "online" kepada masyarakat; - Pembangunan Fasilitas Pelayanan <i>online</i> melalui Smartphone bagi masyarakat; - Pelatihan khusus kepada pegawai terkait pelayanan berbasis <i>online</i> .

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
						7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3.	4. Biaya/tarif: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 5. Waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi jenis pelayanan: - Integrasi secara <i>online</i> terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat dengan Dinas/Instansi di Kabupaten Kuningan. 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: 3. Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kelurahan.
	Rata-rata	81,727	B (Baik)				

Dari hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilakukan terhadap 41 (empat puluh satu) perangkat daerah, 29 (dua puluh sembilan) Unit, dan 1 (satu) Kelurahan yang disurvei rata-rata masyarakat merasa Puas atau Baik dengan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Diketahui 1 (satu) perangkat daerah dan 3 (tiga) Unit memperoleh penilaian SKM hasil sangat baik, 64 (enam puluh empat) terdiri dari perangkat daerah, Unit, dan Kelurahan memperoleh penilaian SKM hasil baik, serta 3 (tiga) perangkat daerah memperoleh penilaian SKM dengan hasil kurang baik. Dari hasil tersebut maka Nilai SKM sebesar 81,727 dengan kategori Baik, namun terjadi penurunan yang signifikan dari Tahun 2022 yang memiliki nilai SKM 84,07. Hasil tersebut diharapkan pemerintah daerah ke depan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan telah disusunnya rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat

2.1.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan Tahun 2024. yaitu:

A. Urusan Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Pendidikan Tahun 2024:

Tabel 2.95 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	96,07 %
2.	Pendidikan Dasar	97,00 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	95,46 %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		96,07 % (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata indeks pencapaian sebesar 96,07% (kategori Tuntas Utama). Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini mencapai 96,07%, Pendidikan Dasar 97,00%, dan Pendidikan Kesetaraan 95,46%, yang mencerminkan tingginya akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar di daerah.

2. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus / HIV)

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Kesehatan di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024:

Tabel 2.96 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69,15 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74,39 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,97 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	83,16 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	96,39 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	64,23 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	92,44 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87,51 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84,23 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	97,29 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86,64 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	80,55 %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		82,83 % (Tuntas Madya)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor kesehatan triwulan I tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan rata-rata mencapai 82,83%, tergolong dalam kategori Tuntas Madya. Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir (97,97%) dan orang dengan gangguan jiwa berat (97,29%) menunjukkan tingkat pencapaian tertinggi, diikuti oleh pelayanan pada usia pendidikan dasar (96,39%) dan usia lanjut (92,44%). Sementara itu, pelayanan kesehatan pada ibu hamil (69,15%) dan usia produktif (64,23%) masih menunjukkan pencapaian yang relatif rendah dibandingkan indikator lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar, namun perlu adanya peningkatan fokus pada kelompok ibu hamil dan usia produktif untuk mencapai target pelayanan yang lebih optimal.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tabel 2.97 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (2024)
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100.00 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	90,49 %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		95,24 % (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor Pekerjaan Umum tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan indeks pencapaian keseluruhan sebesar 95,24%, yang masuk dalam kategori Tuntas Utama. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berhasil mencapai 100%, menandakan pemenuhan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik juga menunjukkan pencapaian tinggi sebesar 90,49%, yang mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan lingkungan dan sanitasi.

4. Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Berikut ini merupakan

Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Tabel 2.98 Capaian SPM Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (2024)
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
Kategori Indeks Pencapaian SPM		100,00 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian SPM Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 berada pada kategori “Tuntas Paripurna” atau sebesar 100%.

E. BIDANG URUSAN TRANTRIBUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal perangkat daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP menjadi :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Satpol PP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.99 Capaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024
1 .	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100 %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	100,00 % (Tuntas Paripurna)
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100.00 %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	100,00 % (Tuntas Paripurna)
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100.00 %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR	100.00 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 sudah sangat baik, dengan mencapai kategori “Tuntas Paripurna”.

5. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2024 meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.100 Capaian SPM Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	100.00 %
5	Kabupaten/Kota	100.00 %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		100.00 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian SPM Sosial Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 mencapai kategori “Tuntas Paripurna” atau sebesar 100%.

2.1.4 Inovasi Daerah

1. Kabisa Desa (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang menjadikan sektor pertanian termasuk peternakan di dalamnya sebagai sektor basis dan memegang peranan penting perekonomian daerah. Pembangunan peternakan merupakan bagian dari reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni: secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan program Kabisa Desa (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa).

Kabisa Desa merupakan suatu konsep pengembangan pertanian terpadu antara sektor pertanian (tanaman sorgum, cabe jawa, hortikultura dan padi organik) dengan agribisnis ternak (domba, ayam, pengolahan pakan ternak, pengolahan limbah ternak

menjadi pupuk organik) dan dengan agribisnis ikan (ikan nila dengan sistem bioflock). Program Kabisa Desa mulai dilaksanakan pada Tahun 2023.

2. Pelaksanaan Inovasi Gerakan Pengembangan Kambing dan Ayam (Gerbang Kaya)

Gerbang Kaya selaras dengan konsep *integrated farming system* yang dicirikan dengan adanya interaksi dan keterkaitan yang sinergis antar berbagai aktivitas pada sektor pertanian (padi organik, sorgum, Cabe jawa dan hortikultura) dalam mewujudkan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Adanya keterkaitan dalam sistem produksi dapat mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada masukan produksi eksternal baik berupa pupuk, pestisida dan benih. Berkurangnya masukan eksternal dapat mendatangkan nilai tambah yang menjadi pendapatan petani.

Gerbang Kaya di arahkan pada desa miskin ekstrem di kecamatan darma, yaitu Desa Tugumulya, Desa Karangsari, Desa Cageur, Desa Situsari dan Desa Paninggaran. Gerbang Kaya suatu upaya penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi usaha ternak yang lebih efisien dan produktif yang ramah lingkungan. Nilai kebaruan kegiatan ini yaitu pengembangan usaha ternak domba yang terintegrasi dengan unit pengolahan pakan dan unit pengolahan pupuk organik dari limbah ternak padat dan cair. Dengan adanya unit pengolahan pakan dari limbah silase dan rumput odod, para peternak akan lebih efisien dalam pemberian pakan yang lebih efisien dan efektif karena tidak perlu mencari rumput setiap hari. Selanjutnya, para peternak juga dilatih dan diberi bantuan sarana prasarana untuk pengolahan pupuk organik padat dan cair dari limbah ternak domba. Berdasarkan rangkaian tersebut para peternak selain mendapat pendapatan dari usaha ternak domba juga mendapat penghasilan dari usaha pupuk organik dan silase (pakan ternak) Ternak ayam yang dikembangkan jenisnya adalah ayam sentu diberikan pada sasaran manfaat pada keluarga miskin sebanyak 2.600 orang yang tersebar pada 5 desa miskin ekstrem di Kecamatan Darma, Kebaruan kegiatan ternak ayam di antaranya adalah jenis ayam unggul yang mempunyai produktivitas pedaging dan memiliki potensi ayam telur yang diarahkan para penerima manfaat selain bisa mengonsumsi telur dan daging juga dikembangkan pada pengembangan usaha menjual DOC ayam sentul yang saat ini harga dan pasarannya sangat prospektif.

3. Pelaksanaan inovasi sistem kolam bioflock optimalisasi ideal naikkan ekonomi keluarga pelaku budidaya pondasi nikmat Illahi (si koboi naek kuda poni)

Produk pangan berbasis ikan menjadi andalan pemerintah dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui teknik bioflock yang banyak diterapkan pada budidaya perikanan. Teknologi budidaya ikan sistem bioflock adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai pencernaan pakan.

Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Isu ini menjadi penting, karena pakan merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi usaha budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70%. Di sisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga akan menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya. Kondisi ini dipicu karena keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga industri masih sangat tergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan. Dengan mekanisme Kegiatan KABISA Desa pembudidaya ikan akan dibekali juga dengan keterampilan pembuatan pakan ikan dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitarnya.

Kegiatan Sistem Kolam *Bioflock* Optimalisasi Ideal Naikkan Ekonomi Keluarga Pelaku Budidaya Pondasi Nikmat Illahi (Si Koboi Naek Kuda Poni) adalah sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial pada sektor kelautan dan perikanan. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan yaitu meliputi:

- a. Pengadaan prasarana budidaya perikanan, terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan beton, pekerjaan pemasangan bak bulat, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan instalasi air, pekerjaan instalasi aerasi, pekerjaan saluran outlet dan pekerjaan lain-lain;
- b. Pengadaan sarana budidaya perikanan, meliputi pengadaan benih ikan nila ukuran 8-10 cm, pengadaan pakan *starter* ukuran 1 mm, pakan pembesaran ukuran 2 mm dan pakan pembesaran ukuran 3 mm.

- c. Pengadaan obat ikan dan vitamin, meliputi pengadaan probiotik serbuk, gara, gula pasir, kapur
- d. Pengadaan mesin meliputi pengadaan timbangan duduk digital, Hiblow LW 240 Yasunaga, Genset 1.5 KVA setara krisbow, dan Pompa air in/out dia 1 inc 200 watt Sanyo.
- e. Biaya Penunjang untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan yang meliputi rapat persiapan, atk kegiatan, persiapan kontraktual, *monitoring* dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan.

4. SIPANDUK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan telah meningkatkan model pelayanan baik yang datang secara langsung ke kantor, langsung jemput bola ke lapangan, melalui Media sosial WhatsApp (WA) ataupun melalui aplikasi berbasis Android. Sejak merebaknya Pandemi Virus Corona-19, semua pelayanan publik mengalami imbasnya tak terkecuali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Selanjutnya pelayanan melalui WA dan aplikasi berbasis android juga belum bisa memberikan pelayanan Adminduk secara optimal, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mengembangkan aplikasi pelayanan adminduk online atau digital berbasis Web, dengan tema **“Layanan Adminduk Secara Online dan Digital untuk membahagiakan masyarakat kabupaten Kuningan”**

Tujuan dan sasaran dalam Program SIPANDUK adalah Untuk memberikan Kemudahan dan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan digital, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat kabupaten Kuningan, manfaat aplikasi ini Sebagai secara edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan teknologi informasi pentingnya kepemilikan dokumen dan pemutakhiran data kependudukan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus bolak balik datang ke kantor.

Layanan Inovasi Program SIPANDUK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan) merupakan kategori inovasi di Bidang Tata kelola Pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Sejalan dengan semangat informasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan , ketatalaksanaan dan Sumber daya manusia aparatur, Inovasi Program SIPANDUK diharapkan dapat memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam mengurus semua dokumen kependudukan.

Adapun metode Pelayanan Program SIPANDUK adalah sebagai berikut :

SIPANDUK merupakan aplikasi usulan pelayanan Adminduk secara online dan digital pada DISDUKCAPIL Kabupaten Kuningan yang berbasis Web dan Android yang memiliki Fitur. Pembagian Akun dan User yang terbagi menjadi 4 level, yaitu :

- a. Level Operator Disdukcapil
 - Berbasis Web dengan alamat: <https://opr.sipanduk.kuningankab.go.id/>
 - Untuk keamanan akun dan user, user nama dan Password ditetapkan oleh Admin dengan ditetapkan oleh SK Kadisdukcapil
 - Pemroses atau verifikator usulan, baik Password maupun kolektif secara digital untuk diserahkan ke operator SIAK.
- b. Level Masyarakat Secara Personal atau Mandiri
 - Berbasis Web dengan alamat : <https://sipanduk.kuningankab.go.id/>
 - Berbasis Android dengan mendownload aplikasi SIPANDUK di Playstore
 - Untuk keamanan akun atau user, user name dan password diisi dengan NIK dan Nomor KK serta diwajibkan registrasi terlebih dahulu melalui Email aktif pribadi sebelum LOGIN
 - Mengusulkan semua jenis layanan, konsolidasi data dan Nomor antrian
- c. Level Desa/Kelurahan sebagai layanan Kolektif
 - Berbasis Web dengan alamat: <https://opr.sipanduk.kuningankab.go.id/>
 - Untuk keamanan akun dan user, user name dan Password ditetapkan oleh Admin dengan menandatangani Surat Pernyataan serta wajib mencantumkan Email yang aktif.
 - Pengusul layanan dan konsolidasi secara kolektif bagi masyarakat yang kurang menguasai IT di masing-masing Desa/kelurahannya

- Pelaporan kematian, apabila ada penduduk yang meninggal dunia di masing-masing desa/kelurahannya.
 - Mengusulkan semua jenis layanan dan konsolidasi data.
- d. Level Lembaga /Instansi Hasil Kerja sama Program Inovasi :
- Berbasis Web dengan alamat: <https://opr.sipanduk.kuningankab.go.id/>
 - Untuk keamanan akun dan user, User name dan Password ditetapkan oleh Admin dengan menandatangani Surat Pernyataan serta wajib mencantumkan Email aktif
 - Pengusul layanan dan konsolidasi secara kolektif bagi masyarakat berdasarkan Program Inovasi hasil kerja sama dengan stakeholders terkait yaitu Program PULPEN PNS, PATURAI, PADUKA dan PANUTAN
 - Mengusulkan jenis layanan tertentu sesuai jenis-jenis Program Inovasi dan konsolidasi data
- 1) Jenis-Jenis Layanan
- a. KTP-el dan KIA
- KTP-el rusak atau hilang
 - KIA baru
- b. Kartu Keluarga (KK)
- Pembuatan KK baru
 - Penambahan Anggota Keluarga (kelahiran)
 - KK rusak atau hilang
 - Penambahan anggota keluarga (Numpang KK)
 - Pengurangan anggota keluarga
- c. Akte
- Pembuatan Akte Kelahiran yang sudah masuk KK
 - Pembuatan Akte Kematian
 - Pembuatan Akte Perkawinan dan Perceraian (Non Muslim)
- d. Surat Keterangan
- Perpindahan keluar kabupaten atau Provinsi
- 2) Pelaporan kematian dari level Desa/kelurahan secara kolektif
- 3) Konsolidasi Perbedaan data secara Personal maupun kolektif
- 4) Nomor Antrean untuk level Personal.

Aplikasi SIPANDUK ini merupakan Inovasi layanan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengurusan seluruh dokumen kependudukan, kelebihanannya adalah bahwa layanan ini merupakan layanan yang terintegrasi, artinya pengurusan dokumen kependudukan dilakukan secara online atau Daring (dalam jaringan), Layanan inovasi ini tidak memungut biaya apa pun kepada masyarakat pemohon. Waktu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan perubahan status melalui layanan inovasi Program SIPANDUK adalah 2X24 Jam setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

5. GERBANG BERKAH (Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah)

Gerbang berkah merupakan inovasi bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa dimulai dari jenjang Pendidikan PAUD, SD, dan SMP. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kuningan, Nomor: 420/ 3012/ Disdikbud. Tentang Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah (Gerbang Sekolah), pelaksanaan program ini dalam rangka implementasi kurikulum merdeka dan upaya mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta menumbuhkan kehidupan sosial di sekolah dengan kondisi lingkungan yang menyenangkan, melalui pengembangan nilai moral, etika baik, dan sikap toleransi di antara warga sekolah yang berlandaskan pada agama.

Tujuan pelaksanaan program Gerbang Berkah (Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah) adalah gerakan dalam membangun kebersamaan, kekompakan antar siswa, guru, tenaga kependidikan di sekolah, termasuk dengan masyarakat setempat guna menyatukan perbedaan menjadi landasan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan rasa toleransi yang disinergikan dengan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Kegiatan Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah meliputi:

1. Mengaji bersama
2. Sholat Dhuha
3. Tausiah atau kuliah 7 (tujuh) menit (kultum)
4. Sholat Jum'at berjamaah di Masjid
5. Makan bersama (berbagi bekal makanan)

2.2 Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.2.1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Permukiman

Arah pengembangan permukiman ke depan dengan memperhatikan pertambahan kepadatan penduduk perlu adanya peningkatan kualitas permukiman dan perumahan yang sehat, layak, dan aman. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan akibat desakan pengembangan permukiman.

Tabel 2.101 Proyeksi Penduduk, Kepadatan Penduduk Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Permukiman Tahun 2025-2045

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Kabupaten (Jiwa/Ha)	Kepadatan Penduduk Permukiman (Jiwa/Ha)	Kebutuhan Lahan Hunian Tidak Bertingkat (Ha)	Kebutuhan Rumah
1	2025	1.225.493	10,26	70,46	12.255	306.373,30
2	2026	1.236.281	10,35	71,08	12.363	309.070
3	2027	1.247.069	10,44	71,70	12.471	311.767
4	2028	1.257.856	10,53	72,33	12.578	314.464
5	2029	1.268.644	10,62	72,95	12.686	317.161
6	2030	1.279.432	10,71	73,57	12.794	319.858

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, dianalisis 2024, *1 rumah = 4 orang

Selain memperhatikan aspek kesehatan dan kelayakan, pengembangan permukiman juga perlu memperhatikan ketahanan bencana. Pengembangan kawasan permukiman perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bencana yang mungkin terjadi dengan mengurangi risiko terjadinya bencana.

2.2.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk mendukung pelayanan publik di bidang pendidikan dibutuhkan sarana prasarana seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pendidikan per tahun sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.102 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Tahun	TK	SD	SMP	SMA
1	2025	980	766	255	255
2	2026	989	773	257	257
3	2027	998	780	260	260

No.	Tahun	TK	SD	SMP	SMA
4	2028	1006	786	262	262
5	2029	1015	793	265	265
6	2030	1.024	800	267	267

Sumber: RPJPD 2025-2045 Kab. Kuningan, 2025

2.2.3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik di bidang kesehatan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut seperti posyandu, puskesmas pembantu dan puskesmas. Pada tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 1.115 posyandu, 46 Puskesmas Pembantu, dan 12 Puskesmas.

Tabel 2.103 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan

No.	Tahun	Posyandu	Puskesmas Pembantu	Puskesmas
1	2025	980	41	10
2	2026	989	41	10
3	2027	998	42	10
4	2028	1006	42	11
5	2029	1015	43	11

Sumber: RPJPD 2025-2045 Kab. Kuningan, 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung berkembangnya industri kesehatan. Selain puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di level masyarakat, pengembangan rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan berkualitas perlu menjadi prioritas jangka panjang untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor kesehatan ini. Jika dibandingkan dengan data Tahun 2022, ketersediaan posyandu sudah terlampaui yakni sebanyak 1.435 buah. Adapun kebutuhan puskesmas dan pustu masih terdapat gap sebesar 21 buah di mana jumlah puskesmas Tahun 2022 sebanyak 37 buah, sedangkan pustu masih belum tersedia, menurut analisis SNI 03-1733-2004 hanya dibutuhkan 12. Hal ini mengingat bahwa karena pendekatannya perkotaan, SNI 03-1733-2004 tidak mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, jarak dan aksesibilitas di suatu kabupaten. Selain itu, SNI tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai ukuran minimal dan maksimal kapasitas pelayanan posyandu, puskesmas maupun puskesmas pembantu.

2.2.4. Kebutuhan Pangan Pokok

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Amanat undang-undang menyebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan adanya penambahan penduduk, kebutuhan penyediaan pangan yang cukup akan semakin tinggi. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang intensif dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka menuju Kemandirian Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Namun pada bab ini pembahasan difokuskan pada proyeksi penyediaan pangan pokok mayoritas penduduk, yaitu Beras.

Tabel 2.104 Proyeksi Kebutuhan Beras

Tahun	Jumlah Penduduk*	Rata-Rata Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun** (Kg/Orang/Thn)	Kebutuhan Beras (Ton)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Ketersediaan Lahan*** (Ha)
2025	1.225.493	100,9	123.652	15.987	26.522
2026	1.236.281	100,9	124.741	16.138	26.263
2027	1.247.069	100,9	125.829	16.289	26.005
2028	1.257.856	100,9	126.918	16.441	25.746
2029	1.268.644	100,9	128.006	16.592	25.488

Sumber Data : * BPS Kabupaten Kuningan

** Buku Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2022,
Pusdatin Kementan 2022

*** Asumsi Alih Fungsi Lahan sebesar 1% per Tahun

2.2.5. Kebutuhan terhadap Akses Air Bersih

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 2.105 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,2736$	66	17,55
2	$0,1117 < 0,2736$	56	14,89
3	$0,0331 < 0,1117$	73	19,41
4	$0,0069 < 0,0331$	84	22,34
5	$0,0018 < 0,0069$	52	13,83
6	$< 0,0018$	45	11,97

Sumber : RPJPD 2025-2045 Kab. Kuningan, 2025

2.2.6. Kebutuhan Akses Tenaga Kesehatan

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 2.106 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 2,7814$	60	15,96
2	$1,5313 < 2,7814$	60	15,96
3	$0,8263 < 1,5313$	70	18,62
4	$0,3698 < 0,8263$	71	18,88
5	$0,1888 < 0,3698$	66	17,55
6	$< 0,1888$	49	13,03

Sumber : RPJPD 2025-2045 Kab. Kuningan, 2025

2.3 Gambaran Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kuningan, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.107 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan Daerah	2.934.051.323.031	2.652.148.692.376	2.679.853.810.091	2.842.014.508.932	2.677.550.380.176
4.1.	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>390.151.405.630</i>	<i>354.017.458.295</i>	<i>346.586.033.112</i>	<i>350.362.663.121</i>	<i>221.470.105.855</i>
4.1.01	Pajak Daerah	120.045.749.600	126.230.000.000	107.678.513.745	122.612.598.317	68.143.356.255
4.1.02	Retribusi Daerah	99.074.791.156	16.545.809.499	77.239.874.431	55.688.506.176	12.452.590.950
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.371.500.000	8.004.650.000	7.138.783.168	6.674.861.370	5.573.460.803
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	163.659.364.874	203.236.998.796	154.528.861.768	165.386.697.258	135.300.697.847
4.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>2.498.743.438.517</i>	<i>2.290.131.234.081</i>	<i>2.323.512.627.999</i>	<i>2.486.364.724.961</i>	<i>2.433.251.146.353</i>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.113.432.942.000	2.137.968.827.064	2.072.555.555.913	2.124.497.547.732	2.299.738.040.641
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	385.310.496.517	152.162.407.017	250.957.072.086	361.867.177.229	133.513.105.712
4.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	<i>45.156.478.884</i>	<i>8.000.000.000</i>	<i>9.755.148.980</i>	<i>5.287.120.850</i>	<i>22.829.127.968</i>
4.3.01	Hibah	6.000.000.000	8.000.000.000	9.755.148.980	5.287.120.850	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					22.829.127.968
	Jumlah Pendapatan	2.934.051.323.031	2.652.148.692.376	2.679.853.810.091	2.842.014.508.932	2.677.550.380.176
5	Belanja Daerah	2.795.800.003.283	2.742.154.197.355	2.708.515.650.596	2.832.406.522.597	2.371.647.242.754,20
5.1	<i>Belanja Operasi</i>	<i>1.909.824.149.985</i>	<i>1.951.840.892.690</i>	<i>2.010.061.509.032</i>	<i>2.071.607.933.939</i>	<i>1.886.225.546.569,20</i>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.198.140.805.050	1.152.944.764.985	1.146.569.988.635	1.236.027.150.638	1.249.061.715.710
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.797.764.199	729.215.570.980	787.351.371.791	740.038.445.929	556.582.477.734,20
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	1.408.740.156	2.619.236.622	3.218.634.875

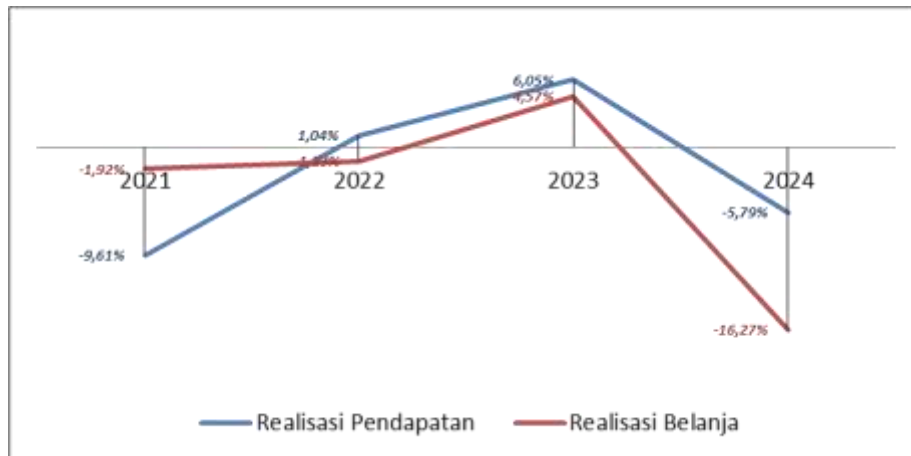
Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Subsidi	-	-	-		-
5.1.04	Belanja Hibah	50.895.164.000	59.840.624.500	66.576.805.450	83.430.575.750	72.457.138.250
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	29.990.416.736	9.839.932.225	8.154.603.000	9.492.525.000	4.905.580.000
5.2	Belanja Modal	378.703.766.805	320.727.654.179	229.856.933.449	254.910.604.687	326.882.705.076
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.732.989.296	7.612.718.068	26.751.824.467	11.192.050.724	181.406.240
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.573.821.550	104.329.063.606	49.977.556.706	67.447.867.808	171.187.413.767
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.473.642.588	88.667.096.662	66.623.156.876	81.763.034.176	106.969.766.797
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.926.659.308	119.717.944.843	79.711.956.467	86.485.838.150	43.225.942.800
5.2.05	Belanja Aset Tetap lainnya	37.996.654.063	400.831.000	6.792.438.933	7.989.804.829	5.025.215.472
5.2.06	Belanja Aset lainnya				32.009.000	292.960.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	52.902.857.991	25.272.600.802	11.870.504.527	9.491.497.400	9.226.991.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.902.857.991	25.272.600.802	11.870.504.527	9.491.497.400	9.226.991.000
5.4	Belanja Transfer	454.369.228.502	444.313.049.684	456.726.703.588	496.396.486.571	149.312.000.109
5.4.01	Belanja Bagi Hasil (10% Paret)	14.370.649.039	13.580.038.690	15.921.642.838	18.185.397.238	17.543.860.517
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan (DD, ADD)	439.998.579.463	430.733.010.994	440.805.060.750	478.211.089.333	131.768.139.592
	Jumlah Belanja	2.795.800.003.283	2.742.154.197.355	2.708.515.650.596	2.832.406.522.597	2.371.647.242.754
	Total Surplus/ (Defisit)	138.251.319.748	(90.005.504.979)	(28.661.840.505)	9.607.986.335	305.903.137.422
6	Pembiayaan Daerah	51.604.199.504	28.802.221.262	44.766.793.268	5.725.071.348	36.440.515.965,13
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	54.604.199.504	32.302.221.262	65.266.792.658	72.294.861.048	95.167.422.138
6.1.01	SILPA Sebelumnya	54.604.199.504	32.302.221.262	65.266.792.658	15.908.071.348	15.340.516.965,13
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				17.400.000.000	21.100.000.000

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6.1.03	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah				38.986.789.700	58.726.905.173
6.1.05	Pinjaman Dalam Negeri					-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah					-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	54.604.199.504	32.302.221.262	65.266.792.658	72.294.861.048	95.167.422.138
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	20.499.999.390	66.569.789.700	58.726.906.173
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				38.986.789.700	58.726.906.173
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	5.499.999.390	4.083.000.000	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan			15.000.000.000	23.500.000.000	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah				-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.500.000.000	20.499.999.390	72.294.861.048	58.726.906.173
	Pembiayaan Netto	51.604.199.504	28.802.221.262	44.766.793.268	-	36.440.515.965
6.3	Defisit	189.855.519.252	(61.203.283.717)	16.104.952.763	9.607.986.335	342.343.653.386,93

Sumber : Bappenda Kabupaten Kuningan, 2025
BPKAD Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2.677.550.380.176 pada APBD Kabupaten Kuningan tahun 2024 menurun sebesar Rp164.464.128.756 dari tahun 2023 . Sedangkan pada belanja daerah realisasi belanja Kabupaten Kuningan sebesar Rp2.371.647.242.754 pada tahun 2024 menurun Rp460.759.279.843 dari belanja tahun 2023. Secara umum persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah Kuningan di sajikan pada grafik berikut

Gambar 2.23 Persentase Kenaikan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022-2024



Pendapatan daerah Kabupaten Kuningan cenderung mengalami peningkatan pasca pandemi covid-19. Tren positif ini didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan serta peningkatan Dana Transfer ke Daerah. Hal tersebut diimbangi juga dengan peningkatan belanja daerah . Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan belanja diakibatkan penurunan jumlah pendapatan daerah.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Kuningan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	2.649.173.155.270,54	2.800.682.920.021,14	2.927.970.125.369,59	3.069.309.385.426,31	3.304.708.928.764,87
A. Aset Lancar	106.317.329.605,23	118.980.815.484,17	72.115.093.408,32	89.165.522.482,11	96.891.122.599,81
Kas dan Setara Kas	33.801.393.959,06	65.322.987.384,47	16.278.489.290,13	16.063.609.484,65	24.134.094.230,00
Piutang Pendapatan	66.903.141.150,09	37.026.542.237,09	37.442.840.272,74	54.814.187.788,65	54.469.303.161,00
Penyisihan Piutang	-19.922.832.700,53	-12.526.965.390,14	-14.252.149.670,68	-15.698.345.109,55	-15.698.345.109,55
Beban dibayar di muka	-	-	365.348.351,65	789.195.032,97	789.195.032,97
Persediaan	25.535.627.196,61	29.158.251.252,75	32.280.565.164,48	33.196.875.285,39	33.196.875.285,39
B. Investasi Jangka Panjang	94.805.940.742,34	100.695.095.907,38	95.915.104.233,68	94.694.267.200,75	94.694.267.200,75
C. Aset Tetap	2.418.465.562.827,94	2.540.241.244.997,11	2.702.590.287.638,32	2.800.387.375.830,83	3.048.590.305.893,04
D. Dana Cadangan	-	-	15.000.000.000,00	21.100.000.000,00	-
E. Aset Lainnya	29.584.322.095,03	40.765.763.632,48	42.349.640.089,27	41.131.810.099,22	41.702.823.257,87
F. Aset Properti Investasi	-	-	-	22.830.409.813,40	22.830.409.813,40
JUMLAH ASET	2.649.173.155.270,54	2.800.682.920.021,14	2.927.970.125.369,59	3.069.309.385.426,31	3.304.708.928.764,87
KEWAJIBAN	40.660.086.413,14	78.561.438.465,25	270.571.782.850,16	283.252.861.571,86	274.567.516.596,64
A. Kewajiban Jangka Pendek	40.660.086.413,14	78.561.438.465,25	270.571.782.850,16	283.252.861.571,86	274.567.516.596,64
B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	40.660.086.413,14	78.561.438.465,25	270.571.782.850,16	283.252.861.571,86	274.567.516.596,64
EKUITAS	2.608.513.068.857,41	2.722.121.481.555,90	2.657.398.342.519,43	2.786.056.523.854,45	3.030.141.412.168,23
Ekuitas	2.608.513.068.857,41	2.722.121.481.555,90	2.657.398.342.519,43	2.786.056.523.854,45	3.030.141.412.168,23

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH EKUITAS	2.608.513.068.857,41	2.722.121.481.555,90	2.657.398.342.519,43	2.786.056.523.854,45	3.030.141.412.168,23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.649.173.155.270,55	2.800.682.920.021,15	2.927.970.125.369,59	3.069.309.385.426,31	3.304.708.928.764,87

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuningan, 2025

Adapun proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2026-2030 menggunakan Kerangka Pendanaan pada RKPD 2026 sebagai baseline untuk menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

URAIAN	RKPD 2026	RKPD 2027	RKPD 2028	RKPD 2029	RKPD 2030
PENDAPATAN DAERAH	2.797.112.495.258	2.924.738.590.923,31	3.076.388.708.919,14	3.238.044.070.191,38	3.409.387.539.607,33
Pendapatan Asli Daerah	475.041.696.513	506.498.753.671,91	557.616.946.039,10	614.158.366.553,01	675.574.203.208,31
Pajak Daerah	232.056.546.505	255.476.601.156,38	281.492.578.272,02	310.421.562.009,22	341.463.718.210,14
Retribusi Daerah	27.617.836.941	14.118.108.142,49	15.529.918.956,74	17.082.910.852,41	18.791.201.937,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.989.655.258	9.033.306.052,32	9.936.636.657,55	10.930.300.323,31	12.023.330.355,64
Lain-lain PAD Yang Sah	208.377.657.809	227.870.738.320,72	250.657.812.152,79	275.723.593.368,07	303.295.952.704,88
Pendapatan Transfer	2.273.029.388.762	2.364.294.286.270,10	2.459.431.656.800,60	2.558.611.586.951,00	2.662.011.808.042,91
Transfer Pemerintah Pusat	2.148.818.983.000	2.233.873.360.220,00	2.322.489.684.448,00	2.414.822.515.980,76	2.511.033.283.524,16
Dana Desa	341.151.707.000	347.974.741.140,00	354.934.235.963	362.032.920.682	369.273.579.096
Dana Bagi Hasil (DBH)	83.579.635.000	87.758.616.750,00	92.146.547.588	96.753.874.967	101.591.568.715
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.215.202.072.000	1.263.810.154.880,00	1.314.362.561.075	1.366.937.063.518	1.421.614.546.059
Dana Alokasi Khusus (DAK)-NF	508.885.569.000	534.329.847.450	561.046.339.823	589.098.656.814	618.553.589.654
Transfer Antar-Daerah	124.210.405.762	130.420.926.050,10	136.941.972.352,61	143.789.070.970,24	150.978.524.518,75
Pendapatan Bagi Hasil	124.210.405.762	130.420.926.050	136.941.972.353	143.789.070.970	150.978.524.519
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.041.409.983	53.945.550.981,30	59.340.106.079,43	65.274.116.687,37	71.801.528.356,11
Hibah	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.041.409.983	53.945.550.981,30	59.340.106.079,43	65.274.116.687,37	71.801.528.356,11
Jumlah Pendapatan	2.797.112.495.258	2.924.738.590.923,31	3.076.388.708.919,14	3.238.044.070.191,38	3.409.387.539.607,33

URAIAN	RKPD 2026	RKPD 2027	RKPD 2028	RKPD 2029	RKPD 2030
BELANJA DAERAH	2.765.710.557.342	2.898.258.460.314,54	3.038.757.366.060,33	3.190.087.105.351,93	3.353.160.032.274,29
Belanja Operasi	2.263.050.850.342	2.361.112.573.824,54	2.464.711.267.516,03	2.576.557.779.909,52	2.697.383.654.050,92
Belanja Pegawai	1.304.768.535.103	1.317.816.220.454,03	1.330.994.382.658,57	1.344.304.326.485,16	1.357.747.369.750,01
Belanja Barang dan Jasa	918.938.807.989	1.001.643.300.708,01	1.091.791.197.771,73	1.190.052.405.571,19	1.297.157.122.072,59
Belanja Bunga	12.350.000.000	14.389.610.340	14.389.610.340	14.389.610.340	14.389.610.340
Belanja Subsidi	-				
Belanja Hibah	17.198.507.250	17.370.492.322,50	17.544.197.245,73	17.719.639.218,18	17.896.835.610,36
Belanja Bantuan Sosial	9.795.000.000	9.892.950.000,00	9.991.879.500,00	10.091.798.295,00	10.192.716.277,95
Belanja Modal	-	-	-	-	-
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Jarigan dan Irigasi	-	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Transfer	492.659.707.000	527.145.886.490,00	564.046.098.544,30	603.529.325.442,40	645.776.378.223,37
Belanja Bagi Hasil	14.658.000.000	15.684.060.000,00	16.781.944.200,00	17.956.680.294,00	19.213.647.914,58
Belanja Bantuan Keuangan	478.001.707.000	511.461.826.490,00	547.264.154.344,30	585.572.645.148,40	626.562.730.308,79
Jumlah Belanja	2.765.710.557.342	2.898.258.460.314,54	3.038.757.366.060,33	3.190.087.105.351,93	3.353.160.032.274,29
Total Surplus/ (Defisit)	31.401.937.916	26.480.130.608,77	37.631.342.858,81	47.956.964.839,46	56.227.507.333,04

URAIAN	RKPD 2026	RKPD 2027	RKPD 2028	RKPD 2029	RKPD 2030
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	
SILPA Sebelumnya	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.401.937.916	26.480.130.608,77	37.631.342.858,81	47.956.964.839,46	56.227.507.333,04
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo	22.500.000.000	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	-				
Pembentukan Dana Cadangan	8.901.937.916	3.980.130.608,77	15.131.342.858,81	25.456.964.839,46	33.727.507.333,04
Pemberian Pinjaman Daerah	-				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.401.937.916	26.480.130.608,77	37.631.342.858,81	47.956.964.839,46	56.227.507.333,04
Pembiayaan Netto	(31.401.937.916)	(26.480.130.608,77)	(37.631.342.858,81)	(47.956.964.839,46)	(56.227.507.333,04)
DEFISIT	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan Kabupaten Kuningan tahun 2026-2030 diproyeksikan naik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 10 persen. sedangkan untuk dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat naik sebesar 2-5%. Sedang untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan tetap hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2026 dilaksanakan melalui tugas perbantuan , sedangkan DAK yang bersifat rutin seperti DAK Non Fisik pada bidang pendidikan dan kesehatan yang diberikan langsung kepada daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 adalah diprioritaskan untuk menunjang isu strategis, program unggulan serta ketercapaian terhadap indikator makro Kabupaten Kuningan dengan rincian dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 4,4 persen dengan kebijakan surplus anggaran. Hal tersebut merupakan kebijakan efisiensi untuk pembayaran cicilan pokok hutang jangka menengah, pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Tahun 2030 dan Persiapan Pembebasan Lahan untuk kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS).

Untuk menekan Belanja Pegawai hingga mencapai 30 persen dari total belanja APBD selama 5 tahun kedepan, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan diantaranya :

- a. Pengendalian Pertumbuhan Belanja Pegawai, dengan strategi :
 - Moratorium penerimaan pegawai baru kecuali untuk formasi strategis (guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis esensial).
 - Penataan ulang beban kerja melalui redistribusi pegawai antar PD dan antar wilayah untuk mengurangi kebutuhan rekrutmen.
 - Pengendalian tunjangan dan insentif agar selaras dengan kinerja dan kemampuan fiskal daerah.
 - Mendorong pensiun alami (*attrition*) tanpa penggantian penuh formasi kecuali pada layanan dasar.
 - Digitalisasi pelayanan publik untuk mengurangi kebutuhan pegawai administratif.
- b. Peningkatan Proporsi Belanja Non-Pegawai, dengan strategi :

- Optimalisasi PAD (Pajak Daerah, Retribusi, BUMD) untuk memperbesar total APBD sehingga porsi belanja pegawai otomatis mengecil secara persentase.
 - Memaksimalkan dana transfer pusat (DAU, DAK, DID) dan hibah untuk pembiayaan belanja modal dan program pembangunan.
 - Menggandeng kemitraan swasta (PPP/KPBU) untuk pendanaan infrastruktur, sehingga belanja modal tidak sepenuhnya membebani APBD.
- c. Efisiensi dan Reprioritisasi Anggaran, dengan strategi :
- Melakukan review belanja pegawai tiap tahun untuk mengidentifikasi pos yang bisa dihemat.
 - Mengintegrasikan program sejenis antar-PD untuk mengurangi kebutuhan pegawai tambahan.
 - Mengutamakan belanja yang memberikan *multiplier effect* pada ekonomi daerah (infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, layanan publik).
- d. Kebijakan Jangka Panjang, dengan strategi :
- Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis jabatan dan beban kerja (Anjab-ABK) sehingga formasi tidak berlebih.
 - Pengembangan kompetensi pegawai agar produktivitas meningkat dan tidak perlu menambah pegawai untuk setiap program baru.
 - Reformasi birokrasi menuju struktur organisasi yang ramping namun efektif.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dasar penting dalam merumuskan kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan atau diharapkan di masa depan, termasuk faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan secara tepat dan komprehensif menjadi langkah awal yang krusial dalam proses perencanaan. Analisis terhadap isu strategis juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan ke depan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika daerah.

2.1.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berlandaskan pada tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pasal 258 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Dalam penyusunan RPJMD, permasalahan pembangunan dirumuskan melalui pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan hasil analisis terhadap empat aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat/ekonomi, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan perumusan permasalahan yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah. Berikut di bawah ini dijelaskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pengintegrasian KLHS dan 4 (empat) aspek tersebut di atas.

2.1.5.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pengintegrasian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan pendekatan perencanaan yang holistik, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai instrumen analisis untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial antar generasi. Hasil pengintegrasian KLHS terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan mendasar yang saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang masih signifikan, khususnya di wilayah perdesaan, kawasan pinggiran, dan komunitas rentan, mengindikasikan belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Kemiskinan struktural terjadi akibat keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, lapangan pekerjaan, lahan produktif, dan lingkungan

yang mendukung kehidupan layak. Kondisi ini semakin diperburuk oleh ketimpangan spasial dan rendahnya kapasitas sosial ekonomi masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan.

2. Belum Optimalnya Pengurangan Pengangguran dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Pengangguran terutama di kalangan usia produktif dan lulusan pendidikan menengah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, struktur ekonomi lokal yang belum cukup kuat dan masih didominasi sektor informal menyebabkan rendahnya daya tahan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai tambah, terbatasnya diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta belum berkembangnya kewirausahaan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Masih Tingginya Angka Stunting

Angka stunting yang masih tinggi mencerminkan rendahnya kualitas hidup anak-anak akibat kombinasi antara kemiskinan, kurangnya asupan gizi, buruknya sanitasi dan higiene, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Isu ini merupakan persoalan lintas sektor yang juga berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga, edukasi gizi, serta lingkungan permukiman yang sehat. Bila tidak ditangani dengan tepat, stunting akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masa depan.

4. Masih Rendahnya Produktivitas Pertanian

Pertanian sebagai sektor utama penghidupan sebagian besar masyarakat perdesaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti degradasi kualitas lahan, ketergantungan pada pola tanam tradisional, minimnya inovasi teknologi, dan perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam serta hasil produksi. Selain itu, lemahnya kelembagaan petani, terbatasnya akses terhadap pembiayaan, serta rantai pasok yang tidak efisien turut menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing sektor pertanian.

5. Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas Pendidikan

Meskipun akses pendidikan telah meningkat, namun masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah, khususnya antara daerah urban dan rural. Tantangan meliputi kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan merata,

keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya capaian literasi dan numerasi, serta terbatasnya kurikulum yang adaptif terhadap tantangan abad 21, seperti literasi digital, perubahan iklim, dan kewirausahaan. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi instrumen mobilitas sosial dan transformasi masyarakat.

6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah Padat Domestik dan Lumpur Tinja

Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah, serta belum tersedianya sistem pengelolaan lumpur tinja yang layak menyebabkan peningkatan risiko pencemaran lingkungan, terutama di wilayah permukiman padat dan sekitar badan air. Selain menimbulkan dampak kesehatan masyarakat, kondisi ini juga berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan air tanah, serta menurunkan daya dukung ekosistem perkotaan.

7. Belum Optimalnya Mitigasi Bencana

Tingginya tingkat risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan memperlihatkan bahwa upaya mitigasi masih belum menyeluruh dan berbasis pada peta risiko yang terbaru. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam manajemen risiko bencana, minimnya pengelolaan kawasan rawan bencana, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali memperparah tingkat kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.

8. Belum Optimalnya Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim telah memengaruhi produktivitas sektor-sektor kunci, seperti pertanian dan perikanan, serta meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem. Namun demikian, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk transisi energi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan konservasi lingkungan, belum menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Emisi gas rumah kaca dari sektor energi, transportasi, dan limbah juga belum dikendalikan secara optimal.

9. Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata, meskipun memiliki potensi besar, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah dan pelestarian lingkungan. Kurangnya integrasi antar destinasi, masih rendahnya kualitas amenities dan SDM pariwisata, belum berkembangnya paket-paket wisata, belum adanya

rencana sektor yang terpadu dan komprehensif, serta belum kuatnya citra daerah sebagai destinasi unggulan menghambat tumbuhnya pariwisata berbasis komunitas dan berkelanjutan yang dapat menciptakan nilai tambah ekonomi serta memperkuat identitas budaya dan pelestarian alam.

10. Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk belum efektifnya koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya difasilitasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya inovasi pelayanan publik dan efektivitas kebijakan dalam mengakselerasi pengembangan wilayah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan di atas menunjukkan bahwa tantangan pembangunan tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga saling terkait dan kompleks. Pendekatan pembangunan ke depan harus berbasiskan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan hidup, sejalan dengan arahan KLHS yang menekankan pentingnya integrasi antara dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengarusutamaan KLHS dalam perencanaan pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2.1.5.2 Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi

1. Sebagian wilayah rawan terhadap bencana alam.

Sebagian wilayah memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks. Meskipun wilayah ini diberkahi dengan tanah subur, potensi wisata alam, serta posisi strategis sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan Kawasan Metropolitan Rebana, namun topografi berbukit dan struktur geologi membuatnya rentan terhadap bencana seperti gerakan tanah, banjir geomorfologis, letusan gunung api, dan gempa bumi. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, sekitar 44,69% wilayah berada dalam zona kerentanan menengah dan 13,31% dalam zona kerentanan tinggi terhadap gerakan tanah, terutama di bagian selatan dan timur. Selain itu, banjir geomorfologis berisiko terjadi di beberapa kecamatan saat curah hujan ekstrem, dan letusan Gunung Ciremai

yang aktif dapat memicu gempa vulkanik di wilayah sekitarnya. Peta rawan bencana menunjukkan bahwa wilayah seluas 7.197,05 Ha berpotensi terdampak langsung oleh aktivitas vulkanik Gunung Ciremai. Di samping itu, potensi gempa bumi juga dipengaruhi oleh keberadaan sesar seperti Sesar Cibingbin dan Sesar Subang, meskipun bukan termasuk sesar primer. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana melalui pembangunan yang tangguh dan responsif terhadap risiko.

2. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada serta terus menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan jangka panjang dan menghambat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya alam yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lahan pertanian produktif. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Selain itu, potensi komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, hasil kehutanan, dan peternakan belum dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan industri hilir berskala besar maupun ekspor antar daerah. Komoditas tersebut perlu diarahkan untuk berorientasi pasar dengan memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kualitas produksi, serta memperluas jejaring pemasaran dan investasi.

3. Degradasi lingkungan dalam menjaga ketersediaan air bersih.

Degradasi lingkungan menjadi tantangan serius dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air bersih. Meskipun berdasarkan analisis daya dukung, ketersediaan air hingga tahun 2042 masih dalam kondisi surplus untuk memenuhi kebutuhan, namun tren pembangunan yang masif dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas air bersih secara signifikan. Perubahan tata guna lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, pencemaran badan air, dan kerusakan ekosistem sumber mata air menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan sumber daya ini.

2.4.1.3 Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi

1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah masih tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari indikator pendapatan per kapita. Berdasarkan data BPS Tahun 2022, PDRB per kapita daerah tercatat sebesar Rp24.682.000,- atas dasar harga berlaku dan Rp18.450.340,- atas dasar harga konstan, yang menempatkan daerah ini pada posisi ketiga terbawah di Provinsi Jawa Barat. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi terhadap kemakmuran masyarakat masih belum optimal.

2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di daerah belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama akibat dampak signifikan dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pada puncak pandemi di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi daerah melambat drastis hingga hanya mencapai 0,11 persen. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan secara berturut-turut, dari 11,41 persen pada tahun 2019 menjadi 13,10 persen pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 12,76 persen seiring upaya pemulihan ekonomi, angka ini masih jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,98 persen) dan Nasional (9,5 persen). Tingginya angka kemiskinan menjadikan Kuningan sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Barat, menandakan perlunya strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam penanganannya.

3. Tingginya Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah masih tergolong tinggi dan menunjukkan tantangan serius dalam pembangunan ketenagakerjaan. Selama periode 2019 hingga 2021, angka TPT meningkat dari 9,68 persen menjadi 11,68 persen akibat melemahnya aktivitas ekonomi, terutama selama masa pandemi. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 9,81 persen, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (8,31 persen) dan Nasional (5,86 persen). Berdasarkan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, daerah ini menempati posisi keenam tertinggi dalam hal angka pengangguran terbuka. Tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain terbatasnya lapangan usaha, rendahnya kompetensi pencari kerja, serta mismatch antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan

Pembangunan pemberdayaan perempuan di daerah masih belum optimal, sebagaimana tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Padahal, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 407.319 jiwa perempuan usia produktif yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Rendahnya IPG menunjukkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera direspons dengan kebijakan yang lebih afirmatif dan berpihak pada kesetaraan gender.

5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa di daerah masih belum optimal, meskipun Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan tren yang positif. Kenaikan angka IDM belum secara langsung mampu mengatasi permasalahan krusial yang dihadapi desa, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, serta masih lebarnya kesenjangan pendapatan antar warga. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya menyentuh aspek-aspek pemberdayaan yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk

Upaya pengendalian penduduk di daerah masih belum optimal, ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan pola fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tidak terkendali laju pertumbuhan ini dapat menimbulkan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk penyediaan layanan dasar, ketersediaan lapangan kerja, serta kualitas lingkungan hidup. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang, terutama dalam rangka mewujudkan proyeksi kependudukan yang ideal menuju Indonesia Emas 2045.

7. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal

Pemberdayaan pemuda di daerah masih belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari masih terbatasnya peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya di sektor olahraga dan kewirausahaan. Padahal, pemuda merupakan aset strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan daerah. Rendahnya partisipasi pemuda ini disebabkan oleh berbagai

faktor, antara lain kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya akses terhadap pelatihan dan pembinaan, serta terbatasnya ruang ekspresi dan wadah kreatif yang dapat menyalurkan potensi mereka secara konstruktif.

2.1.5.3 Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

A. Permasalahan Daya Saing Ekonomi

1. Produktivitas perekonomian belum optimal

Produktivitas ekonomi daerah masih belum optimal, ditandai dengan dominasi sektor pertanian dalam struktur PDRB yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan industri pengolahan pasca panen serta lambatnya regenerasi SDM pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi menuju pertanian modern, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta diversifikasi pangan dan produk olahannya untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah, terutama sebagai daerah penyangga kawasan perkotaan.

2. Menurunnya ketersediaan pangan utama dan kerentanan pangan

Penurunan ketersediaan pangan utama dan meningkatnya kerentanan pangan daerah dipicu oleh tren penurunan produksi yang berkelanjutan. Faktor penyebab utamanya mencakup alih fungsi lahan, regenerasi SDM pertanian yang lambat, dampak perubahan iklim, penurunan kesuburan lahan, keterbatasan sarana prasarana, serta tantangan pemasaran hasil pertanian. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya desa-desa berstatus rawan pangan, yang memerlukan intervensi terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pangan secara berkelanjutan.

3. Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas.

Kapasitas dan daya saing UMKM masih menghadapi berbagai kendala, meskipun berperan strategis dalam hilirisasi produk pertanian dan penggerak ekonomi masyarakat. Permasalahan utama meliputi keterbatasan modal yang berdampak pada skala produksi, rendahnya literasi manajemen bisnis, minimnya orientasi ekspansi usaha, kurangnya inovasi produk, serta distribusi dan akses pasar yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dalam bentuk fasilitasi pendampingan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan pembiayaan dan akses pemasaran untuk mendorong UMKM yang lebih tangguh dan berdaya saing

4. Rendahnya produktivitas pariwisata

Produktivitas sektor pariwisata masih rendah, tercermin dari kontribusinya terhadap PDRB yang belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pariwisata yang masih berbasis komunitas dan belum bertransformasi menjadi sektor industri. Akibatnya, pertumbuhan sektor ini berjalan lambat dan belum mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal dibandingkan dengan pariwisata yang dikelola secara industrial.

2.1.5.4 Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM daerah selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, akan tetapi nilai tersebut masih berada di bawah IPM Jawa Barat dan Nasional. Nilai IPM pada Tahun 2022 sebesar 70,16, sedangkan nilai IPM Jawa Barat dan Nasional secara berurutan masing-masing sebesar 73,12 dan 72,91. Menurut data BPS (2022), pada Tahun 2022 mengalami peningkatan status dari level “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) menjadi level “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Meskipun demikian, masih menempati peringkat 17 tertinggi di Jawa Barat.

b. Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

Pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun masih belum optimal, ditunjukkan oleh angka rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2022 baru mencapai 7,88 tahun, masih di bawah target minimal jenjang SMP. Kondisi ini mengindikasikan masih banyak anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar-menengah. Ketimpangan infrastruktur pendidikan dan distribusi tenaga pendidik menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Upaya percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas perlu diperkuat untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing.

c. Kemampuan literasi masyarakat masih rendah

Kondisi ini membutuhkan perhatian lintas sektor, khususnya di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemanfaatan media informasi, dan pembinaan keagamaan. Penguatan literasi di berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan produktif.

d. Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk dan stunting

Kasus gizi buruk dan stunting pada balita masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan SDM. Meskipun sempat menurun, angka gizi buruk mengalami tren fluktuatif, dari 0,26% pada 2017 meningkat menjadi 0,71% pada 2020, dan turun menjadi 0,5% pada 2021. Demikian pula stunting yang menurun dari 8,39% pada 2019 menjadi 6,21% pada 2021, namun kembali naik menjadi 6,6% di 2022 (data e-PPGBM). Kondisi ini menempatkan daerah sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan stunting nasional. Permasalahan ini menuntut peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya kompetensi tenaga medis, penguatan upaya pengendalian penyakit, serta optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Meskipun tingkat keikutsertaan sudah tinggi, partisipasi aktif masyarakat terhadap kewajiban dalam sistem jaminan kesehatan masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2.1.5.5 Permasalahan daya saing infrastruktur

Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di daerah masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar seperti air minum dan sanitasi. Ketimpangan antar wilayah masih terjadi, khususnya di wilayah berbukit dan berpola permukiman tersebar yang memerlukan biaya tinggi untuk pembangunan akses. Infrastruktur penunjang perekonomian juga menghadapi kendala seperti konektivitas antar wilayah yang belum optimal, kemantapan jalan yang belum merata, serta keterbatasan akses ke jalan bebas hambatan, yang menghambat peningkatan investasi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Selain itu, sarana dan prasarana sumber daya air belum sepenuhnya mendukung produktivitas pertanian akibat banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak serta belum optimalnya rehabilitasi dan pembangunan konservasi air.

a. Penyediaan rumah layak huni belum maksimal

Penyediaan rumah layak huni masih belum optimal, dengan masih terdapat 7.233 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2023. Permasalahan ini dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan masyarakat serta belum optimalnya pendataan dan identifikasi kawasan permukiman kumuh sesuai standar yang berlaku. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2045, kebutuhan hunian akan terus meningkat dan perlu diantisipasi secara tepat. Selain itu, penataan ruang belum sepenuhnya memperhatikan aspek mitigasi bencana, terbukti dari masih banyaknya

masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana, serta belum optimalnya bantuan perbaikan rumah pascabencana. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam mengarahkan pengembangan kawasan industri ramah lingkungan. Ketiadaan arahan ini berdampak pada belum optimalnya investasi, yang seharusnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan industri ramah lingkungan secara adil dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

c. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal

Meskipun rasio tutupan lahan tergolong memadai, upaya pelestarian plasma nutfah dan perlindungan kawasan konservasi masih terbatas. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga perlu terus ditingkatkan, terutama dalam peranannya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Peningkatan emisi GRK yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, sampah, kebakaran hutan, limbah pertanian, dan aktivitas lainnya berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola potensi pertanian, peternakan, dan kehutanan yang dapat menghasilkan emisi, sehingga kebijakan yang berorientasi pada penurunan emisi perlu diperkuat. Selain itu, pengelolaan limbah, baik padat maupun cair, belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten/Kota untuk periode 2025–2029 menunjukkan tren peningkatan nilai target dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, target penurunan intensitas emisi GRK ditetapkan sebesar 7,14 ton CO₂eq/2010 IDR miliar, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 7,58 pada 2026, 8,02 pada 2027, 8,46 pada 2028, hingga mencapai 8,90 pada tahun 2029.

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029

Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	7,14	7,58	8,02	8,46	8,9

Peningkatan target yang konsisten ini mencerminkan adanya komitmen kuat dalam mengurangi emisi GRK sejalan dengan pembangunan ekonomi. Semakin besar nilai penurunan intensitas emisi GRK menunjukkan semakin baiknya efisiensi pembangunan dalam menekan emisi karbon per satuan produk domestik regional bruto (PDRB) riil. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berjalan, namun dengan intensitas emisi yang semakin rendah. Berikut disajikan target penurunan Emisi GRK Kabupaten Kuningan tahun 2025-2029.

Secara strategis, pencapaian target ini membutuhkan penerapan kebijakan rendah karbon di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, industri, dan pengelolaan sampah. Selain itu, konsistensi peningkatan target hingga 2029 menunjukkan upaya jangka panjang dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission nasional.

2.1.5.6 Permasalahan daya saing iklim investasi

Investasi di daerah masih rendah, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti regulasi tata ruang yang belum mendukung potensi investasi, keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis, serta rendahnya kapasitas sosial budaya masyarakat. Selain itu, birokrasi perizinan yang belum efektif dan efisien turut menjadi hambatan. Mengingat pentingnya investasi dalam mengatasi persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pendapatan per kapita, maka diperlukan upaya menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.7 Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum

Permasalahan pembangunan daerah dari aspek pelayanan umum diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu:

- a. masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; dan
- b. masih rendahnya angka rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama dalam urusan kesehatan antara lain, yaitu:

- a. kasus stunting yang masih tinggi;
- b. masih ditemukannya balita kurang gizi;
- c. masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi;
- d. belum banyaknya desa/kelurahan yang *Universal Child Immunization* (UCI);
- e. masih tingginya kasus penyakit tidak menular dan penyakit menular;
- f. masih terbatasnya sarana dan prasarana layanan kesehatan;
- g. masih rendahnya standarisasi dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- h. masih terbatasnya tenaga medis dan non medis khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- i. rendahnya kompetensi tenaga kesehatan;
- j. belum optimalnya promosi dan pembinaan konsumsi masyarakat dari olahan pangan lokal;
- k. masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat sehat dan aman;
- l. masih belum optimalnya penataan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya bagi masyarakat miskin; dan
- m. rendahnya tata kelola pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

- a. kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata di seluruh daerah terutama di sentra produksi pangan daerah;
- b. kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air;
- c. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanganan infrastruktur bidang sumber daya air di kabupaten kuningan;
- d. masih terjadinya banjir di beberapa wilayah DAS;

- e. masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan;
- f. masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan;
- g. masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- h. kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah;
- i. kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan;
- j. masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah;
- k. masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastruktur daerah;
- l. masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum;
- m. belum ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan
- n. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu:

- a. pendataan rumah belum menggunakan standar ketentuan yang berlaku;
- b. belum dilaksanakan identifikasi kawasan dan permukiman kumuh secara menyeluruh dan mendalam;
- c. belum optimalnya penanganan kawasan kumuh pada jalan lingkungan dan drainase;
- d. dokumen perencanaan sektoral (RPKP, RP2KP, RP3KP, RP2KPKPK, RPLP, Masterplan Kawasan Kumuh dan lain-lain) belum sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru;
- e. penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor;
- f. masih banyak masyarakat bermukim di lokasi yang tidak sesuai tata ruang;

- g. belum optimalnya bantuan perbaikan rumah korban bencana alam;
- h. masih kurangnya penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;
- i. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sesuai dengan RTRW kabupaten terbatas pada anggaran daerah; dan
- j. kurangnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengelolaan tanah pemerintah.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:

- a. masih kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku;
- b. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda dan Perkada;
- c. kurang memadainya sarana, prasarana serta SDM Satpol PP, Linmas, dan Damkar;
- d. belum optimalnya sinergitas lintas sektoral dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. masih rendahnya pendidikan berpolitik dan wawasan kebangsaan;
- f. belum optimalnya pelayanan prabencana, penanganan darurat bencana dan pasca bencana sehingga tingginya risiko bencana; dan
- g. belum optimalnya ketercapaian nilai ketahanan daerah.

6. Urusan Sosial

Permasalahan utama urusan sosial, yaitu:

- a. masih tingginya angka kemiskinan;
- b. masih rendahnya fasilitas dasar untuk masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, hunian, air bersih dan sanitasi;
- c. masih tingginya kesenjangan sosial masyarakat;
- d. masih belum terpadunya data kemiskinan;
- e. belum optimalnya sikap dan mental masyarakat dalam menyikapi kemiskinan;
- f. masih rendahnya kepemilikan aset masyarakat miskin;
- g. masih maraknya masalah sosial dan penyakit masyarakat; dan
- h. belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan utama urusan tenaga kerja, yaitu:

- a. tingginya tingkat pengangguran;
- b. rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- c. kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah;
- d. belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
- e. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja;
- f. produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan; dan
- g. masih mengalami bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif dikhawatirkan melebihi lapangan kerja yang tersedia.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. kurang optimalnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. tidak semua perangkat daerah membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender;
- c. masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender;
- e. rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan; dan
- f. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih rendah.

3. Urusan Pangan

Permasalahan utama urusan pangan, yaitu:

- a. tidak terpenuhinya kualitas pangan sesuai standar keamanan pangan;
- b. belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertanian;
- c. masih rendahnya diversifikasi pangan dan produk olahannya;
- d. belum optimalnya proses transformasi dari pertanian konvensional ke pertanian modern;
- e. ketersediaan pangan cenderung menurun;
- f. belum meratanya distribusi pangan;
- g. belum terjaminnya keamanan pangan;
- h. belum optimalnya konsumsi pangan lokal; dan
- i. terhambatnya regenerasi petani.

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan, yaitu

- a. masih terdapat tanah negara yang belum jelas legalitas kepemilikannya;
- b. kurangnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengelolaan tanah pemerintah;
- c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sesuai dengan RTRW kabupaten terbatas pada anggaran daerah.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup, yaitu:

- a. cakupan pelayanan sampah belum optimal;
- b. pengelolaan TPA belum optimal;
- c. fasilitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau belum memadai;
- d. penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup belum ditegakkan;
- e. terdapat pencemaran air dan udara di beberapa lokasi;
- f. belum tersedianya Laboratorium Lingkungan;
- g. belum optimalnya tata kelola lingkungan;
- h. pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh penanganan sampah sehingga perlu didorong upaya peningkatan pola pengurangan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak di sumber;
- i. meningkatnya kerusakan ekosistem dan alih fungsi lahan;
- j. deforestasi dan menurunnya ketersediaan sumber-sumber mata air;
- k. belum optimalnya penyusunan instrumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. belum optimalnya pengkajian lingkungan dikarenakan mengikuti kebijakan yang terus diperbaharui; dan
- m. belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu:

- a. belum semua penduduk memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan yang lengkap; dan
- b. terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

- a. pemahaman regulasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa sampai tingkat desa dan masyarakat masih sangat minim;
- b. masih belum optimalnya sarana dan prasarana di desa dalam menunjang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di desa.
- c. masih belum optimalnya inventarisasi dan penataan aset desa;
- d. masih belum optimalnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa;
- e. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa terutama dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di desa; dan
- f. kurang berkembangnya usaha Bumdes dan Bumdes Bersama.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu:

- a. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
- b. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB;
- c. masih tingginya persentase *unmet need*; dan
- d. belum maksimalnya strategi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

9. Urusan Perhubungan

Permasalahan utama urusan perhubungan, yaitu:

- a. sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik;
- b. belum adanya dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJ LLAJ), Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ), Rencana umum nasional keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ);
- c. rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor melakukan uji kendaraan bermotor berkala;
- d. belum tersedianya fasilitas khusus parkir yang aman, nyaman, tertib dan teratur;
- e. rendahnya kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap PAD;
- f. belum optimalnya pelayanan terminal tipe C dan angkutan masal;
- g. belum tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ramah difabel dan lansia;

- h. belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan berkeselamatan pada usia dini (SALUD);
- i. belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan; dan
- j. belum tersedianya sistem transportasi cerdas atau ITS (*intelligents transportation system*).

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama urusan komunikasi dan informatika, yaitu:

- a. belum terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika dengan baik;
- b. belum optimalnya integrasi data dan informasi pemerintah daerah; dan
- c. belum optimalnya kualitas sarana prasarana dalam mendukung Kuningan *Smart City*.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan utama urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, yaitu belum optimalnya peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.

12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal, yaitu:

- a. masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. belum memadainya sarana prasarana yang mendukung pengembangan investasi;
- c. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat legalitas untuk kepentingan pribadi maupun usahanya;
- d. kerja sama investasi dan promosi investasi daerah yang belum optimal;
- e. produktivitas penerbitan perizinan belum seimbang dengan potensi masyarakat yang membangun dan berusaha; dan
- f. kesadaran para pengusaha masih relatif rendah terkait pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu:

- a. belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
- b. belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dengan *stakeholder* terkait penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda;

- c. belum optimalnya pengembangan kewirausahaan pemuda pemula;
- d. belum optimalnya pembinaan atlet usia dini;
- e. belum optimalnya pembinaan *sentra club* olahraga;
- f. belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang urusan kepemudaan dan olah raga; dan
- g. apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina dan tenaga keolahragaan yang berprestasi belum optimal.

14. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama urusan kebudayaan yaitu:

- a. masih rendahnya minat masyarakat terutama anak muda dalam melestarikan budaya daerah;
- b. masih rendahnya promosi dan apresiasi terhadap budaya daerah; dan
- c. masih belum optimalnya sarana dan prasarana kebudayaan dalam mendukung kebudayaan daerah.

15. Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan, yaitu

- a. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan;
- b. keterbatasan SDM pengelola perpustakaan; dan
- c. kurangnya sosialisasi minat baca serta masih minim sarana literasi di tempat umum.

16. Urusan Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan, yaitu:

- a. keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kearsipan;
- b. masih terbatasnya SDM pengelolaan kearsipan; dan
- c. belum optimalnya pengelolaan arsip statis dan dinamis.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. masih rendahnya tingkat produksi perikanan;
- b. kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan hasil perikanan;
- c. belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan;

- d. masih belum tertanganinya dan termanfaatkannya kotoran hewan;
- e. masih rendahnya produksi dan produktivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- f. masih rendahnya pengawasan sumber daya perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan utama urusan pariwisata, yaitu:

- a. SDM pengelola pariwisata belum sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata;
- b. Belum optimalnya penataan daya tarik wisata;
- c. belum optimalnya sarana dan prasarana pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pemasaran pariwisata masih jauh dari memadai dari sisi variasi kegiatan, luasnya jejaring, serta publikasinya;
- e. masih terdapatnya ketidaksesuaian antara pola ruang dengan pemanfaatannya untuk sektor pariwisata; dan
- f. belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Urusan Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanian, yaitu:

- a. menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian;
- b. masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu;
- c. belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian;
- d. belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian;
- e. belum optimalnya pendampingan secara intensif kepada petani;
- f. belum optimalnya produksi peternakan baik daging, telur, maupun susu, dan produk turunannya untuk meningkatkan pendapatan peternak;
- g. belum termanfaatkannya kotoran ternak yang siap pakai untuk kebutuhan pertanian; dan
- h. belum tersedianya rumah potong unggas.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama urusan perdagangan, yaitu kenaikan inflasi yang disebabkan oleh gejolak harga pangan (belum terpenuhinya kualitas, kuantitas, kontinuitas produk).

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama urusan perindustrian, yaitu belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi COVID-19.

6. Urusan Transmigrasi

Permasalahan utama urusan transmigrasi, yaitu:

- a. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di lokasi transmigrasi; dan
- b. masih terbatasnya lapangan kerja di lokasi transmigrasi yang menjadi faktor utama perpindahan tenaga kerja produktif ke daerah perkotaan.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. sinkronisasi perencanaan lintas sektor masih belum optimal;
- b. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang masih belum optimal; dan
- c. mekanisme usulan perencanaan daerah yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para mitra pembangunan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. masih belum optimalnya advokasi hasil kajian dan penelitian untuk dalam penentuan kebijakan pembangunan di daerah; dan
- b. masih rendahnya keterpaduan inovasi dalam menyelesaikan isu dan permasalahan di daerah.

3. Keuangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. masih belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. masih rendahnya PAD;
- c. belum maksimalnya Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- d. belum optimalnya dalam penyusunan/pembuatan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah; dan

- f. belum Tertib dan terinventarisnya aset-aset milik daerah secara optimal dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. belum optimalnya profesionalitas ASN;
- b. adanya deviasi antara jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan jumlah pemenuhan pegawai menyebabkan ketidakseimbangan distribusi beban kerja;
- c. jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis belum merata; dan
- d. belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian.

5. Pengawasan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik; dan
- b. program belum optimal dalam kerangka reformasi birokrasi.

E. Fungsi Penunjang Lainnya

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. terbatasnya sarana prasarana untuk mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah;
- b. minimnya informasi hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah daerah;
- c. kurangnya pemahaman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah;
- d. kurangnya pemahaman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- e. belum optimalnya kualitas koordinasi, sistem pengawasan internal, pelaporan kinerja pemerintahan daerah dan tata kelola administrasi pemerintahan daerah;
- f. adanya perkara hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti di daerah;
- g. belum optimalnya pembangunan jaring pengaman sosial (keagamaan, pangan, kesehatan, kepemudaan dan pendidikan) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan;
- h. masih rendahnya penggunaan Produk Lokal dalam kegiatan belanja pemerintah;

- i. belum optimalnya kualitas pengendalian kegiatan pembangunan, pelaporan hasil kinerja pembangunan dan tata kelola administrasi pembangunan;
- j. rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
- k. belum optimalnya pengendalian stabilitas harga komoditas bahan pokok;
- l. masih belum optimalnya penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponomi (alam, buatan, dan budaya); dan
- m. layanan Internal dan eksternal sebagian masih secara manual (non elektronik) sehingga terjadinya keterlambatan pelayanan.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tidak bisa maksimal sesuai target dikarenakan terkendala lama waktu pembahasan yang sangat variatif dan referensi yang terbatas;
- b. belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD menuju terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Government*);
- c. belum optimalnya fasilitasi aspirasi masyarakat; dan
- d. belum optimalnya sarana pendukung dalam meningkatkan kinerja DPRD.

3. Kecamatan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- a. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi;
- b. belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dan instansi vertikal dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan; dan
- c. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.

2.1.6 Isu Strategis

Isu strategis daerah Kabupaten Kuningan diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun regional/daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Kuningan yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan

daerah pada 2025-2029.

2.1.6.1 Isu Strategis Global

Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

a. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global yang kian kompleks menjadi tantangan nyata bagi Indonesia di masa mendatang. Persaingan antarnegara adidaya yang semakin intens, disertai kemunculan kekuatan baru, mempengaruhi stabilitas kawasan dan posisi Indonesia dalam tatanan global. Konflik bersenjata seperti perang Rusia-Ukraina serta ketegangan antara Israel dan negara-negara Timur Tengah memperbesar kewaspadaan terhadap potensi konflik serupa di kawasan lain seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Dampak konflik ini tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga memicu tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, serta dorongan untuk memperkuat instrumen pertahanan. Kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu episentrum kontestasi geopolitik, di mana Indonesia memegang peran penting melalui pendekatan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dalam mendorong kerja sama dan menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik turut memengaruhi geoekonomi global. Risiko yang muncul seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga ancaman siber berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan memperbesar risiko krisis energi serta pangan. Kondisi ini diperparah oleh tren global seperti pelemahan ekonomi Tiongkok dan meningkatnya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang berpengaruh besar terhadap arus perdagangan dan investasi dunia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang bersifat lintas batas, dibutuhkan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan di dalam negeri maupun internasional guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menjaga peran aktif Indonesia dalam percaturan global. Berikut dijelaskan terkait isu ekonomi global tersebut di bawah ini.

Situasi ekonomi global saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat melemahnya perekonomian China, yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan global. Perlambatan ini terjadi di tengah berbagai ketidakpastian global, termasuk dinamika politik di Amerika Serikat, konflik geopolitik di Timur Tengah, serta bencana alam di kawasan Amerika Utara. Dampaknya terasa langsung pada pasar

komoditas yang sensitif terhadap permintaan dari China. Ketergantungan negara-negara pengekspor terhadap pasar China membuat kondisi ini berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi di berbagai kawasan, termasuk negara berkembang.

Pelemahan ekonomi China dipicu oleh sejumlah faktor struktural, seperti kelebihan kapasitas produksi, krisis sektor properti, lemahnya konsumsi domestik, serta inflasi inti yang stagnan. Data terakhir menunjukkan bahwa harga konsumen di China hampir tidak mengalami pertumbuhan, dengan inflasi inti hanya 0,1% per tahun pada September 2024. Di sisi lain, masalah demografis seperti populasi menua dan meningkatnya pengangguran pemuda semakin memperburuk prospek jangka menengah. Penurunan permintaan global terhadap barang dari China, terutama di pasar Eropa, turut memperdalam perlambatan ini. Tanpa intervensi kebijakan yang agresif, China berisiko mengalami periode stagnasi ekonomi berkepanjangan yang menyerupai deflasi Jepang di era 1990-an.

Kebijakan proteksionisme kembali mencuat ke permukaan sejak Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, menerapkan berbagai langkah untuk melindungi ekonomi domestik selama masa jabatannya (2017–2021). Proteksionisme, yang bertujuan membatasi persaingan luar negeri melalui tarif impor, kuota, dan regulasi ketat, bukanlah kebijakan baru. Sejak abad ke-19, negara-negara seperti Britania Raya dan Amerika Serikat telah menggunakannya untuk membangun kekuatan industri nasional. Langkah Trump dalam mengenakan tarif tinggi terhadap impor baja dan aluminium menjadi contoh nyata pendekatan ini di era modern. Dampak kebijakan tersebut memicu perdebatan global. Di satu sisi, pendukungnya menilai proteksionisme dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian industri nasional. Namun di sisi lain, para pengkritik menilai langkah ini menimbulkan perang dagang, merugikan konsumen akibat kenaikan harga, serta menurunkan volume perdagangan internasional. Indonesia, sebagai bagian dari sistem perdagangan global, turut merasakan dampaknya, terutama akibat melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Kebijakan proteksionisme AS menjadi pengingat penting bagi negara-negara berkembang untuk menata ulang strategi perdagangan dan meningkatkan ketahanan sektor industrinya.

a. Dampak Perubahan Iklim Global

Tiga krisis global—perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta

kehilangan keanekaragaman hayati (*triple planetary crisis*)—diperkirakan akan terus berlangsung dan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan pembangunan. Krisis ini mendorong perubahan arah pembangunan global, dari paradigma *business-as-usual* menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi. Konsekuensinya, berbagai sektor seperti energi, industri, pertanian, kelautan, dan limbah dituntut untuk bertransformasi menuju ekonomi rendah karbon dan penerapan prinsip ekonomi sirkuler.

Pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon kini menjadi strategi global yang diadopsi oleh banyak negara, dengan target ambisius penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk Indonesia yang menetapkan target *net zero emission* pada tahun 2060. Peralihan ke sumber energi baru dan terbarukan menjadi keniscayaan, seiring menurunnya keekonomian teknologi seperti tenaga surya, bayu, dan berkembangnya teknologi nuklir generasi IV (SMR). Selain itu, teknologi Green Hydrogen (GH₂) dan *fuel cell* semakin menunjukkan potensi besar, khususnya untuk transportasi berat dan sektor industri strategis, menjadikannya bagian penting dalam ekosistem energi masa depan.

b. Demografi Global

Perkembangan demografi global menjadi faktor strategis yang memengaruhi arah pembangunan ekonomi dan sosial dunia. Dengan proyeksi populasi mencapai 9,7 miliar jiwa pada 2050, tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, energi, dan air, yang harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Meskipun laju pertumbuhan penduduk melambat akibat menurunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup, dinamika demografi seperti peningkatan populasi lansia dan banyaknya penduduk usia muda menciptakan tekanan baru terhadap sistem perlindungan sosial dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, perubahan struktur keluarga, transformasi sosial akibat teknologi digital, serta dinamika ideologi turut mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Fenomena seperti *childfree*, penundaan pernikahan, dan perkawinan usia dini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial, sementara akses digital yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan risiko sosial yang lebih kompleks. Konsentrasi pertumbuhan penduduk di kawasan Asia dan Afrika

memperkuat posisi strategis kawasan tersebut dalam perekonomian global, menjadikannya pusat pertumbuhan masa depan, terutama dengan munculnya negara-negara berkembang yang berpotensi memimpin dalam bidang teknologi dan inovasi.

c. Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah mendorong terjadinya disrupsi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari manufaktur, pendidikan, hingga pemerintahan. Berbagai teknologi seperti AI, IoT, *blockchain*, dan robotika telah mengubah cara kerja industri serta mendorong digitalisasi usaha, terutama sejak pandemi COVID-19. Namun, adaptasi terhadap disrupsi teknologi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan permodalan. Di sisi lain, disrupsi teknologi juga berdampak signifikan pada perubahan struktur pekerjaan dan pola kerja, termasuk munculnya tren remote working yang mempengaruhi sektor properti dan real estate, sekaligus menuntut kepercayaan tinggi antara pekerja dan pemberi kerja.

Dalam sektor pemerintahan, disrupsi teknologi membuka peluang transformasi besar melalui digitalisasi tata kelola, peningkatan efisiensi layanan publik, serta pengambilan kebijakan berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu proses pembentukan regulasi menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan partisipatif, sekaligus mengurangi tumpang tindih regulasi dan meningkatkan kualitas kelembagaan negara. Masyarakat dituntut untuk memiliki literasi digital dan pola pikir adaptif guna mengoptimalkan manfaat teknologi dan meminimalkan risikonya. Dengan pendekatan yang tepat, disrupsi teknologi bukan hanya tantangan, tetapi peluang strategis untuk mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di negara-negara *emerging economies*. Diproyeksikan pada tahun 2050, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan, dengan 95 persen pertambahan terjadi di negara berkembang. Di Asia, jumlah penduduk perkotaan diperkirakan meningkat 1,7 kali lipat dalam empat dekade ke depan. Sejalan dengan itu, ukuran kota pun bertambah, tercermin dari meningkatnya jumlah megacities, dari hanya dua pada tahun 1970 menjadi 23 pada tahun 2020, lebih dari setengahnya berada di negara-negara berkembang. Fenomena ini menciptakan tantangan besar terhadap ketersediaan infrastruktur, pelayanan dasar, serta ruang hidup yang layak.

Sayangnya, banyak kota di negara berkembang belum mampu mengelola urbanisasi dengan baik. Sekitar 25–30 persen penduduk kota di Asia dan Afrika masih tinggal di permukiman yang minim akses terhadap layanan dasar. Urbanisasi yang tidak terkendali juga menyebabkan perluasan kota ke wilayah pinggiran, yang berimplikasi pada alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial. Dari sisi ekonomi, terjadi pergeseran aktivitas menuju sektor industri, jasa, dan perdagangan. Kondisi ini mendorong perlunya paradigma baru dalam pengelolaan perkotaan yang lebih kompak, efisien, dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan urbanisasi serta menjaga kualitas hidup masyarakat.

e. Perdagangan Internasional

Pergeseran kekuatan ekonomi global menunjukkan peningkatan peranan negara berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara E7 diperkirakan akan mengambil alih dominasi ekonomi dunia dari negara-negara G7, didorong oleh pertumbuhan perdagangan intra-Asia yang kuat terutama dari Tiongkok, India, dan ASEAN. Di Afrika, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan demografi yang pesat, seperti di Nigeria dan beberapa negara Afrika Selatan, juga memicu pergeseran arus perdagangan internasional ke kawasan tersebut. Perubahan ini mencerminkan orientasi baru perdagangan global yang berbasis pada dinamika negara berkembang dengan potensi pasar yang besar.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital dan tuntutan keberlanjutan semakin mempengaruhi pola perdagangan dunia. Negara yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital serta memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi akan lebih kompetitif dalam rantai nilai global. Selain itu, kerja sama kawasan seperti RCEP dan IPEF memperkuat posisi Asia Pasifik sebagai pusat perdagangan dunia. Kawasan ini, dengan keunggulan geografis, potensi sumber daya, dan kekuatan ekonomi, menjadi pusat pertumbuhan investasi, inovasi, dan ketersediaan rantai pasok global, mengukuhkan peran strategis Indo-Pasifik dalam perdagangan internasional masa depan.

f. Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika struktur ekonomi dan demografi. Perubahan struktur ekonomi dan peningkatan produktivitas penduduk membuka peluang bagi peningkatan

penerimaan negara, namun pada saat yang sama komposisi belanja negara juga akan berubah signifikan, terutama akibat meningkatnya proporsi penduduk lansia yang mendorong belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan, kebijakan fiskal akan terhubung erat dengan perkembangan pasar keuangan yang semakin dalam, serta dinamika kebijakan moneter global yang mempengaruhi pergerakan suku bunga dan arus likuiditas. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* juga menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dari risiko yang ditimbulkan oleh aset kripto yang tidak teregulasi.

Transformasi digital telah menciptakan disrupsi besar dalam industri jasa keuangan. Inovasi teknologi seperti IoT, AI, *cloud computing*, dan *machine learning* telah mengubah lanskap sektor keuangan dengan meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan. Perusahaan teknologi finansial seperti bank digital dan sistem keuangan terdesentralisasi berkembang pesat, menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi sistem keuangan konvensional. Perubahan ini akan menggeser kebutuhan keterampilan tenaga kerja secara drastis, dengan hilangnya jutaan pekerjaan lama yang digantikan oleh peran-peran baru. Namun demikian, tanpa regulasi yang memadai, pesatnya pertumbuhan sektor teknologi finansial dapat menimbulkan risiko sistemik yang mengancam stabilitas keuangan di masa depan.

g. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan global terhadap sumber daya alam seperti energi, air, dan pangan diproyeksikan akan meningkat seiring pertumbuhan populasi dan intensifikasi aktivitas ekonomi. Kebutuhan terhadap SDA yang terus melonjak menjadi pemicu utama munculnya kompetisi lintas negara dan bahkan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia. Fenomena ini menandai pentingnya SDA sebagai faktor strategis dalam dinamika global, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam keamanan dan politik internasional. Tingkat persaingan untuk mengakses SDA di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keberhasilan negara dalam merespons tantangan ini akan bergantung pada efektivitas pengelolaan dan konservasi sumber daya, inovasi teknologi yang mendukung efisiensi dan substitusi SDA, serta perubahan pola konsumsi dan produksi menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kebijakan pengelolaan SDA menjadi krusial, baik dalam konteks nasional maupun kerja sama

internasional, guna menjaga ketahanan sumber daya dan stabilitas global.

h. Penduduk Kelas Menengah

Pada tahun 2045, jumlah penduduk kelas menengah dunia diperkirakan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen populasi global, dengan sekitar 140 juta orang masuk ke status kelas menengah setiap tahunnya. Pergeseran komposisi kelas menengah dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat ke Asia, khususnya Tiongkok dan India, mencerminkan perubahan signifikan dalam peta ekonomi dunia. Pertumbuhan pesat kelas menengah ini membuka peluang ekonomi baru melalui peningkatan konsumsi dan investasi domestik, namun juga memunculkan tantangan sosial dan politik, seperti meningkatnya ekspektasi terhadap pelayanan publik, inklusivitas, dan kestabilan sosial. Kenaikan proporsi kelas menengah turut mendorong munculnya jenis dan lapangan pekerjaan baru yang lebih beragam dan menyesuaikan dengan gaya hidup modern. Kebutuhan akan pekerjaan yang terkait dengan teknologi tinggi, dunia virtual-metaverse, serta pekerjaan yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada mobilitas tinggi akan meningkat. Transformasi ini tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga memicu dinamika mobilitas pekerja antar sektor dan jenis pekerjaan yang semakin cair. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sistem pendidikan dan pelatihan kerja agar mampu menjawab perubahan kebutuhan kompetensi di masa depan.

2.1.6.2 Isu Strategis Nasional

a. Rendahnya Produktivitas

Produktivitas Indonesia masih tergolong rendah di tengah meningkatnya persaingan global. Berdasarkan laporan Asian Productivity Organization (2024), pertumbuhan Total Factor Productivity Indonesia selama 2015–2022 hanya meningkat 60 basis poin dibanding periode sebelumnya, yaitu dari -0,9 persen menjadi -0,3 persen. Capaian ini tertinggal jauh dari Korea Selatan dan Tiongkok pada masa transisi mereka menuju negara maju. Rendahnya produktivitas Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal—terutama perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, serta kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang belum memadai. Selain itu, kelembagaan yang lemah, termasuk sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum, turut memperburuk situasi. Khusus untuk perempuan, partisipasi dalam pasar kerja masih

terhambat oleh norma sosial budaya, kurangnya fleksibilitas jam kerja, dan minimnya akses terhadap layanan pengasuhan anak yang terjangkau dan berkualitas.

Rendahnya produktivitas juga berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada periode 2005–2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai rata-rata 5,7 persen, namun menurun menjadi 4,7 persen selama 2010–2015. Meskipun sempat meningkat menjadi 5,0 persen pada 2015–2019 dan mencapai 5,05 persen pada 2023, laju ini tetap menunjukkan kecenderungan stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas telah menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menyulitkan Indonesia untuk tumbuh lebih cepat dan keluar dari perangkap pertumbuhan menengah.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada tahun 2022 masih tergolong rendah, yakni sebesar US\$28.600 per pekerja, tertinggal dibandingkan Amerika Serikat (US\$149.100) maupun rata-rata kawasan ASEAN (US\$30.200). Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas adalah kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tahun 2022 yang hanya mencapai skor rata-rata 369,3 untuk aspek membaca, matematika, dan sains mengalami penurunan dari tahun 2018 (382) dan masih jauh di bawah rata-rata negara OECD (488,33). Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan kapasitas pembelajaran sejak dini. Di sisi lain, daya saing tenaga kerja Indonesia juga dihambat oleh rendahnya kualifikasi pendidikan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 mencatat bahwa lebih dari separuh (52,32 persen) angkatan kerja hanya mengenyam pendidikan tingkat rendah, sementara hanya 12,86 persen yang memiliki pendidikan tinggi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya proporsi pekerja yang terserap di bidang keahlian menengah dan tinggi, yang baru mencapai 41,23 persen. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan manusia unggul dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Indonesia perlu melakukan investasi yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi guna memperkuat kapasitas dan daya saing sumber daya manusia di pasar kerja.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah kini menjadi kelompok sosial ekonomi terbesar di

Indonesia, dengan jumlah mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari populasi pada tahun 2024. Namun, dalam lima tahun terakhir, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat signifikan sebesar 12,72 juta orang, mencapai 67,69 juta jiwa atau 24,33 persen dari total populasi. Fenomena ini menunjukkan adanya risiko mobilitas sosial ke bawah, di mana kelompok kelas menengah semakin rentan tergelincir menjadi calon kelas menengah bahkan miskin. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 46.420 orang pada Agustus 2024 dan diperkirakan terus bertambah, mengindikasikan tekanan serius terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka PHK, yang berdampak langsung pada kelangsungan sektor industri. Data menunjukkan terjadinya deflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah, dari 1,68 persen pada Agustus menjadi 1,40 persen pada September 2024, serta deflasi signifikan pada komponen harga bergejolak, dari 3,04 persen menjadi 1,43 persen pada periode yang sama. Penurunan daya beli ini berimplikasi pada melemahnya permintaan terhadap barang dan jasa, mempersulit industri untuk menutup biaya operasional. Akibatnya, banyak pelaku usaha terpaksa mengurangi tenaga kerja atau menghentikan aktivitas bisnisnya, yang pada gilirannya memperparah kerentanan ekonomi masyarakat dan memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan, mengingat tingginya kebutuhan hidup masyarakat harus diimbangi dengan keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, serta keterbatasan lahan. Situasi ini menuntut perencanaan pembangunan yang cermat agar tekanan terhadap lingkungan dan sumber daya tidak semakin meningkat. Selain tantangan sumber daya, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan sosial, jaminan kesehatan, akses pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu dan berkelanjutan yang mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan

kelestarian lingkungan.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan global saat ini dihadapkan pada tantangan besar berupa *triple planetary crisis*, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Ketiga krisis tersebut saling terkait dan berdampak luas terhadap keberlanjutan bumi dan kesejahteraan manusia. Sekitar 50–75 persen populasi dunia diprediksi akan terdampak kondisi iklim ekstrem pada tahun 2100. Risiko ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa—sebesar 9.176 orang dalam satu dekade terakhir di Indonesia—tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp22,8 triliun per tahun. Di sisi lain, lebih dari satu juta spesies terancam punah, dan polusi udara menjadi penyebab kematian dini bagi 4,2 juta orang setiap tahun secara global. Indonesia turut mengalami krisis ini, dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara dan pencemaran pada sekitar 70 persen sumber air rumah tangga. Timbulan sampah, khususnya sampah makanan, juga menunjukkan tren meningkat dan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

Lebih lanjut, tekanan terhadap sumber daya alam kian meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, ekonomi, dan ekstraksi sumber daya yang tidak terkendali. Dalam lima dekade terakhir, ekstraksi sumber daya alam meningkat tiga kali lipat secara global, dan Indonesia menjadi negara dengan tingkat ekstraksi tambang terbesar ke-8 di dunia. Masih adanya ribuan tambang ilegal menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Krisis ini juga memicu potensi konflik geopolitik akibat perebutan sumber daya seperti energi, air, dan pangan. Oleh karena itu, *triple planetary crisis* berimplikasi besar terhadap pencapaian target pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun panjang. Upaya transisi menuju ekonomi rendah emisi serta penyelarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi keniscayaan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global yang kian kompleks menjadi tantangan serius bagi Indonesia, khususnya terkait eskalasi persaingan antarnegara adidaya dan kemunculan kekuatan baru yang mengubah konstelasi kawasan dan global. Konflik Rusia-Ukraina menjadi pemicu meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi konflik serupa di kawasan strategis seperti Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Indo-

Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik, yang kini menjadi pusat perhatian global karena potensi pertumbuhan ekonominya, turut mendorong persaingan pengaruh antar negara, baik regional maupun global. Ketegangan geopolitik ini tidak hanya menimbulkan risiko keamanan, tetapi juga berdampak terhadap inflasi, krisis energi dan pangan, serta mengubah strategi pertahanan negara-negara di dunia.

Ketidakstabilan geopolitik turut berkontribusi terhadap ketidakpastian geoekonomi global, tercermin dari tingginya suku bunga, fluktuasi inflasi, dan perlambatan perdagangan internasional. Meski ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen pada 2024–2025, tekanan inflasi dan tingginya suku bunga acuan di berbagai negara, termasuk Indonesia, berpotensi menahan laju pertumbuhan. Selain itu, faktor-faktor seperti penguatan dolar AS, perubahan pola konsumsi global, penurunan harga komoditas, hingga dampak perubahan iklim turut memperberat tantangan ekonomi global. Menghadapi situasi ini, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan arah kebijakan yang terkoordinasi untuk menjaga stabilitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan, serta mendorong iklim investasi yang sehat. Upaya ini menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan demokratis. Namun demikian, tren Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan signifikan, dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022 dan stagnan di angka tersebut pada 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara.

Di sisi lain, meskipun Indeks Perilaku Anti Korupsi menunjukkan perbaikan selama 2019–2022, capaian tersebut menghadapi tantangan pada tahun berikutnya, mengindikasikan adanya risiko dalam konsistensi pemberantasan korupsi. Selain itu, penguatan tata kelola data menjadi aspek krusial dalam mendukung proses pembangunan nasional melalui pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Namun, tingkat keamanan data privasi dan siber pemerintah masih belum optimal dalam mengantisipasi risiko peretasan, pembajakan, maupun pelanggaran privasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

2.1.6.3 Isu Strategis Regional

a. Isu Strategis RPJMD Teknokratik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Berikut adalah sintesis hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat yang mencakup sejumlah isu utama yang menjadi isu strategis untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat.

1. Isu *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Jawa Barat menuntut keterlibatan masyarakat secara aktif melalui pendekatan ekonomi inklusif, yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tantangan global dan regional, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Konsep *green* dan *blue economy* menjadi paradigma penting yang harus diintegrasikan ke dalam sistem sosial-ekologi Jawa Barat, dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pembangunan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja yang adil, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan menggabungkan prinsip *green* dan *blue economy* serta pendekatan inklusif, pembangunan diharapkan mampu menjawab tantangan secara berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan.

2. Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat menghadirkan peluang strategis berupa potensi sumber daya manusia yang besar. Namun, agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan upaya serius dalam mempersiapkan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing, khususnya dalam menghadapi dinamika global dan regional. Penguatan ketahanan sosial menjadi kunci, mencakup aspek pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan yang merata, perlindungan sosial yang inklusif, serta penguatan norma sosial-budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, kualitas dan daya saing SDM di Jawa Barat menjadi isu sentral. Tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja,

pengembangan keterampilan yang sesuai dengan era digital, serta dorongan terhadap inovasi dan kreativitas. Selain itu, penting pula memastikan kesejahteraan dan motivasi kerja, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang terus berlangsung.

3. Isu Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Jawa Barat menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesetaraan sosial masyarakat. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi masih terasa nyata, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi lokal, serta memperbesar jurang ketimpangan antara wilayah perkotaan dan non-perkotaan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Isu ini juga berkaitan erat dengan tantangan perubahan iklim, inklusivitas sosial, serta kebutuhan akan pemerataan pembangunan antarwilayah. Infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana menjadi semakin relevan di tengah dinamika perubahan iklim global. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan afirmatif, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal teknis, tetapi juga merupakan bentuk komitmen terhadap keadilan sosial dan peningkatan daya saing wilayah secara menyeluruh.

4. Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah menjadi isu strategis yang harus diutamakan dalam perumusan RPJMD Jawa Barat 2025–2029, khususnya dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah. Tekanan pembangunan yang semakin tinggi, ditambah dengan risiko perubahan iklim dan kerawanan bencana, menuntut perhatian serius terhadap keberlanjutan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanpa pengelolaan yang tepat, kerusakan lingkungan akan menghambat kelangsungan pembangunan dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan upaya pelestarian lingkungan

perlu dilakukan sejak tahap awal pembangunan, melalui pendekatan perencanaan yang holistik dan berbasis pada kapasitas ekologis wilayah. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus mencakup perlindungan sumber daya alam, rehabilitasi kawasan kritis, serta peningkatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan bukan hanya menjadi prasyarat teknis pembangunan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap masa depan yang tangguh, adil, dan lestari bagi seluruh warga Jawa Barat.

5. Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pembangunan fisik menimbulkan tekanan terhadap ruang, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penataan ruang yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ruang budidaya untuk kegiatan ekonomi dan permukiman dengan perlindungan ruang lindung yang memiliki fungsi ekologis. Penataan ruang yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjamin tersedianya jasa ekosistem lingkungan, seperti ketersediaan air, udara bersih, dan pengendalian bencana, yang semuanya merupakan pondasi penting bagi kualitas hidup masyarakat. Isu keberlanjutan penataan ruang sangat relevan dalam konteks pembangunan jangka panjang di Provinsi Jawa Barat. Perencanaan tata ruang harus mampu menjawab tantangan urbanisasi, alih fungsi lahan, serta fragmentasi ekosistem dengan pendekatan yang integratif dan berbasis data spasial. Kesesuaian antara rencana tata ruang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi syarat utama untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu melestarikan nilai-nilai lingkungan serta budaya lokal.

6. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan yang semakin kompleks serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berintegritas menuntut penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan berkeadilan sosial. Tata kelola yang baik juga menjadi prasyarat untuk menciptakan kepercayaan publik dan mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem pelayanan publik yang adaptif dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut,

diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan dunia akademik. Peran serta aktif para pemangku kepentingan akan memperkuat proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan dukungan teknologi digital, penguatan kapasitas kelembagaan, dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

b. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, di mana pada periode pertama ini berfokus pada **"Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata dan SDM"** yang meliputi:

- 1) Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial untuk semua;
- 2) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
- 4) Penyelenggaraan transformasi tata kelola ideologi, politik, integritas dan kondusivitas daerah;
- 5) Penguatan nilai kebudayaan dan berwawasan lingkungan;
- 6) Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;
- 8) Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Adapun isu strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045, yaitu:

1. Kemiskinan dan Kerentanan Sosial;
2. Tata kelola Pemerintahan yang baik dan demokratis;
3. Kualitas dan Daya Saing SDM;
4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian;
5. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan;

6. Pengelolaan Sumber daya Alam (SDA);
7. Pengembangan Industri Hijau;
8. Penguatan Teknologi dan Pengembangan Inovasi.

c. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 telah dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. masih tingginya kemiskinan;
2. belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi masyarakat;
3. masih tingginya angka stunting;
4. masih rendahnya produktivitas pertanian;
5. belum optimalnya pemerataan kualitas pendidikan;
6. belum optimalnya pengelolaan sampah padat domestik, dan lumpur tinja;
7. belum optimalnya mitigasi bencana;
8. belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca;
9. belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata; dan
10. belum optimalnya transformasi tata kelola pemerintahan yang mendukung pengembangan wilayah dan partisipasi masyarakat.

2.1.6.4 Telaahan terhadap RPJMD Daerah Kabupaten/Kota Sekitarnya

Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari wilayah strategis di Jawa Barat bagian timur dan berbatasan langsung dengan beberapa daerah penting, antara lain Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cilacap. Dalam rangka menyusun arah pembangunan yang sinergis dan responsif terhadap konteks regional, penting untuk menelaah keterkaitan isu strategis Kuningan dengan isu strategis daerah-daerah tersebut. Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi irisan prioritas, potensi kerja sama, dan pendekatan lintas-wilayah dalam perencanaan pembangunan.

Kabupaten Kuningan mengedepankan sektor pertanian sebagai keunggulan utama dalam pengembangan ekonomi. Isu peningkatan produktivitas pertanian ini sejalan dengan fokus Kabupaten Cirebon pada penguatan ekonomi kerakyatan, Kabupaten Ciamis pada pertanian dan ketahanan pangan, serta Kabupaten Brebes

yang menekankan daya saing ekonomi desa. Kabupaten Cilacap juga menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi lokalnya. Hal ini membuka ruang kolaborasi dalam integrasi rantai pasok pertanian antarwilayah, pengembangan kawasan agropolitan lintas batas, serta penerapan inovasi dan teknologi tepat guna berbasis komunitas.

Selanjutnya, pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan desa yang menjadi salah satu prioritas Kuningan juga memiliki keterkaitan kuat dengan Kabupaten Ciamis yang menekankan pariwisata berbasis kearifan lokal. Kota dan Kabupaten Cirebon dikenal dengan kekayaan budaya dan religi yang dapat diintegrasikan dalam paket wisata lintas daerah. Kabupaten Majalengka memiliki akses strategis melalui Bandara Kertajati yang dapat memperkuat konektivitas pariwisata regional. Sinergi dapat diarahkan pada pengembangan destinasi wisata tematik, promosi kolaboratif, dan penguatan infrastruktur pendukung pariwisata lintas kabupaten.

Dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), hampir seluruh daerah menempatkan isu ini sebagai prioritas utama. Kota Cirebon fokus pada pemerataan kualitas SDM, sementara Majalengka dan Brebes menghadapi tantangan berupa rendahnya rata-rata lama sekolah. Kuningan mendorong peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing daerah. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui program pelatihan vokasi regional, pengembangan pusat pelatihan lintas daerah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendidikan bersama.

Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi menjadi isu yang diangkat oleh Kabupaten Kuningan dan juga merupakan fokus utama Kabupaten Cirebon, Majalengka, Brebes, serta Cilacap. Dengan kesamaan tantangan ini, potensi kerja sama dapat diwujudkan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif kawasan, serta pembentukan dan penguatan BUMDes lintas kabupaten. Skema inklusi keuangan dan program perlindungan sosial bersama juga dapat menjadi pendekatan strategis.

Isu penanggulangan stunting menjadi prioritas penting Kuningan dan relevan dengan situasi yang dihadapi oleh Kabupaten Majalengka, Brebes, dan Ciamis yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan dasar dan kesehatan.

Sinergi regional dapat dilakukan dalam bentuk kampanye gizi lintas daerah, penguatan layanan posyandu dan puskesmas, serta pengembangan model intervensi stunting berbasis komunitas.

Dalam upaya pengurangan pengangguran, keterkaitan terlihat dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Ciamis yang fokus pada perluasan kesempatan kerja, serta Kabupaten Brebes dan Cilacap yang menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi dapat berupa penyelenggaraan bursa kerja lintas wilayah, pelatihan kerja bersama berbasis potensi lokal, serta sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah.

Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa yang menjadi agenda penting Kuningan sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Majalengka yang memiliki cakupan pengelolaan sampah rendah, serta Kabupaten Ciamis dan Cilacap yang menaruh perhatian pada aspek daya dukung lingkungan. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui edukasi dan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah kawasan, serta pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) secara bersama.

Isu tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan efektif juga menjadi perhatian bersama. Kabupaten dan Kota Cirebon mengedepankan transformasi digital dan tata kelola yang inovatif, Kabupaten Brebes menekankan pemberdayaan desa dan akuntabilitas, sedangkan Cilacap mendorong implementasi *good governance*. Potensi kerja sama dapat dibentuk dalam forum pemerintah daerah lintas kabupaten untuk berbagi praktik baik, inovasi layanan publik, dan sinergi transformasi digital pelayanan.

Secara keseluruhan, keterkaitan isu strategis antara Kabupaten Kuningan dan wilayah sekitarnya menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Integrasi lintas wilayah, khususnya dalam klaster Ciayumajakuning dan daerah perbatasan Jawa Tengah, sangat penting untuk menciptakan efisiensi, pemerataan, dan daya saing kawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan forum kolaborasi regional, integrasi kerja sama antar daerah, serta pembangunan proyek percontohan tematik seperti agropolitan, ekowisata, dan pendidikan vokasi lintas batas. Dengan demikian, Kabupaten Kuningan dapat memainkan peran strategis sebagai lokomotif pembangunan di kawasan timur Jawa Barat dan sekitarnya.

2.1.6.5 Isu Strategis Kabupaten Kuningan

Berdasarkan kondisi yang telah diidentifikasi, maka perlu dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Kuningan sebagai bentuk kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki, serta dengan memperhatikan isu global, nasional dan regional, maka dirumuskan isu strategis RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029:

1. Peningkatan produktivitas pertanian.
 - 1.1. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan hortikultura dan peternakan secara terintegrasi dan berkelanjutan;
 - 1.2. Peningkatan produksi olahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - 1.3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian;
 - 1.4. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian;
 - 1.5. Penguatan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani untuk mendukung percepatan produksi dan pengolahan hasil pertanian;
 - 1.6. Penguatan kelembagaan ekonomi dan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar;
 - 1.7. Perlindungan hasil produksi pertanian;
 - 1.8. Pemasaran hasil produksi pertanian dan olahan hasil pertanian melalui pengembangan jejaring dan kerja sama yang strategis.
2. Optimalisasi pariwisata daerah sebagai destinasi wisata dunia berbasis komunitas dan desa.
 - 2.1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Destinasi Wisata;
 - 2.2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Institusi Pariwisata;
 - 2.3. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis
 - 2.4. Penguatan Sektor Penunjang Pariwisata
 - 2.5. Digitalisasi Kepariwisata
 - 2.6. Promosi dan Branding

3. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung pengembangan SDM yang berdaya saing.
 - 3.1. Peningkatan kualitas pendidikan formal, informal dan non-formal yang berorientasi pada pengembangan industri khususnya di sektor pertanian dan pariwisata;
 - 3.2. Pengembangan pendidikan berbasis kejuruan untuk peningkatan keterampilan anak didik yang mendukung kebutuhan industri.
4. Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan ekonomi.
 - 4.1. Jaminan pemenuhan hak dan layanan dasar bagi keluarga miskin;
 - 4.2. Penguatan kemandirian desa dalam penanggulangan kemiskinan berbasis aset dan potensi desa;
 - 4.3. Membangun ketahanan pangan keluarga miskin dan rentan;
 - 4.4. Penguatan dan pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi pelatihan, sarana dan prasarana produksi, perijinan, pemasaran.
5. Penanggulangan *stunting*.
 - 5.1. Membangun sistem ketahanan pangan berbasis pangan lokal melalui penguatan komunitas dan desa;
 - 5.2. Intervensi dalam pelayanan dan pemenuhan gizi spesifik dan gizi sensitif;
 - 5.3. Penguatan komunitas dan desa yang peduli dan mendukung pencegahan *stunting*.
6. Pengurangan Pengangguran
 - 6.1. Peningkatan keterampilan masyarakat baik di tingkat komunitas melalui program pemberdayaan maupun di institusi pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;
 - 6.2. Membangun kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan SDM yang inovatif dan siap kerja.
7. Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa
 - 7.1. Pengembangan teknologi pengolahan sampah di tingkat komunitas dan desa melalui pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak III.
 - 7.2. Pengembangan industri yang ramah lingkungan dan *zero waste*, baik

- industri kecil, menengah maupun industri besar;
- 7.3. Pengembangan inovasi-inovasi lokal dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan komunitas;
 - 7.4. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan dan pengolahan sampah;
 - 7.5. Pengurangan produksi sampah plastik di tingkat institusi pemerintah daerah, ruang publik, sektor swasta dan institusi pemerintah lainnya;
 - 7.6. Penguatan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis komunitas dan desa.
8. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, Dan Efektif
- 8.1. Pembangunan ekosistem digital terintegrasi;
 - 8.2. Peningkatan kapasitas ASN yang kolaboratif;
 - 8.3. Peningkatan kapasitas kompetensi dan kepemimpinan ASN.

Tabel 2.110 Teknis Penyimpulan Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Potensi Geografis, Demografis dan Strategis	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Sebagian wilayah rawan terhadap bencana alam; 2. Degradasi lingkungan dalam menjaga ketersediaan air bersih	- Belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Geopolitik dan Geoekonomif	- Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	- Rendahnya Produktivitas	- Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan ekonomi
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 2. Kemampuan literasi masyarakat masih rendah; 3. Penyediaan rumah layak huni belum maksimal; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 5. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 6. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi masyarakat	- Dampak Perubahan Iklim Global	- Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung pengembangan SDM yang bedaya saing
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pendidikan): 1. masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; dan 2. masih rendahnya angka rata-rata Lama Sekolah (RLS)	- belum optimalnya pemerataan kualitas pendidikan	- Demografi Global	- Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	- Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kesehatan): 1. masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi; 2. belum banyaknya desa/kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI); 3. masih tingginya kasus penyakit tidak menular dan penyakit menular; 4. masih terbatasnya sarana dan prasarana layanan kesehatan; 5. masih rendahnya standarisasi dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 6. masih terbatasnya tenaga medis dan non medis khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama; 7. rendahnya kompetensi tenaga kesehatan; 8. masih belum optimalnya penataan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya bagi masyarakat miskin; dan 9. rendahnya tata kelola pelayanan kesehatan masyarakat.	- belum optimalnya pengelolaan sampah padat domestik, dan lumpur tinja	- Disrupsi Teknologi	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	- Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan efektif
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air; 2. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanganan infrastruktur bidang sumber daya air di kabupaten kuningan; 3. masih terjadinya banjir di beberapa wilayah DAS; 4. masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan; 5. masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal; 6. kondisi kemandirian	- belum optimalnya mitigasi bencana	- Urbanisasi Dunia	- Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	- Geopolitik dan Geoekonomi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah; 7. kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan; 8. masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah; 9. masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastruktur daerah; 10. masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum; 11. belum ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 12. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman): 1. pendataan rumah belum menggunakan standar ketentuan yang berlaku; 2. belum dilaksanakan identifikasi kawasan dan pemukiman kumuh secara menyeluruh dan mendalam; 3. belum optimalnya penanganan kawasan kumuh pada jalan lingkungan dan drainase; 4. dokumen perencanaan sektoral (RPKP, RP2KP, RP3KP, RP2KPKPK, RPLP, Masterplan Kawasan Kumuh dan lain-lain) belum sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru; 5. penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor; 6. masih banyak masyarakat bermukim di lokasi yang tidak sesuai tata ruang; 7. belum optimalnya bantuan perbaikan rumah korban bencana alam; 8. masih kurangnya penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat; 9. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sesuai dengan RTRW kabupaten terbatas pada anggaran daerah; dan 10. kurangnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengelolaan tanah pemerintah.	- belum optimalnya transformasi tata kelola pemerintahan yang mendukung pengembangan wilayah dan partisipasi masyarakat	Keuangan Internasional		- Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat): 1. masih kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku; 2. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda dan Perkada; 3. kurang memadainya sarana, prasarana serta SDM Satpol PP, Linmas, dan Damkar; 4. belum optimalnya sinergitas lintas sektoral dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 5. masih rendahnya pendidikan berpolitik dan wawasan kebangsaan; 6. belum optimalnya pelayanan prabencana, penanganan darurat bencana dan pasca bencana sehingga tingginya risiko bencana; dan 7. belum optimalnya ketercapaian nilai ketahanan daerah.		Penduduk Kelas Menengah			
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Sosial): 1. masih tingginya angka kemiskinan; 2. masih rendahnya fasilitas dasar untuk masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, hunian, air bersih dan sanitasi; 3. masih tingginya kesenjangan sosial masyarakat; 4. masih belum terpadunya data kemiskinan; 5. belum optimalnya sikap dan mental masyarakat dalam menyikapi kemiskinan; 6. masih rendahnya kepemilikan aset masyarakat miskin; 7. masih maraknya masalah sosial dan penyakit masyarakat; dan 8. belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak): 1. kurang optimalnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 2. tidak semua Perangkat Daerah membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender; 3. masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender; 5. rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan; dan 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih rendah.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pertanahan): 1. masih terdapat tanah negara yang belum jelas legalitas kepemilikannya; 2. kurangnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengelolaan tanah pemerintah; 3. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sesuai dengan RTRW kabupaten terbatas pada anggaran daerah.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil): 1. belum semua penduduk memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan yang lengkap; dan 2. terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa): 1. pemahaman regulasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa sampai tingkat desa dan masyarakat masih sangat minim; 2. masih belum optimalnya sarana dan prasarana di desa dalam menunjang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di desa; 3. masih belum optimalnya inventarisasi dan penataan aset desa; 4. masih belum optimalnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa; 5. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa terutama dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di desa; dan 6. kurang berkembangnya usaha Bumdes dan Bumdes Bersama.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana): 1. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; 2. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB; 3. masih tingginya persentase unmet need; dan 4. belum maksimalnya strategi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perhubungan): 1. sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik; 2. belum adanya dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJ LLAJ), Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ), Rencana umum nasional keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ); 3. rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor melakukan uji kendaraan bermotor berkala; 4. belum tersedianya fasilitas khusus parkir yang aman, nyaman, tertib dan teratur; 5. rendahnya kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap PAD; 6. belum optimalnya pelayanan terminal tipe C dan angkutan massal; 7. belum tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ramah difabel dan lansia; 8. belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan berkeselamatan pada usia dini (SALUD); belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan; dan 9. belum tersedianya sistem transportasi cerdas atau ITS (intelligents transportation system).					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Komunikasi dan Informatika): 1. belum terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika dengan baik; 2. belum optimalnya integrasi data dan informasi pemerintah daerah; dan 3. belum optimalnya kualitas sarana prasarana dalam mendukung Kuningan Smart City.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kepemudaan dan Olahraga): 1. belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah; 2. belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dengan stakeholder terkait penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda; 3. belum optimalnya pengembangan kewirausahaan pemuda pemula; 4. belum optimalnya pembinaan atlet usia dini; 5. belum optimalnya pembinaan sentra club olahraga; 6. belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang urusan kepemudaan dan olah raga; dan 7. apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina dan tenaga keolahragaan yang berprestasi belum optimal.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kebudayaan): 1. masih rendahnya minat masyarakat terutama anak muda dalam melestarikan budaya daerah; 2. masih rendahnya promosi dan apresiasi terhadap budaya daerah; dan 3. masih belum optimalnya sarana dan prasarana kebudayaan dalam mendukung kebudayaan daerah.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perpustakaan): 1. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan; 2. keterbatasan SDM pengelola perpustakaan; dan 3. kurangnya sosialisasi minat baca serta masih minim sarana literasi di tempat umum.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kearsipan): 1. keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kearsipan; 2. masih					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	terbatasnya SDM pengelolaan kearsipan; dan 3. belum optimalnya pengelolaan arsip statis dan dinamis.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perindustrian): 1. belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi COVID-19.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Transmigrasi): 1. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di lokasi transmigrasi; dan 2. masih terbatasnya lapangan kerja di lokasi transmigrasi yang menjadi faktor utama perpindahan tenaga kerja produktif ke daerah perkotaan.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perencanaan Pembangunan): 1. sinkronisasi perencanaan lintas sektor masih belum optimal; 2. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang masih belum optimal; dan 3. mekanisme usulan perencanaan daerah yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para mitra pembangunan.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penelitian dan Pengembangan): 1. masih belum optimalnya advokasi hasil kajian dan penelitian untuk dalam penentuan kebijakan pembangunan di daerah; dan 2. masih rendahnya keterpaduan inovasi dalam menyelesaikan isu dan permasalahan di daerah.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Keuangan): 1. masih belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. masih rendahnya PAD; 3. belum maksimalnya Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah; 4. belum optimalnya dalam penyusunan/pembuatan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5. belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah; dan 6. belum Tertib dan terinventarisnya aset-aset milik daerah secara optimal dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan): 1. belum optimalnya profesionalitas ASN; 2. adanya deviasi antara jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan jumlah pemenuhan pegawai menyebabkan ketidakseimbangan distribusi beban kerja; 3. jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis belum merata; dan 4. belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pengawasan): 1. belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik; dan 2. program belum optimal dalam kerangka reformasi birokrasi.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Sekretariat Daerah): 1. terbatasnya sarana prasarana untuk mendukung kinerja keuangan Pemerintah Daerah; 2. minimnya informasi hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah; 3. kurangnya pemahaman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah; 4. kurangnya pemahaman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah; 5. belum optimalnya kualitas koordinasi, sistem pengawasan internal, pelaporan kinerja pemerintahan daerah dan tata kelola administrasi pemerintahan daerah; adanya perkara hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti di daerah; 6. belum optimalnya pembangunan jaring pengaman sosial (keagamaan, pangan, kesehatan, kepemudaan dan pendidikan) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan; 7. masih rendahnya penggunaan Produk Lokal dalam kegiatan belanja pemerintah; 8. belum optimalnya kualitas pengendalian kegiatan pembangunan, pelaporan hasil kinerja pembangunan dan tata kelola administrasi pembangunan; 9. rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; 10. belum optimalnya pengendalian stabilitas harga komoditas bahan pokok; 11. masih belum optimalnya penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponomi (alam, buatan, dan budaya); dan 12. layanan Internal dan eksternal sebagian masih secara manual (non elektronik) sehingga terjadinya keterlambatan pelayanan.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Sekretariat DPRD): 1. penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tidak bisa maksimal sesuai target dikarenakan terkendala lama waktu pembahasan yang sangat variatif dan referensi yang terbatas; 2. belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD menuju terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang baik (<i>Good Goverment</i>); 3. belum optimalnya fasilitasi aspirasi masyarakat; dan 4. belum optimalnya sarana pendukung dalam meningkatkan kinerja DPRD.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kecamatan): 1. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi; 2. belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan; dan 3. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.					
Potensi Sumber Daya Alam (Kehutanan)	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	- masih tingginya kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	- Rendahnya Produktivitas	- Pengurangan Pengangguran
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi: 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi; 2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tingginya Angka Pengangguran; 4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan; 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa; 6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk; 7.	- belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi	- Dampak Perubahan Iklim Global	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Pemberdayaan pemuda yang belum optimal	masyarakat				
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Produktivitas Perekonomian Belum Optimal; 2. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 3. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 4. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 5. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Disrupsi Teknologi		- Krisis Lingkungan	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Tenaga Kerja): 1. tingginya tingkat pengangguran; 2. rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3. kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah; 4. belum kondusifnya kondisi hubungan industrial; 5. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja; 6. produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan; dan 7. masih mengalami bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif dikhawatirkan melebihi lapangan kerja yang tersedia.		- Persaingan Sumber Daya Alam		- Geopolitik dan Geoekonomi	
Potensi Sumber Daya Alam (Pertanian & Perkebunan)	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	- masih tingginya kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	- Rendahnya Produktivitas	- Produktivitas pertanian

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi: 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi; 2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tingginya Angka Pengangguran; 4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan; 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa; 6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk; 7. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal	- belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi masyarakat	- Dampak Perubahan Iklim Global	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Penanggulangan stunting
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Produktivitas Perekonomian Belum Optimal; 2. Menurunnya ketersediaan pangan utama dan kerentanan pangan; 3. Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas; 4. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 5. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting; 6. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 7. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 8. Masih rendahnya investasi daerah	- masih tingginya angka stunting	- Disrupsi Teknologi		- Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	- Pengurangan Pengangguran
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kesehatan): 1. kasus stunting yang masih tinggi; 2. masih ditemukannya balita kurang gizi ; 3. belum optimalnya promosi dan pembinaan konsumsi masyarakat dari olahan pangan lokal; 4. masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat sehat dan aman.	- masih rendahnya produktivitas pertanian	- Perdagangan Internasional		- Geopolitik dan Geoekonomi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata di seluruh daerah terutama di sentra produksi pangan daerah; 2. belum ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 3. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.		- Persaingan Sumber Daya Alam			
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Tenaga Kerja): 1. tingginya tingkat pengangguran; 2. rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3. kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah; 4. belum kondusifnya kondisi hubungan industrial; 5. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja; 6. produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan; dan 7. masih mengalami bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif dikhawatirkan melebihi lapangan kerja yang tersedia.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pangan): 1. tidak terpenuhinya kualitas pangan sesuai standar keamanan pangan; 2. belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertanian; 3. masih rendahnya diversifikasi pangan dan produk olahannya; 4. belum optimalnya proses transformasi dari pertanian konvensional ke pertanian modern; 5. ketersediaan pangan cenderung menurun; 6. belum meratanya distribusi pangan; 7. belum terjaminnya keamanan pangan; 8. belum optimalnya konsumsi pangan lokal; dan 9. terhambatnya regenerasi petani.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah): 1. belum optimalnya peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pertanian): 1. menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian; 2. masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu; 3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian; 4. belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian; 5. belum optimalnya pendampingan secara intensif kepada petani; 6. belum optimalnya produksi peternakan baik daging, telur, maupun susu, dan produk turunannya untuk meningkatkan pendapatan peternak; 7. belum termanfaatkannya kotoran ternak yang siap pakai untuk kebutuhan pertanian; dan 8. belum tersedianya rumah potong unggas.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perdagangan): 1. kenaikan inflasi yang disebabkan oleh gejolak harga pangan (belum					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	terpenuhinya kualitas, kuantitas, kontinuitas produk).					
Potensi Sumber Daya Alam (Pernakan)	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	- masih tingginya kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	- Rendahnya Produktivitas	- Penanggulangan stunting
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi: 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi; 2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tingginya Angka Pengangguran; 4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan; 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa; 6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk; 7. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal	- belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi masyarakat	- Dampak Perubahan Iklim Global	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Pengurangan Pengangguran
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Produktivitas Perekonomian Belum Optimal; 2. Menurunnya ketersediaan pangan utama dan kerentanan pangan; 3. Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas; 4. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 5. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting; 6. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 7. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 8. Masih rendahnya investasi daerah	- masih tingginya angka stunting	- Disrupsi Teknologi		- Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kesehatan): 1. kasus stunting yang masih tinggi; 2. masih ditemukannya balita kurang gizi; 3. belum optimalnya promosi dan pembinaan konsumsi masyarakat dari olahan pangan lokal; 4. masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat sehat dan aman.	- belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Perdagangan Internasional		- Geopolitik dan Geoekonomi	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. belum ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 2. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.		- Persaingan Sumber Daya Alam			
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Tenaga Kerja): 1. tingginya tingkat pengangguran; 2. rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3. kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah; 4. belum kondusifnya kondisi hubungan industrial; 5. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja; 6. produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan; dan 7. masih mengalami bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif dikhawatirkan melebihi lapangan kerja yang tersedia.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Potensi Sumber Daya Alam (Perikanan)	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	- masih tingginya kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Rendahnya Produktivitas	- Penanggulangan stunting
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi: 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi; 2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tingginya Angka Pengangguran; 4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan; 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa; 6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk; 7. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal	- belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi masyarakat	- Dampak Perubahan Iklim Global		- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Pengurangan Pengangguran
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Produktivitas Perekonomian Belum Optimal; 2. Menurunnya ketersediaan pangan utama dan kerentanan pangan; 3. Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas; 4. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 5. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting; 6. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 7. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 8. Masih rendahnya investasi daerah	- masih tingginya angka stunting	- Disrupsi Teknologi		- Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kesehatan): 1. kasus stunting yang masih tinggi; 2. masih ditemukannya balita kurang gizi ; 3. belum optimalnya promosi dan pembinaan konsumsi masyarakat dari olahan pangan lokal; 4. masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat sehat dan aman.		- Perdagangan Internasional		- Geopolitik dan Geoekonomi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. belum ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 2. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.		- Persaingan Sumber Daya Alam			
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Tenaga Kerja): 1. tingginya tingkat pengangguran; 2. rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3. kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah; 4. belum kondusifnya kondisi hubungan industrial; 5. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja; 6. produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan; dan 7. masih mengalami bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif dikhawatirkan melebihi lapangan kerja yang tersedia.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Kelautan & Perikanan): 1. masih rendahnya tingkat produksi perikanan; 2. kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan hasil perikanan; 3. belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan; 4. masih belum tertanganinya dan termanfaatkannya kotoran hewan; 5. masih rendahnya produksi dan produktivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan 6. masih rendahnya pengawasan sumberdaya perikanan.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Potensi Sumber Daya Alam (Panas Bumi (Geothermal))	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	- belum optimalnya mitigasi bencana	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan ekonomi
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Produktivitas Perekonomian Belum Optimal; 2. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 3. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 4. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 5. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Disrupsi Teknologi		- Krisis Lingkungan	
			- Persaingan Sumber Daya Alam		- Geopolitik dan Geoekonomi	
Potensi Pariwisata	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi: 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi; 2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tingginya Angka Pengangguran; 4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan; 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa; 6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk; 7. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal	- masih tingginya kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan pariwisata daerah sebagai destinasi wisata dunia berbasis komunitas dan desa

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat/Ekonomi: 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi; 2. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan; 3. Tingginya Angka Pengangguran; 4. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan; 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa; 6. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk; 7. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal	- belum optimalnya pengurangan angka pengangguran dan upaya penguatan ekonomi masyarakat	- Disrupsi Teknologi		- Geopolitik dan Geoekonomi	- Pengurangan Pengangguran
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Produktivitas Perekonomian Belum Optimal; 2. Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas; 3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata; 4. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 5. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 6. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 7. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya mitigasi bencana	- Perdagangan Internasional			
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. belum ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 2. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.	- belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata				

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Tenaga Kerja): 1. tingginya tingkat pengangguran; 2. rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3. kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah; 4. belum kondusifnya kondisi hubungan industrial; 5. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja; 6. produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan; dan 7. masih mengalami bonus demografi, jumlah tenaga kerja produktif dikhawatirkan melebihi lapangan kerja yang tersedia.					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penanaman Modal): 1. masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; 2. belum memadainya sarana prasarana yang mendukung pengembangan investasi; 3. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat legalitas untuk kepentingan pribadi maupun usahanya; 4. kerja sama investasi dan promosi investasi daerah yang belum optimal; 5. produktivitas penerbitan perizinan belum seimbang dengan potensi masyarakat yang membangun dan berusaha; dan 6. kesadaran para pengusaha masih relatif rendah terkait pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pariwisata): 1. SDM pengelola pariwisata belum sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata; 2. Belum optimalnya penataan daya tarik wisata; 3. belum optimalnya sarana dan prasarana pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. pemasaran pariwisata masih jauh dari memadai dari sisi variasi kegiatan, luasnya jejaring, serta publikasinya; 5. masih terdapatnya ketidaksesuaian antara pola ruang dengan pemanfaatannya untuk sektor pariwisata; dan 6. belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).					
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Perindustrian): 1. belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi COVID-19.					
Potensi Sumber Daya Air	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Degradasi lingkungan dalam menjaga ketersediaan air bersih	- belum optimalnya mitigasi bencana	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	- Krisis Lingkungan	- Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan ekonomi
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Menurunnya ketersediaan pangan utama dan kerentanan pangan; 2. Rendahnya produktivitas pariwisata; 3. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 5. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 6. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Disrupsi Teknologi	- Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	- Geopolitik dan Geoekonomi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air; 2. masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan perdesaan; 3. belum ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 4. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.		- Persaingan Sumber Daya Alam	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang		
Potensi Daya Dukung Lingkungan	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Sebagian wilayah rawan terhadap bencana alam; 2. Degradasi lingkungan dalam menjaga ketersediaan air bersih	- belum optimalnya pengelolaan sampah padat domestik, dan lumpur tinja	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	- Krisis Lingkungan	- Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 2. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 3. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya mitigasi bencana	- Dampak Perubahan Iklim Global	- Isu Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	- Geopolitik dan Geoekonomi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. belum ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 2. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.	- belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Disrupsi Teknologi	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Lingkungan Hidup): 1. cakupan pelayanan sampah belum optimal; 2. pengelolaan TPA belum optimal; 3. fasilitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau belum memadai; 4. penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup belum ditegakkan; 5. terdapat pencemaran air dan udara di beberapa lokasi; 6. belum tersedianya Laboratorium Lingkungan; 7. belum optimalnya tata kelola lingkungan; 8. pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh penanganan sampah sehingga perlu didorong upaya peningkatan pola pengurangan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak di sumber; meningkatnya kerusakan ekosistem dan alih fungsi lahan; 9. deforestasi dan menurunnya ketersediaan sumber-sumber mata air; 10. belum optimalnya penyusunan instrumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. belum optimalnya pengkajian lingkungan dikarenakan mengikuti kebijakan yang terus diperbaharui; dan 12. belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Potensi Pertambangan	Permasalahan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi: 1. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	- belum optimalnya mitigasi bencana	- Geopolitik dan Geoekonomi	- Isu Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	- Krisis Lingkungan	- Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan ekonomi
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah; 2. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal; 3. Masih rendahnya investasi daerah	- belum optimalnya penanggulangan dampak perubahan iklim dan upaya penurunan efek gas rumah kaca	- Disrupsi Teknologi	- Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	- Geopolitik dan Geoekonomi	
	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang): 1. belum ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan; dan 2. masih belum terakomodirnya ruang untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri karena belum ditetapkan melalui Perda RTRW.		- Persaingan Sumber Daya Alam			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda 2025

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

2.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pernyataan mengenai kondisi ideal yang diharapkan tercapai dalam kurun waktu perencanaan pembangunan daerah. Visi ini memberikan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan oleh kepala daerah selama masa jabatannya. Dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan daerah mencerminkan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sementara itu, misi adalah pernyataan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna mencapai visi tersebut. Misi menjadi landasan penting dalam menyusun tujuan dan sasaran serta kebijakan pembangunan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029 merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 yaitu **“Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG)”**. Kata Gemilang mengandung makna: **Gemah Ripah**, mengamanatkan pembangunan yang selaras dengan nilai kelestarian alam, mampu menyediakan sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat; **Maju Berkelanjutan**, mengamanatkan pembangunan yang bertumpu pada karakteristik dan keunggulan lokal untuk mampu bersaing secara global, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sinergi dan kolaborasi; serta **Berdaya Saing**, mengamanatkan pembangunan yang mampu membentuk SDM unggul secara utuh lahir dan batin, iman dan akal, membangun masyarakat yang harmonis dan agamis berahlaqul kharimah.

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029 adalah:



“Kuningan Melesat Tahun 2029”
(Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh)”

yang mengandung makna:

- **Maju:** Perekonomian tumbuh dan berkembang dengan LPE tinggi dan pesatnya sumbangan PDRB sektor pertanian dan jasa pariwisata;
- **Empowering:** Sistem administrasi publik dan pembangunan sosial berlangsung dalam iklim yang memberdayakan, memberikan ruang kreasi, inovasi dan kemandirian luas bagi masyarakat;
- **Lestari:** Pembangunan sosial dan fisik berlangsung dalam bingkai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip konservasi;
- **Agamis:** Pendekatan dan ruh penyelenggaraan pembangunan dilandaskan pada nilai dan norma agama yang telah mengakar kuat dalam sejarah kehidupan masyarakat Kuningan;
- **Tangguh:** Kuningan tumbuh kembang dengan lompatan yang menempatkan angka-angka indikator kunci Pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya Beli, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Angka Harapan Hidup) berada di jajaran atas Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Berikut ini merupakan keselesarasan Visi RPJPD dan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Barat secara jelas ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.111 Tabel Sandingan Visi Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan

Visi Indonesia 2025-2045 <i>INDONESIA EMAS 2045</i>	Visi Jawa Barat 2025-2045 <i>Jabar Termaju Indonesia Emas 2045</i>	Visi Kuningan 2025-2045 <i>Kuningan Gemilang</i>
Bersatu Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan Semangat Bhineka Tunggal Ika Berdaulat Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman Tangguh Maju Berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil Berkelanjutan Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan	Termaju Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lainnya Berdaya Saing Dunia Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek Berkelanjutan Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang secara berkesinambungan selama 4 (empat) tahap periodisasi pembangunan untuk mencapai Visi Jawa Barat pada tahun 2045	Gemah Ripah Mengamankan pembangunan yang selaras dengan nilai kelestarian alam, mampu menyediakan sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat Maju Berkelanjutan Mengamankan pembangunan yang bertumpu pada karakteristik dan keunggulan lokal untuk mampu bersaing secara global, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sinergi dan kolaborasi Berdaya Saing Mengamankan pembangunan yang mampu membentuk SDM unggul secara utuh lahir dan batin, iman dan akal, membangun masyarakat yang harmonis dan agamis berahlaqul kharimah
Visi Indonesia 2025-2029 <i>Bersama Indonesia maju, Menuju Indonesia Emas 2045</i>	Visi Jawa Barat 2025-2029 <i>Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata</i>	Visi Kabupaten Kuningan 2025-2029 <i>Kuningan Melesat</i>
Membangun memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045	Istimewa Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pembangunan dan pelayanan publik yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Lembur Diurus pembangunan wilayah perdesaan sebagai kawasan pertanian dan konservasi yang dikelola untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Kota Ditata pembangunan wilayah perkotaan sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah	Maju Akselerasi Ekonomi Empowering Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Lestari Pembangunan berkelanjutan Agamis Pendekatan Nilai agama Tangguh Penguatan ketahanan dan modal sosial

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Misi 1 : Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani

komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, dan menanamkan budaya kerja yang akuntabel. Profesionalisme diwujudkan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara berbasis sistem merit. Pemerintahan modern didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan layanan publik yang cepat, transparan, dan terukur. Semua ini diarahkan untuk membentuk birokrasi yang melayani, di mana orientasi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan

Misi 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

Menekankan upaya mendorong ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang menjadi potensi lokal. Pengembangan pariwisata yang berbasis budaya dan alam, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan perdagangan dan jasa dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong daya saing daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata

Misi 3 : Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (*Empowering*)

mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kemampuan, kreativitas, serta inovasi di berbagai bidang. Pendekatan pemberdayaan difokuskan pada penguatan kapasitas individu dan kelompok, khususnya UMKM, komunitas kreatif, dan sektor informal, agar mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang berdaya saing dan berkontribusi langsung terhadap kemajuan daerah.

Misi 4 : Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan

Menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai dasar keberlanjutan pembangunan. Upaya ini mencakup pelestarian hutan, sungai, dan daerah tangkapan air guna menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air bersih, serta pengendalian pencemaran dan emisi melalui pengelolaan limbah yang lebih baik dan penerapan prinsip ramah lingkungan. Dengan komitmen ini, pemerintah daerah berperan aktif dalam menghadapi perubahan iklim, menjaga kualitas lingkungan, serta mewariskan alam yang lestari bagi generasi mendatang

Misi 5 : Penerapan Nilai-Nilai Agamis dalam Kehidupan Berbudaya dan Bermasyarakat

Memperkuat moral, etika, dan karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan beradab, serta memperkuat jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi aspek spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk budaya yang santun dan masyarakat yang saling menghargai serta peduli terhadap sesama

Misi 6 : Pembangunan yang Tangguh Dengan Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial.

Komitmen untuk membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, sementara pembangunan infrastruktur yang memadai mendukung konektivitas dan produktivitas wilayah. Seluruh upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan serta membentuk modal sosial yang solid, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Perumusan tujuan jangka menengah daerah dilakukan secara teknokratik dengan berpedoman pada arah pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta isu strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu rumusan tujuan tersebut diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2026-2029.

Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa sasaran yang dapat menunjang perwujudan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan RPJMD ini merupakan gambaran hasil pembangunan daerah yang dicapai dari capaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah. Setiap sasaran pembangunan diselaraskan dengan sasaran pokok dan berisi indikator-indikator dari sasaran visi dan indikator utama pembangunan RPJPD periode 2025-2029. Sehingga RPJMD ini merupakan bagian dari perwujudan tahapan pembangunan pertama dalam periodisasi RPJPD 2025-2029.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan tujuan dan sasaran adalah pendekatan tematik, holistik, dan integratif. Pendekatan tematik holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis dalam pencapaian visi dan misi, serta pendekatan integratif dilakukan dengan penggabungan hubungan antar kewenangan yang dapat bersinergi dalam

pencapaian tujuan pembangunan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Selanjutnya IKU daerah diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

Dari 6 (enam) misi pembangunan diterjemahkan menjadi 8 (delapan) tujuan dan 17 sasaran yang masing-masing memiliki indikator dan target pembangunan setiap tahun dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berikut adalah uraian dari tujuan dan sasaran pembangunan:

1. Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani, memiliki tujuan, yaitu: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi.
2. Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal, memiliki tujuan yaitu: Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah dengan sasaran Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah.
3. Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering), memiliki tujuan yaitu: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya investasi, kerja sama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan;
 - b. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat;

- c. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda.
- 4. Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumber Daya Alam, Daerah Tangkapan Air Dan Mengurangi Emisi Lingkungan, memiliki tujuan, yaitu: Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- 5. Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat, memiliki tujuan, yaitu: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila, dengan sasaran:
 - b. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- 6. Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial, memiliki tujuan, yaitu:
 - 6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan, dengan sasaran:
 - a. Penurunan angka kemiskinan;
 - b. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku.
 - 6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa;
- b. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah;
- c. Meningkatnya kualitas hunian masyarakat;
- d. Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

**Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan
Tahun 2025 – 2029**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)													
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani													
1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik		Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	A ⁻	A ⁻	A ⁻	A ⁻	A ⁻	A ⁻	A ⁻	Sekretariat Daerah	Indikator Utama Pembanguna n RPJPD
	1.1.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggara an pelayanan publik dan penyelenggara an pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75,02	80	82	84	86	88	88	90	Sekretariat Daerah	Indikator Sasaran RPJMD
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal													
2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,61	5,18-5,71	5,20-5,76	5,21-5,81	5,23-5,86	5,24-5,91	5,24-5,91	5,56-6,19		Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Kontribusi PDRB Kabupaten/kot a	Persen	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	1,3	1,31		Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,1	3,3 – 3,9	3,18-3,86	3,06-3,82	2,95-3,78	2,83-3,75	2,83-3,75	2,7-3,7		Indikator Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
keunggulan wilayah													Pembangunan RPJPD
	2.1.1 Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	2,274	2,275	2,276	2,276	2,277	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	13,52	13,55	13,58	13,58	13,6	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
		Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen	N/a	10	10	15	15	25	25	25	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	2,09	2,13	2,16	2,16	2,16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	23,23	24,49	24,57	24,64	24,72	24,8	24,8	24,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
												Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	2.725	2.775	2.825	2.825	2.835	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Sasaran RPJMD
												Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Rasio PDRB	Persen	17,66	14,43-	14,37-	14,31-	14,26-	14,20-	14,20-	14,09-	Dinas	Indikator

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)			18,13	18,53	18,93	19,33	19,72	19,72	20,12	Perhubungan	Utama Pembangunan RPJPD
		Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	poin	-	64,98	65,93	66,88	67,82	68,77	68,77	69,72	Bappeda	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)													
3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional		Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,82	3,51	3,85	3,89	3,94	3,98	3,98	4,02	Bappeda	Indikator Sasaran Visi RPJPD
	3.1.1 Meningkatnya investasi, kerja sama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	7,58-8,69	7,45-8,57	7,33-8,46	7,21-8,35	7,21-8,35	6,27-6,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,4	24,43	24,47	24,5	24,53	24,53	24,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	3.1.2 Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29,82	30	32	34	36	38	38	40	Bappeda	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan	Indeks Pembangunan Kualitas	Poin	62,68	62,84	63	63,16	63,32	63,48	63,48	63,64	Dinas Pengendalian Penduduk,	Indikator Utama Pembangunan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Keluarga (poin)										Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	n RPJPD
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	88,36	88,48	88,6	88,6	88,72	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Indeks Perlindungan Anak	Persen	N/a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	0,9	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
		Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Poin	N/a	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kategori	n/a	63	65	67	69	71	71	73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
Misi 4 : Menjaga Komitmen Kelestarian Sumber Daya Alam, Daerah Tangkapan Air Dan Mengurangi Emisi Lingkungan													
4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	N/a	7,14	7,58	8,02	8,46	8,9	8,9	9,35	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton CO2eq	N/a	393.756,10	512.676,81	631.597,53	750.518,24	869.438,96	869.438,96	988.359,67	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat													
5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	79,84	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	5.1.1 Meningkatkan kesadaran dan	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	79,84	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja	Indikator Utama Pembangunan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila	kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Umum											n RPJPD
	5.1,2 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	76,49	76,9	77,33	77,75	78,18	78,61	78,61	79,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial													
6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,56	71,65	71,75	72,07	72,39	72,71	72,71	73,03		Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Pengeluaran Per Kapita	ribu	10.418,00	10.599,49	10.781,49	10.963,48	11.145,48	11.327,47	11.327,47	11.509,47		Indikator Sasaran RPJMD
		PDRB per Kapita	juta/kap/Tahun	29,27	29,09-29,45	30,89-60,34	32,68-62,13	34,48-63,93	36,27-65,72	36,27-65,72	38,07-67,52		Indikator Sasaran Visi RPJPD
	6.1.1 Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,9	8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	9,7	10,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,37	12,43	12,49	12,54	12,60	12,60	12,66	Dinas Pendidikan	Indikator Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		(tahun)										dan Kebudayaan	Pembangunan RPJPD
	6.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	75,66	75,86	76,06	76,06	76,25	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Prevalensi Stunting	Persen	22,7	20,51	19,71	18,92	18,12	17,33	17,33	16,53	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,5	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	8,26-9,30	7,72-8,75	Dinas Sosial	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	6.2.1 Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,50	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	8,26-9,30	7,72-8,75	Dinas Sosial	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	6.2.2. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	3,82	3,61	3,4	3,4	3,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,4	2,6	2,8	3,01	3,21	3,21	3,41	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang		Indeks Gini	Poin	0,379	0,34-0,347	0,339-0,346	0,337-0,346	0,336-0,345	0,334-0,345	0,334-0,345	0,333-0,344		
	6.3.1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan	Indeks Desa Membangun (ID)	poin	0,79	0,78	0,8	0,83	0,85	0,87	0,87	0,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah	desa sebagai penggerak pembangunan di desa												
	6.3.2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
		Persentase Kualitas Infrastruktur	poin	81,9	83,61	85,42	85,96	86,53	87,08	87,08	87,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
	6.3.3.Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	N/a	78,60	79,73	80,85	81,98	83,11	83,11	84,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	6.3.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	130	129	127,95	126,89	125,84	124,79	124,79	123,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

3.2 Arah Kebijakan, strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mencapai target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar berlangsung secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan output hasil pembangunan yang lebih optimal dapat tercapai.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dengan pendekatan yang teknokratis dan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

3.2.1 Arah pembangunan RPJMN 2025-2029 untuk Daerah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan daerah tahun 2025-2029 diarahkan untuk:

1. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura.
2. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Cisanggarung.

3. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ dan danau terutama pada DAS Cisanggarung dan Waduk Darma.
4. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, performa agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
5. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur, konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pasca panen.
6. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
7. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggulan dan budaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

Selain arah pembangunan diatas, terdapat program Prioritas Nasional yang harus mendapat dukungan dan sinergi dari Pemerintah Daerah, diantaranya :

1. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang bertujuan menyediakan makanan dengan gizi seimbang secara gratis kepada kelompok sasaran tertentu, terutama anak-anak sekolah, santri, dan kelompok masyarakat rentan, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi

harian mereka. Program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dukungan ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian anak-anak sekolah dan kelompok rentan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam pelaksanaannya, dukungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mencakup:

a. Penguatan Pasokan Bahan Pangan Lokal

Mengoptimalkan peran petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan di Kuningan sebagai pemasok utama bahan baku program, sehingga tercipta pasar yang stabil bagi produk lokal.

b. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan

Menetapkan standar menu gizi seimbang, pengawasan kualitas bahan pangan, dan jaminan keamanan pangan sesuai ketentuan kesehatan.

c. Kolaborasi dengan Satuan Pendidikan

Mengintegrasikan MBG ke dalam program sekolah, melibatkan guru, komite sekolah, dan orang tua dalam pemantauan konsumsi gizi anak.

d. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Mengikutsertakan UMKM pengolahan pangan dan koperasi sekolah dalam penyediaan makanan bergizi, sehingga memberi nilai tambah pada perekonomian daerah.

e. Penguatan Tata Kelola dan Monitoring

Membentuk tim koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan pengelolaan program transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan, khususnya bagi masyarakat pada kelompok rentan dan marjinal. Melalui

pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life skills*), serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, program ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia Kuningan yang berdaya saing dan berakhlak mulia.

Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung penuh implementasi Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan, fasilitas pendidikan yang memadai, serta memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Selain itu, Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan integrasi program Sekolah Rakyat pada berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, terutama di wilayah dengan tingkat partisipasi sekolah yang masih rendah.

Dukungan ini juga diperkuat dengan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pemberdayaan komunitas lokal, serta sinergi dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran unggulan yang tidak hanya mencetak lulusan berprestasi secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, mandiri, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

3. Koperasi Merah Putih

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan, khususnya bagi masyarakat pada kelompok rentan dan marjinal. Melalui pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life skills*), serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, program ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia Kuningan yang berdaya saing dan berakhlak mulia.

Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung penuh implementasi Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan, fasilitas pendidikan yang memadai, serta memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Selain itu, Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan integrasi program Sekolah

Rakyat pada berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, terutama di wilayah dengan tingkat partisipasi sekolah yang masih rendah.

Dukungan ini juga diperkuat dengan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pemberdayaan komunitas lokal, serta sinergi dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran unggulan yang tidak hanya mencetak lulusan berprestasi secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, mandiri, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

4. Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah merupakan program strategis tingkat nasional di bidang perumahan yang digagas untuk mengatasi tingginya *backlog* perumahan di Indonesia. Program ini juga ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, dalam memperoleh hunian yang layak.

Sasarannya meliputi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan pedesaan, aparatur sipil negara, TNI/Polri, pekerja sektor informal, generasi muda yang belum memiliki rumah, serta wilayah padat penduduk dengan tingkat *backlog* tinggi, termasuk kawasan kumuh.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, khususnya agar dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah Kabupaten Kuningan melalui kebijakan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. Dukungan tersebut diwujudkan melalui beberapa program strategis sebagai berikut:

a. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Program perbaikan Rutilahu merupakan salah satu program prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan perbaikan sejumlah unit rumah tidak layak huni hingga tahun 2029, mencakup kawasan kewenangan kabupaten, desa, maupun wilayah luar kawasan kumuh.

b. Program Perbaikan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi

Program ini bertujuan menyediakan rumah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana maupun masyarakat yang terdampak relokasi akibat pelaksanaan program pemerintah. Bentuk dukungan yang dilaksanakan antara lain:

- Penyediaan anggaran melalui APBD Kabupaten Kuningan untuk pembangunan rumah dengan pendekatan swakelola.
- Bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana, termasuk gempa bumi, hingga mencapai kelayakan huni.
- Fasilitasi pengadaan lahan dan pembangunan rumah bekerja sama dengan ATR/BPN serta pemerintah pusat.
- Pengembangan kawasan pasca-bencana yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

c. Fasilitasi Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan BUMN

Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong keterlibatan pengembang nasional, BUMN (seperti Perumnas dan PPDPP), serta BUMD dalam pembangunan rumah bersubsidi maupun rumah sewa. Selain itu, pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga diarahkan untuk mendukung penyediaan hunian layak di wilayah Kabupaten Kuningan.

5. Pengembangan Ekonomi Syariah

Potensi pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Kuningan cukup besar karena Kabupaten Kuningan memiliki modal sosial, budaya, dan sumber daya alam yang sesuai untuk pengembangan prinsip-prinsip syariah, baik di sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, maupun UMKM.

a. Modal dan Peluang Pengembangan

1. Karakteristik Masyarakat

- Mayoritas penduduk beragama Islam → mudah diterima konsep ekonomi berbasis syariah.
- Budaya gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sudah kuat.

- Banyak pesantren, madrasah, dan ormas Islam → basis SDM dan jejaring edukasi ekonomi syariah.
2. Infrastruktur dan Kelembagaan
 - BAZNAS Kabupaten Kuningan aktif mengelola zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik
 - Potensi wakaf produktif (lahan, bangunan, aset masjid) yang belum dioptimalkan.
 - Kehadiran BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, dan kantor bank syariah nasional/regional.
 3. Sektor Potensial
 - Pertanian & Agroindustri → produksi pangan halal, sertifikasi halal untuk ekspor dan pasar wisata.
 - Pariwisata Syariah → wisata alam dan religi yang ramah Muslim (akomodasi halal, paket umrah plus wisata).
 - UMKM Halal → kuliner, fesyen muslim, herbal.
- b. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah
1. Keuangan Syariah
 - Perluasan akses ke pembiayaan mikro syariah bagi petani, pedagang, dan pelaku UMKM.
 - Digitalisasi layanan keuangan syariah (mobile banking, QRIS syariah) agar menjangkau desa.
 - Penguatan BMT & koperasi syariah sebagai grassroot financial institution.
 - Industri Halal
 - Pusat sertifikasi halal daerah bekerja sama dengan MUI & BPJPH untuk mempercepat legalitas UMKM.
 - Klaster industri halal di desa: produk makanan-minuman, fashion muslim, dan herbal.
 2. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Produktif
 - Optimalisasi IZN melalui sinergi BAZNAS, pemerintah, dan UPZ.
 - Pengembangan wakaf produktif: lahan pertanian, ruko, kios pasar yang hasilnya untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat.

- Integrasi data mustahik–muzaki untuk transparansi dan tepat sasaran.

3. Pariwisata Syariah

- Paket wisata halal: wisata alam + kuliner halal + penginapan ramah Muslim.
- Peningkatan kapasitas pelaku wisata untuk melayani wisatawan Muslim domestik dan internasional.
- Festival ekonomi syariah daerah (kuliner halal, fesyen, produk UMKM).

c. Tantangan

- Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa.
- Terbatasnya SDM profesional ekonomi syariah.
- Proses sertifikasi halal yang dianggap rumit dan mahal bagi UMKM.
- Minimnya data potensi wakaf produktif.

3.2.2 Proyek Strategis dan strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, terdapat beberapa program/proyek strategis daerah dan strategi pembangunan untuk tahun 2025-2029 di antaranya adalah:

1. Rekonstruksi jalan lingkar utara Jawa Barat yang didanai oleh APBN melalui dukungan DAK, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota melalui dokumen perencanaan dan lahan.
2. TPPAS Cirebon Raya yang diarahkan melalui skema B to B atau KPBU dan oleh APBD berupa Kompensasi tegakan, pembangunan akses jalan, lahan urug serta *tipping fee*.
3. Pengembangan sektor primer dan swasembada pangan, strategi yang dibuat untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah melalui konservasi dan peningkatan produktivitas lahan perkebunan dan kehutanan untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan dan kehutanan melalui kegiatan konservasi

sumber daya alam yaitu: pengendalian dan pemanfaatan kawasan, bantuan embung dan pipanisasi serta pengembangan pupuk organik.

4. Peningkatan akses pendidikan, strategi yang dibuat untuk memastikan akses masyarakat terhadap pendidikan layak melalui peningkatan pendidikan kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
5. Peningkatan layanan kesehatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur kesehatan.
6. Peningkatan akses standar hidup layak, untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap peningkatan pendapatan yang layak melalui peningkatan, pendampingan dan permodalan usaha.
7. Meningkatkan pendapatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pendapatan yang layak melalui peningkatan dan penguatan peran BUMDes
8. Mengurangi beban pengeluaran, untuk memastikan masyarakat bisa merasa terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran melalui penerapan program kartu miskin.
9. Mengurangi kantong kemiskinan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan terhadap kesehatan yang layak melalui peningkatan, pendampingan dan permodalan usaha.

3.2.3 Arah Kebijakan dan strategi daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan adalah kajian *grand design* perencanaan komprehensif tentang tahapan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam mencapai target dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan kajian, analisis dan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional serta selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2025-2029.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD tahun 2025-2029 tidak terlepas dari arah kebijakan RPJPD tahun 2025-2045 karena RPJMD 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari pencapaian Visi Kuningan gemilang

2045. Pada tahap pertama ini menitikberatkan pada peningkatan inovasi dan produktivitas pertanian, pariwisata, dan SDM. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial untuk semua;
2. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
4. Penyelenggaraan transformasi tata kelola pemerintahan untuk penguatan ideologi, politik, integritas dan kondusivitas daerah;
5. Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan wawasan lingkungan;
6. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan yang tepat akan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian hasil dari sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan melalui 6 misi dan 8 tujuan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Penahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada tahap kesatu (Tahun 2025 – 2029) adalah “Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM. Dan Hal ini juga yang menjadi acuan dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dan hal tersebut

menjadi acuan dalam penahapan pembangunan selama empat tahun ke depan.

Tabel 3. 2 Tema dan Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap I (Periode 2 RPJPD)
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tema					
Penguatan Fondasi untuk Pertanian dan Pariwisata Berkelanjutan	Penguatan Infrastruktur dasar untuk Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	SDM Unggul untuk Masa Depan yang Kompetitif	Digitalisasi Menuju Transformasi Pertanian dan Pariwisata	Menuju Puncak Produktivitas Melalui Kolaborasi SDM, Pertanian, dan Pariwisata	Pertanian Unggul dan Pariwisata Tangguh
Penahapan					
Penguatan Sektor Pertanian dan pariwisata berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur dan pelayanan dasar untuk peningkatan Produktivitas Pertanian, Pariwisata, dan SDM.	Penguatan SDM yang unggul dan kompetitif	Pengembangan digitalisasi di sektor pertanian dan pariwisata	Pencapaian peningkatan produktivitas pertanian, pariwisata dan SDM	Peningkatan Kualitas produktivitas pertanian dan pariwisata

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kuningan, arah kebijakan disusun sebagai pedoman strategis yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai utama yang terkandung dalam visi serta mendukung pencapaian tujuan yang termuat dalam misi.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan terciptanya sinergi dan efisiensi dalam mencapai target-target strategis. Dengan arah kebijakan yang terarah dan terpadu, diharapkan visi besar yang telah ditetapkan bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan menjadi realitas yang terwujud melalui langkah-langkah strategis dan implementasi yang konsisten. Berikut ini merupakan arah kebijakan dari masing-masing misi Kabupaten Kuningan tahun 2025-2029.

Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani	1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	1. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja 2. Pemberian insentif dan disinsentif dalam peningkatan profesionalisme ASN	1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 3. program perekonomian dan pembangunan 4. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 5. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 6. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 7. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 8. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 9. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 10. program koordinasi
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	1. membangun ruang diskusi publik 2. Pelayan pengaduan masyarakat	
			Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	1. Melakukan sinergi pembangunan bersama pemerintah provinsi dan Pusat dalam penanganan isu strategis daerah 2. menentukan lokasi-lokasi penanganan tepat sasaran	
			Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	1. penajaman manajemen risiko dalam setiap rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah	
			Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	1. membangun sarana dan prasarana teknologi yang memadai dalam mendukung digitalisasi 2. mendorong inovasi penggunaan teknologi dalam	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				pelaksanaan birokrasi pemerintahan 3. mendorong keterbukaan informasi publik	dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 11. program pengelolaan pendapatan daerah 12. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 13. program pengelolaan keuangan daerah 14. program pengelolaan barang milik daerah 15. program kepegawaian daerah 16. program kepegawaian daerah 17. program pengembangan sumber daya manusia 18. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 19. program pengelolaan aplikasi informatika 20. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 21. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 22. program penyelenggaraan statistik sektoral 23. program pengelolaan arsip
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	1. membangun sinergi lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien 2. mengembangkan kompetensi lintas sektor dalam membentuk Aparatur yang adaptif	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	1. mendorong inovasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan 2. memperluas jangkauan jaringan internet 3. Meningkatkan SDM pengelola layanan berbasis digital	24. program perlindungan dan penyelamatan arsip 25. program penyelenggaraan pengawasan 26. program penyelenggaraan pengawasan 27. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 28. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 29. program pendaftaran penduduk 30. program pencatatan sipil 31. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan 32. program pengelolaan profil kependudukan 33. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 34. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 35. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 36. program
			Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	1. Meningkatkan penggunaan media digital dalam pelaksanaan pemerintahan 2. pengukuran yang tepat terhadap pelaksanaan SPBE	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 37. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal	2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah	2.1.1 Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	1. identifikasi komoditas unggulan sektor pertanian 2. Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Sektor Pertanian 3. membangun jaringan pasok dan pemasaran hasil pertanian	1. Perencanaan dan pembangunan industri 2. Pengendalian izin usaha industri 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional 4. Peningkatan sarana distribusi perdagangan 5. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 6. Program pengembangan ekspor 7. Standarisasi dan perlindungan konsumen 8. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 9. Pelayanan izin usaha simpan pinjam 10. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	1. Meningkatkan penggunaan pupuk organik dan obat-obatan Nabati 2. Penggunaan pupuk dan obat-obatan tepat guna serta tepat sasaran 3. Mempermudah akses pupuk dan pakan untuk petani 4. Menjaga ketersediaan pupuk, obat dan pakan	
			Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1. mempertahankan Lahan Sawah Dilindungi/LP2B	
			Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta	1. memberikan kemudahan akses perbankan untuk petani 2. memperkuat koperasi tingkat desa	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			perikanan.		11. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian	1. memperluas cakupan layanan jaringan irigasi kondisi baik 2. memperluas cakupan layanan jaringan jalan usaha tani kondisi baik	12. Pendidikan dan latihan perkoperasian 13. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, pengindraan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	1. meningkatkan inovasi digital dalam sektor perikanan 2. memberikan pelatihan penggunaan teknologi untuk nelayan 3. memperluas cakupan infrastruktur sumber daya air untuk nelayan 4. Penyediaan Saran dan Prasarana serta SDM pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	14. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 15. Pengembangan UMKM 16. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pengolahan hasil pertanian	1. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan pemasaran pertanian dan produksi pengolahannya	17. Program pemasaran pariwisata 18. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata	1. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan pemasaran pariwisata	19. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	1. Pengembangan pariwisata daerah sebagai destinasi wisata berbasis komunitas dan desa, 2. Melakukan kajian potensi wisata tingkat desa	20. Program pengembangan kebudayaan
			Pengembangan sumber	1. memberikan kemudahan	21. Program pengembangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			daya manusia dan para pelaku usaha di sektor pariwisata	investasi untuk pelaku usaha sektor pariwisata	22. kesenian tradisional
				2. meningkatkan kualitas SDM penyediaan layanan jasa pariwisata	23. Program pembinaan sejarah
			Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	1. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas rantai pasok hulu-hilir	24. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	1. Memberikan kemudahan dalam layanan pengembangan perumahan tanpa mengenyampingkan kelestarian lingkungan	25. Program pengelolaan permuseuman
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	1. perlindungan terhadap mata air 2. menjaga kualitas lingkungan di kawasan hulu 3. memperluas jangkauan akses air bersih	26. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Peningkatan ketahanan bencana	1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana 2. Edukasi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	27. Penyuluhan pertanian
			Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	1. pemeliharaan jalan daerah dan jalan desa	28. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
			Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah	2. Meningkatkan peran aktif pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi daerah	29. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	1. Penguatan kelembagaan koperasi	30. Program pengelolaan perikanan budidaya
				2. Membangun jejaring usaha	31. Program pengelolaan perikanan tangkap
					32. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
					33. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					Program pengendalian kesehatan hewan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	1. Perluasan peran ekosistem digital pada UMKM 2. Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	dan kesehatan masyarakat veteriner 34. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 35. Program perencanaan tenaga kerja 36. Program Kesejahteraan Masyarakat
			Penataan dan restrukturisasi BUMD.	1. melakukan audit berkala terhadap BUMD	
			Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah	Mengoptimalkan Dana Sosial Syariah melalui pengumpulan dana zakat	
				Mengoptimalkan Sistem Keuangan Syariah	
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)	3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional	3.1.1 Meningkatnya investasi, kerja sama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah	1. Peningkatan Promosi dan Kerja sama antar daerah	1. Program penempatan tenaga kerja 2. Program hubungan industrial 3. Program pengembangan iklim penanaman modal 4. Program promosi penanaman modal 5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				2. Penguatan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah	
			Penyiapan kompetensi SDM yang unggul kompetitif dan penempatan tenaga kerja	1. Melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
				2. Menjalin Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja	
				3. Menjalin Kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam penyaluran tenaga kerja	
		3.1.2 Meningkatnya inovasi	Pengembangan pembiayaan	1. Peningkatan Inovasi Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
		dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi aset serta CSR		
		3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	1. Pengarusutamaan Gender	
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	1. Mengikutsertakan keterlibatan gender dalam pembangunan	
Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumber Daya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan	4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	1. Penguatan kelembagaan dan sistem kerja sama antar daerah	1. Program pelayanan penanaman modal 2. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 3. Program pelayanan penanaman modal 4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 5. Program penelitian dan pengembangan daerah 6. Program penelitian dan pengembangan daerah
			Percepatan penetapan Revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis	1. Berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis	
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa	1. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang berbasis risiko	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan		7. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek strategis/prioritas.	1. Penguatan basis data spasial lahan	8. Program peningkatan kualitas keluarga
			Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment)	1. Inventarisasi data stok karbon	9. Program perlindungan perempuan
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan)	1. Memberikan kemudahan perizinan sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif	10. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			Perencanaan dan implementasi Reformasi Agraria.	1. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah 2. Memberi kemudahan hak akses terhadap Reformasi Agraria	11. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
			Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka	1. Membangun kelembagaan riset dan inovasi IPTEK daerah 2. Menjalinkan kerja sama dengan	12. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
					13. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
					14. Program pemenuhan hak anak (PHA)
					15. Program perlindungan khusus anak
					16. Program pengendalian penduduk
					17. Program pembinaan keluarga berencana

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	akademisi	(kb) 18. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) 19. Program pembinaan keluarga berencana (KB) 20. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) 21. Program peningkatan kualitas keluarga 22. Program pengendalian penduduk 23. Program pengendalian penduduk 24. Program pengendalian penduduk 25. Program peningkatan kualitas keluarga
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy	1. Optimalisasi dan Pembangunan TPST 2. Penyebarluasan informasi terkait 3R (Reduce Reuse Recycle) tingkat rumah tangga	
			Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR	1. Menyelaraskan dokumen perencanaan tingkat daerah, provinsi dan pusat	
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat	5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila	5.1.1 Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap perundang-undangan daerah	1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah 2. Penegakan hukum peraturan daerah	1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
			Meningkatkan peran aktif	1. Penerapan nilai-nilai agama	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			masyarakat dalam kehidupan beragama, berpolitik, berbangsa dan bernegara	dan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	3. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 4. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
		5.1,2 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama		2. Menggalakkan pendidikan wawasan kebangsaan dalam pendidikan formal atau informal	5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	1. Memberikan kemudahan perizinan pendirian sekolah dan pesantren 2. Memberikan masukan tentang kurikulum berbasis penguatan karakter dan kearifan lokal 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pesantren	
			Meningkatkan pembinaan untuk lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	1. Memberikan fasilitasi perizinan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	
Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk	6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua	6.1.1 Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan	1. Penyediaan akses pendidikan bagi kelompok rentan atau daerah terpencil, misalnya melalui program beasiswa atau bantuan	1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program pendidik dan tenaga kependidikan 3. Program pengelolaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial			dasar dan pendidikan menengah)	khusus. 2. Peningkatan Kompetensi dan Redistribusi Tenaga Pendidik 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendidikan dasar	pendidikan 4. Program pendidik dan tenaga kependidikan 5. Program pengelolaan pendidikan 6. Program pendidik dan tenaga kependidikan 7. Program pengelolaan pendidikan
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	1. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan	8. Program pembinaan perpustakaan 9. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 10. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah	Mendorong kurikulum yang berbasis pedagogi dan mengintegrasikan pembelajaran non-akademik, dan muatan lokal	11. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	1. Memberikan kemudahan perizinan pendirian sekolah dan pesantren	12. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				2. Memberikan masukan tentang kurikulum berbasis penguatan karakter dan kearifan lokal 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pesantren	13. Program pemberdayaan sosial 14. Program rehabilitasi sosial 15. Program perlindungan dan jaminan sosial 16. Program penanganan bencana 17. Program pengelolaan taman makam
			Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak	1. Identifikasi Dini dan Pemetaan Bakat, dengan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah	tujuan untuk menciptakan profil bakat siswa yang terintegrasi dari PAUD hingga pendidikan menengah 2. Mendorong implementasi pembelajaran terdiferensiasi di kelas, di mana guru menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa 3. Membangun kemitraan dengan praktisi, seniman, ilmuwan, dan profesional di berbagai bidang untuk memberikan bimbingan dan kesempatan belajar yang relevan bagi siswa dengan talenta khusus	pahlawan 18. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 19. Program penanganan kerawanan pangan 20. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 21. Program penataan desa 22. Program peningkatan kerja sama desa 23. Program administrasi pemerintahan desa 24. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 25. Program penyelenggaraan penataan ruang 26. Program penyelenggaraan jalan 27. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 28. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 29. Program pengelolaan
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan Kompetensi dan Redistribusi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan	
			Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital TIK	1. Penyediaan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital	
				2. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis digital	
		6.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan	1. Penyiapan dan Pemenuhan Penyediaan Air Minum dan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			sanitasi, kesehatan ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Sanitasi 2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Penyediaan fasilitas Komunal Pendukung Kesehatan (Sarana Olah raga dan Rekreasi, Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu)	dan pengembangan sistem air limbah 30. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 31. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Standarisasi Sarana Prasarana Puskesmas 2. Pemenuhan Alat Kesehatan Esensial 3. Penyediaan Obat dan vaksin yang cukup 4. Pengelolaan Limbah Medis yang aman	32. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) 33. Program penataan bangunan gedung 34. Program penataan bangunan dan lingkungannya 35. Program pengembangan jasa konstruksi
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	1. Melakukan Edukasi pola hidup bersih dan sehat Berbasis Komunitas 2. Penguatan Peran Kader Kesehatan dan Organisasi Masyarakat	36. Program pengembangan perumahan 37. Program kawasan permukiman
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan lokal 2. Sosialisasi dan penjangkaran bakat berbasis komunitas 3. Pendidikan berjenjang berbasis kompetensi	38. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 39. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Peningkatan Kompetensi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	40. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan tanah dan program abstentee
			Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	1. Integrasi Program penanganan Stunting 2. Pendampingan ibu hamil dan remaja usia produktif	41. Program penyelesaian ganti kerugian dan
			Peningkatan pelayanan	1. Peningkatan Akses dan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
			kesehatan ibu dan anak yang prima	Kualitas Pelayanan di Tingkat Pelayanan Dasar (Puskesmas dan Posyandu) 2. Penguatan Sistem Rujukan dan Jaringan Pelayanan 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Akurat	santunan tanah untuk pembangunan 42. Program penanggulangan bencana
			Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	1. Deteksi dini dan pengobatan masal 2. Peningkatan Sanitasi, Higiene, dan Pengendalian Vektor 3. Edukasi dan promosi Kesehatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma buruk dan diskriminasi	
	6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan	6.2.1 Penurunan angka kemiskinan	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar	
				2. Pemutakhiran data kepersertaan penerima jaminan kesehatan	
		6.2.2. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi	1. Memberikan bantuan sosial	
		6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	1. Meningkatkan sarana prasarana air minum dan sanitasi masyarakat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
	6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah	6.3.1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa	Pembinaan aparaturnya dan masyarakat desa	1. Melaksanakan diklat bagi aparaturnya desa 2. Meningkatkan sinergi Pembangunan bottom up	
		6.3.2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Penyiapan dan penataan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik	1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana konektivitas masyarakat 1. Meningkatkan layanan transportasi publik yang murah dan berkualitas	
		6.3.3 Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah	1. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah	
			Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan/ perdesaan	1. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat di perkotaan/ perdesaan	
		6.3.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	1. Peningkatan Mitigasi Bencana	
				2. Peningkatan standar bangunan yang tahan bencana dan perubahan iklim	

3.2.4 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah maka dibutuhkan serangkaian program daerah yang dirancang sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, serta diselaraskan dengan program prioritas provinsi dan nasional.

Sebagai penjabaran dari enam misi pembangunan daerah, prioritas pembangunan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Prioritas pembangunan ini menggambarkan komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan melayani, pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai sosial-keagamaan, serta pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang merata. Berikut ini merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 4 Prioritas Pembangunan Daerah

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1	Melakukan percepatan reformasi birokrasi yang berintegritas dan profesional melalui tata kelola pemerintahan yang modern dan melayani.	<i>Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif.</i> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel melalui percepatan reformasi birokrasi berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik yang profesional dan melayani.

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa yang maju, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.	<i>Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.</i> Menggerakkan roda perekonomian daerah melalui penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa modern; didukung oleh pemberdayaan UMKM, inovasi kewirausahaan, dan perluasan investasi berbasis potensi lokal.
3	Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan (empowering) yang berkelanjutan.	<i>Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif</i> Membangun ekosistem masyarakat yang mandiri, produktif, dan solutif melalui pendekatan berbasis empowerment, peningkatan literasi digital dan kewirausahaan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
4	Menjaga komitmen terhadap kelestarian sumber daya alam, termasuk daerah tangkapan air, serta berupaya mengurangi emisi dan dampak negatif terhadap lingkungan.	<i>Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan</i> Menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan dengan memperkuat konservasi sumber daya alam, pengelolaan daerah tangkapan air, pengurangan emisi, serta pengembangan kebijakan ramah iklim dan berorientasi masa depan.
5	Menerapkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sosial dan budaya, guna memperkuat karakter masyarakat yang harmonis dan beretika.	<i>Penguatan Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Kehidupan Sosial</i> Menumbuhkan karakter masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui integrasi nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari, penguatan institusi sosial-keagamaan, dan pelestarian budaya serta kearifan lokal.
6	Mewujudkan pembangunan yang tangguh, dengan fokus pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur untuk memperkuat ketahanan dan modal sosial masyarakat.	<i>Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif</i> Memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis yang merata dan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Pada kurun waktu 2025-2029, Kabupaten Kuningan juga mendapat prioritas kegiatan yang menunjang program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Beberapa rencana proyek strategis dan nasional yang berlokasi di Kuningan dan pemanfaatannya akan dirasakan masyarakat Kuningan. Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan

Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Kawasan Rebana. Kawasan Rebana merupakan salah satu kawasan pengembangan ekonomi di Jawa Barat yang tujuannya untuk mengakselerasi laju pembangunan di kawasan perkotaan inti Cirebon, Patimban dan Kertajati serta kawasan penunjangnya. Peran Kabupaten Kuningan di Kawasan Rebana adalah sebagai penunjang kebutuhan pangan dan pariwisata.

Program prioritas untuk mendukung Kawasan Rebana yang akan dilaksanakan adalah :

- 1. Pengembangan Sektor Pertanian dan perikanan**, terdiri dari : a) Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani; b) Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu; c) Program Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Pasundan; dan d) Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya.
- 2. Pengembangan Sektor Pariwisata**, terdiri dari : a) Program Penguatan Promosi dan Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Desa; dan b) Program Pengembangan Kawasan Wisata Kebun Raya Kuningan.
- 3. Pengembangan Industri Manufaktur** yaitu : Program Pengembangan Industri Ramah Lingkungan, Ekonomi Kreatif dan Rantai Pasok Komoditas Lokal.
- 4. Promosi Investasi** guna mempercepat peningkatan investasi di Kabupaten Kuningan melalui Program Investasi Ramah Lingkungan.

Untuk mewujudkan sinergitas antara program pembangunan nasional dan provinsi, Kabupaten Kuningan merumuskan **10 Program Unggulan – Melesat Tahun 2025-2029** yaitu :

- 1. NGAJI DIRI** (Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pesantren Mandiri)
Target : Bantuan Air Bersih dan Sanitasi ke 100 Pesantren, Beasiswa Santri 5.000 orang, Insentif Guru Ngaji 1.000 orang.
- 2. GEMA SADULUR** (Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran)
Target : Bantuan Sosial 25.000 Paket, Bursa Kerja 10.000 lowongan kerja, Rutilahu 1.000 paket (Pusat dan Daerah).

3. JAWARA TANI (Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti)

Target Pemeliharaan dan Pembangunan 500 Unit Irigasi, Optimalisasi Subsidi Pupuk (Pusat dan Daerah), Insentif Petani Muda.

4. SOMEAH KA SEMAH (Sistem Online Modern, Efisien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan)

Target : 500 Investor Baru (menengah kebawah), dan kemantapan jalan (87,22%).

5. PERTAMA (Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna)

Target : RLS 9 Tahun, Rehab Kelas 1.000 unit, RKB 500 unit, Prevalensi Stunting di bawah 10% (EPPBGM) / SKI dibawah 20%.

6. NATA DAYA (Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata)

Target: 32 Alun- Alun Sentra Ekonomi dan Wisata Desa

7. TATAPAKAN JATI (Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi)

Target : Demplot Cabe dan Bawang 32 Kecamatan.

8. AJEG TIMBANGAN (APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang)

Target : Optimalisasi PAD, Belanja Selektif dan Sinergi Perencanaan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

9. PASAR RAYA (Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat)

Target : Sanggar Ekraf di 32 Kec dan PIRT untuk 1.000 UMKM.

10. ABDI NEGARA (ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani)

Target : Nilai RB Baik, Nilai SAKIP Baik, WTP

Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Kuningan.

Sepuluh Program Unggulan diatas merupakan penjabaran untuk mencapai target Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) ataupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi indikator keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Untuk dapat melihat keterkaitan antara 10 program Unggulan dengan

Visi-Misi dan pencapaian IKU pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Program Prioritas pembangunan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	10 Program Unggulan
KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)					
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani	1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	• Talent Pool ASN dan Pelaksanaan Sistem Merit • Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Penerapan E-Government • Peningkatan Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah • Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah • Peningkatan Capaian Nilai SPBE • Kuningan <i>Fast Respon Multiplatform</i>	ABDI NEGARA: ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani AJEG TIMBANGAN: APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang
		1.1.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal	2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalakan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	• Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Pangan • Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi • Peningkatan Minat Usaha Tani Pada Kaum Muda • Peningkatan Produktifitas Lahan dan Indeks Pertanaman (IP) • Peningkatan Produktifitas Peternakan , Perikanan dan Perkebunan • Peningkatan minat investor industri ramah lingkungan	JAWARA TANI: Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti SOMEAH KA SEMAH: Sistem Online Modern, Efisien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan NATA DAYA: Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata
			Kontribusi PDRB Kabupaten/kota		
			Tingkat Inflasi (%)		
		2.1.1 Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
			Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)		
			Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM		
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	10 Program Unggulan
			Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%) Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	- Peningkatan Kemantapan Jalan melalui Pembangunan Jalan Baru dan Rehabilitasi Jalan Eksisting - Penyediaan pusat kegiatan ekonomi sosial budaya di desa dan kelurahan	
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)	3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional		Indeks Daya Saing Daerah	- Penyediaan Sanggar Ekonomi Kreatif sesuai dengan Potensi UMKM Setempat - Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha dan perdagangan - Peningkatan Kapasitas UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif - Program Peningkatan SDM pelaku usaha dan perdagangan serta Wirausahawan Baru - Perluasan Akses Pasar produk unggulan daerah - Dukungan legalitas bagi pelaku usaha dan perdagangan	PASAR RAYA : Pemberdayaan Sanggar ekraf dan Usaha Rakyat
		3.1.1 Meningkatnya investasi, kerjasama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
		3.1.2 Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Indeks Inovasi Daerah		
		3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
			Indeks Perlindungan Anak		
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		
			Indeks Pembangunan Kelurga (I Bangsa)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	10 Program Unggulan
			Indeks Pembangunan Berwawasan Pependudukan		
Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan	4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Pemanfaatan Lahan untuk penyediaan komoditas pangan rawan inflasi - Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga tutupan lahan berbasis vegetasi - Peningkatan inisiatif pemanfaatan energi hijau dan terbarukan - Mendorong pemanfaatan jasa lingkungan untuk ekonomi berbasis kearifan lokal	TATAPAKAN JATI : Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penurunan GRK Kumulatif (Ton Co2eq)		
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat	5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Meningkatkan tingkat pendidikan formal bagi santri - Mendukung penyediaan fasilitas umum , air bersih dan sanitasi untuk kegiatan pesantren - Peningkatan kesejahteraan bagi guru ngaji - Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial masyarakat - Meningkatkan tingkat ketentraman dan ketertiban umum	NGAJI DIRI : Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pasantren Mandiri
		5.1.1 Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		5.1.2 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)		
Misi 6: Pembangunan	6.1 Terwujudnya		Indeks Pembangunan	• Peningkatan dan perluasan	PERTAMA : Pelayanan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	10 Program Unggulan
Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial	masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua		Manusia	- akses pendidikan dasar dan menengah - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar - Penguatan nilai-nilai muatan lokal melalui pada semua level pendidikan - Penanaman nilai moral dan etika sejak usia sekolah - Peningkatan dan perluasan akses layanan kesehatan yang paripurna - Peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan Kesehatan - Peningkatan Akses Jaminan Kesehatan bagi kelompok rentan - Promosi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat - Pengurangan angka stunting melalui peningkatan kesehatan untuk remaja putri, Calon Pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita - Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui perlindungan kesempatan berusaha dan perbaikan infrastruktur	Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna GEMA SADULUR: Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran
			PDRB Per Kapita		
		6.1.1 Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)*		
			Harapan Lama Sekolah (tahun)		
	6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan	6.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
			Prevalensi Stunting		
			Persentase Penduduk Miskin		
		6.2.1 Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin		
		6.2.2. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	10 Program Unggulan
		6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	• Menjalin link and match kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri • Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja • Penggunaan Skema Padat Karya dalam pekerjaan pemerintah • Penguatan jaringan pengaman sosial bagi kelompok rentan • Peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam situasi kebencanaan • Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pendukung layanan publik • Peningkatan layanan perhubungan dan konektivitas wilayah	
	6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah		Indeks Gini		
		6.3.1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa	Peresentase Desa Mandiri		
		6.3.2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Tingkat Konektivitas antar wilayah		
			Persentase Kualitas infrastruktur		
		1.3.3. Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
		6.3.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)		

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Perumusan Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Program perangkat daerah merupakan turunan dari kebijakan Perangkat Daerah (PD) yang diwujudkan dalam bentuk upaya berisi satu atau lebih kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan capaian yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Rincian program hingga tingkat kegiatan dan subkegiatan tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) PD, yang disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Program perangkat daerah ini menjadi masukan timbal balik dari Renstra PD yang disusun sesuai tugas dan fungsi, serta didukung oleh hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda). Proses ini menghubungkan perencanaan secara vertikal, memadukan pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari sinergi berbagai program atau kegiatan lain yang saling melengkapi.

Program pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2025-2029 merupakan langkah yang ditujukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas; perekonomian yang tangguh, inklusif dan berdaya saing; membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, kreatif, inovatif; menjaga kelestarian sumber daya alam; membangun kerukunan kehidupan masyarakat; mewujudkan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan pemerataan pembangunan. Upaya ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikerjakan oleh seluruh perangkat daerah. Berbagai program dalam RPJMD 2025–2029 disertai dengan indikator dan target kinerja yang terukur pada setiap program. Program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025–2029.

Penyusunan program perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada nomenklatur program sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

4.1.2 Pertimbangan Kerangka Pendanaan dalam Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka pendanaan yang akan dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Kerangka pendanaan ini berperan penting untuk memastikan seluruh rencana pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Kerangka pendanaan untuk RPJMD Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan analisis keuangan daerah yang mencakup berbagai sumber pendanaan, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Sumber utama pendanaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain.
- b. Transfer dari Pemerintah Pusat : Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

- c. Pinjaman daerah : Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman daerah yang dapat digunakan untuk mendukung program-program strategis.
- d. Partisipasi Masyarakat : Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan melalui skema CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dana swadaya masyarakat.

Rencana pendanaan pagu indikatif perangkat daerah Kabupaten Kuningan untuk periode tahun 2025-2029 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026	2027	2028	2029	2030						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	Persen	98,05	99,4	213.376.630.000	99,85	229.925.000.000	99,05	244.475.000.000	100	278.150.000.000	100	292.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM PAUD (%)	Persen	96	96,85		97,1		97,75		98,1		98,5		
	APK SD /MI/PAKET A (%)	Persen	100	100		100		100		100		100		
	APM SD/MI/PAKET A (%)	Persen	98,52	99,92		99,92		99,93		99,93		99,93		
	APK SMP/MTs/PAKET B (%)	Persen	99,65	100		100		100		100		100		
	APM SMP/MTS/PAKET B (%)	Persen	81,3	97,9		98,25		98,85		98,98		99,05		
	APK Kesetaraan (%)	Persen	74	74,98		75,25		75,95		77,05		79,25		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik PAUD yang memiliki kompetensi (%)	Persen	46,39	55,15	260.000.000	57,6	400.000.000	60,02	550.000.000	65,3	1.100.000.000	70,15	1.200.000.000	
	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	Persen	97,28	98,1		98,55		98,8		98,95		99,05		
	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	Persen	97,15	98,35		98,75		98,9		99,05		99,45		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya yang dilindungi (Poin)	Unit	4	6	960.000.000	7	1.350.000.000	8	1.750.000.000	9	2.150.000.000	9	2.350.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Jumlah karya budaya lokal yang naik kelas ke event regional dan/atau nasional (Poin)	Unit	28	28		28		28		28		28		
	Jumlah karya budaya yang dipertahankan (Poin)	Unit	3	3		4		5		6		6		
	Jumlah masyarakat (aparatur/komunitas/lembaga kebudayaan) terbina yang aktif berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan) (orang)	Orang	4	6		7		8		9		9		
Program	Jumlah Warisan Budaya yang	Unit	6	6	275.000.000	7	325.000.000	8	550.000.000	9	700.000.000	9	775.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Pengembangan Kesenian Tradisional	dilindungi													
Program Pembinaan Sejarah	Tempat Sejarah (Desa)	Desa	32	32	275.000.000	32	400.000.000	32	550.000.000	32	700.000.000	32	775.000.000	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya yang terlindung	Unit	16	23	575.000.000	23	800.000.000	24	1.150.000.000	24	1.500.000.000	24	1.675.000.000	
	Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Unit	8	12.00		13.00		13.00		13.00				
Program Pengelolaan Permuseuman	Benda Koleksi Museum		311	311	930.000.000	311	1.150.000.000	311	1.400.000.000	311	1.650.000.000	311	1.800.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya fasilitas sarana kesehatan FKTP (Unit)	Unit	37	37	188.429.044.084	37	201.647.017.469	37	215.770.880.927	37	231.107.896.691	37	239.092.719.079	Dinas Kesehatan
	Terpenuhinya sarana alat kesehatan FKTP (Paket)	Unit	37	37		37		37		37				
	Persentase Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	Persen	100	100		100		100		100				
	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC) (%)	Persen	98,41	99,13		99,53		99,93		100				
	Persentase melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan (%)	Persen	100	100		100		100		100				
	Persentase Cakupan Pustu yang Melaksanakan ILP (%)	Persen	44,12	55		60		70		80				
	Presentase tertanganinya kasus penyakit tidak menular (%)	Persen	100	100		100		100		100				
	Presentase tertanganinya kasus penyakit menular (%)	Persen	100	100		100		100		100				
	Persentase tertanganinya	Persen	100	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH		
				2026		2027		2028		2029		2030				
	penyakit KLB dan Bencana (%)															
	Jumlah sistem data kesehatan yang terstandar dan terintegrasi (Dokumen)	Dokumen	1	1				1				1				1
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Puskesmas (%)	Persen	84,64	85,5				86				86,5				87
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLUD Rumah Sakit)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan RSUD 45 (%)	Persen	86,57	83,01	126.000.000.000	83,02	127.000.000.000	83,03	128.000.000.000	83,04	129.000.000.000	83,04	130.000.000.000			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan RSUD Linggarjati (%)	Persen	70,77	76,6	41.906.500.000	76,7	41.910.500.000	77	41.910.500.000	90	41.914.500.000	90	42.000.000.000			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Standar Tenaga Kesehatan (%)	Persen	N/a	18,92	1.892.845.000	27,03	2.026.052.039	40,54	2.167.962.974	54,05	2.322.061.348	54,05	2.402.289.091			
	Jumlah Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	N/a	8				9				9				10
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan Farmasi (%)	Persen	N/a	100	717.070.000	100	767.408.000	100	821.160.000	100	879.528.000	100	909.916.000			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kerjasama/ kemitraan (Desa Siaga Aktif Strata Purnama)	Persen	67,45	72,50	580.072.390	75,00	620.793.000	77,50	664.276.000	80,00	711.492.000	82,50	736.075.000			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	66,97	67,33	2.844.759.000	67,51	2.980.000.000	67,8	3.100.000.000	68	3.220.000.000	68,14	3.340.000.000	Dinas Pekerjaan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
SUMBER DAYA AIR (SDA)														Umum Dan Tata Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,74	93,1	500.000.000	93,79	525.000.000	94,51	550.000.000	95,26	575.000.000	96,05	600.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah bangunan persampahan	Persen	3	3	100.000.000	3	105.000.000	3	110.000.000	3	115.000.000	3	120.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses Sanitasi Layak	Persen	96,67	97,04	200.000.000	97,31	210.000.000	97,57	220.000.000	97,84	230.000.000	98,11	240.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Berkurangnya kawasan genangan banjir di permukiman	Ha	1.611. 715	1561, 72	100.000.000	1536, 72	105.000.000	1511, 72	110.000.000	1.486. 715	115.000.000	1.461. 715	120.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-PBG	Nilai	21	26	50.000.000	28	52.500.000	31	55.000.000	34	57.750.000	40	60.000.000	
PROGRAM PENATAAN	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan	Persen	54	58	7.770.000.000	61	7.970.000.000	64	8.170.000.000	67	8.470.000.000	70	8.570.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	lingkungannya													
PROGRAM	Persentase Kemantapan jalan	Persen	72,22	84,22	8.080.857.548	85,22	8.072.525.837	86,22	8.756.710.138	87,22	9.170.683.433	89,22	9.181.761.768	
PENYELENGGARA AN JALAN	Panjang Pembangunan Jalan	Persen	0	0	-	2,88	113.857.397.000	1,45	90.068.257.000	1,63	137.285.022.000	3,55	66.848.456.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	Persen	19	20	100.000.000	21	105.000.000	22	110.000.000	23	115.000.000	24	120.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	67,7	75,42	630.000.000	83,36	660.000.000	86,54	690.000.000	88,62	720.000.000	90,92	750.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	390.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase capaian kawasan kumuh yang ditangani	Persen	15,44	17,95	880.000.000	19,17	550.000.000	20,39	750.000.000	21,62	550.000.000	22,84	550.000.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (Rutilahu)	Unit	1,36	1,26	1.500.000.000	1,17	2.000.000.000	1,09	2.000.000.000	1,02	3.000.000.000	0,95	3.000.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kemantapan jalan lingkungan	Persen	51,7	59,65	1.350.000.000	63,94	1.704.658.250	68,22	2.126.773.736	72,52	2.003.152.680	76,79	2.352.075.956	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN TANAH DAN PROGRAM ABSTENTEE	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	NA	150	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	142	100.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemanfaatan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	100	15.729.480.000	100	25.000.000.000	100	23.050.520.000	0	-	0	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang bersertifikat kompetensi (%)	Persen	NA	96.5	50.000.000	97	52.500.000	97.5	55.125.000	98	57.881.250	98	60.775.312	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Satgas Linmas Aktif (%)	Persen	NA	91	1.727.500.000	92	1.813.875.000	93	1.904.568.750	94	1999797188	94	2.099.787.047	
	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	Persen	NA	87	55.000.000	88	57.750.000	89	60.637.500	90	63.699.375	90	66.852.844	
	Persentase Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati yang Terselesaikan (%)	Persen	NA	9.5	50.000.000	97	52.500.000	97.5	55.125.000	98	57.881.250	98	60.775.313	
Program Pencegahan, Penanggulangan,	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai standar pelayanan (%)	Persen	NA	65	37.500.000	70	39.375.000	75	41.343.750	80	43.410.938	80	45.581.478	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jangkauan	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan informasi rawan bencana (%)	Persen	100	100	500.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	70.000.000	100	225.000.000	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	Persen	100	100	205.000.000	100	400.000.000	100	300.000.000	100	430.000.000	100	275.000.000	
	Persentase pelayanan penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (%)	Persen	100	100	185.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
	Jumlah dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Dokumen	1	1	110.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	235.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	Persen	66.67	66.67	350.000.000	66.67	400.000.000	75	400.000.000	75	425.000.000	75	425.000.000	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kembali berfungsi sosial (%)	Persen	N/A	52.5	1.070.000.000	55	1.375.000.000	57.5	1.440.000.000	60	2.065.000.000	60,25	2.065.000.000	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang berkurang pengeluarannya (%)	Persen	N/A	91	4.502.976.000	92	4.550.000.000	93	4.675.000.000	95	4.775.000.000	97	4.775.000.000	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	Persen	100	100	500.000.000	100	595.000.000	100	645.000.000	100	770.000.000	100	795.000.000	
Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	layanan di Lokasi Taman Makam Pahlawan (%)													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang sesuai dengan RTKD (%)	Persen	N/A	60	25.000.000	70	40.000.000	80	50.000.000	80	75.000	85	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang terserap (%)	Persen	N/A	52,5	1.025.000.000	55	1.230.000.000	57,5	1.440.000.000	60	1.650.000.000	70	1.800.000.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan diberdayakan (%)	Persen	N/A	75	580.000.000	80	790.000.000	85	1.250.000.000	90	1.300.000.000	92	1.500.000.000	
Program Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	N/A	44,44	250.000.000	44,45	345.000.000	44,47	400.000.000	44,48	550.000.000	44,5	650.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai konsumsi pangan perkapita per Tahun	Poin	93,8	95	100.000.000	96,3	100.000.000	97,5	100.000.000	98,8	100.000.000	100	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	Ton	8	200	2.600.000.000	200	2.600.000.000	200	2.600.000.000	200	2.600.000.000	200	2.600.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian	Unit	NA	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian	Unit	NA	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terlaksananya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Ha	NA	1	1.000.000.000	1,5	1.500.000.000	2	2.000.000.000	2,5	2.500.000.000	2,5	2.500.000.000	
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok yang Naik Kelas	Poktan	2.573, 00	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	3	4.500.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun (Persen)	Persen	100	100	75.000.000	100	400.000.000	0	-	100	300.000.000	0		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Poin)	Poin	65,98	68,41	85.000.000,00	68,66	200.000.000	68,92	250.000.000	69,17	250.000.000	69,42	350.000.000	
	Indeks Kualitas Udara (Poin)	Poin	50,1	70,59		70,79	75.000.000,00	70,99	100.000.000	71,19	100.000.000	71,39	150.000.000	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Poin)	Poin	59	69,3	150.000.000	69,37	300.000.000	69,44	400.000.000	69,51	400.000.000	69,58	500.000.000	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3	Badan Usaha	N/A	0	-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)														
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Badan Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Menaati Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan Usaha	20	50	20.000.000	60	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	N/A	0	-	25	50.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	75	150.000.000	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah orang/lembaga yang berpartisipasi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Orang/Le mbaga	N/A	0	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	N/A	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	
Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	Persen	59,76	57,3	170.000.000	56,8	500.000.000	56,3	1.182.794.618	55,8	1.189.083.129	55,3	1.200.000.000	
	Pengurangan Sampah	Persen	8,73	6,1		6,2		6,3		6,4		6,5		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026	2027		2028		2029		2030			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP-EL (Persen)	Persen	99.06	99,15	220.000.000	99,2	300.000.000	99,25	400.000.000	99,3	500.000.000	99,35	550.000.000	Dinas Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (Persen)	Persen	55.2	61		62		63		64		65		
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun (Persen)	Persen	96.36	96.38	100.000.000	96.39	150.000.000	96.4	225.000.000	96.41	300.000.000	96,42	325.000.000	
	Persentase Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian (Persen)	Persen	100	100				100				100		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Fasilitasi Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data Administrasi Kependudukan (Persen)	Persen	100	100	175.000.000	100	225.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	
	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Persen)	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan Berskala Kabupaten/ Kota (Jenis Buku)	Buku	1	1	25.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata (%)	Persen	60	20.00	100.000.000	30.00	150.000.000	40.00	200.000.000	50.00	250.000.000	50	250.000.000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat Dan Desa
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan nilai indeks komposit ekonomi desa di kabupaten/kota (%)	Persen	5	10		10		10		10		50		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan nilai indeks komposit lingkungan desa di kabupaten/kota (%)	Persen	100	35	6.700.000.000	45	6.850.000.000	55	7.100.000.000	65	7.350.000.000	75	7.350.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan nilai indeks komposit sosial desa di kabupaten/kota (%)	Persen	100	40	2.550.000.000	55	2.850.000.000	70	3.100.000.000	80	3.350.000.000	80	3.600.000.000	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase sumber daya manusia terbina yang menerapkan pengarusutamaan gender (%)	Persen	100.0 0	100.0 0	50.001.100	100.0 0	55.000.000	100.0 0	60.000.000	100.0 0	65.000.000	100	70.000.000	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA (%)	Persen	100.0 0	100.0 0	25.000.000	100.0 0	30.000.000	100.0 0	35.000.000	100.0 0	45.000.000	100	50.000.000	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan (Rasio)	Point	6.90	6.70		6.60		6.50		6.40		6,3		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pembinaan di Kabupaten Kuningan (PUSPAGA)	Lembaga	1	1	49.999.900	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan ketersediaan data yang up to date di Kabupaten Kuningan (Dokumen)	Dokumen	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	
Program Pemenuhan	Cakupan Penguatan dan	Persen	100.0	100.0	49.999.000	100.0	50.000.000	100.0	55.000.000	100.0	60.000.000	100	65.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH				
				2026		2027		2028		2029		2030						
Hak Anak (Pha)	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat di Kabupaten Kuningan (%)		0	0		0		0		0								
Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (Rasio)	Point	0.86	0.82	50.000.000	0.80	55.000.000	0.78	60.000.000	0.76	65.000.000	0,74	70.000.000					
	Persentase Pengaduan kekerasan, eksploitasi diskriminasi (KED) terhadap anak yang diselesaikan (%)	Persen	100.0 0	100.0 0				100.0 0				100.0 0				100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Nilai	21,4	2,13	150.000.000	2,12	160.000.000	2,11	165.000.000	2,1	170.000.000	2,09	175.000.000	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak				
	Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Nilai	11,2	18,3				17,9				17,5				17,1		16,7
	GDPK yang	Dokumen	1	1				1				1				1		1
	diimplementasikan sebagai dasar perencanaan																	
	Jumlah sekolah	Sekolah	71	5				5				5				5		5
	formal/non formal yang melakukan																	
	pendidikan																	
	kependudukan																	
	Jumlah Rumah Data Paripurna	Unit	55	10				10				10				10		10
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	MCPR (Angka Prevalensi Kontirsepsi Modern (Pesera KB Modern: Suntik)	Persen	66,4	69,03	3.053.137.000	69,53	3.200.000.000	70,03	3.360.000.000	70,53	3.528.000.000	71,03	3.704.400.000					
	Persentase Kebutuhan ber KB yang terpenuhi (Unmet Nedd)	Persen	10,3	6,21				5,96				5,71			5,46		5,21	
	Persentase Cakupan Penguuna	Persen	26,32	38,25				38,5				38,75			39		39,25	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MCJP)													
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	BKB 14,45 %	BKB 33,32 %	3.070.965.000	BKB 42,75 %	3.200.000.000	BKB 52,18 %	3.360.000.000	BKB 61,62 %	3.528.000.000	BKB 71,05 %	3.704.400.000	
			BKR 6,44 %	BKR 25,31 %		BKR 34,74 %		BKR 44,17 %		BKR 53,61 %		BKR 63,04 %		
			BKL 7,41 %	BKL 26,28 %		BKL 35,71 %		BKL 45,14 %		BKL 54,58 %		BKL 64,01 %		
	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	Nilai	20,9	21,1		21,2		21,3		21,4		21,5		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program	Nilai PDRB sektor Transportasi	Persen	19,94	20,74	25.000.000	21,14	50.000.000	21,54	75.000.000	21,94	150.000.000	22,26	200.000.000	Dinas Perhubunga n
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase konektivitas angkutan umum	Persen	47,78	50,41	25.000.000	55,61	50.000.000	58,22	75.000.000	60,83	150.000.000	62,92	200.000.000	
	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	37,05	38,55	185.174.000	41,44	370.348.000	44,73	748.121.080	47,28	1.496.242.160	53,16	1.660.828.798	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah	Point	3	3	960.000.000	3	1.056.000.000	3	1.056.000.000	3	1.056.000.000	3	1.056.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE/Indeks Pemdigi	Point	3,57	1	2.040.000.000	1,2	2.244.000.000	1,4	2.244.000.000	1,6	2.244.000.000	1,8	2.244.000.000	
	Nilai Perencanaan Strategis SPBE/Indeks Pemdigi	Point	3,57	1		1,2		1,4		1,6		1,8		
	Persentase Layanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Perangkat Daerah yang terpusat dalam portal layanan publik berbasis elektronik (%)													
	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Persen	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	Persen	100	100	100.000.000	100	161.328.428	100	200.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	PersentasePerangkatDaerah yang menggunakan Jaring Sandi dan Jumlahlayanan keamanan informasi yang disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	100.000.000	1	165.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	NA	10	250.000.000	15	275.000.000	15	300.000.000	25	300.000.000	25.000	350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Koperasi yang memenuhi standar													
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan	Persen	NA	10	250.000.000	15	275.000.000	15	300.000.000	25	350.000.000	25.000		
	dan Pemeriksaan													
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan Penilaian	Persen	NA	10	250.000.000	15	275.000.000	15	300.000.000	25	300.000.000	25.000		
	Kesehatan KSP/USP													
Program Pendidikan	Persentase diadakannya	Persen	NA	10	250.000.000	15	275.000.000	15	300.000.000	25	350.000.000	25.00	400.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan											0		
	Perkoperasian													
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	NA	10	500.000.000	15	500.000.000	15	650.000.000	25	700.000.000	25.00 0	800.000.000	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM Binaan (%)	Persen	NA	15	1.500.000.000	15	1.600.000.000	15	1.600.000.000	20	1.650.000.000	20.00 0	1.750.000.000	
Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (%)	Persen	NA	15	500.000.000	15	500.000.000	15	600.000.000	20	700.000.000	20.00 0	750.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana perdagangan	Persen	NA	0,5	800.000.000	0,5	850.000.000	0,5	955.000.000	0,5	1.100.000.000	0,5	1.200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdaganga n Dan Perindustria n
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	NA	100	650.000.000	100	700.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100.0 00	1.100.000.000	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor bersih perdagangan	persen	NA	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	
Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera Ulang	Persen	NA	100	300.000.000	100	350.000.000	100	450.000.000	100	550.000.000	100.0 00	600.000.000	
Program Penggunaan dan	Persentase Produk Unggulan Daerah yang dipromosikan	Persen	NA	10	750.000.000	10	800.000.000	10	850.000.000	10	900.000.000	10.00 0	1.000.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Pemasaran Produk Dalam Negeri														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan penguatan IKM dan dokumen RPIK (%)	Persen	NA	25	750.000.000	25	750.000.000	25	800.000.000	25	850.000.000	25.00 0	850.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdaganga n Dan Perindustria n
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase peningkatan informasi bagi para IKM /perusahaan terkait izin usaha industri (%)	Persen	NA	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	10	150.000.000	10.00 0	150.000.000	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan (%)	Persen	NA	10	150.000.000	15	150.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15.00 0	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi	NA	2	50.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi	NA	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Laporan	NA	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
PROGRAM PELAYANAN	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Jenis Kegiatan	NA	4	125.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PENANAMAN MODAL	Nonperizinan													
	Jumlah produk pelayanan perizinan yang dikeluarkan	Produk Izin	NA	4000	-	4500	-	5000	-	5500	-	6000	-	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Media informasi perizinan dan nonperizinan	Kegiatan	NA	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader (%)	Persen	0,5	0,5	950.000.000	0,5	1.075.000.000	0,5	1.150.000.000	0,5	1.223.000.000	0,5	1.400.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Medali Yang diperoleh dalam kejuaran tingkat provinsi (%)	Persen	18	18,42	8.101.000.000	19,74	8.850.000.000	22,37	9.185.000.000	26,31	9.828.000.000	22,37	10.485.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda dalam Kegiatan Kepramukaan (%)	Persen	NA	0,5	600.000.000	0,5	600.000.000	0,5	650.000.000	0,5	650.000.000	0,5	650.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memenuhi standar (%)	Persen	25	30	2.800.000.000	35	3.150.000.000	40	3.375.000.000	45	3.375.000.000	50	3.805.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase produk pariwisata yang dipasarkan (%)	Persen	30	40	1.700.000.000	45	1.700.000.000	50	2.000.000.000	55	2.000.000.000	60	2.179.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan (%)	Persen	20	17,6	1.046.000.000	17,6	1.046.000.000	17,6	1.096.000.000	23,6	1.200.000.000	23,6	1.225.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	Persen	20	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	20	1.625.000.000	20	1.800.000.000	20	2.000.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (%)	Persen	81	83	250.000.000	84	250.000.000	85	250.000.000	86	250.000.000	87	250.000.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaa n
	Nilai Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (eksemplar)	Eksempla r	21450	34150	250.000.000	36150	250.000.000	38150	250.000.000	41000	250.000.000	44000	250.000.000	
	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (orang)	Orang	10450	12000	1.000.000.000	13000	1.000.000.000	15000	1.000.000.000	17000	1.000.000.000	18000	1.000.000.000	
	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) (perpustakaan)	Perpustak aan	100	150	250.000.000	175	250.000.000	200	250.000.000	225	250.000.000	250	250.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Informasi Kearsipan (%)	Persen	90	93	150.000.000	93,5	150.000.000	94	150.000.000	94,5	225.000.000	95	300.000.000	Dinas Kearsipan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yang di autentikasi dan hasil alih media sesuai standar (%)	Persen	90	93	100.000.000	93,5	100.000.000	94	100.000.000	94,5	175.000.000	95	250.000.000	Dan Perpustakaa n
	Persentase Arsip yang diselamatkan (%)	Persen	90	93	50.000.000	93,5	50.000.000	94	50.000.000	94,5	150.000.000	95	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	420	475	500.000.000	500	600.000.000	525	850.000.000	550	1.100.000.000	575	1.100.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
	Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	103	103		103		103		104				
	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	1,8	2		2,1		2,2		2,3		2,4		
	Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	20	30		35		40		45		45		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tingkat Produksi Budidaya Perikanan	Ton	28,5	32,5	850.000.000	34,5	1.250.000.000	36,5	1.400.000.000	38,5	1.850.000.000	39,5	2.300.000.000	
	Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan (NTN)	Persen	104	105		105		106		106		106		
	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	23	25		25,5		26		26,5		27,5		
	Cakupan Kelompok Pembudi Daya Ikan	Kelompok	1	1,2		1,3		1,4		1,5		1,6		
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Produksi Pengolahan hasil Perikanan	Ton	250	275	300.000.000	290	400.000.000	305	650.000.000	320	800.000.000	350	1.000.000.000	
	Cakupan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	40	60		70		80		90		100		
	Jumlah Rumah Tangga Pengolah dan Pemasaran	Orang	3	4		4,5		5		5,5		6		
	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/T hn	27	27		27		27		27		27		
Pogram Pengawasan	Rasio Kawasan Perairan	Ha	200	200	500.000.000	200	500.000.000	200	750.000.000	200	750.000.000	200	750.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET									PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030	
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	terhadap total lindung luas nelayan												
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang- undangan	Persen	-	-		-		-		-		-	
	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan	Kelompok	4	6		6		6		6		6	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya Benih/bibit Ternak	Ton	4,678	16	1.400.000.000	16	1.400.000.000	16	1.850.000.000	16	2.050.000.000	16	2.500.000.000
	Produksi Daging												
	1. Daging Sapi	Ton	2,259	2,399		2,405		2,411		2,417		2,456	
	2. Daging Domba/Kambing	Ton	1,348	1,459		1,462		1,466		1,47		1,495	
	3. Daging Ayam Buras	Ton	648	715		717		718		720		765	
	4. Daging Ayam Ras Petelur	Ton	1,479	1,831		1,835		1,84		1,844		1,911	
	5. Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	31,67 9	33,60 9		33,69 3		33,77 7		33,86 1		34,01 1	
	Produksi Telur												
	1. Telur Ayam Buras	Ton	1,493	1,646		1,651		1,655		1,659		1,712	
	2. Telur Ayam Ras Petelur	Ton	18,16 8	22,48 2		22,53 8		22,59 5		22,65 1		22,96 2	
	3. Telur Itik	Ton	484	514		515		516		517		556	
	Produksi Susu												
	Susu Sapi Perah	Ton	18,97 9	19,17		19,21 8		19,26 6		19,31 4		19,42 3	
	Populasi Ternak												
	1. Sapi Perah	Ekor	7,943	8,102		8,123		8,143		8,163		8,233	
2. Sapi Potong	Ekor	30,55	31,79		31,87		31,95		32,03		32,15		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
			9	4		3		3		3		6		
	3. Kerbau	Ekor	4,678	4,725		4,737		4,749		4,761		4,801		
	4. Domba	Ekor	133,7 9	139,3 66		139,7 14		140,0 64		140,4 14		140,6 12		
	5. Kambing	Ekor	7,718	7,795		7,814		7,834		7,854		7,932		
	6. Ayam Buras	Ekor	696,5 45	767,9 41		769,8 61		771,7 86		773,7 15		774,1 55		
	7. Ayam Ras Petelur	Ekor	1.588. 772	1.966. 033		1.970. 948		1.975. 875		1.980. 815		1.998. 515		
	8. Ayam Ras Pedaging	Ekor	4.027. 412	4.272. 682		4.283. 363		4.294. 072		4.304. 807		4.311. 285		
	9. Itik	Ekor	75,83 6	77,36 1		77,55 4		77,74 8		77,94 2		79,01 2		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	Unit	5	10	400.000.000	13	600.000.000	15	650.000.000	18	900.000.000	18	900.000.000	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	3,6	4	250.000.000	4	725.000.000	5	625.000.000	5	1.100.000.000	6	1.350.000.000	
SEKRETARIAT DAERAH														
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Poin	n/a	3.11	1.500.000.000	3.12	1.650.000.000	3.13	1.815.000.000	3.14	1.996.500.000	3,14	2.196.150.000	Sekretariat Daerah
	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang Efektif	Persen	n/a	55	14.000.000.000	60	15.400.000.000	65	16.940.000.000	70	18.634.000.000	70	20.497.400.000	
	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,54	0,58		0,6		0,62		0,64		0,66		
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	77.80	77,85	1.000.000.000	77,9	1.100.000.000	77,95	1.210.000.000	78	1.331.000.000	78	1.464.100.000	
Program Perekonomian Dan	Persentase Deviden BUMD terhadap PAD	Persen	n/a	1-2%	1.400.000.000	1-2%	1.540.000.000	1-2%	1.694.000.000	1-2%	1.863.400.000	1-2%	2.049.740.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	82.00	83	1.000.000.000	83,5	1.100.000.000	84	1.210.000.000	84,5	1.331.000.000	84,5	1.464.100.000	
SEKRETARIAT DPRD														
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Terselenggaranya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lancar (Raperda)	Ranperda	8	10	2.550.000.000	10	2.750.000.000	10	2.950.000.000	10	3.250.000.000	10	3.350.000.000	Sekretariat DPRD
	Terlaksananya Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Lancar (Rapat Paripurna)	Kegiatan	39	40	500.000.000	40	650.000.000	40	750.000.000	40	950.000.000	40	1.200.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (Kegiatan)	Kegiatan	2	2	3.896.930.000	2	4.346.930.000	2	4.796.930.000	2	5.246.930.000	2	5.646.930.000	
	Terselenggaranya kegiatan DPRD yang terpublikasikan (Kegiatan)	Kegiatan	2	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	
	Jumlah aspirasi yang masuk melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD (Kegiatan)	Kegiatan	30	35	500.000.000	35	600.000.000	35	800.000.000	35	1.000.000.000	35	1.200.000.000	
	Terselenggaranya Pembahasan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Lancar (Kegiatan)	Kegiatan	3	3	2.894.175.000	3	3.524.175.000	3	3.524.175.000	3	3.524.175.000	3	3.524.175.000	
	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan dalam Alat Kelengkapan DPRD (Kegiatan)	Kegiatan	94	106	2.875.155.000	106	3.250.000.000	106	3.624.845.000	106	3.999.690.000	106	4.375.000.000	
	Terselenggaranya Keprotokolan Kegiatan Pimpinan DPRD	Kegiatan	12	24	600.000.000	24	800.000.000	24	1.000.000.000	24	1.200.000.000	24	1.450.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Lancar (Kegiatan)													
PERENCANAAN														
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Predikat)	Poin	22,5	23,5	260.000.000	24	272.500.000	24,5	285.000.000	25	297.500.000	25,5	302.500.000	Badan Perencanaa n Pembangun an, Penelitian Dan Pengemban gan Daerah
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Predikat)	Poin	21	22	45.000.000	22,5	47.500.000	23	50.000.000	23,5	52.500.000	24	52.500.000	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Predikat)	Poin	21,5	23,5	285.000.000	24	296.250.000	24,5	307.500.000	25	322.500.000	25,5	330.000.000	
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Predikat)	Poin	21	22	193.900.000	22,5	201.400.000	23	208.900.000	23,5	220.150.000	24	223.900.000	
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Predikat)	Poin	22	23	185.000.000	23,5	192.500.000	24	200.000.000	24,5	211.250.000	25	215.000.000	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	21	22	40.000.000	22,5	43.750.000	23	47.500.000	23,5	52.500.000	24	55.000.000	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Poin	21	22	31.100.000	22,5	33.600.000	23	36.100.000	23,5	39.850.000	24	41.100.000	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran	Poin	20	21	40.000.000	21,5	42.500.000	22	45.000.000	22,5	48.750.000	23	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan	Persen	15	25	70.000.000	30	75.000.000	35	80.000.000	40	85.000.000	45	90.000.000	Badan Perencanaa n Pembangun an, Penelitian Dan Pengemban gan Daerah
	Persentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang Terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dirujuk dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Perangkat Daerah					100		100		100		100		
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dirujuk dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100						
	Perangkat Daerah				100	100	100	100						
KEUANGAN														
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (%)	Persen	90	91	5.785.400.000	92	6.363.972.555	93	6.999.369.810	94	7.700.306.791	95	8.470.337.470	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Prioritas Pembangunan Daerah yang Dianggarkan Dalam APBD (%)	Persen	100	100	515.765.407.125	100	540.096.704.807	100	565.671.242.863	100	594.796.622.206	100	610.228.162.405	Badan Pengelolaan Keuangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Persentase Tindakanjutan Usulan Pencairan Dana yang Tepat Waktu (%)	Persen	100	100		100		100		100		100		Dan Aset Daerah
	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Predikat)	Predikat	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Nilai)	Point	3	3,05	419.299.875	3,1	441.000.000	3,15	463.050.000	3,2	486.202.500	3,25	499.500.000	
KEPEGAWAIAN														
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan	Point	35	37	1.075.000.000	39	1.491.313.178	41	2.047.834.525	42	2.558.685.709	42	2.842.936.892	Badan Kepegawaia n Dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan	Point	40	40		40		40		40		40		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Point	59	83		83		83		83		83		
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	30	32		32		32		32		32		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Point	60	60		60		60		60		60		
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Point	35	38		38		38		38		38		
	Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan	Point	14	17		17		17		17		17		
	Nilai Aspek Sistem Informasi	Point	16	18		18		18		18		18		
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Point	24,78	25		25		25		25		25		
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi	Point	5	5		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Disiplin													
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Point	26.61	30	3.183.190.000	31	3.183.190.000	33	3.183.190.000	37	3.183.190.000	37	3.183.190.000	Badan Kepegawaia n Dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Point	21.85	23		23		23		24		24		
INSPEKTORAT DAERAH														
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh mitra Irban I	Persen	90	92%	1.925.000.000	92%	2.117.500.000	93%	232.950.000	79	2.562.175.000	80	2.818.392.500	Inspektorat
	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh mitra Irban II	Persen	90	92%	1.925.000.000	92%	2.117.500.000	93%	232.950.000	79	2.562.175.000	80	2.818.392.500	
	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh mitra Irban III	Persen	90	92%	1.925.000.000	92%	2.117.500.000	93%	232.950.000	79	2.562.175.000	80	2.818.392.500	
	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh mitra Irban IV	Persen	90	92%	300.000.000	92%	325.000.000	93%	350.000.000	79	400.000.000	80	440.000.000	
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti SKPD Irban I	Persen	40%	76%	300.000.000	77%	325.000.000	78%	350.000.000	79	400.000.000	80	440.000.000	
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti SKPD Irban II	Persen	40%	76%	300.000.000	77%	325.000.000	78%	350.000.000	79	400.000.000	80	440.000.000	
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti SKPD Irban III	Persen	40%	76%	300.000.000	77%	325.000.000	78%	350.000.000	79	400.000.000	80	440.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti SKPD Irban IV	Persen	40%	76%	300.000.000	77%	325.000.000	78%	350.000.000	79	400.000.000	80	440.000.000	
	Persentase kasus Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan	Persen	60	76	250.000.000	77	275.000.000	78	300.000.000	79	325.000.000	80	357.500.000	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persen	40%	76	300.000.000	77	325.000.000	78	350.000.000	79	400.000.000	80	440.000.000	
	Persentase rekomendasi hasil audit SPBE pada Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	0	76	275.000.000	77	302.500.000	78	400.000.000	79	450.000.000	80	495.000.000	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP Provinsi yang diselesaikan Mitra Irban I	Persen	22,4	76	300.000.000	77	325.000.000	78	400.000.000	79	450.000.000	80	495.000.000	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang diselesaikan Mitra Irban II	Persen	22,4	76	300.000.000	77	325.000.000	78	400.000.000	79	450.000.000	80	495.000.000	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang diselesaikan Mitra Irban III	Persen	22,4	76	300.000.000	77	325.000.000	78	400.000.000	79	450.000.000	80	495.000.000	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang diselesaikan Mitra Irban IV	Persen	22,4	76	300.000.000	77	325.000.000	78	400.000.000	79	450.000.000	80	495.000.000	
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BLUD dan BUMD Mitra Irban I	Persen	0%	76	3.575.000.000	77	3.932.500.000	78	4.325.750.000	79	4.758.325.000	80	5.234.157.500	
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BLUD dan BUMD Mitra Irban II	Persen	0%	76	3.575.000.000	77	3.932.500.000	78	4.325.750.000	79	4.758.325.000	80	5.234.157.500	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BLUD dan BUMD Mitra Irban III	Persen	0%	76	3.575.000.000	77	3.932.500.000	78	4.325.750.000	79	4.758.325.000	80	5.234.157.500	
	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BLUD dan BUMD Mitra Irban IV	Persen	0%	76	3.575.000.000	77	3.932.500.000	78	4.325.750.000	79	4.758.325.000	80	5.234.157.500	
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evalulasi SAKIP	Persen	0	76	194.300.000	77	200.000.000	78	205.000.000	79	211.316.000	80	232.447.600	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase tindakanlanjut pendampingan Implementasi SPIP	Persen	0	76	85.000.000	77	87.000.000	78	88.000.000	79	91.200.000	80	100.320.000	
	Level Maturitas APIP	Level	3	3	80.278.000	3	88.305.000	3	97.136.380	3	106.850.018	3	117.535.020	
	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Point	75	76	54.420.000	77	59.862.200	78	72.443.020	79	79.676.322	80	87.643.954	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persen	80	80.02	500.000.000	80.03	500.000.000	80.04	500.000.000	80.05	500.000.000	80,05	500.000.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase usia pemilih yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik	Persen	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
	Persentase Kebutuhan Dukungan Peningkatan Stabilitas Politik yang Terpenuhi	Persen	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
	Persentase kebutuhan dukungan sumber daya Pemilu yang terpenuhi	Persen	100	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	Jumlah masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kerja sama kerukunan umat	Orang	100	120	200.000.000	130	200.000.000	140	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
Sosial, Dan Budaya	beragama (orang)													
	Jumlah masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang)	Orang	100	120	200.000.000	130	200.000.000	140	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan monitoring lokasi rawan konflik sosial yang terdeteksi dini	Persen	10	30	200.000.000	50	200.000.000	80	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
KEWILAYAHAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	89,56	90,00 - 90,50	7.084.528.962	91,00	7.473.757.414	91,50	7.837.441.430	>95	8.108.709.084,0	>95	8.300.669.339	KECAMATA N CIGUGUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	7.500.000	100	11.400.000	100	12.000.000	100	15.000.000,0	100	14.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	10,14	9,50	1.011.500.000	9,00	1.012.000.000	8,50	1.112.500.000	8,00	1.263.000.000,0	7,50	1.314.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	14,95	14	107.100.000	14	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000,0	12	60.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	10	9	7.005.000	8	20.000.000	7,5	20.000.000	7	20.000.000,0	7	13.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60	64	16.650.000	66	50.000.000	68	12.000.000	70	40.000.000,0	70	50.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	16.450.000	100	35.000.000	100	36.000.000	100	40.000.000,0	100	40.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100	10.000.000,0	100	8.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	4.900.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	10.000.000,0	100	8.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	89,56	90,00 - 90,50	7.084.528.962	91,00	7.473.757.414	91,50	7.837.441.430	>95	8.108.709.084,0	>95	8.300.669.339	KECAMATAN PANCALANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	7.500.000	100	11.400.000	100	12.000.000	100	15.000.000,0	100	14.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	10,14	9,50	1.011.500.000	9,00	1.012.000.000	8,50	1.112.500.000	8,00	1.263.000.000,0	7,50	1.314.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat	Persen	14,95											

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan			14	107.100.000	14	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000,0	12	60.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	10	9	7.005.000	8	20.000.000	7.5	20.000.000	7	20.000.000,0	7	13.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60	64	16.650.000	66	50.000.000	68	12.000.000	70	40.000.000,0	70	50.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	16.450.000	100	35.000.000	100	36.000.000	100	40.000.000,0	100	40.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100	10.000.000,0	100	8.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	4.900.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	10.000.000,0	100	8.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	1.216.944.975	100,0 0	1.297.399.051	100,0 0	1.306.399.051	100	1.508.302.048,0	100	1.565.320.648	KECAMATA N CIMAHI
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000,0	100	75.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	11,21	8,00	235.080.000	7,00	236.000.000	5,60	237.000.000	4,00	238.000.000,0	2,90	238.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	7,90	5,70		4,40		3,60		2,30		1,40		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7	5,60		4,30		3,50		2,90		1,60		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	6-,78	75,34		79,06		84,87		89,76		94,54		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000,0	100	75.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000,0	100	75.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000,0	100	75.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,47	92,00	1.879.756.081	92,75	1.984.194.123	93,25	2.054.989.008	94	2.154.373.345,0	95	2.215.122.789	KECAMATA N JAPARA
PROGRAM PENYELENGGARA AN	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	oleh Kecamatan													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	8,83	7,97	5.000.000	7,54	6.000.000	7,11	7.000.000	6,68	8.000.000,0	6,25	8.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	12,68	11,04	15.000.000	10,22	16.500.000	9,40	18.000.000	8,56	19.500.000,0	7,76	19.500.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7	6,56	5.000.000	6,43	6.000.000	6,28	7.000.000	6,13	8.000.000,0	5,98	8.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	61	66,52	15.000.000	69,52	16.500.000	72,52	18.000.000	75,52	19.500.000,0	78,52	19.500.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000,0	100	39.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000,0	100	13.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.000.000	100	52.000.000,0	100	52.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	2.029.715.360	100,0 0	2.096.142.312	100,0 0	2.180.447.302	100	2.304.045.990,0	100	2.366.776.259	KECAMATA N NUSAHERA NG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000,0	100	20.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	11,10 %	<10%	65.000.000	<9%	73.000.000	<8%	81.000.000	<7%	84.000.000,0	<6%	87.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	0,12	<10%		<9%		<8%		<7%		<6%		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7,64 %	<7,30 %		<7%		<6%		<5%		<4%		
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60	64		66		68		70		80		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentrman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	15.000.000	100	20.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000,0	100	15.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	23.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000,0	100	40.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	21.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	100	40.000.000,0	100	40.000.000	
PROGRAM PENUNJANG	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,47	91,50	2.289.295.080	92,00	2.370.632.341	92,50	245.016.104	93	2.598.272.413,0	94	2.675.169.176	KECAMATA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														N KRAMATM ULYA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100		100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	5,40	5,00	24.000.000	4,50	27.000.000	4,00	30.000.000	3,40	30.000.000,0	3,00	30.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	9,51	8	24.000.000	7	27.000.000	6	30.000.000	4	30.000.000,0	4	30.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	8	7	24.000.000	7	27.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000,0	5	30.000.000	
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60	64	24.000.000	66	27.000.000	68	30.000.000	70	30.000.000,0	75	30.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	24.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	98.000.000	100	102.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000,0	100	120.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	24.000.000	100	24.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
DESA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	80,00	>82	207.762.025	>83	2.125.186.468	>84	2.184.770.286	>85	2.245.836.387,0	>86	2.270.900.417	KECAMATA N MALEBER
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	20.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	100	55.000.000,0	100	55.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	12,50	12,00	20.000.000	11,50	20.000.000	11,00	20.000.000	10,50	20.000.000,0	10,00	20.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	8,35	7	10.000.000	7	15.000.000	7	20.000.000	7	25.000.000,0	6	30.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	9	8	10.000.000	8	15.000.000	8	20.000.000	7	25.000.000,0	7	30.000.000	
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60	64	10.000.000	66	15.000.000	68	20.000.000	70	25.000.000,0	75	30.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	30.000.000	100	45.000.000	100	60.000.000	100	75.000.000,0	100	90.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	53.000.000,0	100	60.000.000	KECAMATA N CIDAHU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,47	91,50	1.739.269.620	92,00	1.834.357.538	92,50	1.943.335.733	93	2.047.433.937,0	94	2.134.236.006	
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	19.500.000	100	20.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000,0	100	14.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	17,67	14,07	4.150.000	12,27	5.000.000	10,10	12.000.000	8,07	8.000.000,0	8,07	8.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	17,67	14	4.150.000	12	5.000.000	10	12.000.000	8	8.000.000,0	8	8.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7	6	4.150.000	6	5.000.000	6	8.000.000	5	8.000.000,0	5	8.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	40	44	4.150.000	46	5.000.000	48	8.000.000	50	8.000.000,0	50	8.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	23.498.500	100	23.498.500	100	15.499.500	100	16.499.500,0	100	16.499.000	
PROGRAM PENYELENGGARA	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum	Persen	100	100	55.513.100	100	55.513.100	100	45.523.100	100	49.523.100,0	100	48.923.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan													
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	33.520.000	100	33.520.000	100	23.520.000	100	24.520.000,0	100	11.670.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	86,90	87,10	2.055.365.857	87,20	2.056.391.063	87,30	2.082.783.683	87	2.082.783.683,0	88	2.107.929.778	KECAMATA N CIGANDAM EKAR
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000,0	100	10.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	11,55	10,55	40.000.000	10,05	50.000.000	9,55	90.000.000	9,05	110.000.000,0	8,55	110.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	23,38	22		21		20		19		18		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	6	5		5		4		4		3		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	21	24		26		28		30		31		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	80	84	10.000.000	86	10.000.000	88	10.000.000	90	10.000.000,0	91	10.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
UMUM														
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	34.800.000	100	40.000.000	100	60.000.000	100	80.000.000,0	100	80.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	92	93	35.872.000	94	37.000.000	94	37.000.000	95	60.000.000,0	95	90.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	89,56	90- 90,5	2.395.014.690	91,00	2.507.440.029	91,50	2.621.841.209	92	2.745.378.725,0	93	2.811.960.129	KECAMATA N CIBINGBIN
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100		100	16.612.027	100	27.426.054	100	39.476.151,0	100	46.192.720	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	11,32	9,50	18.200.000	9,00	18.964.585	8,50	19.830.120	8,00	20.764.488,0	7,50	21.268.072	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	6,57	6,00		5,50		5,00		4,50		4,00		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	9,50	9,00		8,00		7,00		6,00		5,00		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	18.200.000	100	18.964.855	100	19.830.120	100	20.764.448,0	100	21.268.072	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	38.860.000	100	28.718.209	100	30.028.468	100	31.443.368,0	100	32.205.938	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	9.100.000	100	9.482.427	100	9.915.060	100	10.382.245,0	100	10.634.037	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,00	>91,5	2.478.861.585	>92	2.478.861.585	>92,5	2.601.546.956	>93	2.734.283.170,0	>93	2.806.188.300	KECAMATA N KALIMANG GIS
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	35.000.000	100	37.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000,0	100	40.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	0,27	<19 %	10.000.000	< 16 %	10.000.000	< 13 %	15.000.000	< 13 %	15.000.000,0	< 10 %	15.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	0,15	< 13 %	10.000.000	< 12 %	10.000.000	< 11 %	15.000.000	< 11 %	15.000.000,0	< 10 %	15.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	26,90	<19		< 16		< 13		< 13		< 10		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	Tingkat Kecamatan		%	%	17.000.000	%	18.000.000	%	10.000.000	%	10.000.000,0	%	10.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	100	64	10.000.000	66	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000,0	70	10.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000,0	100	15.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	25.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	25.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100%	100%	1.891.549.633	100%	1.964.587.817	100%	2.031.956.755	100%	2.119.879.898,0	100%	2.180.380.043	KECAMATAN DARMA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	17.000.000,0	100%	17.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	15,40 %	13,0 %	15.000.000	12,5 %	17.000.000	12,0 %	20.000.000	11,5 %	22.000.000,0	11,0 %	22.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	4,30 %	3,00 %	5.000.000	2,50 %	7.000.000	2,00 %	10.000.000	1,50 %	12.000.000,0	1,00 %	12.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	5,30 %	4,50 %	5.000.000	4,00 %	7.000.000	3,50 %	10.000.000	3,00 %	12.000.000,0	2,50 %	12.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	50,00 %	54,00 %	5.000.000	56,00 %	7.000.000	58,00 %	10.000.000	60,00 %	12.000.000,0	62,00 %	12.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	17.000.000,0	100%	17.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	35.000.000	100%	41.000.000	100%	50.000.000	100%	56.000.000,0	100%	56.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	15.000.000	100%	21.000.000	100%	30.000.000	100%	36.000.000,0	100%	36.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	80%	82%	1.522.748.445	83%	1.652.748.445	84%	1.672.748.445	8500 %	1.692.946.856,0	86%	1.692.748.773	KECAMATA N CILEBAK
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	80%	85,91 %	30.000.000	87,75 %	30.000.000	90,30 %	60.000.000	96,40 %	60.000.000,0	97%	80.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PUBLIK														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	16%	8%	190.681.720	7%	150.681.720	5%	191.674.321	4%	229.681.720,0	2%	260.681.720	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	9%	4%		3%		2%		1%		0,07 %		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	11,63 %	5%		4%		3%		2%		1%		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	0%	14%		21%		28%		35%		42%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	90%	91,25 %	37.500.000	92%	69.500.000	93%	48.500.000	93,50 %	48.500.000,0	94% %	70.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	89%	91%	74.500.000	92%	54.500.000	93%	74.500.000	93,50 %	74.500.000,0	94%	94.100.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	90%	91,80 %	52.500.000	94,50 %	43.463.828	97,50 %	52.500.000	99%	52.500.000,0	100%	67.076.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	79,83 %	79,85 %	2.243.103.974	79,87 %	2.355.259.173	79,90 %	2.473.022.131	80,92 %	2.596.673.238,0	79,90 %	2.648.606.703	KECAMATA N GARAWAN GI
PROGRAM	Persentase Perencanaan dan	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan				12.000.000		12.263.685		12.481.435		13.223.656,0		15.332.419	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	13,70 %	11,00 %	73.778.341	10,70 %	75.657.164	9,70 %	78.684.098	8,00 %	84.275.855,0	7,70 %	96.242.229	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	19,06 %	17,05 %		15,08 %		14,01 %		12,10 %		10,09 %		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7,79 %	7,35 %		7,02 %		6,83 %		6,10 %		5,75 %		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	79,83 %	76,50 %		74,88 %		72,99 %		70,84 %		69,90 %		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	13.185.560	100%	13.647.055	100%	15.011.761	100%	16.512.937,0	100%	18.164.230	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	12.000.000	100%	12.263.685	100%	12.481.435	100%	13.223.656,0	100%	15.332.419	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	12.000.000	100%	12.263.685	100%	12.481.435	100%	13.223.656,0	100%	15.332.419	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	89,56 %	90- 90,50 %	1.669.993.513	91,00 %	1.732.310.882	91,50 %	1.789.218.298	92,00 %	1.852.814.183,0	92,50 %	1.886.191.371	KECAMATA N PASAWAHA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
DAERAH KABUPATEN/KOTA														N
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	24.150.000	100%	30.150.000	100%	34.650.000,0	100%	38.150.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	18,00 %	14,00 %	15.000.000	12,00 %	19.150.000	10,00 %	25.150.000	8,00 %	31.650.000,0	6,00 %	35.150.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	6%	5,90 %	10.000.000	5,80 %	14.150.000	5,70 %	20.150.000	5,60 %	26.650.000,0	5,50 %	30.150.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	8,50 %	7,50 %	10.000.000	7%	14.150.000	6,50 %	20.150.000	5%	26.650.000,0	5%	30.150.000	
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60%	100%	10.000.000	100%	14.150.000	100%	20.150.000	100%	26.650.000,0	100%	30.150.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100	20.000.000	100%	24.150.000	100%	30.150.000	100%	34.650.000,0	100%	38.150.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	60.000.000	100%	72.450.000	100%	90.450.000	100%	109.950.000,0	100%	120.450.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100	20.000.000	100	24.150.000	100	30.150.000	100%	34.650.000,0	100%	38.150.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	80,50 %	81,85 %	12.460.167.437	82,35 %	12.291.717.038	82,35 %	12.413.978.123	82,35 %	12.534.043.014,0	82,35 %	12.652.573.874	KECAMATA N KUNINGAN
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	10.000.000	100	17.000.000	100	27.000.000	100	55.000.000,0	100%	60.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	8%	8,23 %	40.000.000	8,19 %	15.000.000	8,19 %	18.500.000	8,07 %	30.000.000,0	8,02 %	37.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	3,62 %	2,62 %	53.000.000	2,12 %	22.500.000	1,62 %	25.000.000	1,12 %	35.000.000,0	1,12 %	42.500.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7,94 %	6,94 %	1.000.000.000	6,44 %	1.005.000.000	5,94 %	100.650.000	5,44 %	100.800.000,0	5,44 %	1.010.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	25%	30%	1.030.000.000	40%	1.506.000.000	50%	1.655.000.000	60%	1.805.000.000,0	70%	195.650.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100	10.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100	20.000.000,0	100	22.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	10.000.000	100%	26.000.000	100%	57.000.000	100	80.000.000,0	100%	90.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan	Persen	100%	100	10.000.000	100	14.000.000	100	25.000.000	100%	34.500.000,0	100%	42.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	pemerintah													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	84,87 %	86,00 %	2.249.583.432	91,00 %	2.359.677.871	91,00 %	2.476.997.586	92,00 %	2.604.022.582,0	92,00 %	2.672.702.783	KECAMATA N CIPICUNG
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	29.914.748	100	31.260.750	100	32.687.012	100	34.227.178,0	100%	35.057.262	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	8,21 %	8,00 %	5.000.000	8,00 %	5.000.000	8,00 %	5.000.000	7,00 %	5.000.000,0	7,00 %	5.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	8,61 %	8%	4.943.165	7%	5.840.500	7%	6.791.341	6%	7.818.119,0	6%	8.371.508	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	8,58 %	7,18 %	5.000.000	6,49 %	5.000.000	5,12 %	5.000.000	4,45 %	5.000.000,0	4,45 %	5.000.000	
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	5%	900%	5.000.000	11%	5.000.000	13%	5.000.000	15%	5.000.000,0	15%	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	19.943.165	100%	20.840.500	100%	21.791.341	100%	22.818.119,0	100%	23.371.508	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	49.857.913	100%	52.101.249	100%	54.478.353	100%	57.045.297,0	100%	58.428.769	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
UMUM														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	9.971.582	100%	10.420.250	100%	10.895.670	100%	11.409.059,0	100%	11.685.754	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100%	100%	1.775.458.142	100%	1.855.344.159	100%	1.939.993.665	100%	2.031.403.472,0	100%	2.080.669.424	KECAMATA N CIBEUREU M
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	19.943.165	100%	20.840.500	100%	21.791.341	100%	22.818.119,0	100%	23.371.508	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	12,00	11,00 %	35.429.205	10,00 %	44.262.178	9,00 %	54.152.403	9,00 %	64.123.751,0	9,00 %	71.210.652	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	9,54 %	9,25 %		8,95 %		8,50 %		7,50 %		7,50 %		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	9,54 %	9,25 %		8,95 %		8,50 %		7,50 %		7,50 %		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	3,52 %	4,20 %		4,80 %		4,95 %		5,10 %		5,25 %		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	19.943.000	100%	20.840.000	100%	21.791.000	100%	22.818.000,0	100%	23.371.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	85%	87%	49.857.000	87%	52.101.000	90%	54.478.000	90	58.045.000,0	92%	58.428.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	10000 %	100	39.886.000	100	41.680.000	100	43.582.000	100%	45.636.000,0	100%	46.743.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	80%	82%	1.770.294.852	84%	1.795.090.341	84%	1.869.997.460	84%	1.958.458.469,0	84%	1.994.492.662	KECAMATA N SINDANGA GUNG
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	82%	83%	40.000.000	84%	40.000.000	84%	50.000.000	84%	60.000.000,0	85%	70.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	15%	<13%	20.000.000	<12%	80.000.000	<11%	85.000.000	<10%	88.000.000,0	<10%	90.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	15%	<13%		<12%		<11%		<10%		<10%		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	15%	<13%		<12%		<11%		<10%		<10%		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	15%	<13%		<12%		<11%		<10%		<10%		
PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000,0	100%	20.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kecamatan yang diatasi													
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	84%	85%	40.000.000	85%	40.000.000	86%	40.000.000	87%	40.000.000,0	87%	40.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	83%	85%	40.000.000	86%	40.000.000	87%	40.000.000	88%	40.000.000,0	89%	40.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	89,56 %	90- 90,50 %	2.584.547.934	91,00 %	2.715.326.934	91,50 %	2.843.803.174	92%	2.982.906.124,0	92,50 %	3.149.280.000	KECAMATA N CIAWIGEBA NG
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000,0	100%	29.282.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	16%	16,60 %	20.000.000	15,50 %	22.000.000	15,25 %	24.200.000	15,00 %	26.620.000,0	14,50 %	29.282.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	8,27 %	7,50 %		7,00 %		6,50 %		6,00 %		5,50 %		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	8,06 %	7,80 %		7,00 %		6,75 %		6,00 %		5,80 %		
	Persentase Sampah yang	Persen	30%	40%		45%		50%		55%		60%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	terkelola di Tingkat Kecamatan													
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000,0	100%	29.282.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	40.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	39.930.000,0	100%	43.923.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000,0	100%	28.600.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90%	90- 90,5 %	2,348,996,221	91,00 %	2,433,163,409	91,50 %	2,558,702,905	92,00 %	2,697,879,572	92,50 %	2,755,111,632	KECAMATA N JALAKSAN A
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	18,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	10,14 %	9,50 %	62.000.000	9,00 %	76.000.000	8,50 %	72,000,000	8,00 %	72,000,000	7,50 %	79,000,000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	10,14 %	9,50 %		9,00 %		8,50 %		8,00 %		7,50 %		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH	
				2026		2027		2028		2029		2030			
KELURAHAN	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	10,14 %	9,50 %		9,00 %		8,50 %		8,00 %		7,50 %			
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	10,14 %	9,50 %		9,00 %		8,50 %		8,00 %		7,50 %			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000		
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	35,500,000	100%	47,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	10,000,000	100%	14,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	18,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,47 %	91,50 %	2.376.311.819	95,50 %	2.370.693.378	95,50 %	2.385.334.345	95,50 %	2.400.805.017,0	95,50 %	2.415.682.692		KECAMATA N CINIRU
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
PROGRAM	Persentase Penduduk Miskin	Persen	18,82	18,40		18,20		18,00		18,00		18,00			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kecamatan		%	%	55.000.000	%	55.000.000	%	55.000.000	%	55.000.000,0	%	55.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	18,82 %	18,40 %		18,20 %		18,00 %		18,00 %		18,00 %		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	18,82 %	18,40 %		18,20 %		18,00 %		18,00 %		18,00 %		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	18,82 %	18,40 %		18,20 %		18,00 %		18,00 %		18,00 %		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	80%	84%	15.000.000	86%	15.000.000	88%	15.000.000	90%	15.000.000,0	90%	15.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	40.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000,0	100%	65.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	92%	93%	15.000.000	94%	15.000.000	94%	15.000.000	95%	15.000.000,0	95%	15.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,00	90,00	2.047.873.161	92,00	2.088.188.161	93,00	2.220.497.622	93,50	2.296.587.139,0	93,50	2.296.587.139	KECAMATA N CIWARU
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	10.000.000	100,0 0	11.000.000	100,0 0	12.000.000	100,0 0	13.000.000,0	100,0 0	14.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
DAN PELAYANAN PUBLIK														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	10,14	9,50	103.600.000	9,00	105.400.000	8,50	114.450.000	8,00	120.900.000,0	7,50	131.400.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	15,20	13,00	7.000.000	12,50	20.000.000	11,00	20.000.000	10,50	8.000.000,0	10,00	20.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	26,50	19,50	7.000.000	16,00	11.000.000	13,00	12.000.000	12,00	12.000.000,0	10,00	13.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60,00	64,00	15.000.000	66,00	11.000.000	68,00	12.000.000	70,00	13.000.000,0	70,00	14.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100,0 0	100,0 0	31.000.000	100,0 0	31.000.000	100,0 0	35.000.000	100,0 0	36.000.000,0	100,0 0	37.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	5.000.000	100,0 0	5.000.000	100,0 0	6.000.000	100,0 0	6.000.000,0	100,0 0	7.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100,0 0	100,0 0	4.900.000	100,0 0	5.500.000	100,0 0	6.000.000	100,0 0	7.000.000,0	100,0 0	8.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	2.124.018.762	100,0 0	2.297.400.300	100,0 0	2.297.400.300	100,0 0	2.297.400.300,0	100,0 0	2.297.400.300	KECAMATA N HANTARA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	25.000.000	100,0 0	75.000.000	100,0 0	75.000.000	100,0 0	75.000.000,0	100,0 0	75.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	11	8,00	20.000.000	7,00	47.000.000	5,60	49.000.000	4,00	49.000.000,0	2,90	51.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	7,90	5,70		4,40		3,60		2,30		1,40		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7,00	5,60		4,30		3,50		2,90		1,60		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60,78	75,34		79,06		84,87		89,76		94,54		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100,0 0	100,0 0	-	100,0 0	-	100,0 0	-	100,0 0	-	100,0 0	-	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	45.000.000	100,0 0	95.000.000	100,0 0	97.000.000	100,0 0	99.000.000,0	100,0 0	101.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100,0 0	100,0 0	10.000.000	100,0 0	95.000.000	100,0 0	101.000.000	100,0 0	104.000.000,0	100,0 0	106.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	81,20	83,00	2.171.525.776	84,00	2.268.572.362	85,00	2.339.798.370	86,00	2.416.725.311,0	87,00	2.468.335.771,00	KECAMATA N

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														KADUGEDE
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	86,00	100,00	15.000.000	100,00	20.000.000	100,00	25.000.000	100,00	35.000.000,0	100,00	35.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	9,59	8,00	30.000.000	7,60	35.000.000	7,60	50.000.000	7,20	60.000.000,0	6,80	70.000.000,00	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	9,16	8,50		8,00		7,50		7,30		6,80		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	9,16	8,50		8,00		7,50		7,30		6,80		
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	62,00	66,00		68,00		70,00		70,00		70,00		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100,00	100,00	8.000.000	100,00	10.000.000	100,00	12.000.000	100,00	14.000.000,0	100,00	16.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	24.000.000	100,00	25.000.000	100,00	34.000.000	100,00	57.000.000,0	100,00	57.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100,00	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	25.000.000	100,00	30.000.000,0	100,00	35.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	94	96,30	1.717.790.035	97,25	1.798.311.925	97,80	1.880.174.209	98,90	1.967.028.113,0	99,00	2.010.242.094,00	KECAMATA N SUBANG
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	80	85,91	20.000.000	87,75	22.000.000	90,30	25.000.000	96,40	27.400.000,0	97,00	30.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	23	22,50	15.000.000	22,00	17.500.000	21,50	20.000.000	21,00	21.000.000,0	20,50	21.000.000,00	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	4	3,90		3,80		3,70		4,60		3,50		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	5	4,70		4,60		4,50		4,40		4,30		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	10	14,00		16,00		18,00		20,00		22,00		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	85	88,90	17.500.000	92,00	18.000.000	94,35	21.000.000	95,00	25.000.000,0	97,00	27.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	75	81,90	54.500.000	85,00	57.000.000	89,75	59.000.000	92,75	65.000.000,0	94,00	70.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan	Persen	85	91,80	12.500.000	94,50	14.000.000	97,50	17.000.000	99,00	20.000.000,0	100,0	23.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	pemerintah											0		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	2.241.752.462	100,0 0	2.301.500.500	100,0 0	2.301.500.500	100,0 0	2.301.500.500,0	100,0 0	2.301.500.500,00	KECAMATA N LEBAKWAN GI
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	20.000.000	100,0 0	65.000.000	100,0 0	75.000.000	100,0 0	75.000.000,0	100,0 0	75.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	11,21	8,00	20.000.000	7,00	45.000.000	5,60	47.000.000	4,00	49.000.000,0	2,90	51.000.000,00	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	7,90	5,70		4,40		3,60		2,30		1,40		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7,00	5,60		4,30		3,50		2,90		1,60		
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60,78	75,34		79,06		84,87		89,76		94,54		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100,0 0	100,0 0	20.000.000	100	25.000.000	100,0 0	25.000.000	100,0 0	25.000.000,0	100,0 0	25.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100,0 0	100,0 0	20.000.000	100	30.000.000	100,0 0	45.000.000	100,0 0	55.000.000,0	100,0 0	60.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
UMUM														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100,0 0	100,0 0	20.000.000	100	85.000.000	100,0 0	101.000.000	100,0 0	104.000.000,0	100,0 0	106.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	90,00	>91,5	2.478.861.585	>92	2.478.861.585	>92,5	2.601.546.956	>93	2.734.283.170,0	>93	2.806.188.300	KECAMATA N CILIMUS
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100	100	35.000.000	100	37.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000,0	100	40.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	0,27	<19 %	10.000.000	< 16 %	10.000.000	< 13 %	15.000.000	< 13 %	15.000.000,0	< 10 %	15.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	0,15	< 13 %	10.000.000	< 12 %	10.000.000	< 11 %	15.000.000	< 11 %	15.000.000,0	< 10 %	15.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	26,90 %	<19 %	17.000.000	< 16 %	18.000.000	< 13 %	10.000.000	< 13 %	10.000.000,0	< 10 %	10.000.000	
	Persentase Sampah yang dikelola di Tingkat Kecamatan	Persen	100	64	10.000.000	66	10.000.000	68	10.000.000	68	10.000.000,0	70	10.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000,0	100	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	25.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100	100	25.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000,0	100	30.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	100%	100%	1.891.549.633	100%	1.964.587.817	100%	2.031.956.755	100%	2.119.879.898,0	100%	2.180.380.043	KECAMATA N KARANGKA NCANA
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	17.000.000,0	100%	17.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	15,40 %	13,0 %	15.000.000	12,5 %	17.000.000	12,0 %	20.000.000	11,5 %	22.000.000,0	11,0 %	22.000.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	4,30 %	3,00 %	5.000.000	2,50 %	7.000.000	2,00 %	10.000.000	1,50 %	12.000.000,0	1,00 %	12.000.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	5,30 %	4,50 %	5.000.000	4,00 %	7.000.000	3,50 %	10.000.000	3,00 %	12.000.000,0	2,50 %	12.000.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	50,00 %	54,00 %	5.000.000	56,00 %	7.000.000	58,00 %	10.000.000	60,00 %	12.000.000,0	62,00 %	12.000.000	
PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban	Persen	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	17.000.000,0	100%	17.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kecamatan yang diatasi													
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	35.000.000	100%	41.000.000	100%	50.000.000	100%	56.000.000,0	100%	56.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	15.000.000	100%	21.000.000	100%	30.000.000	100%	36.000.000,0	100%	36.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	80%	82%	1.522.748.445	83%	1.652.748.445	84%	1.672.748.445	8500 %	1.692.946.856,0	86%	1.692.748.773	KECAMATA N LURAGUNG
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	80%	85,91 %	30.000.000	87,75 %	30.000.000	90,30 %	60.000.000	96,40 %	60.000.000,0	97%	80.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	16%	8%	190.681.720	7%	150.681.720	5%	191.674.321	4%	229.681.720,0	2%	260.681.720	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	9%	4%		3%		2%		1%		0,07 %		
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	11,63 %	5%		4%		3%		2%		1%		
	Persentase Sampah yang	Persen	0%	14%		21%		28%		35%		42%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
	terkelola di Tingkat Kecamatan													
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	90%	91,25 %	37.500.000	92%	69.500.000	93%	48.500.000	93,50 %	48.500.000,0	94% %	70.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	89%	91%	74.500.000	92%	54.500.000	93%	74.500.000	93,50 %	74.500.000,0	94%	94.100.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	90%	91,80 %	52.500.000	94,50 %	43.463.828	97,50 %	52.500.000	99%	52.500.000,0	100%	67.076.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	79,83 %	79,85 %	2.243.103.974	79,87 %	2.355.259.173	79,90 %	2.473.022.131	80,92 %	2.596.673.238,0	79,90 %	2.648.606.703	KECAMATA N MADIRANC AN
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	12.000.000	100%	12.263.685	100%	12.481.435	100%	13.223.656,0	100%	15.332.419	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Persen	13,70 %	11,00 %	73.778.341	10,70 %	75.657.164	9,70 %	78.684.098	8,00 %	84.275.855,0	7,70 %	96.242.229	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	0,19	17,05 %		15,08 %		14,01 %		12,10 %		10,09 %		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
KELURAHAN	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	7,79 %	7,35 %		7,02 %		6,83 %		6,10 %		5,75 %		
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	79,83 %	76,50 %		74,88 %		72,99 %		70,84 %		69,90 %		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100%	13.185.560	100%	13.647.055	100%	15.011.761	100%	16.512.937,0	100%	18.164.230	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	12.000.000	100%	12.263.685	100%	12.481.435	100%	13.223.656,0	100%	15.332.419	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100%	12.000.000	100%	12.263.685	100%	12.481.435	100%	13.223.656,0	100%	15.332.419	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	Persen	89,56 %	90- 90,50 %	1.669.993.513	91,00 %	1.732.310.882	91,50 %	1.789.218.298	92,00 %	1.852.814.183,0	92,50 %	1.886.191.371	KECAMATA N SELAJAMB E
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang terfasilitasi oleh Kecamatan	Persen	100%	100%	20.000.000	100%	24.150.000	100%	30.150.000	100%	34.650.000,0	100%	38.150.000	
PROGRAM	Persentase Penduduk Miskin	Persen	18,00	14,00		12,00		10,00		8,00		6,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET										PERANGK AT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kecamatan		%	%	15.000.000	%	19.150.000	%	25.150.000	%	31.650.000,0	%	35.150.000	
	Prevelensi Stunting Tingkat Kecamatan	Persen	6%	5,90 %	10.000.000	5,80 %	14.150.000	5,70 %	20.150.000	5,60 %	26.650.000,0	5,50 %	30.150.000	
	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kecamatan	Persen	8,50 %	7,50 %	10.000.000	7% %	14.150.000	6,50 %	20.150.000	5% %	26.650.000,0	5% %	30.150.000	
	Persentase Sampah yang terkelola di Tingkat Kecamatan	Persen	60%	100%	10.000.000	100%	14.150.000	100%	20.150.000	100%	26.650.000,0	100%	30.150.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan yang diatasi	Persen	100%	100	20.000.000	100%	24.150.000	100%	30.150.000	100%	34.650.000,0	100%	38.150.000	
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyrakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	60.000.000	100%	72.450.000	100%	90.450.000	100%	109.950.000,0	100%	120.450.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang patuh terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah	Persen	100%	100	20.000.000	100	24.150.000	100	30.150.000	100%	34.650.000,0	100%	38.150.000	

Sumber: Hasil olahan Bappeda, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menjadi acuan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap program yang akan dilaksanakan berlandaskan pada rencana strategis masing-masing perangkat daerah dan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Secara umum, program-program tersebut terbagi ke dalam urusan wajib dan pilihan, dengan pendekatan kinerja yang terukur melalui indikator sasaran dan output kegiatan. Perangkat Daerah merancang program kerja yang mendukung visi-misi pembangunan daerah, dengan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan sub-kegiatan yang terstruktur. Program Perangkat Daerah yang menjadi prioritas pembangunan yaitu program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, potensi wilayah kabupaten kuningan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III bahwa Pertanian dan pariwisata merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan dalam mengatasi isu-isu strategis terutama dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran yang terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Namun selain dari hal tersebut apabila dilihat dari kontribusi PDRB Kabupaten Kuningan, terdapat 5 sektor unggulan (PANCAGATRA) yang memiliki kontribusi terbesar, diantaranya adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan; Transportasi dan pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Pendidikan; dan konstruksi. Kelima sektor ini telah menjadi penyumbang terbesar perekonomian di kabupaten kuningan, sehingga hal ini menjadi potensi untuk terus didorong dalam meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus dapat menjadi potensi pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 4. 2 Sektor Unggulan PDRB Kabupaten Kuningan (Pancagatra)

Sektor PDRB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,60	23,91	23,80	23,73	23,23
Transportasi dan Pergudangan	14,02	13,65	14,75	15,96	17,66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	14,00	14,06	13,91	13,60	13,43

Sektor PDRB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sepeda Motor					
Jasa Pendidikan	12,42	12,54	12,32	12,06	11,61
Konstruksi	8,16	8,70	8,58	8,45	8,07

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya untuk indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) memuat IKU daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran

RPJMD dan merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah, Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

N o	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75,02	80	82	84	86	88	88	90	Sekretariat Daerh	Indikator Sasaran RPJMD
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	2,274	2,275	2,276	2,276	2,277	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Utama Pembangunan an RPJPD
3	Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	13,52	13,55	13,58	13,58	13,6	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
4	Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen	N/a	10	10	15	15	25	25	25	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	2,09	2,13	2,16	2,16	2,16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indikator Utama Pembangunan an RPJPD
6	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	23,23	24,49	24,57	24,64	24,72	24,8	24,8	24,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan an RPJPD
											Dinas Perikanan dan Peternakan	
7	Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	2.725	2.775	2.825	2.825	2.825	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Sasaran RPJMD
											Dinas Perikanan dan Peternakan	
8	Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	17,66	14,43-18,13	14,37-18,53	14,31-18,93	14,26-19,33	14,20-19,72	14,20-19,72	14,09-20,12	Dinas Perhubungan	Indikator Utama Pembangunan an RPJPD
9	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	-	64,98	65,93	66,88	67,82	68,77	68,77	69,72	Bappeda	Indikator

N O	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Pada Pilar Ekonomi											Utama Pembangun an RPJPD
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	7,58-8,69	7,45-8,57	7,33-8,46	7,21-8,35	7,21-8,35	6,27- 6,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,4	24,43	24,47	24,5	24,53	24,53	24,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
12	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29.82	30	32	34	36	38	38	40	Bappeda	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)	Poin	62,68	62,84	63	63,16	63,32	63,48	63,48	63,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	88,36	88,48	88,6	88,6	88,72	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
15	Indeks Perlindungan Anak	Persen	N/a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
16	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	0,9	Dinas Pengendalian Penduduk,	Indikator Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
											Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
17	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Poin	N/a	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
18	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kategori	n/a	63	65	67	69	71	71	73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
20	Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton CO2eq	N/a	393.756,10	512.676,81	631.597,53	750.518,24	869.438,96	869.438,96	988.35 9,67	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
21	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	79,84	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	76,49	76,9	77,33	77,75	78,18	78,61	78,61	79,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
23	Rata-Rata lama	Tahun	7,9	8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	9,7	10,1	Dinas Pendidikan	Indikator

N O	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)										dan Kebudayaan	Utama Pembangun an RPJPD
24	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27	12,37	12,43	12,49	12,54	12,60	12,60	12,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
25	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	75,66	75,86	76,06	76,06	76,25	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
26	Prevalensi Stunting	Persen	22,7	20,51	19,71	18,92	18,12	17,33	17,33	16,53	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
27	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,50	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	8,26-9,30	7,72- 8,75	Dinas Sosial	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
28	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	3,82	3,61	3,4	3,4	3,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
29	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,4	2,6	2,8	3,01	3,21	3,21	3,41	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
30	Indeks Desa Membangun (ID)	Poin	0,79	0,78	0,8	0,83	0,85	0,87	0,87	0,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
31	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
32	Persentase Kualitas infrastruktur	Poin	81,9	83,61	85,42	85,96	86,53	87,08	87,08	87,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
33	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	N/a	78,60	79,73	80,85	81,98	83,11	83,11	84,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	Indikator Utama Pembangun an RPJPD
34	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	130	129	127,95	126,89	125,84	124,79	124,79	123,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indikator Utama Pembangun an RPJPD

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
	Aspek Geografi dan Demografi										
1	Penanganan Kerawanan Pangan	Desa	8	10	12	14	16	18	18	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	3,82	3,61	3,4	3,4	3,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,4	2,6	2,8	3,01	3,21	3,21	3,41	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*	Persen	0	5,4	9,16	12,93	16,69	20,45	20,45	20,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	0	5,66	9,56	13,46	17,37	21,27	21,27	21,27	Dinas Lingkungan Hidup
7	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	N/a	7,14	7,58	8,02	8,46	8,9	8,9	9,35	Dinas Lingkungan Hidup
9	Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ eq)	Ton CO ₂ eq	N/a	393.756,10	512.676,81	631.597,53	750.518,24	869.438,96	869.438,96	988.359,67	Dinas Lingkungan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
											Hidup
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	130	129	127,95	126,89	125,84	124,79	124,79	123,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,73	0,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	0,9	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
		Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	0,9	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,61	5,18-5,71	5,20-5,76	5,21-5,81	5,23-5,86	5,24-5,91	5,24-5,92	5,56-6,19	-
2	Kontribusi PDRB Kabupaten/kota	Persen	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	2,3	1,31	-
3	Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,1	3,3 – 3,9	3,18-3,86	3,06-3,82	2,95-3,78	2,83-3,75	2,83-3,76	2,7-3,7	-
4	Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	poin	-	64,98	65,93	66,88	67,82	68,77	69,77	69,72	Bappeda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	7,58-8,69	7,45-8,57	7,33-8,46	7,21-8,35	7,21-8,36	6,27-6,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,4	24,43	24,47	24,5	24,53	24,53	24,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,56	71,65	71,75	72,07	72,39	72,71	72,71	73,03	-
8	Pengeluaran Per Kapita	ribu	10.418,00	10.599,49	10.781,49	10.963,48	11.145,48	11.327,47	11.327,47	11.509,47	-
9	PDRB per Kapita	juta/kap/Tahun	29,27	29,09-29,45	32,16-35,41*	32,68-62,13	34,48-63,93	36,27-65,72	36,27-65,73	38,07-67,52	-
10	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,50	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	8,26-9,31	7,72-8,75	Dinas Sosial
11	Indeks Gini	Poin	0,379	0,34-0,347	0,339-0,346	0,337-0,346	0,336-0,345	0,334-0,345	0,334-0,346	0,333-0,344	-
12	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,82	3,51	3,85	3,89	3,94	3,98	3,98	4,02	-
13	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29.82	30	32	34	36	38	38	40	Bappeda
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	62,68	62,84	63	63,16	63,32	63,48	63,48	63,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	88,36	88,48	88,6	88,6	88,72	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
16	Indeks Perlindungan Anak	Poin	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	55	55,9	56,3	56,7	60,11	60,15	60,15	60,20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,9	8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	9,7	10,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27	12,37	12,43	12,49	12,54	12,6	12,6	12,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	75,66	75,86	76,06	76,06	76,25	Dinas Kesehatan
21	Prevalensi Stunting	Persen	22,7	20,51	19,71	18,92	18,12	17,33	17,33	16,53	Dinas Kesehatan
22	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,64	0,66	Bagian Kesra Setda
	Aspek Daya Saing Daerah										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	2,274	2,275	2,276	2,276	2,277	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	13,52	13,55	13,58	13,58	13,6	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen	0	10	10	15	15	25	25	25	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	2,09	2,13	2,16	2,16	2,16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan,	Persen	23,23	24,49	24,5674	24,6447	24,7221	24,7995	24,7995	24,7995	Dinas Ketahanan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
	Perkebunan dan Perikanan (%)										Pangan dan Pertanian
											Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	17,66	14,43-18,13	14,37-18,53	14,31-18,93	14,26-19,33	14,20-19,72	14,20-19,73	17,66	Dinas Perhubungan
7	Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	2.725	2.775	2.825	2.825	2.835	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	poin	0	0,783	0,80495	0,82689	0,84884	0,87079	0,87079	0,87079	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Persentase Kualitas infrastruktur	poin	81,9	84,66	86,96	87,74	88,26	88,8	88,8	88,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	0	78,6	79,73	80,85	81,98	83,11	83,11	83,11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
	Aspek Pelayanan Umum										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,4	75,41	75,42	75,43	75,44	75,45	75,45	75,45	
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	76,5	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
3	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12,06	16,33	16,79	17,68	18,52	19,43	19,43	21,66	Badan Perencanaan Pendapatan Daerah
4	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	76,5	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	0	70	70,2632	70,5263	70,7895	71,0526	71,0526	71,0526	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indikator Kinerja Kunci										
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	75,4	75,41	75,42	75,43	75,44	75,45	75,45	75,45	Sekretariat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin	77,47	78,50	79,50	80,50	81,50	82,50	82,50	83,50	Sekretariat DPRD
3	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP	Predikat	B	B	B	B	A	A	A	A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP	Predikat	B	B	B	B	A	A	A	A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	Poin	0	80	83	85	86	88	88	90	Badan Perencanaan Pendapatan Daerah
6	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Indeks Sistem Merit	Poin	289	300	325	327	329	330	330	330	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8	Indeks Profesionalitas ASN	poin	78,23	81	83	84	86	91	91	91	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
9	Indeks Keamanan informasi	poin	-	350	355	360	365	370	370	375	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	-	2,8	3	3,2	3,4	3,5	3,5	3,7	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Predikat	CC	B	B	B	B	B	B	B	Disarsipus
12	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	90	91	92	92	93	93	93	94	Inspektorat
14	Nilai SAKIP Pemerintah	Katagori	BB	A	A	A	A	A	A	A	Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
	Daerah										
	dimensi evaluasi										
15	Level/ Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
16	Nilai survei penilaian integritas	Nilai	-	72	74	76	78	80	80	82	Inspektorat
17	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan	Persen	90,87	91,71	92,07	92,43	92,79	93,15	93,15	93,15	Disdukcapil
18	Cakupan Kepemilikan KTP-EL	Persen	99,06	99,06	99,1	99,15	99,2	99,25	99,25	99,25	Disdukcapil
19	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	55,2	60	61	62	63	64	64	64	Disdukcapil
20	Cakupan Kepemilikan Akta	Persen	96,36	96,37	96,38	96,39	96,4	96,41	96,41	96,41	Disdukcapil
	Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun										
21	Persentase Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
	Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian										
22	Persentase Fasilitasi Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
23	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
24	Persentase OPD yang telah	Persen	76,36	78,18	80	81,82	83,64	85,45	85,45	85,45	Disdukcapil
	memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan										
	Perjanjian Kerja sama										
25	Persentase Pemenuhan Target	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
	Kerja sama Pemanfaatan Dokumen dan Inovasi Administrasi Kependudukan										
26	Persentase Penyelesaian Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Kepada Camat	Persen	86,5	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Cigugur
27	Nilai PDRB Industri Pengolahan	Milyar	850,8	908,17	965,54	1022,91	1080,28	1137,64	1137,64	850,8	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
28	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Milyar	4.773,35	5054,77	5358,16	5661,56	5964,95	6268,34	6268,34	6571,73	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
29	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	-	15	15	20	25	25	25	100	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
30	Persentase UMKM Naik kelas	Persen	-	15	20	20	20	25	25	100	Dinas KUKM, Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
											dan Perindustrian
31	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	-	3	4	5	6	7	7	7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
32	Nilai PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	Persen	-	24,49	24,5674	24,6447	24,7221	24,7995	24,7995	24,7995	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
											Dinas Perikanan dan Peternakan
33	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Poktan	2573	2623	2673	2725	2775	2825	2825	2825	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
34	Nilai PDRB sektor Transportasi	Persen	19,94	20,34	20,74	21,14	21,54	21,94	21,94	21,94	Dinas Perhubungan
35	Produksi Perikanan Budidaya Ikan Kecil	Ton	27.000	30500	32500	33500	34500	35.000	35.000	35.500	Dinas Perikanan dan Peternakan
36	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	420	450	475	500	525	550	550	550	Dinas Perikanan dan Peternakan
37	Produksi Perikanan Hasil Perikanan	Ton	250	275	300	325	350	375	375	375	Dinas Perikanan dan Peternakan
38	Populasi Ternak	Ekor	4678	4702	4725	4800	4900	5000	5000	5000	Dinas Perikanan dan Peternakan
39	Pelayanan Kesehatan Hewan	Persen	7	8	10	12	15	17	17	17	Dinas Perikanan dan Peternakan
40	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	IDR Juta/Orang	33,96	49,55	55,56	58,89	61,17	62,63	62,63	63,49	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
41	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	IDR Juta/Orang	76,5	78,78	91,68	99,57	107,47	115,26	115,26	123,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Persentase tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang terserap/ bekerja di perusahaan dan berwirausaha	Persen	-	50	52,5	55	57,5	60	60	60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	Persen	-	70	75	80	85	90	90	90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	-	44,42	44,44	44,45	44,47	44,48	44,48	44,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45	Meningkatnya Perusahaan yang menerap kan tata kelola kerja yang layak	Persen	-	44,42	44,4358	44,4516	44,4674	44,4832	44,4832	44,4832	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46	Nilai Realisasi Investasi	Triliun	1,85	2	2,5	3	3,5	4	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47	Jumlah produk pelayanan perizinan yang dikeluarkan	Produk izin	-	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500	6.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
48	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dirujuk oleh Dokumen	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
	Perencanaan Daerah										
49	Persentase Kematangan Inovasi Daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
50	Persentase pengarusutamaan Gender	Persen	87,02	87,04	87,06	87,08	87,1	87,12	87,12	87,12	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
51	Persentase Keberhasilan Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
52	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
54	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	58	10	14	15	17	20	20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
55	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
56	Indeks Kualitas Air	Poin	50,1	70,39	70,59	70,79	70,99	71,19	71,19	71,19	Dinas Lingkungan Hidup
57	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,5	65,51	65,91	66,31	66,71	67,11	67,11	67,11	Dinas Lingkungan Hidup
58	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	59	69,23	69,3	69,37	69,44	69,51	69,51	69,51	Dinas Lingkungan Hidup
59	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	-	5,66	9,56	13,46	17,37	21,27	21,27	21,27	Dinas Lingkungan Hidup
60	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
61	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	-	7,14	7,77	8,45	9,33	10,17	10,17	10,17	Dinas Lingkungan Hidup
62	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	Persen	-	96	96,2105	96,4211	96,6316	96,8421	96,8421	96,8421	Satuan Polisi Pamong Praja
63	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
64	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	Persen	75,53	76,05	77,45	78,6	79,75	80,1	80,1	80,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen	99,83	99,9	99,94	99,96	99,98	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen	98	98,5	98,9	99,25	99,75	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	Persen	30,39	30,95	31,25	32,05	33,95	35	35	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (poin)	Poin	-	6,9	6,96	7,02	7,07	7,13	7,13	7,19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
69	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,4668	75,6637	75,8605	76,0574	76,0574	76,0574	Dinas Kesehatan
70	Persentase Penurunan PPKS	Persen	N/A	1	2	3	4	5	5	6	Dinas Sosial
71	Skor PPH Ketersediaan	Persen	-	4,23	4,02	3,82	3,61	3,4	3,4	3,4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
72	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Ton	8	200	200	200	200	200	200	200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
73	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	-	42,66	48,2	53,74	56,51	62,05	62,05	62,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
74	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Kabupaten Yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	70	82,5	84,5	86,5	89,5	92,54	92,54	92,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
75	Kemantapan jalan	Persen	72,22	78,22	84,22	85,22	86,22	87,22	87,22	87,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
76	Tingkat aksesibilitas transportasi	Persen	8,06	9	9,2	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8	Dinas Perhubungan
77	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	Persen	-2	5	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	Dinas Perhubungan
78	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*	Persen	4,31	5,4	9,16	12,93	16,69	20,45	20,45	24,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
79	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	-	34,75	38,18	41,62	45,05	48,49	48,49	48,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
80	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	66,97	67	67,33	67,51	67,8	68	68	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
81	Rasio bangunan ber-PBG	Persen	0,021	0,023	0,026	0,028	0,031	0,034	0,034	0,034	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
82	Persentase rumah layak huni	Persen	98,64	98,69	98,74	98,83	98,91	98,98	98,98	98,98	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
83	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen	98,57	98,63	98,64	98,69	98,7	98,73	98,73	98,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman &

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir 2029	Target	PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
											Pertanahan
84	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68	0,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pelaksanaan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

6.1 Kaidah

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan oleh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis PD untuk 5 (lima) tahun ke depan serta pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa atau dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perangkat Kabupaten Kuningan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
- b. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;

- c. Bupati Kuningan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
- d. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029;
- e. Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2026 sampai dengan 2029 dengan melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten;
- f. Kepala perangkat daerah Kabupaten Kuningan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, dan Sistem Pengendalian Internai Pemerintah; dan
- g. Penyusunan RPJM Desa pada wilayah Kabupaten Kuningan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Kuningan.

6.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada RPJMD Teknokratik yang disiapkan oleh Bappeda dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Teknokratik disusun 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Bupati periode 2025 – 2029 berakhir, dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kuningan dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD. RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2029, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi, daerah dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025– 2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, dan mengawal terwujudnya Visi Misi Bupati Kuningan Tahun 2025-2030.

“Kuningan Melesat”.

Maju Ekonomi Berakselerasi

Berdaya (berdaya) Masyarakat

Lestari Alam dan Lingkungan

Agamis Nilai Budaya dan Kehidupan

Tangguh Ketahanan dan Modal Sosial

Misi:

- a. **Percepatan reformasi birokrasi** yang berintegritas, dan profesional melalui pemerintahan modern dan melayani;
- b. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** daerah berbasis pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa yang maju dengan pemanfaatan sumber daya lokal;
- c. Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas masyarakat berbasis pemberdayaan (Berdaya);
- d. **Menjaga komitmen kelestarian sumber daya alam**, daerah tangkapan air dan mengurangi emisi lingkungan;

- e. **Penerapan nilai-nilai agamis** dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat; dan
- f. **Pembangunan yang tangguh** dengan orientasi pada layanan Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur untuk penguatan ketahanan dan modal sosial.

Kuningan,

BUPATI KUNINGAN

DR. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si.